



PERATURAN BUPATI RKPD 2011 BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG



PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;

17. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksana Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 36 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 1 Seri D);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2011 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
- (2) RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penjabaran dari Raperda RPJPD 2005 – 2025 yang dituangkan dalam RPJMD Tahap II Tahun 2011-2015 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
- (4) RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman di dalam penyusunan evaluasi Renja – SKPD.
 - b. Pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Bandung Tahun 2011.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja – SKPD Tahun 2011 sebagaimana Pasal 2 ayat (4) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2011, untuk :

1. Menyusun Rancangan Akhir Renja – SKPD;
2. Sebagai bahan untuk penyusunan Pra RKA – SKPD.

Pasal 4

Kepala Bappeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja – SKPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pasal 5

Kaidah – kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Kepala SKPD melakukan pemantauan.
2. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing – masing SKPD.

3. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.
4. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2011

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.1.1. Proses Penyusunan RKPD 2011	I – 2
1.1.2. Keterkaitan antara dokumen RKPD dengan RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	I – 4
1.2. Landasan Hukum	I – 6
1.3. Maksud dan Tujuan	I – 9
1.3.1 Maksud	I – 9
1.3.2 Tujuan	I – 9
1.4. Sistematika Penyusunan RKPD	I – 9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD 2010	II – 1
2.1. Kaidah Transisi Perencanaan Pembangunan Daerah	II – 1
2.2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	II – 4
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program RKPD Tahun 2010	II – 10
2.4. Isu Strategis Tahun 2011	II - 43
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	III – 1
3.1. Kondisi Perekonomian Daerah Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 serta Perkiraan Tahun 2011	III – 1
3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan Tahun 2011	III – 8
3.2.1. Analisa Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal	III – 9
3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III – 20
3.3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional	III – 20
3.3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Propinsi Jawa Barat	III – 22
3.3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bandung	III – 25
3.4. Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah	III – 28
3.4.1. Dana Desentralisasi	III – 28
3.4.2. Dana Dekonsentrasi/APBN	III – 32
3.4.3. Dana Tugas Pembantuan/APBN	III – 32
3.5. Kebijakan Keuangan Daerah	III – 33
3.5.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	III – 33

3.5.2.	Kebijakan Belanja Daerah	III – 36
3.5.3.	Kebijakan Pembiayaan Daerah	III – 38
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN	IV – 1
4.1	Prioritas Pembangunan Nasional	IV – 1
4.2	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	IV – 4
4.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung	IV – 9
4.4	Prioritas Program dan sasaran Pembangunan Daerah	IV – 11
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS	V – 1
BAB VI	KAIDAH PELAKSANAAN	VI – 1
LAMPIRAN MATRIKS KERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TAHUN 2011		
LAMPIRAN MATRIKS LAMPIRAN MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas: perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diperoleh dari Renja SKPD sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD sekurang-kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik berasal dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam mekanismenya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa Bappeda menyusun rancangan awal RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD.

Dalam prosesnya, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2011 merujuk pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005–2025 Kabupaten Bandung, khususnya memasuki tahap ke-2 RPJMD tahun 2011–2015. Hal ini dikarenakan pada tahun 2010 berada pada fase pemilihan kepala daerah periode 2011–2015, sehingga kemungkinan waktu penetapan RPJMD sebagai dasar penyusunan

RKPD 2011 belum bisa dilakukan. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2011 merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2011, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi dan RKPD Provinsi Tahun 2011 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2011. Penetapan program prioritas yang tertuang dalam RKPD 2011 berorientasi pada pemenuhan hak–hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Bappeda bertugas mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dan selanjutnya disepakati menjadi dokumen rancangan ahir RKPD di dalam Musrenbang RKPD. Lebih lanjut RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2011 merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan daerah serta sebagai acuan dalam proses penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2011.

1.1.1 Proses Penyusunan RKPD

Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2011 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyiapan Rancangan Awal RKPD

- a. Menyiapkan bahan masukan bagi penyusunan rancangan awal RKPD yang bersumber dari:
 - Rancangan Peraturan Daerah RPJP Tahun 2005 - 2025;
 - Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2007-2027;
 - Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Tahun 2011;
 - Capaian kinerja tahun lalu dan tahun berjalan dari hasil monitoring dan evaluasi;
 - Prakiraan anggaran tahun rencana dari APBD tahun berjalan.
- b. Merumuskan isu strategis, prioritas pembangunan daerah, dan kebijakan serta rencana kerja setiap prioritas untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang direncanakan;
- c. Merumuskan indikasi program/kegiatan;
- d. Membahas rancangan awal RKPD dengan SKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja SKPD;

- e. Melaksanakan Forum SKPD untuk membahas usulan SKPD dalam Rancangan Renja SKPD;
- f. Pra Musrenbang Kabupaten untuk sinkronisasi usulan wilayah dan SKPD.

2. Penyusunan Rancangan RKPD

- a. Menerima secara resmi naskah rancangan Renja SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD;
- b. Menilai dan membahas konsistensi rancangan Renja SKPD terhadap tugas dan fungsi SKPD;
- c. Mengintegrasikan rancangan Renja SKPD ke dalam rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD;
- d. Menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD;
- e. Melakukan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui Musrenbang untuk menyempurnakan rancangan RKPD.

3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

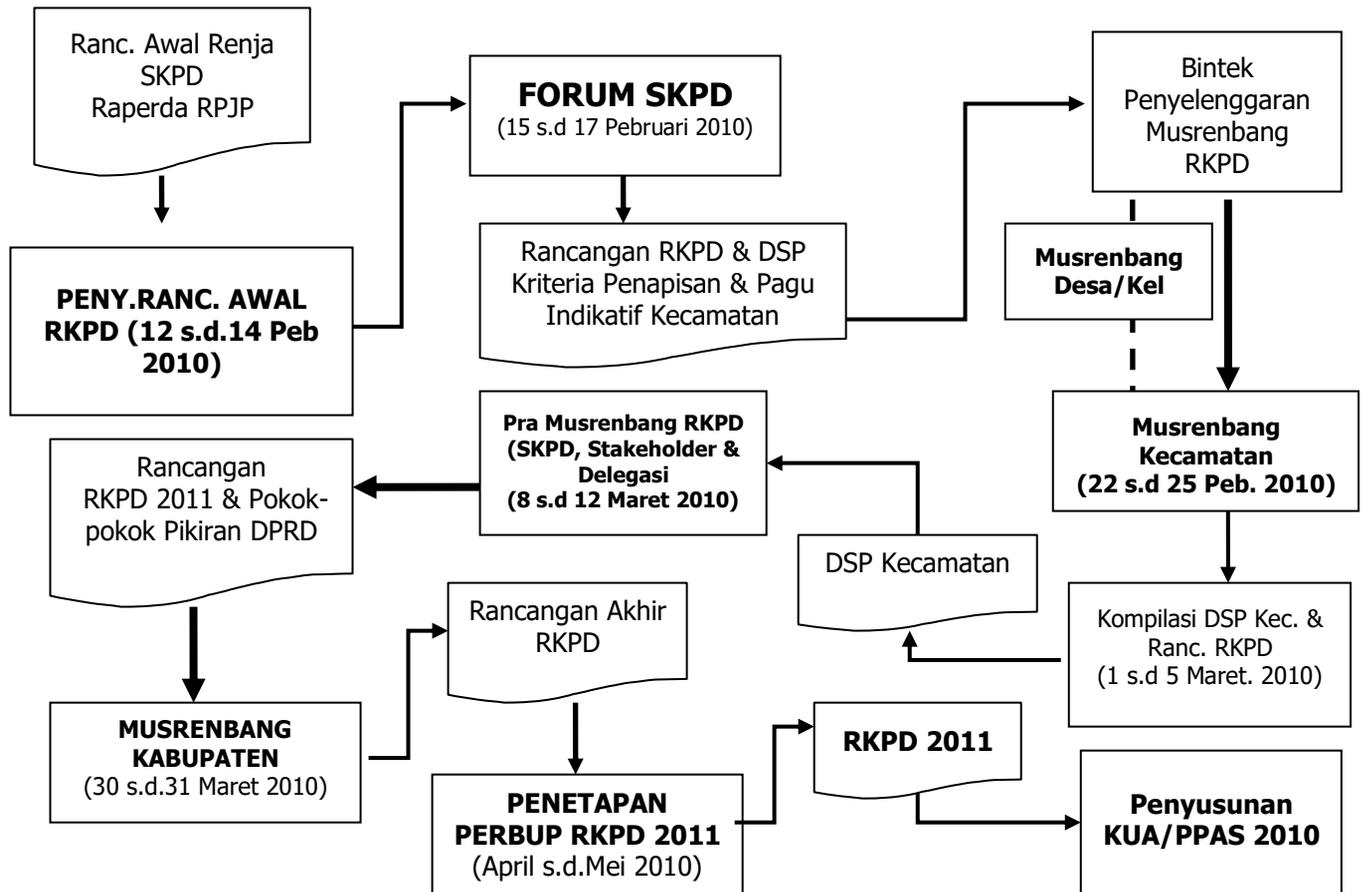
- 1) Menyusun rancangan akhir RKPD dengan memuat kesepakatan hasil Musrenbang;
- 2) Penyusunan rancangan akhir RKPD dengan memperhatikan naskah RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Barat, khususnya tentang kegiatan dan program yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bandung;
- 3) Menyusun naskah rancangan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.

4. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD

- a. Kepala Daerah menerima secara resmi naskah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dari Kepala Bappeda;
- b. Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD;
- c. Kepala Daerah memberikan pengantar dan arahan untuk menggunakan RKPD.

Mengenai keterkaitan proses/tahapan mekanisme penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2011 serta proses penyusunannya, maka secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Bandung



1.1.2. Keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

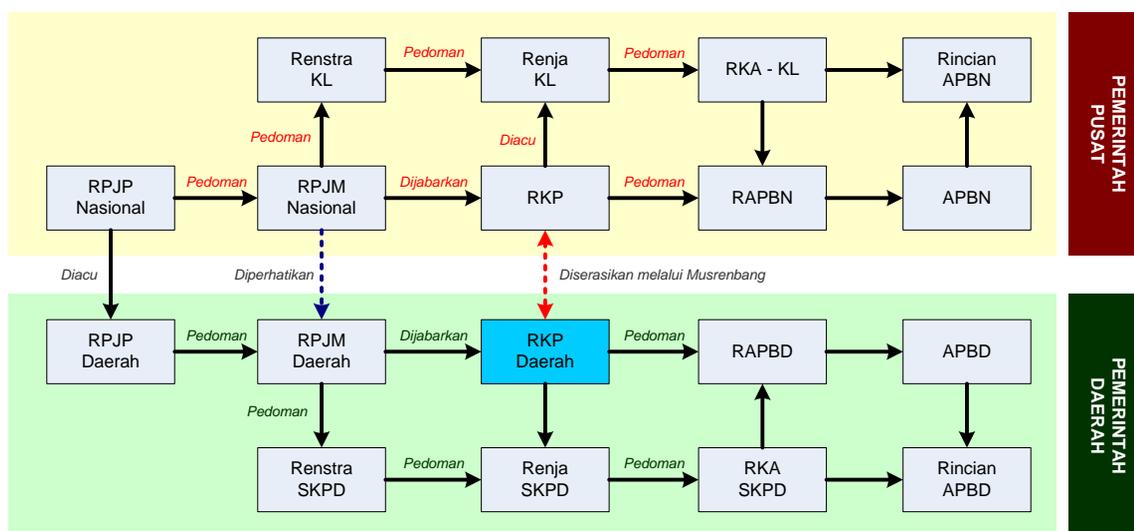
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), (2) Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), (3) Rencana Kerja Pemerintah/Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut :

Gambar 1.3
Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



Sumber : Bahan Sosialisasi UU SPPN Bappenas tahun 2004 (dalam Luwihono, 2006)

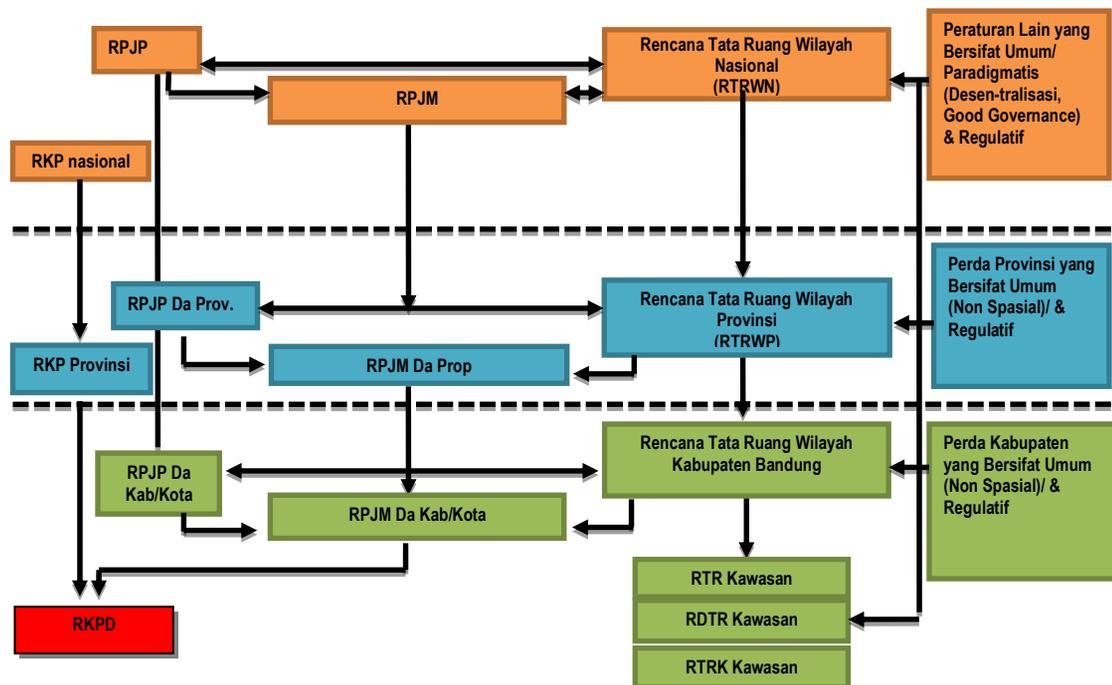
Mengacu pada Gambar 1.3 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah
- RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD
- RKPD ini nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja SKPD.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa barat, RPJM Kabupaten Bandung, Renstra SKPD serta Renja SKPD. Selain itu, bila dilihat dari dokumen

perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi, maupun RTRW Kabupaten Bandung, kedudukan RKPD Kabupaten Bandung tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 1.4. seperti di bawah ini.

Gambar 1.4.
Kedudukan RKPD Kabupaten Bandung di antara
Dokumen perencanaan lainnya



1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2011 Kabupaten Bandung adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
17. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013;
24. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat:
26. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2010 tentang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan daerah serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2011 adalah:

1. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah tahap kedua (tahun 2011 – 2015)
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antarsektor, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penyusunan RKPD

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen-dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, regional maupun lokal (peraturan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD).

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun rencana dalam kaitannya dengan dokumen RPJMD dan isu strategis serta kaitannya dengan prioritas pembangunan jangka menengah tahap kedua.

1.4 Sistematika Penyusunan RKPD

Mengemukakan struktur penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Mendeskripsikan kedudukan program dan kegiatan tahun rencana dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

2.2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Mengemukakan tentang status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan indikator-indikator makro pembangunan daerah dan penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah.

2.3 Evaluasi Kebijakan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2010

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2010.

2.4 Isu Strategis Tahun 2011

Mengemukakan isu strategis dan permasalahan tingkat daerah (hasil Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten dan keterkaitannya dengan isu strategis dan permasalahan tingkat provinsi dan tingkat nasional).

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Mengemukakan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, mencakup: a) indikator pertumbuhan ekonomi daerah; b) sumber-sumber pendapatan dengan perincian: sumber pendapatan tahun lalu dan satu tahun sebelumnya, tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai perkiraan maju pendapatan; dan c) kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2007, Tahun 2008 dan Tahun 2009, serta Perkiraan Tahun 2010

3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan Tahun 2011

3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berisikan arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Barat dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam RPJMD, yang selanjutnya diturunkan ke kebijakan pengembangan sektoral, regional dan lainnya.

3.4 Analisis dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah

3.4.1 Dana Desentralisasi/APBD

3.4.2 Dana Dekonsentrasi/APBN

3.4.3 Dana Tugas Pembantuan/APBN

3.4.4 Dana Otonomi Khusus/APBN

3.5 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasar pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang pada dasarnya menjadi acuan/kerangka dalam pengelolaan APBD.

3.5.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berisikan mengenai uraian kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah, yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD.

3.5.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.5.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010 (TAHUN RENCANA)

Mengemukakan secara eksplisit prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta aspirasi masyarakat yang disepakati dalam hasil Musrenbang Tahunan Daerah

4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Mengemukakan rincian dan kegiatan pokok RKPD tahun rencana, instansi pelaksana/SKPD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Memuat arahan Kepala Daerah bagi SKPD dalam rangka menyusun dokumen Renja SKPD.

LAMPIRAN MATRIKS KERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TAHUN 2011

LAMPIRAN MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD 2010

2.1 Kaidah Transisi Perencanaan Pembangunan Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010, didasarkan pada pencapaian target yang telah ditetapkan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2005 – 2010 yang merupakan penjabaran Tahun terakhir. Penyusunan perencanaan pembangunan Tahunan (RKPD) yang memasuki Tahun terakhir atau masa transisi menggunakan RPJMD 2005 – 2010 sebagai pedoman sementara selama belum adanya kepala daerah yang baru (penjelasan Pasal 40 ayat 3 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008).

Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2010 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan Tahunan, kedudukan Tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010, serta isu strategis dan prioritas pembangunan RPJMD yang telah ditetapkan.

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 yaitu:

- 1) Resistensi nilai-nilai religius, sosial dan budaya sebagai akibat dari derasnya arus perubahan dan globalisasi, munculnya berbagai penyakit masyarakat, menurunnya kepekaan dan solidaritas sosial, serta berkurangnya kesadaran dan citra budaya Sunda dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Kualitas pendidikan masih relatif rendah disebabkan antara lain belum tercapainya target RLS, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pendidikan, persebaran dan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum memadai.
- 3) Kualitas pelayanan kesehatan, kesadaran hidup bersih dan sehat, serta kualitas kesehatan lingkungan yang masih relatif rendah.
- 4) Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi yang disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendapatan dan tingginya LPP.
- 5) Koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan belum optimalnya aplikasi konsep pembangunan partisipatif.
- 6) Kualitas pelayanan publik belum optimal disebabkan antara lain oleh terbatasnya kualitas sumberdaya manusia aparatur, kinerja birokrasi, SPM, dan sarana prasarana yang belum memadai.
- 7) Masih rendahnya keterpaduan pemanfaatan ruang kota, seperti terminal, pasar dan sistim transportasi sehingga menyebabkan kesemrawutan kota dan kemacetan lalu lintas.

- 8) Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan ditandai dengan meningkatnya pencemaran air dan udara serta masalah lingkungan lainnya seperti banjir dan longsor, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran, perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan, aktivitas pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, rendahnya efektivitas penataan ruang dan lemahnya pengawasan dan pengendalian.
- 9) Rendahnya kinerja pembangunan desa disebabkan kualitas SDM, sarana infrastruktur perdesaan, pemanfaatan ruang kawasan pedesaan, lemahnya kelembagaan desa dan belum teralokasikannya sumber keuangan desa secara memadai.

Selanjutnya, dari Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010, diturunkan menjadi Isu Strategis Kabupaten Bandung Tahun 2010 yaitu:

- 1) Kemiskinan;
- 2) Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
- 3) Infrastruktur;
- 4) Ketahanan Pangan;
- 5) Ketenagakerjaan;
- 6) Kesehatan;
- 7) Pendidikan;
- 8) Ketersediaan Energi dan SDA Lainnya;
- 9) Jumlah Penduduk;
- 10) Kinerja Pemerintahan;
- 11) Lunturnya Nilai-Nilai Religius.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 telah ditetapkan Prioritas Pembangunan yaitu:

- 1) Peningkatan pemahaman nilai-nilai luhur agama dan budaya serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan.
- 2) Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan penuntasan wajar dikdas 9 Tahun.
- 3) Peningkatan perekonomian daerah, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat (UMKM), revitalisasi pertanian, pengembangan industri manufaktur dan pengembangan iklim usaha yang kondusif.
- 4) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan kesadaran budaya sehat, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan sarana/prasarana kesehatan, dan perbaikan gizi masyarakat.

- 5) Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan, peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang kota dan pusat pertumbuhan, peningkatan gairah investasi serta aktivitas ekonomi lainnya.
- 6) Peningkatan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pencegahan dini terhadap bencana.
- 7) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan profesionalisme, efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan.
- 8) Peningkatan optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia dan prinsip keadilan.
- 9) Peningkatan kinerja pembangunan desa, melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa, peningkatan keberdayaan masyarakat desa, pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan perdesaan, serta pengembangan alokasi dana desa (ADD).

Selanjutnya, dalam RKPD Tahun 2010 yang menjadi Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2010 yaitu:

- 1) Peningkatan nilai-nilai luhur agama dan budaya;
- 2) Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas;
- 3) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
- 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- 5) Peningkatan Optimalisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum;
- 6) Peningkatan Perekonomian Daerah;
- 7) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur;
- 8) Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa;
- 9) Peningkatan Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.

Sejalan dengan proses penetapan Raperda RPJPD 2005 – 2025 yang tengah dilakukan Tahun ini, telah dirumuskan visi Kabupaten Bandung 2005 – 2025, yaitu **“KABUPATEN BANDUNG YANG REPEH RAPIH KERTARAHARJA TAHUN 2025”** dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi Kabupaten Bandung, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kabupaten Bandung yang aman dan tertib.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Menciptakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
6. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing.

Perincian misi dan fokus pembangunan setiap tahapan 5(lima) Tahunan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Penjabaran Misi dan Fokus Pembangunan 2005 – 2025

Misi	Fokus Pembangunan			
	2005 - 2010	2011 - 2015	2016 - 2020	2020 - 2025
Mewujudkan Kabupaten Bandung yang aman dan tertib.	Penguatan dan peningkatan budaya tertib dan kesadaran hukum masyarakat	Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban umum	Penegakan disiplin dan supremasi hukum	Pemeliharaan disiplin dan supremasi hukum
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Penataan sistem birokrasi	Reformasi Birokrasi	Penerapan dan pengembangan budaya <i>good governance</i>	Perwujudan pelayanan prima aparatur dan pemerintahan
Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan.	Mengurangi tingkat kerusakan lingkungan	Rehabilitasi kerusakan lingkungan	Pemulihan Lingkungan	Mempertahankan kualitas lingkungan yang optimal
Menciptakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.	Penataan regulasi yang berpihak pada KUKM	Peningkatan akses KUKM thd sumber daya (alam, modal, informasi, pasar)	Peningkatan peran serta koperasi dalam perekonomian	Memperkokoh peran koperasi dalam perekonomian
	Penyediaan prasarana dasar	Pemenuhan kebutuhan prasarana air bersih dan persampahan	Pemenuhan kebutuhan prasarana dasar pengairan	Pemenuhan kebutuhan prasarana transportasi
Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing.	Pengembangan produk unggulan daerah	Peningkatan skala ekonomi produk unggulan	Peningkatan nilai tambah; Produk unggulan	Mempertahankan Kontinuitas dan diversifikasi produk unggulan

Sumber: Raperda RPJPD 2005 - 2025

Selain dokumen–dokumen perencanaan daerah yang telah tersedia, perencanaan pembangunan Tahunan daerah juga memperhatikan serta berpedoman pada RPJMN 2009 – 2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011, RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013, serta RKPD Provinsi Jawa Barat 2011.

Selanjutnya untuk melengkapi dokumen perencanaan pembangunan Tahunan daerah, perlu juga mengetahui kinerja hasil pembangunan yang telah diselenggarakan selama ini. Hal ini dapat dijadikan titik tolak bagi perumusan kebijakan pembangunan Tahun berikutnya.

2.2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Keberhasilan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah salah satunya dapat dilihat dari capaian Indikator makro pembangunan, baik indikator makro pembangunan sosial, maupun indikator makro pembangunan ekonomi. Salah satu indikator makro pembangunan sosial yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu :

meningkatnya derajat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tercapainya kehidupan yang layak.

Selanjutnya, salah satu indikator makro pembangunan ekonomi yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan, khususnya kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yaitu : PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi (atas dasar harga Konstan), Pendapatan per Kapita dan Tingkat Inflasi.

Perkembangan capaian pelaksanaan kinerja pembangunan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

A. Capaian Indikator Makro Pembangunan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bandung pada Tahun 2009 mencapai 73,39 point atau mengalami kenaikan sebesar 0,89 point dari Tahun 2008 yang mencapai sebesar 72,50 point. Dibandingkan dengan rata – rata IPM Jawa Barat pada Tahun 2009 sebesar 71,50 point, maka IPM Kabupaten Bandung termasuk kategori IPM sedang di tingkat Provinsi. Jika melihat target IPM Jawa Barat Tahun 2015 sebesar 80, maka proyeksi kenaikan yang harus dicapai Kabupaten Bandung setiap Tahun sebesar 1,102 point terhitung sejak Tahun 2009.

Capaian IPM Kabupaten Bandung sebesar 73,39 point pada Tahun 2009 tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM, yaitu : Indeks pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli.

Indeks Pendidikan kabupaten Bandung pada Tahun 2009 mencapai 85,61 point atau mengalami peningkatan sebesar 0,03 point dari Tahun 2008 (angka sementara BPS). Peningkatan indeks pendidikan ini relatif kecil, hal ini ditunjukkan dari angka rata – rata lama sekolah (RLS) yang mencapai sebesar 8,87 pada Tahun 2009 atau hanya naik 0,01 point dari Tahun 2008. Demikian pula angka melek huruf (AMH) hanya mengalami kenaikan sebesar 0,03 point, yaitu dari 98,84 point pada Tahun 2008 menjadi 98,87 point pada Tahun 2009. Capaian RLS kabupaten Bandung sebesar 8,87 point pada Tahun 2009 dipengaruhi oleh banyaknya tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Tahun 2009 yaitu sebesar 82,17% dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung, yang terdiri atas : belum/tidak tamat SD/MI=12,47%, tamat SD/MI= 29,16%, tamat SMP/MTs=20,62%, tamat SMA/SMK/MA=16,40% dan tamat perguruan tinggi =3,53% (LKPJ Tahun 2009). Selain itu, capaian RLS dipengaruhi pula oleh capaian komponen angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK), yang meliputi : jenjang pendidikan SD/MI = 105,69 (APK) dan 93,17 (APM), jenjang pendidikan SMP/MTs = 88,20 (APK) dan 72,63 (APM), jenjang pendidikan SMA/SMK/MA = 59,61 (APK) dan 43,27 (APM), serta jenjang perguruan tinggi =8,24 (APK) dan 6,20 (APM).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kabupaten Bandung pada Tahun 2009 belum terbebas dari masalah buta huruf serta belum tuntas wajib belajar 9 (sembilan) Tahun.

Indeks Kesehatan kabupaten Bandung pada Tahun 2009 mencapai 73,23 point atau meningkat 0,87 point dibandingkan Tahun 2008. Peningkatan indeks kesehatan ini didukung dengan angka harapan hidup (AHH) yang mencapai sebesar 68,94 Tahun (naik=0,52 Tahun dari 2008). Sementara itu, peningkatan AHH dipengaruhi oleh adanya penurunan angka kematian bayi (AKB) yang mencapai 3,59%, yaitu 37,36 menjadi 36,02 per 1.000 kelahiran bayi pada Tahun 2009. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kualitas hidup sebagian masyarakat di Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik.

Indeks Daya Beli (PPP) kabupaten Bandung pada Tahun 2009 mencapai 61,31 atau mengalami kenaikan sebesar 1,76 poin dibanding Tahun 2008. Sedangkan nilai nominal kemampuan daya beli masyarakat kabupaten Bandung Tahun 2009 sebesar Rp. 565.320,-. Angka ini meningkat Rp. 7.640,- dari Tahun sebelumnya yang mencapai sebesar Rp. 557.680,-. Peningkatan tersebut tidak signifikan, sehingga tingkat ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung masih belum banyak mengalami kemajuan.

Untuk melihat capaian makro pembangunan sosial secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Perkembangan Capaian Makro Pembangunan Sosial
Tahun 2008 s/d Tahun 2009

No.	Komponen	Tahun		Kenaikan
		2008	2009	
1.	IPM	72,5	73,39	0,89
	- Indeks Pendidikan	85,58	85,61	0,03
	- Indeks Kesehatan	72,36	73,23	0,87
	- Indeks Daya Beli (PPP)	59,55	61,31	1,76
2.	RLS	8,86	8,87	0,01
3.	AMH	98,84	98,87	0,03
4.	Tingkat Partisipasi Sekolah :			
	APK :			
	- SD/MI	96,18	105,69	9,51
	- SMP/MTs	80,06	88,20	8,14
	- SMA/SMK/MA	40,79	59,61	18,82
	- PT	13,59	8,24	-5,35
	APM :			
	- SD/MI	85,54	93,17	7,63
	- SMP/MTs	64,97	72,63	7,66
	- SMA/SMK/MA	34,41	43,27	8,86
	- PT	1,49	6,20	4,71

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, IPM Tahun 2008, 2009.

B. Capaian Indikator Makro Pembangunan Ekonomi

1. PDRB

PDRB Kabupaten Bandung atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 40,94 triliun pada Tahun 2009 sedangkan pada Tahun 2008 mencapai Rp. 38,29 triliun. Adapun PDRB berdasarkan harga konstan mencapai Rp. 20,53 triliun pada Tahun 2009 dan Rp. 19,67 triliun pada Tahun 2008. Peningkatan nilai PDRB ini tidak terlepas dari kontribusi ke-9 sektor lapangan usaha.

Pada Tahun 2009, sektor industri pengolahan berkontribusi 60% bagi peningkatan PDRB Kabupaten Bandung, sedangkan pada Tahun 2008 berkontribusi 60,80%. Sektor lainnya yang berkontribusi cukup besar bagi PDRB Kabupaten Bandung adalah sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor pertanian, yaitu masing-masing berkontribusi sebesar 16,56% dan 7,36% pada Tahun 2009 serta 15,69% dan 7,13% pada Tahun 2008. Secara keseluruhan kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB 2009 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun 2008, kecuali sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor bangunan/konstruksi; dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, masing-masing kontribusinya meningkat sebesar 0,17%; 0,06%; 0,01% dan 0,88%.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

LPE Kabupaten Bandung pada Tahun 2009 mencapai 4,35%. Pertumbuhan ini lebih rendah (mengalami perlambatan) bila dibandingkan dengan pertumbuhan Tahun 2008 yang mencapai 5,30%. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya tingkat produksi industri pengolahan terutama industri tekstil. Industri pengolahan berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan PDRB di Kabupaten Bandung, sehingga menurunnya sektor ini berpengaruh *significant* terhadap kinerja perekonomian di Kabupaten Bandung.

Jika dilihat dari pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi (9 sektor), sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan yang paling besar dibanding sektor ekonomi lainnya, yaitu mencapai 7,23%. Sektor ekonomi lainnya yang mengalami pertumbuhan cukup besar adalah sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor pertanian; yaitu masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 6,16%; 5,43% serta 5,31%.

Sektor ekonomi lainnya seperti : sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan/konstruksi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan di bawah 5%.

3. PDRB Perkapita

PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku pada Tahun 2009 menunjukkan peningkatan lebih besar dibandingkan dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 12.856.303,00, angka ini meningkat 5,01% dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai Rp. 12.242.428,00. Sedangkan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan hanya meningkat sebesar 0,69%, yaitu dari Rp. 6.402.393,00 pada Tahun 2008 menjadi Rp. 6.446.689,00 pada Tahun 2009.

Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat kemakmuran/kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung belum menampakkan kemajuan yang berarti. Namun demikian, jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat maka tingkat pendapatan yang diterima penduduk Kabupaten Bandung tidak jauh berbeda dengan rata-rata pendapatan penduduk Provinsi Jawa Barat. Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku penduduk Jawa Barat pada Tahun 2008 sebesar Rp. 14.309.520,00.

4. Tingkat Inflasi

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat dilihat pula dari kemampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perkembangan barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup penduduk. Jika harga-harga secara umum meningkat maka bisa terjadi daya beli penduduk menurun. Hal tersebut dialami Kabupaten Bandung pada Tahun 2008 di mana tingkat inflasi mencapai 9,11%. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah dalam mengatasi inflasi tersebut, sehingga pada Tahun 2009 inflasi Kabupaten Bandung menurun menjadi 2,49%. Tingkat inflasi ini merupakan inflasi terendah yang terjadi di Kabupaten Bandung sejak Tahun 2000.

Penurunan tingkat inflasi ini terjadi di seluruh sektor perekonomian, bahkan sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami deflasi hingga 5,21% dari tingkat inflasi 9,64% pada Tahun 2008. Deflasi pada sektor pengangkutan terjadi pada sub sektor angkutan jalan raya sedangkan pada sektor komunikasi terjadi sebagai dampak dari pemberlakuan kebijakan penurunan tarif interkoneksi layanan selular pada Tahun 2008. Sektor ekonomi lainnya yang mengalami penurunan tingkat inflasi terbesar adalah sektor industri pengolahan dan sektor bangunan/konstruksi, yang masing-masing mengalami penurunan inflasi hingga 2,09% dan 2,60% dari 9,46% pada Tahun 2008.

Untuk melihat capaian makro pembangunan ekonomi secara terperinci dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.3.
Perkembangan PDRB dan LPE Kabupaten Bandung
Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha
Tahun 2008 s/d Tahun 2009

No.	Sektor Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku (juta rupiah)		LPE (%)	PDRB ADH Konstan (juta rupiah)		LPE (%)
		2008	2009		2008	2009	
1.	Pertanian	2.753.632,27	3.013.007,10	9,42	1.424.992,98	1.502.003,49	5,40
2.	Pertambangan dan Penggalian	468.303,80	526.035,13	12,33	255.888,74	269.782,12	5,43
3.	Industri Pengolahan	23.275.745,49	24.565.562,89	5,54	12.110.396,65	12.519.327,64	3,38
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	642.658,74	674.520,69	4,96	361.439,39	376.034,30	4,04
5.	Bangunan	648.394,06	696.720,83	7,45	339.547,08	355.614,56	4,73
6.	Perdagangan, Hotel dan restoran	6.005.197,92	6.780.385,10	12,91	2.994.763,36	3.211.263,99	7,23
7.	Angkutan dan Komunikasi	1.766.609,79	1.795.161,77	1,62	795.218,85	843.661,61	6,09
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	792.877,54	820.502,95	3,48	436.277,90	451.138,21	3,41
9.	Jasa-jasa	1.936.315,52	2.069.321,52	6,87	955.207,67	1.000.817,32	4,77
PDRB		38.289.735,12	40.941.217,98	6,92	19.673.732,61	20.529.643,24	4,35

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, PDRB Semesteran 2008, 2009.

Tabel 2.4.
Perkembangan Kontribusi/Peranan Nilai Tambah Bruto dan Tingkat Inflasi
di Kabupaten Bandung Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha
Tahun 2008 s/d Tahun 2009

No.	Sektor	Kontribusi/Peranan NTB (%)		Kenaikan	Tingkat Inflasi (%)		Kenaikan
		2008	2009		2008	2009	
1.	Pertanian	7,19	7,36	0,17	7,53	4,85	-2,68
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,22	1,28	0,06	7,05	6,54	-0,51
3.	Industri Pengolahan	60,79	60,00	-0,79	9,46	2,09	-7,37
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,68	1,65	-0,03	4,22	0,88	-3,34
5.	Bangunan	1,69	1,70	0,01	9,46	2,60	-6,86
6.	Perdagangan, Hotel dan restoran	15,68	16,56	0,88	10,61	5,30	-5,31
7.	Angkutan dan Komunikasi	4,61	4,38	-0,23	8,51	-5,21	-13,72
8.	Keuangan, Persewaan dan	2,07	2,00	-0,07	5,66	0,08	-5,58

No.	Sektor	Kontribusi/ Peranan NTB (%)		Kenaikan	Tingkat Inflasi (%)		Kenaikan
		2008	2009		2008	2009	
	Jasa Perusahaan						
9.	Jasa-jasa	5,06	5,05	-0,01	7,35	2,00	-5,35
	PDRB	100,00	100,00		9,13	2,49	-6,64

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, PDRB Semesteran 2008, 2009.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program RKPD Tahun 2010

Arah kebijakan belanja daerah (belanja program) Kabupaten Bandung pada Tahun 2010 diutamakan untuk membiayai program prioritas dalam rangka melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat. Program prioritas tersebut dikelompokkan ke dalam 5 (lima) pembedangan, meliputi : Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Daya Beli, Bidang Infrastruktur dan Bidang Suprastruktur.

Sementara itu, yang menjadi isu strategis Kabupaten Bandung pada Tahun 2010 terdiri dari 11 (sebelas) isu strategis, yaitu : isu kemiskinan, isu lingkungan hidup dan tata ruang, isu infrastruktur, isu ketahanan pangan, isu ketenagakerjaan, isu kesehatan, isu pendidikan, isu ketersediaan energi dan SDA lainnya, isu penduduk, isu kinerja pemerintahan dan isu luntarnya nilai-nilai religius. Kesebelas (ke-11) isu tersebut tercakup di dalam 5 (lima) bidang, yaitu :

- Isu pendidikan dan isu ketenagakerjaan, tercakup di dalam Bidang Pendidikan.
- Isu kesehatan, tercakup di dalam Bidang Kesehatan.
- Isu kemiskinan dan isu ketahanan pangan, tercakup di dalam Bidang Daya Beli.
- Isu lingkungan hidup dan tata ruang, isu infrastruktur dan isu ketersediaan energi dan SDA lainnya, tercakup di dalam Bidang Infrastruktur.
- Isu kependudukan, isu kinerja pemerintahan dan isu luntarnya nilai-nilai religius, tercakup di dalam Bidang Suprastruktur.

Kondisi capaian saat ini berkaitan dengan isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

A. Bidang Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Untuk mencapai hal tersebut perlu melihat sampai sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja bidang pendidikan.

Permasalahan pada Bidang Pendidikan dapat dilihat melalui kondisi berdasarkan isu pendidikan dan isu ketenagakerjaan sesuai dengan dokumen RKPD 2010.

1. Kondisi Pendidikan

Indeks pendidikan Kabupaten Bandung pada Tahun 2009 berkontribusi cukup signifikan terhadap perolehan nilai IPM Kabupaten Bandung, seperti telah diuraikan sebelumnya. Namun besaran kontribusi tersebut hanya dapat meningkatkan indeks pendidikan sebesar 0,03 point dibandingkan Tahun 2008. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program-program pembangunan, baik terkait pendidikan formal maupun non formal.

Bila melihat jumlah kelulusan murid/siswa per jenjang pendidikan pada Tahun 2009, baik SD/MI, SMP/MTs. maupun SMA/MA/SMK, seluruhnya mengalami peningkatan kelulusan, masing-masing sebesar 1,05%, 9,4% dan 1,66% dibandingkan Tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. Peningkatan tersebut tentunya didukung dengan ketersediaan ruang kelas terhadap rombongan belajar, ketersediaan tenaga pendidik/guru terhadap jumlah murid/siswa, serta ketersediaan tenaga pendidik/guru yang berpendidikan keguruan.

Pada Tahun 2009, ketersediaan jumlah ruang kelas untuk jenjang pendidikan SD/MI mencapai 1 : 1,58. Ketersediaan jumlah ruang kelas ini menurun bila dibandingkan dengan Tahun 2008 yang mencapai 1 : 1,54. Penurunan ini terjadi pula pada ketersediaan ruang kelas untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK, di mana pada Tahun 2008 mencapai 1 : 1,14 sedangkan pada Tahun 2009 mencapai 1 : 1,2. Hal ini disebabkan beberapa ruang kelas mengalami kondisi rusak berat. Lain halnya dengan ketersediaan ruang kelas untuk jenjang pendidikan SMP/MTs., di mana ketersediaan ruang kelas untuk jenjang pendidikan ini mengalami peningkatan, yaitu dari 1 : 1,07 pada Tahun 2008 menjadi 1 : 1,01 pada Tahun 2009. Namun demikian, secara keseluruhan jumlah ketersediaan ruang kelas per jenjang pendidikan di Kabupaten Bandung pada Tahun 2009 bisa dikatakan telah mencukupi, namun masih memerlukan peningkatan dari segi kualitasnya.

Ketersediaan ruang kelas terhadap murid/siswa tidaklah cukup untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung, ketersediaan jumlah tenaga pendidik/guru terhadap murid serta ketersediaan jumlah guru yang berpendidikan keguruan turut menentukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung. Pada Tahun 2009, jumlah guru SD/MI mencapai 15.936 orang, terdiri dari : guru tetap sebanyak 9.479 orang dan guru tidak tetap sebanyak 6.457 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan 5,13%

dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai 15.159 orang. Jumlah guru SMP/MTs. sebanyak 10.003 orang pada Tahun 2009, yaitu terdiri dari : guru tetap sebanyak 2.569 orang dan guru tidak tetap sebanyak 7.434 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan 2,14% dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai 9.793 orang. Jumlah guru SMA/MA/SMK sebanyak 6.970 orang pada Tahun 2009, yaitu : guru tetap sebanyak 1.255 orang dan guru tidak tetap sebanyak 5.715 orang. Jumlah ini meningkat 8,96% dibanding Tahun 2008 yang mencapai sebanyak 6.397 orang.

Bila dibandingkan dengan jumlah murid/siswa pada Tahun 2009 berdasarkan jenjang pendidikan, maka jumlah ketersediaan guru per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut : 1 : 25,7 untuk jenjang pendidikan SD/MI; 1 : 14,34 untuk jenjang pendidikan SMP/MTs., dan 1 : 14,34 untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK.

Selanjutnya bila melihat dari jumlah guru yang berpendidikan keguruan, maka jumlah guru berpendidikan keguruan untuk jenjang pendidikan SD/MI mencapai 87,95%, jumlah guru berpendidikan keguruan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs. mencapai 89,33% dan 86,59% jumlah guru berpendidikan keguruan untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu mengantisipasi jumlah guru yang memasuki usia pensiun, terutama pengangkatan Tahun 1975, hal ini berpengaruh terhadap sebaran/distribusinya. Selain itu, masih banyak guru yang belum sepenuhnya mendapatkan penghidupan yang layak, terutama guru yang berstatus pegawai tidak tetap (honorar), baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas murid yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka program pembangunan terkait dengan penambahan jumlah guru tetap, jumlah guru yang berpendidikan keguruan dan kesejahteraan guru tidak tetap perlu ditingkatkan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah, upaya peningkatan sarana dan prasarana sekolah secara terus menerus ditingkatkan, seperti pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, pengadaan meubelair dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Bandung yang mengarah pada perintisan wajib belajar pendidikan 12 Tahun.

Dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi sumber daya manusia pada saat memasuki usia angkatan kerja agar sesuai dengan permintaan lapangan kerja, selain diupayakan melalui pendidikan formal, pendidikan non formal pun terus diupayakan. Pendidikan formal yang bersifat kejuruan atau sekolah yang mengutamakan keahlian perlu dibuka seluas-luasnya, seperti : pengembangan

SMK atau pembukaan program keahlian baru, sehingga diharapkan rasio SMA dibandingkan SMK menjadi 40 berbanding 60. Selain itu, pembentukan kerjasama *Tri Partied* merupakan salah satu upaya agar lulusan SMK bukan hanya mampu merebut pasar tenaga kerja tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru. Pada Tahun 2009 rasio SMA dan SMK adalah 3 berbanding 1. Dengan demikian masih diperlukan upaya-upaya yang lebih keras lagi untuk mencapai rasio yang diharapkan.

Berdasarkan uraian kondisi capaian tersebut, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan.
- Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan.
- Belum memadainya jumlah guru tetap dan jumlah guru yang berpendidikan keguruan.
- Masih adanya kesenjangan penghidupan yang layak terutama bagi guru yang berstatus tidak tetap.

2. Kondisi Ketenagakerjaan

Kualitas sumber daya manusia seutuhnya pada dasarnya adalah manusia yang mempunyai tingkat kemandirian, yang dinyatakan dalam produktivitas. Salah satu parameter produktivitas adalah ketenagakerjaan. Semakin rendah tingkat ketergantungan penduduk, akan semakin mencerminkan bahwa penduduk tersebut produktif. Tingkat produktivitas tersebut harus diimbangi dengan kualitas, agar terwujud tenaga kerja yang berdaya saing.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bandung pada Tahun 2009 mencapai 52%, angka ini menurun bila dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai 52,48%. Jika dilihat berdasarkan perspektif gender, TPAK perempuan pada Tahun 2009 mencapai 27,46%, pada Tahun 2008 mencapai 26,06%, sedangkan TPAK laki-laki pada Tahun 2009 mencapai 76,32% dan pada Tahun 2008 mencapai 78,77%. Secara keseluruhan dapat terlihat bahwa penopang kebutuhan hidup keluarga di Kabupaten Bandung masih didominasi oleh penduduk laki-laki yang bekerja. Perempuan cenderung kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja, hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar perempuan usia produktif berada pada posisi sebagai ibu rumah tangga.

Berkaitan hal di atas, kesempatan kerja pada Tahun 2009 mencapai 87,49%, angka ini meningkat 0,68% bila dibandingkan dengan Tahun 2008 yang mencapai 86,81%. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka mencapai 12,51%

pada Tahun 2009, angka ini lebih rendah dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai sebesar 13,13%. Pengangguran terbuka tersebut pada umumnya didominasi kaum perempuan.

Lapangan pekerjaan di Kabupaten Bandung umumnya bergerak pada sektor : pertanian, industri, perdagangan, jasa dan lainnya (pertambangan, listrik gas dan air, angkutan dan komunikasi, koperasi dan lembaga keuangan). Penyerapan tenaga kerja (usia 10 Tahun ke atas) berdasarkan sektor lapangan kerja adalah sebagai berikut :

- Pada sektor pertanian penyerapan tenaga kerja mencapai 21,87% pada Tahun 2009, angka ini meningkat 1,21% dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai 20,66%.
- Pada sektor industri penyerapan tenaga kerja mencapai 29,87% pada Tahun 2009, angka ini meningkat 2,27% dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai 27,08%.
- Pada perdagangan penyerapan tenaga kerja mencapai 18,75% pada Tahun 2009, angka ini menurun 0,76% dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai 19,51%.
- Pada sektor jasa penyerapan tenaga kerja mencapai 12,49% pada Tahun 2009, angka ini meningkat 2,19% dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai 10,21%.
- Pada sektor lainnya penyerapan tenaga kerja mencapai 17,02% pada Tahun 2009, angka ini menurun 5,52% dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai 22,54%.

Berdasarkan uraian kondisi capaian tersebut, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja khususnya pada sektor lapangan usaha perdagangan dan sektor lainnya sehingga berpengaruh pada tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran.

Terhadap kondisi capaian dan permasalahan isu pendidikan dan isu ketenagakerjaan tersebut, (yang tercakup di dalam Bidang Pendidikan), telah ditetapkan anggaran belanja langsung program di dalam RKPD 2010 sebesar **Rp. 77.738.482.800,00** dan terealisasi di dalam APBD 2010 sebesar **Rp. 179.043.757.513,00 (230,32%)**.

Realisasi anggaran tersebut lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan dalam RKPD, hal ini disebabkan adanya intervensi yang cukup besar dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, yang menunjukkan bahwa baik Pemerintah Kabupaten Bandung, maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sangat fokus terhadap penanganan isu tersebut.

B. Bidang Kesehatan

Kesehatan masyarakat tidak terlepas dari faktor eksternal dan internal, yang dapat menimbulkan pengaruh positif maupun negatif. Intervensi program/kegiatan yang bersifat kuratif, preventif maupun promotif telah dan terus menerus dilakukan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Demikian pula sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia, baik di rumah sakit, puskesmas, pusku, poskesdes maupun mitra pelayanan kesehatan di tingkat desa terus diupayakan agar tetap dapat berfungsi dengan baik sebagai penunjang kesehatan masyarakat.

Permasalahan pada Bidang Kesehatan dapat dilihat melalui kondisi berdasarkan isu kesehatan sesuai dengan dokumen RKPD 2010.

1. Kondisi Kesehatan

Angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Bandung pada Tahun 2009 meningkat 0,52 point dibandingkan Tahun 2008, seperti telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, demikian pula angka kematian bayi (AKB) mengalami penurunan 3,59% dibandingkan Tahun 2008. Penurunan AKB ini tidak terlepas dari kecukupan gizi pada saat bayi dalam kandungan serta penanganan persalinan terakhir yang dilakukan.

Pada Tahun 2009 jumlah penanganan persalinan oleh dokter mencapai 5,94%, persalinan oleh bidan mencapai 59,01%, persalinan oleh tenaga medis lain mencapai 0,45%, persalinan dibantu dukun bersalin mencapai 34,43% serta 0,17% persalinan dibantu oleh family dan lainnya. Penanganan persalinan oleh dokter meningkat 0,96% dibandingkan Tahun 2008, namun tidak demikian untuk penanganan persalinan oleh tenaga yang lainnya. Penanganan persalinan oleh dukun bersalin masih cukup tinggi, hal ini dimungkinkan jumlah dokter dan bidan masih kurang terutama di daerah perdesaan/terpencil.

Dari sejumlah bayi yang dilahirkan pada Tahun 2009, sebanyak 42,86% telah mendapatkan ASI selama kurun waktu di atas dua Tahun; 8,61% mendapatkan ASI hanya 1-5 bulan; sebanyak 8,41 % mendapatkan ASI selama 6-11 bulan; sebanyak 19,47% mendapatkan ASI selama 12-17 bulan; dan sebanyak 20,65% mendapatkan ASI selama 18-23 bulan. Persentase bayi/balita mendapatkan ASI lebih dari 2 (dua) Tahun meningkat 6,4% dibandingkan Tahun 2008, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya ASI semakin meningkat, hal ini berpengaruh terhadap peningkatan AHH di waktu mendatang. Meningkatnya angka harapan hidup, didukung pula oleh ketersediaan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan serta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.

Tenaga kesehatan yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan meliputi : tenaga medis (dokter dan dokter gigi), tenaga keperawatan (perawat dan bidan), tenaga kefarmasian (apoteker, analisis farmasi dan asisten apoteker), tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga sanitasi dan tenaga kesehatan lainnya. Pada Tahun 2009, jumlah tenaga medis pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang ada di Kabupaten Bandung lk 326 orang, tenaga keperawatan dan bidan berjumlah 1.497 orang, tenaga kefarmasian serjumlah 84 orang, tenaga kesehatan masyarakat berjumlah 18 orang, tenaga teknisi medis berjumlah 80 orang, ahli gizi berjumlah 77 orang dan tenaga sanitasi berjumlah 59 orang.

Sarana kesehatan rujukan di Kabupaten Bandung baik pemerintah maupun swasta seluruhnya berjumlah 8 buah, yaitu : RSD Soreang, RSD Majalaya, RSD Cicalengka, RS. Sulaeman, RS. Pasir Junghun, RS Bina Sehat, RS Al-Ihsan, serta RSU AMC Hospital. Untuk RS Pemerintah, khususnya RSD Soreang direncanakan akan dilakukan relokasi dikarenakan RS tersebut berada di pusat keramaian Kota Soreang. Relokasi RSD Soreang direncanakan di Desa Sadu dan pada saat ini masih dalam taraf studi kelayakan.

Sementara itu, untuk RSD Majalaya dan sarana lainnya seperti : Puskesmas, Pustu, Polindes, Posyandu, Poskesdes dan sebagainya masih perlu peningkatan, baik kualitas maupun kuantitas tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Cakupan ketersediaan obat yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka pelayanan kesehatan dasar saat ini (Tahun 2009) mencapai 95%, angka ini meningkat 26% dibandingkan Tahun 2008, yang baru mencapai 69%.

Berdasarkan uraian kondisi capaian tersebut, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih belum memadai.
- Jumlah dan persebaran tenaga medis masih kurang dan belum merata.

Terhadap kondisi capaian dan permasalahan isu kesehatan tersebut (yang tercakup di dalam Bidang Kesehatan), telah ditetapkan anggaran belanja langsung program di dalam RKPD 2010 sebesar **Rp. 88.803.726.000,00** dan terealisasi di dalam APBD 2010 sebesar **Rp. 136.845.444.240,00 (154,10%)**.

Realisasi anggaran tersebut lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan dalam RKPD, hal ini disebabkan adanya intervensi yang cukup besar dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, yang menunjukkan bahwa baik Pemerintah Kabupaten Bandung, maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sangat konsen terhadap penanganan isu tersebut.

C. Bidang Daya Beli

Sesuai uraian pada sub bab sebelumnya bahwa pada Tahun 2009 indeks daya beli Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2008. Namun peningkatan tersebut kurang signifikan, sehingga pada umumnya tingkat ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung masih belum banyak mengalami kemajuan.

Permasalahan pada Bidang Daya Beli dapat dilihat melalui kondisi berdasarkan isu kemiskinan dan isu Ketahanan Pangan sesuai dengan dokumen RKPD 2010.

1. Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam mengakses pelayanan standar terkait dengan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bandung, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bandung Tahun 2009 mencapai 186.631 kk atau 20,09% terhadap jumlah penduduk. Jumlah ini meningkat sebesar 0,85 % dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai 185.064 kk atau 23,64% terhadap jumlah penduduk. Bila dilihat dari segi kewilayahan, jumlah keluarga miskin (gakin) terendah terdapat di Kecamatan Margahayu, yang mana pada Tahun 2008 jumlah gakin mencapai lk. 2.440 kk (miskin perkotaan) dan pada Tahun 2009 jumlah gakin mencapai lk. 2.191 kk (miskin perkotaan). Sedangkan jumlah gakin tertinggi terdapat di Kecamatan Ciparay, yang mana pada Tahun 2009 jumlah gakin mencapai lk. 13.419 kk dan pada Tahun 2009 mencapai lk 13.484 kk.

Dari uraian tersebut terlihat fenomena bahwa masyarakat perkotaan lebih mampu menanggulangi kemiskinan dibandingkan perdesaan terutama dalam mengakses pendidikan dan lapangan pekerjaan.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk miskin, telah dilakukan pemberian bantuan beras bersubsidi sedangkan untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan telah dilakukan upaya bimbingan sosial dan keterampilan bagi keluarga miskin. Selain itu, melalui Program P2WKSS telah dilakukan pelatihan keterampilan bagi ibu rumah tangga dari keluarga miskin sebanyak 100 orang. Program ini merupakan program lanjutan Tahun 2008. Program lain yang telah dilakukan terkait dengan pengentasan masalah kemiskinan yaitu pemberian beasiswa bagi siswa miskin, di mana sebanyak 7.552 siswa SMU/SMK miskin mendapatkan beasiswa sekolah pada Tahun 2009 melalui bantuan operasional manajemen mutu. Pemberian beasiswa tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya memotong jalur generasi miskin. Program lainnya yaitu perawatan kesehatan bagi 4.392 orang masyarakat miskin, yang mana pada Tahun 2008 jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan perawatan kesehatan ini sebanyak 5.101 orang.

Selanjutnya, telah dilaksanakan pula Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di 11 kecamatan dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Sasaran PPK tersebut meningkat dibandingkan pada Tahun 2008 yang hanya dilaksanakan di 4 kecamatan. Kegiatan lainnya yaitu Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa dan P2KP telah dilaksanakan di 20 Kecamatan (171 desa/kelurahan). Sasaran kegiatan tersebut meningkat dibandingkan Tahun 2008 yang hanya dilaksanakan di 10 kecamatan.

Berdasarkan uraian kondisi capaian tersebut, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Berbagai program dari beberapa sektor yang telah dilaksanakan belum mampu/tidak signifikan dalam mengurangi jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bandung.
- Belum terpadunya berbagai program penanggulangan kemiskinan (ego sektor).
- Belum terukur secara jelas mengenai upaya pengurangan kemiskinan pada setiap program, hal ini dikarenakan belum adanya keseragaman data jumlah keluarga miskin sehingga target yang ingin dicapai setiap sektor belum jelas.

Upaya yang perlu dilakukan yaitu penguatan penetapan regulasi dan peningkatan keterpaduan serta sinergitas program penanggulangan kemiskinan yang bersifat multisektor, selain itu percepatan pengurangan kemiskinan melalui identifikasi permasalahan utama kemiskinan sesuai dengan kajian tipologi kemiskinan.

2. Kondisi Ketahanan Pangan

Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki struktur masyarakat agraris, hal ini dapat dilihat dari persentasi jumlah penduduk 10 Tahun ke atas yang bekerja pada sektor pertanian mencapai 20,66 %. Selain itu bisa dilihat juga dari penggunaan lahan yang digunakan untuk pertanian, yaitu mencapai 48,6% dari luas wilayah Kabupaten Bandung, yang terdiri dari : lahan sawah seluas 36.390 ha dan lahan kering seluas 50.577 ha.

Kabupaten Bandung pada saat ini masih merupakan salah satu pemasok utama komoditi beras dan sayuran dataran tinggi maupun dataran rendah bagi daerah perkotaan seperti : Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan pasar-pasar di Kota Bandung. Untuk komoditas beras, sampai saat ini Kabupaten Bandung memasok kurang lebih 50-70 ton per hari ke Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta. Komoditas sayuran sekitar 50% produksinya dijual ke pasar Jakarta dan sekitarnya, sekitar 25% dijual ke pasar Kota Bandung dan sisanya ke pasar lokal. Khusus untuk komoditas kentang, Kabupaten Bandung merupakan penghasil produksi tertinggi di Jawa Barat, yaitu mencapai 70% dan untuk tingkat nasional

mencapai 30%. Komoditas lainnya yaitu produksi teh baik yang berasal dari perkebunan negara, perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat merupakan komoditas yang sebagian besar diekspor.

Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kabupaten Bandung pada Tahun 2009 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun sebelumnya yaitu dari 3,97% dengan kontribusi 7,13% pada Tahun 2008 menjadi 5,4% pada Tahun 2009 dengan kontribusi 7,36%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi alam Kabupaten Bandung sangat menguntungkan bagi percepatan usaha bidang pertanian, dan seharusnya menjadi momentum bagi petani untuk mendapatkan keuntungan.

Perkembangan peningkatan sektor pertanian dapat dilihat melalui tingkat produksi pertanian sektor unggulan, yang secara rata-rata meningkat, meliputi : produk pertanian segar dan olahan, komoditi padi, palawija dan tanaman hortikultura. Produksi padi pada Tahun 2008 mencapai 414.394 ton, produksi ini mengalami peningkatan sebesar 59,355 ton dibandingkan Tahun 2009 yang mencapai 473.749 ton; selanjutnya jagung dari 41.589 ton pada Tahun 2008 menjadi 50.849 ton pada Tahun 2009 (meningkat 9,3 ton); kentang 140.973 ton dari target realisasi 119.042 ton pada Tahun 2009 (mencapai prestasi 118,42%); alpukat dari 20.599 ton pada Tahun 2008 menjadi 52.804 ton pada Tahun 2009; rambutan dari 3.031 ton pada Tahun 2008 menjadi 5.706 ton pada Tahun 2009; teh dari 6.790 ton pada Tahun 2008 menjadi 36.850 ton pada Tahun 2009; kopi dari 607 ton pada Tahun 2008 menjadi 4.218 ton pada Tahun 2009; cengkeh dari 77 ton pada Tahun 2008 menjadi 91 ton pada Tahun 2009.

Pemenuhan kebutuhan pangan seringkali menggunakan lahan kawasan yang berfungsi lindung, seperti halnya hutan lindung terutama untuk sayuran. Lahan hutan yang sering digunakan yaitu lahan hutan sekitar pegunungan Bandung Selatan (Pangalengan, Kertasari, Ibum, Rancabali, Pasirjambu dan Ciwidey) dan Bandung Utara (Cimendan dan Cilengkrang). Untuk menanggulangi dampak tersebut supaya tidak mengakibatkan permasalahan lingkungan, pada Tahun 2008 dan 2009 telah dilakukan program pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pengelolaan hutan bersama. Hasilnya dapat dilihat dari produksi kopi yang meningkat melalui kerjasama tersebut. Pola kerjasama ini perlu terus dilakukan melalui pemberdayaan dalam rangka meningkatkan diversifikasi pangan lainnya, tanpa harus mengorbankan kerusakan hutan dan lingkungan.

Jumlah kelompok tani pada Tahun 2008 tercatat sebanyak 353 kelompok dengan kemampuan akses terhadap kredit usaha dan permodalan sebanyak 20 kelompok. Kelompok tersebut diharapkan menjadi wadah yang tepat terutama bagi buruh tani dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan produksi, pemanfaatan serta pengolahan turunan produk. Sampai saat ini belum ada data

signifikan yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani terutama buruh tani.

Di bidang peternakan, jenis ternak yang masih memiliki potensi antara lain : sapi perah, sapi potong, domba dan unggas. Dari komoditi sapi perah, Kabupaten Bandung memberikan kontribusi cukup tinggi dalam pemenuhan kebutuhan susu segar, baik level Jawa Barat maupun Nasional. Untuk memenuhi kebutuhan susu secara nasional, saat ini Indonesia masih mengandalkan impor yang mencapai 70% (mayoritas dalam bentuk olahan) dan sisanya (30%) dari produksi dalam negeri. Kontribusi susu Jawa Barat terhadap produksi nasional mencapai 34,81% dan 9,2% adalah kontribusi susu segar dari Kabupaten Bandung. Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang pasar susu dalam negeri masih sangat terbuka, namun dihadapkan pada era perdagangan bebas yang menuntut peningkatan produksi, kualitas dan efisiensi usaha.

Produktivitas sapi perah di Kabupaten Bandung saat ini baru mencapai 13,63 liter/ekor/hari. Dengan tingkat produktivitas tersebut, Kabupaten Bandung belum mampu berkompetisi dengan produksi susu dunia yang rata-rata produksinya 20 – 25 liter/ekor/hari. Saat ini produksi susu Kabupaten Bandung mencapai 59.534.141 kg dari populasi sapi perah sebanyak 28.123 ekor. Sebanyak 6.703.225 kg (11,26%) dari produksi susu tersebut telah diolah menjadi produk turunan berupa : dodol, caramel, kerupuk, eskrim, youghurt, susu pasteurisasi, dan sisanya yaitu 52.830.916 kg (88,74%) digunakan sebagai bahan baku Industri Pengolahan Susu (IPS). Sedangkan tingkat capaian konsumsi susu penduduk Kabupaten Bandung sebesar 8,62 kg/kapita/Tahun.

Komoditas lain yang juga potensial dikembangkan adalah sapi potong. Saat ini kebutuhan daging Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagian besar masih dipenuhi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di lain pihak, bibit bakalan sapi potong yang berasal dari pedet jantan sapi perah di Kabupaten Bandung lebih banyak dijual ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini tentunya menjadi suatu peluang bila Kabupaten Bandung mampu menyediakan sapi potong bagi konsumen di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Saat ini konsumsi daging di Kabupaten Bandung mencapai 9,49 kg/kapita/Tahun dari total produksi daging sebesar 40.912.117 kg, dengan kontribusi masing-masing komoditi : sapi potong 49,7%, ayam ras pedaging 42,47%, domba 2,29% dan sapi perah 0,22%. Dengan memperhatikan besaran kontribusi setiap komoditi, maka komoditi sapi potong dan ayam ras pedaging sangat potensial untuk terus dikembangkan.

Potensi lainnya yang terdapat di Kabupaten Bandung adalah ternak domba. Memelihara ternak domba sudah menjadi kultur masyarakat petani/peternak di perdesaan. Ternak domba berfungsi sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat diuangkan bila diperlukan, di samping sebagai penghasil pupuk yang sangat

diperlukan untuk bercocok tanam. Saat ini permintaan daging domba semakin meningkat, sementara ternak bakalan masih sulit didapat.

Selain itu, sektor lainnya yang dikembangkan di Kabupaten Bandung adalah perikanan, yang terdiri atas : pembenihan, pendederan dan pembesaran ikan. Dari sektor ini berkembang usaha pengolahan ikan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Tingkat perkembangan budidaya perikanan rata-rata meningkat yaitu untuk produksi ikan dari 7.336,68 ton pada Tahun 2008 meningkat menjadi 7.718,9 ton pada Tahun 2009. Demikian pula produksi benih ikan dari 932.258 ribu ekor pada Tahun 2008, meningkat menjadi 1.000.706 ton pada Tahun 2009. Produksi olahan ikan meningkat dari 5.600 ton pada Tahun 2008 menjadi 8.974,5 ton pada Tahun 2009. Adapun tingkat pemasaran produksi perikanan masih bertumpu di wilayah Jawa Barat dan DKI sehingga dalam rangka mendorong pemasaran secara lebih luas perlu dilakukan pengembangan pemasaran melalui diversifikasi produk olahan perikanan.

Di lain pihak ketersediaan penyuluhan perikanan hanya sebanyak 4 orang. Hal ini masih kurang dibandingkan potensi dan areal pemeliharaan ikan. Tingkat perkembangan kawasan budidaya air tawar mengalami hambatan, terutama karena adanya alih fungsi kawasan budidaya perikanan menjadi perumahan, hal ini cukup memprihatinkan.

Pada Tahun 2009 tingkat capaian konsumsi telur di Kabupaten Bandung baru mencapai 2,08 kg/kapita/Tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Kabupaten Bandung mendatangkannya dari luar Jawa Barat dan impor. Sedangkan untuk konsumsi ikan, mencapai 18,73 kg/perkapita/Tahun, besaran konsumsi ini meningkat dibandingkan Tahun sebelumnya yang mencapai 18,10 kg/perkapita/Tahun. Namun demikian, konsumsi ikan ini masih di bawah target norma konsumsi ikan nasional yang mencapai 26,5 kg/kapita/Tahun.

Secara umum, pola konsumsi ini perlu diikuti dengan standarisasi dan sertifikasi produk konsumsi, selain bermanfaat bagi industri pangan dalam pemasaran, juga untuk melindungi konsumen dari permasalahan yang akan timbul akibat penggunaan bahan-bahan berbahaya terutama dalam pengolahan produk pangan.

Berdasarkan uraian kondisi capaian tersebut, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Produksi pangan masih didominasi oleh komoditi padi, demikian pula konsumsi beserta diversifikasinya.
- Pencapaian produksi belum optimal jika dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduk.

- Penerapan Sistem Kewaspadaan serta Keamanan Pangan dan Gizi belum berjalan secara optimal sehingga masih ditemukan kasus bahan makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti Rhodamin B, Formalin di beberapa pasar tradisional.

Walaupun Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah yang mengalami surplus pangan terutama padi, jika melihat pertumbuhan penduduk baik secara lokal, nasional maupun global, maka permintaan terhadap pangan mempunyai kecenderungan terus naik. Di samping itu, banyaknya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, mengakibatkan permasalahan pangan akan tetap menjadi isu utama. Pemerintah pusat melalui dewan ketahanan pangan mengharapkan daerah tetap menjadikan permasalahan ketahanan pangan menjadi isu utama dalam pembangunan daerahnya.

Selain berdasarkan isu kemiskinan dan isu ketahanan pangan, permasalahan daya beli juga dipengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan di Kabupaten Bandung. Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perdagangan secara umum meningkat yaitu dari LPE 6,07% dengan kontribusi 15,69% pada Tahun 2008, meningkat menjadi 7,23% dengan kontribusi 16,56% pada Tahun 2009. Sedangkan Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perindustrian cenderung menurun yaitu dari LPE 5,5% dengan kontribusi 60,8% pada Tahun 2008 menurun menjadi LPE 3,38% dengan kontribusi 60% pada Tahun 2009. Penurunan ini dimungkinkan karena sektor industri yang menyumbang kontribusi terbesar pada PDRB mengalami hambatan akibat krisis global yang belum pulih. Namun demikian hal tersebut tidak terlalu berpengaruh pada sektor perdagangan, hal ini karena semakin berkembangnya diversifikasi kebijakan dalam perdagangan dan semakin besarnya dukungan usaha kecil menengah terutama industri kreatif.

Terhadap kondisi capaian dan permasalahan isu kemiskinan dan isu ketahanan pangan tersebut (yang tercakup di dalam Bidang Daya Beli), telah ditetapkan anggaran belanja langsung program di dalam RKPD 2010 sebesar **Rp. 39.859.544.862,00** dan terealisasi di dalam APBD 2010 sebesar **Rp. 37.022.140.946,00 (92,88%)**.

Realisasi anggaran tersebut lebih rendah (tidak mencapai 100%) dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan dalam RKPD, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Bandung serta intervensi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang tidak terlalu besar.

D. Bidang Infrastruktur

Permasalahan pada bidang Infrastruktur dapat dilihat melalui kondisi berdasarkan isu infrastruktur, isu ketersediaan energi dan SDA lainnya serta isu lingkungan hidup dan tata ruang sesuai dengan dokumen RKPD 2010.

1. Kondisi Infrastruktur

Infrastruktur merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam mendukung sektor prioritas bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli.

Sektor infrastruktur terdiri atas : prasarana transportasi, sumber daya air, dan prasarana permukiman, yang berperan sebagai pembentuk struktur ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat antar-wilayah.

Di sektor transportasi, pada Tahun 2009 proporsi panjang jalan kabupaten kondisi mantap (baik) mencapai 32,71%, angka ini meningkat dibanding Tahun sebelumnya yang mencapai 23,71%. Selanjutnya, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi sedang mengalami penurunan, yaitu dari 19,84% pada Tahun 2008 menjadi 38,18% pada Tahun 2009. Proporsi panjang jaringan jalan kondisi rusak mengalami penurunan yaitu dari 36,09% pada Tahun 2008 menjadi 27,67% pada Tahun 2009 sedangkan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak berat naik dari 2% pada Tahun 2008 menjadi 19,80% pada Tahun 2009. Kondisi ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perbaikan jalan di seluruh ruas jalan kabupaten. Hal ini juga dipengaruhi kondisi cuaca (hujan) yang terus menerus dan bencana yang terjadi akhir-akhir ini, sehingga sangat mempengaruhi kondisi jalan mengalami rusak berat di beberapa titik lokasi.

Di lain pihak, pembangunan jalan yang dilaksanakan baru pada 1 ruas jalan dengan panjang 378 m x 4 m, yaitu Jl. TKI-Pameuntasan (Margaasih) sedangkan pembebasan lahan untuk jalan tol Soreang-Pasirkoja tidak dapat dilaksanakan mengingat terlalu lamanya proses pembebasan.

Demikian pula untuk pembangunan jembatan, pada Tahun 2009 hanya dapat melaksanakan pembangunan sebanyak 2 jembatan, berbeda dengan Tahun 2008 yang dapat melaksanakan pembangunan jembatan sebanyak 21 jembatan.

Sebagai tindak lanjut penanganan limpasan air ke badan jalan, telah diupayakan pembangunan saluran drainase di 14 ruas jalan sepanjang 6.494,56 m, dan selanjutnya perlu perhatian terkait pemeliharannya.

Selain permasalahan infrastruktur jalan, permasalahan lain yang dihadapi adalah terjadinya kemacetan pada titik-titik tertentu yaitu pada ruas Jalan Kopo, Banjaran, Jalan Moh. Toha, Bojongsoang dan Cileunyi sedangkan untuk wilayah barat titik kemacetan berada pada Jalan Margaasih. Hal ini disebabkan oleh

penggunaan jalan yang melebihi kapasitas, sehingga volume kapasitas rasio nya melebihi rasio ideal.

Di sektor sumber daya air dan Irigasi, pada saat ini panjang saluran irigasi adalah 594 km, yang terbagi atas : saluran teknis sepanjang 183,8 km dan saluran non teknis sepanjang 410,55 km. Saluran teknis dengan kondisi baik sepanjang 137,975 km, saluran teknis kondisi rusak ringan sepanjang 36,889 km dan saluran teknis kondisi rusak berat sepanjang 4,983 km. Selanjutnya saluran non teknis dengan kondisi baik sepanjang 28,741 km, saluran non teknis kondisi rusak ringan sepanjang 103,240 km dan kondisi saluran non teknis kondisi rusak berat sepanjang 35,800 km.

Bendungan teknis di Kabupaten Bandung pada Tahun 2009 berjumlah 22 buah. Bendungan teknis kondisi baik sebanyak 27%, kondisi rusak ringan sebanyak 41% dan kondisi rusak berat sebanyak 297 buah. Bangunan sadap terdiri dari 56% kondisinya baik, 44% rusak ringan dan 29% rusak berat. Untuk bangunan pelengkap terdiri dari 367 bh dengan 254 kondisinya baik, 72 bh rusak ringan dan 41 rusak berat serta 87.930 m' bangunan pelengkap terdiri dari : 4.000 m' kondisi baik, 37.880 m' kondisi rusak ringan serta 46.050 m' rusak berat.

Cakupan luas lahan pertanian beririgasi (Daerah Irigasi) pada saat ini sebagai berikut : Leuwikuray (640,1 Ha), Cipajaran (60 Ha), Situ Kuluwung (286 Ha), Kiaraeunyeuh (230,2 Ha), Juntihilir (191,5 Ha), Cisabuk (180 Ha), Cikalong (150 Ha), Citarik (200 Ha), Loajogo (155 Ha), Ciranjang (205 Ha), Cibodas (258 Ha), dan Gunungkarung (150 Ha).

Permasalahan bidang keirigasian diantaranya adalah tingginya alih fungsi lahan yang menyebabkan terganggunya sistem jaringan irigasi dan terdapat permasalahan operasi serta pemeliharaan jaringan karena lemahnya manajemen OP dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap OP jaringan irigasi.

Belum adanya Masterplan Sistem Drainase di Kabupaten Bandung menyebabkan pembangunan/rehabilitasi jaringan drainase yang dilaksanakan belum terarah, bahkan penyusunan masterplan hendaknya terintegrasi dengan sistem drainase bersama kabupaten/kota berbatasan di cekungan Bandung.

Kegagalan sistem drainase dapat terlihat dengan timbulnya genangan dan kejadian banjir di beberapa titik terutama wilayah permukiman seperti banjir di Cieunteung – Baleendah, Dayeuhkolot serta Jalan terusan Kopo. Di beberapa tempat terutama daerah perkotaan, saluran irigasi berubah fungsi menjadi saluran drainase. Selain permasalahan penanganan banjir dan genangan, partisipasi masyarakat dinilai kurang terutama dalam mematuhi peraturan perundangan yang ada. Hendaknya wilayah yang merupakan sempadan dan/atau bantaran sungai tidak boleh dijadikan sebagai areal permukiman. Sebelum semua

sempada saluran drainase dan sungai dilakukan pembangunan oleh masyarakat, maka perlu penerapan sanksi yang tegas dan jelas terhadap pelanggarnya.

Gambar 2.1.
Normalisasi Sungai Cikayangan



Di lain pihak kondisi sungai sudah menunjukkan dampak ketidakseimbangan pada bagian hulu sungai, yang telah mengalami degradasi dan longsoran-longsorannya yang diakibatkan oleh arus sungai yang cukup deras dan daerah konservasi yang mulai mengalami penurunan fungsi, sedangkan daerah hilir sungai sudah menunjukkan adanya abrasi yang cenderung membentuk badan sungai menjadi lebar dan dangkal.

Di Sektor Permukiman, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk terutama migran dapat dipastikan bahwa kebutuhan perumahan akan tinggi terutama di daerah perbatasan dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Kebutuhan perumahan oleh penduduk migran tidak saja terhadap rumah permanen dan terorganisir, tetapi juga bagi masyarakat yang tidak mampu di perkotaan yang pindah ke wilayah Kabupaten Bandung dengan alasan masih murah lahan. Sehingga selain karena pada awalnya telah terdapat masyarakat miskin juga bertambahnya jumlah permukiman kumuh oleh para migran terutama di sekitar wilayah industri. Beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut telah dilakukan, diantaranya adalah Program Rumah Tidak Layak Huni, Program Perumahan Swadaya (bekerja sama dengan pusat). Pada Tahun 2009, telah dilakukan perbaikan terhadap rumah tidak layak huni sebanyak 616 unit untuk masyarakat miskin. Selain itu, Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat telah dilaksanakan pula di 16 desa yaitu : pembangunan jalan stapak sepanjang 1.296 m, bak penampungan air bersih sebanyak 2 unit, pembangunan MCK sebanyak 6 unit, rehab rumah tidak layak huni sebanyak 1 unit, pemeliharaan rumah susun kulalet sebanyak 1 lokasi, pemeliharaan IPAL di

3 unit, pembuatan sumur dangkal sebanyak 1 unit, pemasangan pipa sepanjang 2.172 m, Bio gester 1 unit, dan keermir 1 unit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perumahan perlu pemecahan secara struktural dan terkoordinasi melalui program penataan lingkungan perumahan dan pembangunan rumah susun.

Berdasarkan data Suseda, pada Tahun 2008 prosentase konsumsi air minum berasal dari Air Kemasan mencapai 1,99%, Ledeng 9,46%, Pompa 4,34%, Sumur Terlindung 0,64%, Sumur Tak Terlindung 20,55%, Mata Air Terlindung 40,46%, Mata Air Tak Terlindung 4,50%, Air Sungai 13,83%, Air Hujan 2,49% dan Lainnya 1,73%. Sedangkan pada Tahun 2009 prosentasi konsumsi air minum berasal dari Air Kemasan mencapai 18,54%, Ledeng 7,00%, Pompa 22,04%, Sumur Terlindung 30,08%, Sumur Tak Terlindung 2,67%, Mata Air Terlindung 16,38%, Mata Air Tak Terlindung 2,97%, Air Sungai 0,03%, Air Hujan 0,14%, dan Lainnya 0,16%. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi air melalui pemanfaatan sumur terlindung mengalami kenaikan, hal ini disebabkan banyaknya penduduk yang membangun sumur-sumur tersebut dalam pemanfaatan air. Cakupan pelayanan air bersih oleh pemerintah, baik PDAM (perkotaan) maupun Dinas Pertasih (pedesaan) Kabupaten Bandung sampai Tahun 2009 hanya mencapai kurang dari 20%. Kondisi ini sangat menyulitkan program pencapaian pemenuhan air minum/bersih sesuai amanat MDG's sebesar 50% pada Tahun 2015.

Wilayah perkotaan yang sudah terlayani PDAM meliputi : sebagian Kecamatan Bojongsoang, Katapang, Banjaran, Majalaya, Pameungpeuk, Pangalengan, Arjasari, Cicalengka, Cikancung, Ciparay, Pacet, Baleendah, Majalaya, Solokan jeruk, Paseh, Ibum, Soreang, Rancabali dan Canguang. Sedangkan wilayah yang sudah terlayani air bersih pedesaan meliputi : sebagian Kec. Cileunyi, Cimenyan, Cilengkrang, Margahayu, Margaasih, Cimaung, Nagreg, Kertasari, Ibum, Pasirjambu, dan Ciwidey. Sampai saat ini belum ada investor swasta yang tertarik mengembangkan sektor air minum, sehingga perlu adanya kajian mengenai partisipasi dan kewajiban masyarakat dalam menyelenggarakan program air minum dan air bersih.

Pada masa yang akan datang kebutuhan air masyarakat akan semakin meningkat. Permasalahan ini merupakan potensi konflik apabila pemerintah tidak dapat melakukan penyediaan, pelestarian dan pengaturan terkait dengan pemanfaatannya baik pemanfaatan air tanah maupun air permukaan. Beberapa sumber air di bagian hulu Cekungan Bandung yaitu : badan sungai Citarum dan anak-anaknya, danau atau situ (Ciharus, Cisanti, Cileunca dan Patengan) memerlukan pemeliharaan fungsinya.

Selanjutnya mengenai fasilitas tempat pembuangan air besar, dapat diketahui sebagai berikut : prosentase rumah tangga di Kabupaten Bandung pada Tahun

2009 yang menggunakan fasilitas sendiri sebanyak 70,82%, bersama 16,86%, umum 10,78% dan tidak menggunakan fasilitas sebesar 1,53%. Hal ini berbeda jika dibandingkan Tahun 2008 yaitu : yang menggunakan fasilitas sendiri sebanyak 64,69%, bersama 19,69%, umum 13,91% dan tanpa menggunakan fasilitas sebesar 1,71%. Dapat dikatakan bahwa kenaikan prosentase penggunaan fasilitas Buang Air Besar mencerminkan kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap fasilitas sanitasi, hal ini perlu ditindaklanjuti dengan pengelolaan limbah domestik melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah agar tidak mencemari badan sungai.

Berdasarkan uraian kondisi capaian tersebut, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Kondisi cuaca (hujan) yang terus menerus (ekstrim) dan bencana yang kerap terjadi, sangat mempengaruhi dan mempercepat kerusakan infrastruktur seperti : jalan, jembatan, bangunan air dan gedung.
- Terdapat hambatan dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur, yang disebabkan spekulasi lahan dan lamanya proses pembebasan.
- Kurang adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran di area sempadan jalan dan sungai/saluran drainase/saluran irigasi.
- Belum lengkapnya masterplan infrastruktur (air bersih, drainase, permukiman dll) yang terintegrasi dengan sistem di cekungan Bandung karena sangat erat kaitannya dengan infrastruktur kabupaten/kota yang berbatasan.
- Kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh terhadap pentingnya sanitasi lingkungan, belum disertai akan kewajiban masyarakat dalam pelestarian dan pemeliharannya.

Upaya pembuatan masterplan infrastruktur yang terintegrasi dengan sistem infrastruktur cekungan Bandung perlu dilakukan disamping secara kontinyu memperbaiki kerusakannya. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang diakibatkan tingginya pertumbuhan penduduk selain perlu adanya program percepatan juga perlu diupayakan melalui model kerjasama dengan pihak swasta secara saling menguntungkan. Oleh karena itu peningkatan kemampuan tim KPS perlu dioptimalkan. Pola pemberdayaan masyarakat yang tepat dan koperasi perlu diterapkan di sektor infrastruktur sanitasi agar fasilitas infrastruktur tersebut dapat dijaga kelangsungannya.

Dalam upaya penanganan Bencana banjir dan bencana lainnya yang mempengaruhi infrastruktur, perlu disusun standar prosedur sehinggaantisipasi terhadap keadaan darurat dapat dilakukan termasuk penganggarannya. Selama

ini kerusakan infrastruktur yang diakibatkan bencana belum mendapatkan perhatian karena sistem tersebut belum ada, di lain pihak keadaan yang mendesak perlu dilakukan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu dan tidak menimbulkan gejolak permasalahan di masyarakat akibat terlambatnya pelayanan tersebut.

2. Kondisi Ketersediaan Energi dan SDA lainnya

Berdasarkan cakupan pelayanan prasarana jaringan listrik di Kabupaten Bandung pada Tahun 2009, terdapat keluarga yang belum mendapatkan fasilitas listrik perdesaan yang tersebar di beberapa kecamatan antara lain : Kecamatan Arjasari, Cikancung, Cimenyan, Ibum, Pacet, Paseh, Pasirjambu, Rancabali dan Soreang.

Di bidang energi, Kabupaten Bandung memiliki potensi panas bumi yang cukup besar sebagai salah satu alternatif sumber pembangkit tenaga listrik. Dua dari 4 PLTP yang telah beroperasi di Jawa Barat berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung yaitu Kamojang (140 MW) dan Wayang Windu (110 MW).

Seiring dengan semakin mahalnya TDL dan berkurangnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah, menyebabkan tingginya harga BBM serta ditetapkannya Kebijakan Diversifikasi Energi Nasional sebagai bagian dari Kebijakan Umum Bidang Energi (KUBE) yang mengarahkan pada pengurangan pemakaian minyak bumi dan meningkatkan pemakaian batubara dan gas.

Meningkatnya penggunaan bahan bakar batubara sebagai pengganti BBM pada industri-industri, dapat menekan biaya produksi. Namun di pihak lain, limbah yang dihasilkan dari penggunaan batu bara tersebutnya menimbulkan pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola secara benar.

**Gambar .2.2.
Pemanfaatan energi Biogas Limbah Tahu (BPLH 2009)**



Energi alternatif lainnya yang dimanfaatkan oleh masyarakat adalah energi biogas. Di Kabupaten Bandung, Energi Biogas ini sebagian besar dihasilkan dari pemanfaatan limbah kotoran sapi, sehingga sebagian besar lokasi pemanfaatan energi biogas terletak pada wilayah peternakan. Pada Tahun 2009 peralatan biogas yang dimanfaatkan masyarakat tersebar di beberapa kecamatan, antara lain : Kecamatan Cilengkrang, Kertasari, Pangalengan, Paseh dan Rancabali. Sedangkan energi biogas yang berasal dari limbah (tahu) terdapat di Kecamatan Canguang. Selain kotoran sapi dan limbah tahu yang dapat dimanfaatkan sebagai energi biogas, perlu dipertimbangkan pula pemanfaatan limbah dari kotoran kuda sebagaiantisipasi terhadap pencemaran yang dihasilkan angkutan delman. Angkutan delman tersebar di beberapa wilayah seperti : Majalaya, Baleendah, Ciparay, Banjaran, Soreang, Ciwidey, Pasirjambu dan Pangalengan.

Berdasarkan uraian kondisi capaian tersebut, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk, perlu adanya pemetaan akan kebutuhan energi di Kabupaten Bandung disertai pemecahannya dengan berbasis masyarakat.
- Penggunaan energi alternatif seperti pemanfaatan batubara dan limbah kotoran memerlukan kajian selanjutnya terutama efek/dampak yang ditimbulkan jika penggunaannya tidak sesuai standar.
- Pemenuhan energi listrik dengan memanfaatkan air (PLTA) termasuk mikrohidro memerlukan ketersediaan air yang konsisten, di lain pihak kecenderungan masyarakat terhadap kerusakan alam menimbulkan konsistensi tersebut terganggu sehingga diperlukan upaya pelestarian dengan melibatkan masyarakat dan penegakan hukum secara tegas.

3. Kondisi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan tersebut merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang bersifat kewilayahan yang ada di Kabupaten Bandung pada saat ini. Di dalam peraturan tersebut terdapat sanksi bagi pelaku dan juga bagi pengambil kebijakan.

Pada dasarnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bukan merupakan dokumen operasional untuk menyelenggarakan penataan ruang. Dokumen RTRW harus dirinci ke dalam dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) yang disertai dengan peraturan zonasinya. Sampai Tahun 2009 telah disusun dokumen RDTR Baleendah-Dayeuhkolot dan Soreang mewakili wilayah perkotaan serta Kutawaringin (stadion Jalak Harupat) dan Tegalluar mewakili wilayah strategis.

Karena terhambat beberapa prosedur di tingkat provinsi menyebabkan dokumen RDTR yang telah disusun belum memiliki kekuatan hukum melalui pengesahan peraturan daerah, demikian pula untuk dokumen perencanaan lainnya seperti untuk kawasan agropolitan dan cepat tumbuh. Di lain pihak masyarakat umum dan swasta memiliki kebutuhan yang mendesak terkait kepastian hukum dan perlindungan aset dan investasinya.

Khusus mengenai RDTR Soreang hendaknya isu kedudukan Soreang sebagai Ibu Kota Kabupaten Bandung perlu dilakukan penekanan dengan mengacu pada RTRW yang seharusnya disertai rencana-rencana pengembangan strategis perkotaan. Ibu Kota Soreang hendaknya mempunyai ciri khas perkotaan yang mandiri disertai arahan rencana arsitektur kotanya. Sebagai Ibu Kota, Soreang tidak terlalu mengalami kemajuan bahkan dibandingkan kota-kota satelit pada cekungan Bandung lainnya, padahal pusat seluruh kegiatan pemerintahan Kabupaten Bandung berada di Soreang. Kiranya perlu dilakukan pembentukan dewan kota/tim percepatan pembangunan ibu kota Soreang.

Dokumen penataan ruang harus menjadi acuan baik bagi proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan termasuk dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP). Idealnya dokumen perencanaan tata ruang mengatur sampai ke aspek tata bangunannya, sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum dan pemerintah memiliki landasan yang jelas dalam melaksanakan penertiban dan pengendalian sebagai akibat pelanggaran terhadap tata ruang.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat umum memiliki pandangan banyaknya pelanggaran terhadap penataan ruang seperti : pendirian bangunan di sempadan jalan dan sungai serta pembangunan dan pemanfaatan lahan di kawasan lindung sehingga dapat menimbulkan bencana alam. Bencana alam yang sekarang terjadi terutama banjir sebenarnya dapat dikurangi efek negatifnya bahkan dihindari jika pemerintah dan masyarakat secara konsisten mengacu pada ketentuan yang terdapat pada dokumen penataan ruang karena di dalamnya juga diatur mengenai permasalahan dan mitigasi bencana.

Berdasarkan uraian kondisi capaian tersebut, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Belum adanya perda tentang RDTR sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen RDTR Baleendah-Dayeuhkolt, Soreang, Kutawaringin dan Tegalluar. Hal ini menyebabkan terhambatnya rencana dan pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat umum, karena beberapa dokumen harus mengacu terhadap RDTR dan Peraturan Zonasinya.

- Terlambatnya pengesahan RDTR dapat menyebabkan dokumen RDTR yang telah disusun bersifat kadaluarsa dan sudah tidak sesuai lagi dengan isu terkini, terutama untuk RDTR Kawasan Strategis Kota Baru Tegalluar yang dapat menghambat investor menanamkan modalnya di wilayah tersebut.
- Dokumen penataan ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kejadian bencana dan korban yang ditimbulkan akibat ulah manusia itu sendiri.
- Belum ada tim khusus dalam mengawal pengembangan Soreang sebagai Ibu Kota.

Persampahan merupakan permasalahan lingkungan hidup yang memerlukan pemberdayaan masyarakat secara langsung, semakin berkurang timbulan sampah dari TPS ke TPA maka semakin panjang umur TPA nya.

Timbulan sampah di Kabupaten Bandung Tahun 2009 adalah 5.025 m³/hari, dengan besaran timbulan sampah daerah perkotaan 2.886 m³/hari. Tingkat pelayanan rata-rata mencapai 416 m³/hari, dengan demikian timbulah sampah di Kabupaten Bandung yang tertangani hanya 8,3% atau sekitar 14,4% dari timbulan sampah perkotaan, sedangkan sisanya dibuang ke sungai, ditimbun atau dibakar oleh masyarakat. Tentunya hal ini akan mempengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Dengan prosentase timbulan sampah tidak terangkut yang masih besar, beban pemerintah di dalam mengatasi permasalahan sampah akan sangat berat tanpa dibantu oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk itu pemerintah perlu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam mengatasi permasalahan sampah melalui penerapan pola 3R (Reuse, Reduce, Recycle).

Permasalahan lingkungan hidup secara aktual pada saat ini adalah perlindungan terhadap kerusakan hutan dan lahan kritis. Di Wilayah Kabupaten Bandung banyak terdapat lahan kritis. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa luas lahan kritis masih tersebar di wilayah Kecamatan Arjasari, Baleendah, Banjaran, Canguang, Cicalengka, Cikancung, Cilengkrang, Cileunyi, Cimaung, Cimenyan, Ciparay, Ciwidey, Ibum, Kertasari, Margaasih, Margahayu, Nagreg, Pacet, Pameungpeuk, Pangalengan, Pasirjambu dan Soreang.

Permasalahan lingkungan lainnya di Kabupaten Bandung adalah pencemaran lingkungan baik air, udara maupun tanah. Pencemaran tanah yang menonjol terjadi di Kecamatan Rancaekek akibat pencemaran limbah industri dari Kabupaten Sumedang. Pencemaran udara cenderung mengkhawatirkan yang ditunjukkan dengan kualitas udara ambien setiap Tahunnya cenderung menurun. Terdapat kecenderungan bahwa menurunnya kualitas udara ambien akibat

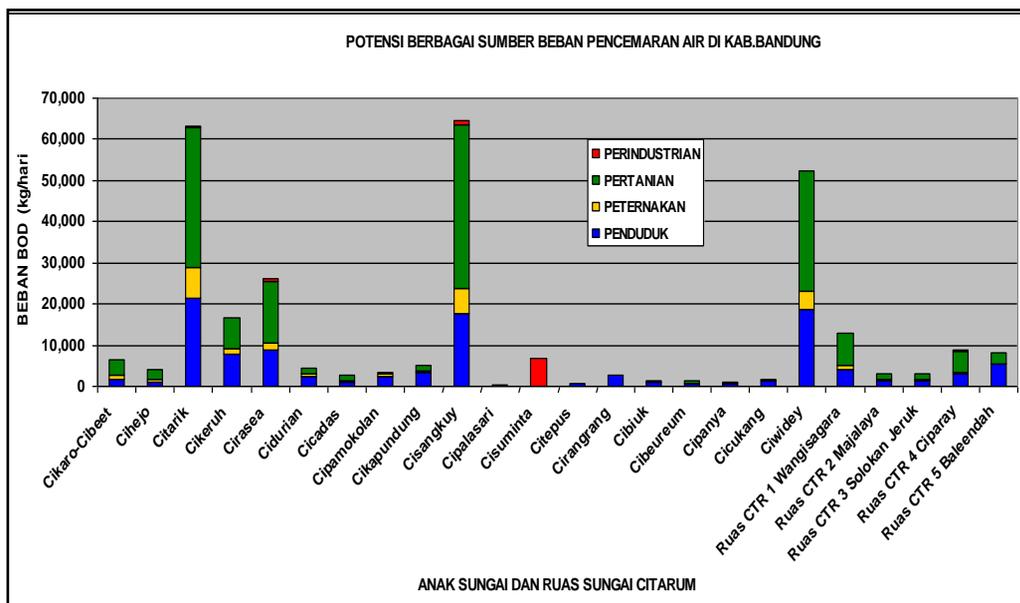
kegiatan transportasi dan industri. Berdasarkan hasil pengakajian Tahun 2006, dari 12 titik lokasi pengukuran polusi udara di Kabupaten Bandung Kadar NO₂ paling tinggi terdapat di Ruas Jalan Kopo – Sayati sebesar 98,6 µg/m³, sedangkan Kadar SO₂ dan NO paling tinggi terjadi di Terminal Cileunyi yaitu masing – masing sebesar 31,7 µg/m³, dan 28.758 µg/m³, tentu saja pada saat ini akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan namun perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

Permasalahan pencemaran sungai merupakan isu utama. Pencemaran ini dihasilkan oleh kalangan industri, domestik dan pertanian/ternak. Beberapa bangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) yang ada saat ini mengalami kesulitan beroperasi karena terbentur pada budaya masyarakat yang belum menyadari pentingnya instalasi IPLT tersebut bagi kelangsungan keseimbangan lingkungan. Sasaran yang perlu dilakukan adalah menurunkan beban pencemaran, khususnya yang bersumber dari air limbah industri, meningkatkan kualitas air sungai, dan meningkatkan kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada Tahun 2008, limbah cair (m³/hari) di kabupaten Bandung adalah 65696,8 m³/hari dengan rata-rata limbah cair per industri 645,44 m³/hari. Ditinjau dari jumlah IPAL industri terdapat 126 perusahaan yang menerapkan pola penggunaan IPAL. Jumlah industri yang memanfaatkan air bawah tanah sebanyak 305 industri. Dari jumlah tersebut, industri memanfaatkan air tanah sebanyak 4.802.371,2 m³ per hari dengan rata-rata pemanfaatan air tanah per industri sebanyak 266.798,40 m³ per hari.

Dari hasil kajian terhadap sungai Citarum pada Tahun 2009 sebagai dampak pencemaran dari anak sungainya juga, kadar BOD yang diperkirakan berasal dari aktivitas penduduk sebesar 125,080kg/hari, peternakan 31.899 kg/hari, pertanian 182.538 kg/hari dan industri 10.543 kg/hari sedangkan kadar COD yang berasal dari aktivitas penduduk sebesar 146.684 kg/hari, peternakan 65.715 kg/hari, pertanian 456.340 kg/hari, industri 31.768 kg/hari. Demikian pula untuk Kadar N yang berasal dari aktivitas penduduk sebesar 6.097 kg/hari, peternakan 330 kg/hari, pertanian 15.766 kg/hari dan industri 136 kg/hari. Selanjutnya kadar P yang berasal dari aktivitas penduduk sebesar 656,7 kg/hari dan pertanian 7.883 kg/hari.

Daya tampung pencemaran Sungai Citarum telah terlampaui sejak Tahun 90-an, artinya sejak Tahun tersebut beban pencemaran yang ada di sungai citarum telah melewati ambang batas pencemaran dan ambang batas sungai apalagi ambang batas untuk digunakan sebagai air minum.

Gambar 2.3.
Potensi Berbagai Sumber Beban Pencemaran Air di Kab.Bandung



Sumber: BPLH Kab Bandung

Upaya yang harus dilakukan setidaknya sesuai ambang batas pencemaran cukup berat antara lain : beban pencemaran limbah penduduk harus diturunkan 86%, beban pencemaran limbah industri diturunkan 95%, beban pencemaran limbah peternakan diturunkan 50% dan beban pencemaran limbah pertanian harus diturunkan 50%.

Isu yang bersifat aktual saat ini di Kabupaten Bandung adalah permasalahan bencana baik bencana banjir, gempa maupun gerakan tanah/longsor. Secara geologis Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang berpotensi terjadi gempa bumi, terutama gempa tektonik dan gempa vulkanik. Wilayah berpotensi terjadi gempa tektonik adalah cabang-cabang dari sesar utama (sesar Lembang dan sesar Cimandiri) yang pengaruhnya tidak terlalu signifikan, sedangkan wilayah yang berpotensi terjadi gempa lainnya yaitu wilayah selatan Kabupaten Bandung.

Gambar 2.4.
Dampak Akibat Bencana Gempa Bumi



Gempa yang cukup besar terjadi pada bulan September 2009 yang berpusat di daerah Tasikmalaya dengan kekuatan 7,3 skala richter cukup membuat wilayah Kabupaten Bandung terguncang terutama wilayah Pangalengan dan Kertasari. Kedua wilayah tersebut mempunyai karakteristik patahan yang banyak dan bervariasi sehingga dapat menjadi katalisator gelombang gempa yang dihasilkan dari aktifitas pertemuan lempeng dataran di Samudera Hindia. Berikut data yang kerusakan dan korban akibat gempa di Kabupaten Bandung pada Tahun 2010.

- Menderita	: 51.714 KK, 196.551 jiwa
- Meninggal	: 24 jiwa
- Luka	: 681 jiwa
- Dirawat	: -
- Dalam pencarian	: -
- Mengungsi	: 75.805 jiwa
- Rumah rusak berat	: 10.527 unit
- Rumah rusak sedang	: 13.453 unit
- Rumah rusak ringan	: 27.734 unit
- Rumah terancam	: 400 unit
- Tempat ibadah	: 447 unit
- Pasar	: 302 unit
- Gedung Pemerintahan	: 46 unit
- Sekolah	: 964 unit
- Jalan	: -

Selain gempa bumi, longsor merupakan salah satu bencana yang kerap menimpa wilayah Kabupaten Bandung. Longsor merupakan pergerakan tanah yang dapat disebabkan oleh gerusan air akibat adanya hujan lebat ke dalam tanah sehingga beratnya meningkat. Longsor juga dapat terjadi akibat gempa sebelumnya kemudian terisi air dari hujan. Sebagian besar daerah longsor di Kabupaten Bandung berada di wilayah selatan dan utara Kabupaten Bandung. Beberapa wilayah yang sering mengalami bencana longsor adalah Cicalengka, Cikancung, Cimaung, Cimenyan, Ciparay, Ibum, Katapang, Kertasari, Majalaya, Margahayu, Pacet, Pangalengan, Paseh, Pasirjambu dan Rancaekek. Pada awal Tahun 2010 terjadi bencana longsor yang cukup besar menimpa kompleks perumahan perkebunan dewata kecamatan Pasirjambu. Longsor tersebut memerlukan keseriusan dan kecepatan dalam penangannya, baik oleh pemerintah maupun partisipasi masyarakat dalam mengurangi jumlah korban jiwa. Berikut data korban dan kerusakan akibat longsor yang terjadi di Perkebunan Dewata Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung sampai dengan awal Tahun 2010 :

- Menderita	: 13 kk, 140 jiwa
- Meninggal	: 44 orang
- Luka	: 4 orang
- Dirawat	: 4 orang
- Dalam pencarian	: 11 orang
- Mengungsi	: 1.013 jiwa
- Rumah rusak berat	: 53 unit
- Rumah rusak sedang	: 1 unit
- Rumah rusak ringan	: 33 unit
- Rumah terancam	: 370 unit

- Tempat ibadah : 2 unit
- Pabrik : 2 unit
- Gedung : 3 unit
- Sawah : 50 ha
- Jalan : 576 m

Sumber Bagian Sosial Setda Kab. Bandung

Sumber daya air merupakan sumber daya yang patut mendapat perhatian di Kabupaten Bandung terkait dengan bencana banjir dan kekeringan. Diperkirakan daerah rawan banjir di Kabupaten Bandung seluas 7.275 ha, lokasinya berada di wilayah Bojongsoang, Dayeuhkolot, Pameungpeuk, Cicalengka, Cikancung, Rancaekek, Ciparay, Baleendah, Majalaya dan Paseh.

Gambar 2.5.
Dampak Akibat Bencana Banjir



Daerah Cieunteung - Baleendah merupakan daerah yang kerap kali dijadikan sebagai pusat pemberitaan permasalahan banjir. Idealnya daerah tersebut dijadikan kawasan lindung terutama lokasinya yang rata-rata berada lebih rendah di banding muka air Citarum. Upaya yang perlu dilakukan adalah relokasi, namun upaya tersebut harus diikuti dengan pengentasan permasalahan lainnya seperti permasalahan pekerjaan, akses ke pusat layanan dan penggantian perumahannya.

Berikut data korban dan kerusakan akibat banjir di Kabupaten Bandung sampai dengan awal Tahun 2010 :

- Menderita : 61.392 kk, 182.567 jiwa
- Mengungsi : 9.353 kk, 26.423 jiwa
- Rumah rusak berat : 319 unit
- Rumah rusak sedang : 67 unit
- Rumah rusak ringan : 1635 unit
- Rumah terancam : 761 unit
- Bangunan terendam : 48.228 unit
- Sekolah : 101 unit
- Tempat ibadah : 207 unit
- Kantor : 81 unit
- Pabrik : 21 unit
- Sawah : 764 ha
- Darat : 59 ha
- Jalan : 2.227 m

Sumber Bagian Sosial Setda Kab. Bandung

Saat ini banjir sudah menjadi permasalahan yang rutin terjadi untuk wilayah-wilayah tertentu. Permasalahan ini terjadi karena dimensi saluran drainase yang sudah tidak memadai, semakin bertambahnya jumlah permukiman, juga disebabkan oleh elevasi saluran yang sudah berubah. Selain itu, sedimentasi di sungai-sungai akibat gerusan air terhadap tanah saat ini sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Demikian pula halnya sampah domestik yang menggenangi di aliran-aliran sungai mengakibatkan terhambatnya kelancaran aliran air.

Namun demikian, muara permasalahan banjir ada pada kondisi lingkungan yang rusak akibat budaya masyarakat yang kurang tertib. Penyelesaian masalah ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Penanganan permasalahan perlu dilakukan mulai dari hulu sampai ke hilir sungai, penanganan dan pemeliharaan saluran-saluran drainase yang menyeluruh, termasuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya memelihara infrastruktur yang sudah terbangun.

Wilayah Kabupaten Bandung juga rentan akan bencana yang diakibatkan Puting Beliung, walaupun tidak terlalu merusak namun hampir setiap Tahun kejadian tersebut sering muncul, hal ini karena letak dan kondisi geografis Kabupaten Bandung memungkinkan terjadinya bencana tersebut. Pada awal Tahun 2010 telah terjadi beberapa kejadian bencana angin puting beliung dengan kerusakan dan korban sebagai berikut:

- menderit	: 239 kk, 329 jiwa
- mengungsi	: 560 jiwa
- rumah rusak berat	: 36 unit
- rumah rusak sedang	: 71 unit
- rumah rusak ringan	: 420 unit
- tempat ibadah	: 9 unit
- kantor	: 2 unit

Terhadap kondisi capaian dan permasalahan isu infrastruktur, isu ketersediaan energi dan SDA lainnya serta isu tata ruang dan lingkungan tersebut (yang tercakup di dalam Bidang Infrastruktur), telah ditetapkan anggaran belanja langsung program di dalam RKPD 2010 sebesar **Rp. 196.616.570.300,00** dan terealisasi di dalam APBD 2010 sebesar **Rp. 170.197.784.170,00 (86,56%)**.

Realisasi anggaran tersebut lebih rendah (tidak mencapai 100%) dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan dalam RKPD, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Bandung serta intervensi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang tidak terlalu besar.

E. Bidang Sufrastuktur

Permasalahan pada bidang supratruktur dapat dilihat melalui kondisi berdasarkan isu kependudukan, isu kinerja pemerintahan serta isu nilai-nilai religius sesuai dengan dokumen RKPD 2010.

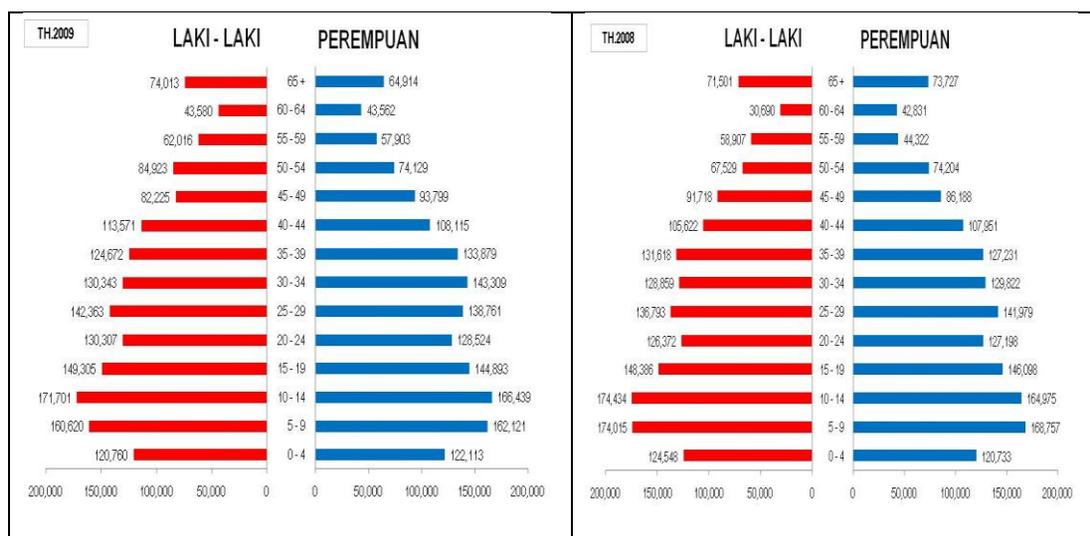
1. Kondisi Kependudukan

Tingkat pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi kesempatan dan akses terhadap pemenuhan kebutuhan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan tingginya kebutuhan hidup terhadap kesempatan kerja, fasilitas pelayanan umum yang harus disediakan seperti : akses pendidikan, kesehatan dan perdagangan/jasa dan ruang termasuk pemeliharaannya. Namun di lain pihak dapat menjadi potensi jika sumber daya manusia yang ada berkualitas. Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung sangat dipengaruhi oleh tingkat urbanisasi, hal ini disebabkan pada saat ini Bandung masih menjadi daya tarik bagi para pencari kerja dari luar wilayahnya.

Jumlah penduduk kabupaten Bandung Tahun 2009 mencapai 3.172.860 jiwa yang terdiri atas 1.590.399 jiwa laki-laki (50,13%) dan 1.582.461 jiwa perempuan (49,87%). Jika dibandingkan dengan Tahun 2008, pertumbuhan penduduk kabupaten Bandung sebesar 1,5% atau mengalami penurunan 1,4% dibanding dengan Tahun 2007 – 2008. Sedangkan luas wilayah kabupaten Bandung mencapai 1.762,39 km², sehingga rata – rata kepadatan penduduk mencapai 1.800 jiwa per kilometer persegi. Berikut adalah perkembangan penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin :

Gambar 2.6.

Proporsi penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2008 - 2009



Komposisi umur penduduk kabupaten Bandung termasuk ke dalam kelompok usia produktif, namun di sisi lain kelompok umur penduduk usia 65+ Tahun cenderung mengalami peningkatan sehingga memerlukan perhatian pemerintah.

Pada Tahun 2008 penduduk yang memiliki KTP sebanyak 1.524.005 jiwa dan meningkat menjadi 2.161.004 jiwa pada Tahun 2009, sedangkan jumlah penduduk yang berumur di atas 17 tahun/sudah menikah meningkat dari 2.419.056 jiwa pada Tahun 2008 menjadi 2.530.540 jiwa pada Tahun 2009.

Dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Bandung telah memandang penting tertib administrasi sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya. Untuk akte nikah, rasio pasangan berakte nikah sekitar 55% pada Tahun 2008 dan meningkat menjadi 62,57% pada Tahun 2009.

Jumlah bayi lahir berakte kelahiran pada Tahun 2008 berjumlah 21.571 jiwa, mengalami peningkatan menjadi 33.575 jiwa pada Tahun 2009 sedangkan jumlah total bayi lahir sebanyak 47.798 jiwa pada Tahun 2008 meningkat menjadi 52.619 jiwa pada Tahun 2009. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat telah meningkat mengenai pentingnya identitas diri melalui akte kelahiran. Kiranya diperlukan pelayanan khusus untuk masyarakat yang belum mendaftarkan kelahiran anaknya seperti upaya jemput bola melalui pelayanan secara *mobile* terutama untuk wilayah yang jaraknya jauh dari pusat pelayanan.

Yang cukup menggembirakan adalah tingkat kelahiran bayi di Kabupaten Bandung telah diimbangi dengan upaya untuk mempertahankan rata-rata jumlah anak per keluarga 1-2 anak pada Tahun 2009 begitupun tahun sebelumnya. Pada saat ini masyarakat Kabupaten Bandung telah memandang bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitasnya. Hal ini ditunjukkan dengan rasio akseptor KB 1 : 1 dengan jumlah akseptor KB mengikuti pertumbuhan penduduk yaitu 426.405 jiwa pada Tahun 2008 dan 473.550 jiwa pada Tahun 2009. Yang perlu diwaspadai adalah masih tumbuhnya jumlah penduduk usia subur yang mencapai 575.767 jiwa pada Tahun 2008 dan meningkat menjadi 600.609 jiwa pada Tahun 2009. Namun demikian penyerapan tenaga kerja mengalami kenaikan cukup tinggi dari 3.839 jiwa pada Tahun 2008 menjadi 6.926 jiwa pada 2009, walaupun tidak terlalu signifikan untuk memecahkan permasalahan pengangguran. Jumlah tenaga kerja/bekerja pada Tahun 2008 sebanyak 1.367.585 jiwa, kondisi ini meningkat menjadi 1.391.947 jiwa pada Tahun 2009. Untuk memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat secara merata, dipandang perlu untuk mempersiapkan program transmigrasi baik lokal maupun luar daerah.

Berdasarkan uraian kondisi capaian tersebut, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Belum adanya program pendataan secara pasti mengenai tingkat urbanisasi ke Kabupaten Bandung, karena pada umumnya migran mempunyai karakteristik tersendiri dan khas untuk diikutsertakan dalam program kegiatan pemerintah.
- Masih adanya masyarakat yang belum memiliki dokumen administrasi terutama KTP dan akte kelahiran, hal ini dapat diupayakan dengan penyederhanaan prosedur pemrosesan akte (misalkan secara *online*) dan mendekatkan pelayanan dengan menggunakan sarana mobilitas untuk masyarakat yang jauh dari pelayanan.

- Belum adanya program yang dapat mengantisipasi ledakan penduduk non produktif (di atas 65 Tahun) serta penanganan permasalahan yang akan timbul.

2. Kondisi Kinerja Pemerintahan

Pada saat ini, pelayanan pemerintah merupakan salah satu pusat perhatian masyarakat dalam mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel. Pemerintah merupakan sistem dan personal yang mampu melaksanakan pelayanan, merancang dan menegakan regulasi serta mengawasi jalannya pembangunan. Pelayanan pemerintah tercermin dari tanggapnya pemerintah dalam menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat, jalannya proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta komitmen terhadap penegakan hukum.

Pada tahap perencanaan, pada dasarnya proses pembangunan dipandang sebagai siklus yang terus berlangsung menuju arah yang diinginkan, sehingga proses pembangunan itu sendiri tidak terlepas dari proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi yang sangat membutuhkan rekaman data dan informasi selama proses tersebut berlangsung. Idealnya data yang digunakan untuk proses tersebut antara lain : dokumen SUSEDA, IPM, PDRB, Kabupaten Bandung Dalam Angka, IKM, Tabel input-output, ICOR, Masterplan dan *Budget Mapping* yang pernah disusun pada Tahun 2008. Proses perencanaan yang dilaksanakan juga tidak terlepas dari permasalahan aktual dan bersifat partisipatif dari objek yang akan dilakukan intervensi, yaitu melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dengan hasil tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada saat ini telah tersedia dokumen perencanaan daerah, meliputi : LKPJ 2009, RKPD 2010, KUA 2010 dan PPAS 2010.

Pelaksanaan Musrenbang tidak terlepas dari keikutsertaan pemerintah yang berada di wilayah yaitu : Pemerintah Kecamatan dan Desa. Pemerintah Kecamatan dan Desa mempersiapkan dan melaksanakan Musrenbang Desa/Kecamatan sampai pendelegasian untuk mengawal program dan kegiatan yang diusulkan.

Keberadaan Pemerintah Kecamatan dan Desa sangatlah penting karena merupakan pintu gerbang pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu setiap perencanaan dan pelaksanaan program yang menyangkut wilayah perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah bersangkutan. Selama ini telah dilaksanakan program-program dalam meningkatkan kapasitas aparatur di wilayah antara lain : Program UED SP, BKM

PNPM/UPK, pelaksanaan P2D dan beberapa program pemberdayaan desa lainnya. Pada pelaksanaan aktivitas program di wilayah memerlukan personil yang sesuai dan menyentuh langsung dengan masyarakat, seperti kader PKK untuk pemberdayaan perempuan baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten. Jumlah kader PKK pada Tahun 2009 mencapai 7.724 kader, jumlah ini mengalami peningkatan dibanding Tahun 2008 yang mencapai 7.477 kader.

Jika melihat kebutuhan masyarakat terhadap aparat pemerintah daerah dalam hal penegakan hukum atau keamanan, terdapat rasio jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yaitu 0,31 per 1000 penduduk, rasio jumlah Linmas 17,59 per 10000 penduduk, dan rasio Pos Kamling per Jumlah Desa yaitu 18,03 buah per desa/kel.

Pelayanan pemerintah yang ada di wilayah dapat dilihat dari perkembangan jumlah pengurus RT dan RW. RT dan RW sangat berperan terhadap pelayanan masyarakat. Pada Tahun 2008 jumlah RT dan RW masing-masing sebanyak 15.946 dan 3.965, jumlah ini meningkat menjadi 16.276 RT dan 4.157 RW pada Tahun 2009.

Berdasarkan uraian kondisi capaian tersebut, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Belum meratanya kualitas sumber daya manusia pada Pemerintahan, terutama pada unit kerja yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Sumber Penilaian masyarakat pada dasarnya terhadap aparat yang melayani dan berhadapan secara langsung pada masyarakat baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dalam rangka penyelenggaraan pelayanan prima, dan mungkin sebaiknya lembaga/instansi tersebut harus menempuh standar pelayanan secara internasional (ISO).
- Masih adanya pandangan negatif akan kinerja yang dilakukan pemerintah, hal ini terjadi karena adanya ketidakkonsistenan baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Selain itu belum adanya penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggar hukum.
- Belum adanya standar prosedur terpadu dalam menghadapi permasalahan yang mendesak seperti : bencana, ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Kondisi Nilai-nilai Religius

Terjadinya dekadensi moral atau penurunan budi pekerti (akhlakul karimah) di kalangan anak-anak dan kelompok pemuda, ditandai dengan maraknya penyalahgunaan narkoba, meningkatnya kriminalitas di kalangan remaja serta

meningkatnya jumlah anak jalanan dan anak terlantar. Hal ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya kualitas pendidikan, dengan meningkatnya angka putus sekolah maupun angka mengulang. Hal ini dapat disebabkan bahwa pendidikan budi pekerti pada pendidikan formal dalam aplikasinya masih bersifat kognitif belum kepada aspek (perilaku) dan praktik. Sementara itu, pendidikan non formal dan informal sebagai salah satu wahana untuk membina moral atau akhlak anak-anak dan remaja baik di rumah, di Mesjid/Pondok Pesantren maupun di tempat-tempat lainnya masih terbatas.

Untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya diperlukan upaya yang tepat terutama kepada generasi muda. Generasi muda mempunyai energi yang kuat yang dapat dimanfaatkan sebagai manusia yang produktif. Pada saat ini telah terbentuk organisasi kepemudaan sebanyak 459 organisasi, jumlah ini meningkat dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai 399 organisasi. Selain itu, sebagai wadah generasi muda untuk beraktivitas olahraga telah terbentuk klub olahraga dengan rasio 3,96 /10.000 penduduk, jumlah ini meningkat dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai rasio 1,95/10.000 penduduk. Organisasi pemuda lainnya yang terbentuk adalah organisasi olah raga yang saat ini berjumlah 804 organisasi.

Selanjutnya sebagai respon terhadap meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana olahraga, pada saat ini rasio gedung olahraga mencapai 1,2./10.000 penduduk pada Tahun 2009, rasio ini menurun dibandingkan Tahun sebelumnya yang mencapai rasio 1,129/10.000 penduduk. Pemerintah Kabupaten Bandung terus mengembangkan sarana dan prasarana olahraga sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya aktivitas masyarakat yang bersifat positif, terutama rencana pembangunan sarana strategis pada kawasan olahraga di Jalak Harupat. Saat ini pembebasan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga di kawasan Stadion di Jalak Harupat telah mencapai 54.862 m² pada Tahun 2009, luasan ini meningkat dibandingkan Tahun 2008 yang baru membebaskan 16.000 m². Total luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan sarana pada kawasan tersebut lk. 750 ha.

Selain itu, aktivitas generasi muda perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang mendorong peningkatan wawasan dan kemampuan yang bersifat naratif, seperti perpustakaan. Pada Tahun 2009 jumlah perpustakaan di Kabupaten Bandung mencapai 148 buah, jumlah ini meningkat dibandingkan Tahun sebelumnya yang mencapai 137 buah. Sebagai gambaran peningkatan keingintahuan masyarakat terhadap data dan informasi, pada Tahun 2009 tercatat jumlah pengunjung perpustakaan daerah sebanyak 10.738 orang, jumlah ini meningkat dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai 9.405 pengunjung.

Sebagai penunjang kebutuhan tersebut telah diupayakan peningkatan jumlah buku perpustakaan, yaitu dari 26.198 buku pada Tahun 2008 menjadi 29.089 buku pada Tahun 2009.

Nilai-nilai religius berkaitan pula dengan pelestarian budaya luhur dengan menjaga adat istiadat, bertumpu pada agama serta pesan yang disampaikan secara tersirat melalui seni dan budaya belum semuanya tergal. Pesan tersebut dapat berupa perjalanan sejarah suatu bangsa atau kondisi geografis sehingga dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan kata lain "pembangunan yang berwawasan lingkungan dan memperhitungkan kearifan budaya lokal". Pada saat ini baru diupayakan pelestarian budaya sunda sebanyak 8 jenis dari 235 jenis yang teridentifikasi. Pelestarian tersebut tidak terlepas dari sarana dan prasarana budaya yang mendukungnya seperti : kelompok-kelompok pelestari budaya yang dikemas dalam bentuk grup kesenian. Jumlah grup kesenian pada Tahun 2009 sebanyak 803 grup, jumlah ini meningkat dari Tahun sebelumnya yang mencapai 608 grup. Jumlah pelestarian/pemeliharaan benda budaya meningkat yaitu : rumah adat sebanyak 3 buah dan benda purbakala sebanyak 89 pada Tahun 2008, jumlah ini meningkat menjadi 196 buah benda purbakala dan 3 rumah adat pada Tahun 2009. Dari jumlah tersebut baru 55 buah benda purbakala yang dilestarikan.

Berdasarkan uraian kondisi capaian tersebut, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Semakin tingginya informasi dan kecenderungan penguasaan media oleh kelompok tertentu baik melalui siaran televisi, radio maupun internet perlu diwaspadai terutama terhadap batas-batas yang menghancurkan adat istiadat dan budaya.
- Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk semakin meningkat pula persaingan kebutuhan hidup dan ketimpangan sosial. Hal tersebut perlu diantisipasi melalui peningkatan kegiatan di bidang kerohanian, olahraga dan aktifitas lainnya bersifat positif.
- Belum adanya mekanisme dan prosedur penertiban yang dapat melindungi pelestarian budaya, norma serta adat istiadat.

Terhadap kondisi capaian dan permasalahan isu kependudukan, isu kinerja pemerintahan dan isu luntarnya nilai-nilai religius tersebut (yang tercakup di dalam Bidang Suprastruktur), telah ditetapkan anggaran belanja langsung program di dalam RKPD 2010 sebesar **Rp. 70.802.428.343,00** dan terealisasi di dalam APBD 2010 sebesar **Rp. 129.574.127.200,00 (183,01%)**.

Realisasi anggaran tersebut lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan dalam RKPD, hal ini disebabkan adanya peningkatan belanja pemilukada, penyelenggaraan Porda XI Jawa Barat, yang sebagian besar didanai dari Pemerintah Provinsi.

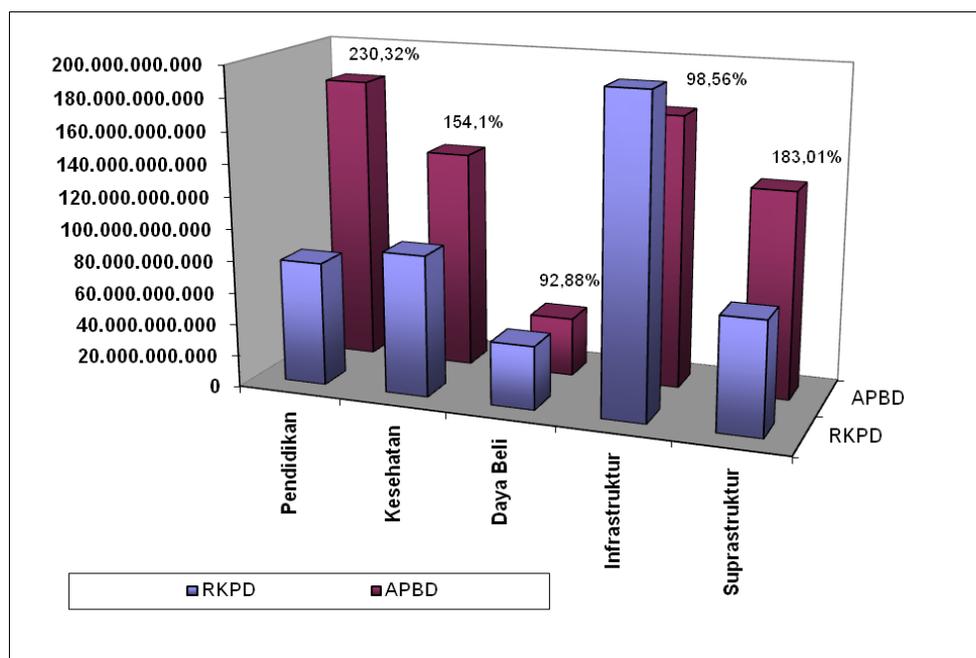
Berikut ini adalah rekapitulasi belanja langsung program yang ditetapkan dalam RKPD 2010 dan APBD 2010.

Tabel 2.5.
Proporsi Belanja Langsung Program Menurut Bidang
pada RKPD 2010 dan APBD 2010

No.	Bidang	Anggaran		% APBD 2010
		RKPD 2010	APBD 2010	
1.	Pendidikan	77.738.482.800	179.043.757.513,00	230,32
2.	Kesehatan	88.803.726.000	136.845.444.240,00	154,10
3.	Daya Beli	39.859.544.862	37.022.140.946,00	92,88
4.	Infrastruktur	196.616.570.300	170.197.784.170,00	86,56
5.	Suprastruktur	70.802.428.343	129.574.127.200,00	183,01
Jumlah		473.820.752.305	652.683.254.069,00	137,75

Sumber : RKPD 2010, APBD 2010 (hasil olahan).

Gambar 2.7.
Proporsi Belanja Langsung Program Menurut Bidang
pada RKPD 2010 dan APBD 2010



2.4 Isu Strategis Tahun 2011

Berdasarkan pada uraian sebelumnya terkait **Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah** dan **Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2010** serta pertimbangan lainnya terkait permasalahan strategis yang aktual dan faktual, maka dirumuskan **Isu Strategis** yang akan menjadi bahan kebijakan dalam perencanaan kegiatan Tahun 2011.

Isu strategis yang akan ditetapkan dalam RKPD 2011 tidak terlepas dari tema pembangunan nasional Tahun 2011 yaitu *"Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung oleh pematapan tata kelola dan sinergi pusat daerah"*, isu strategis provinsi serta isu strategis yang aktual dan faktual. Isu strategis provinsi 2011 meliputi :

1. Aksesibilitas dan Pelayanan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
3. Ketahanan Pangan Masyarakat;
4. Iklim Usaha dan Jaminan Investasi;
5. Permodalan dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
6. Kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan;
7. Kualitas pelayanan publik dan Keterbukaan Informasi;
8. Kualitas Lingkungan dan Penanganan Bencana;
9. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah;
10. Pemenuhan Kebutuhan Energi Berkelanjutan;
11. Peningkatan Desa Membangun Menuju Desa Peradaban;
12. Apresiasi dan Pengembangan Budaya Daerah serta menggali Potensi Wisata.

Berkaitan uraian tersebut di atas, maka ditetapkan isu strategis Kabupaten Bandung Tahun 2011, sebagai berikut :

1. Kualitas pelayanan birokrasi.
2. Rintisan wajib belajar 12 Tahun dan pengembangan pendidikan vokasional.
3. Aksesibilitas kualitas pelayanan kesehatan dan sarana prasarana kesehatan.
4. Masih tingginya angka kemiskinan dan penyandang masalah sosial
5. Kualitas pelayanan sarana prasarana dasar wilayah.
6. Aksesibilitas usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) terhadap sumber daya.
7. Kemampuan daya saing produk unggulan daerah.
8. Penanganan bencana dan kerusakan lingkungan.
9. Keterpaduan pembangunan daerah dan wilayah pedesaan.
10. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
11. Menjaga stabilitas ketahanan pangan

Untuk memahami isu strategis kabupaten Bandung Tahun 2011, berikut diuraikan beberapa penjelasannya :

1. Kualitas pelayanan birokrasi

Dalam arti luas pelayanan publik adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat umum yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Penyelenggara pelayanan publik dilakukan oleh institusi pemerintahan (birokrasi) yang meliputi pelayanan dasar (substansif) dan pelayanan administrasi. Pelayanan dasar menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, permukiman, perlindungan sosial, keamanan, dll. Sedangkan pelayanan administrasi menyangkut pelayanan pendataan sebagai konsekuensi dari status warga negara atau penduduk suatu wilayah/daerah seperti pelayanan KTP, perijinan usaha, kartu keluarga, administrasi kepemilikan aset (sertifikat tanah, kendaraan, dll).

Ukuran kualitas pelayanan birokrasi baik dasar dan administrasi dilakukan terhadap 3 (tiga) tingkatan yaitu: proses, keluaran(*output*) dan hasil (*outcomes*). Pengukuran pada tingkatan proses dilakukan pada setiap langkah atau aktivitas dalam proses, dengan tujuan mengidentifikasi perilaku yang mengatur setiap langkah/aktivitas proses, mengendalikan operasi dan memperkirakan *output* pelayanan yang dihasilkan.

Pengukuran output dilakukan dengan mengukur karakteristik yang diinginkan masyarakat pengguna jasa pelayanan baik dasar maupun administrasi. Kesesuaian output dengan keinginan masyarakat, tingkat efektivitas dan efisiensi produksi, kualitas dari produk serta lainnya.

Pengukuran pada tingkatan outcome merupakan tingkat tertinggi dalam pengukuran kualitas, dimana produk yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan serta sesuai dengan ekspektasi (harapan) pengguna.

Indikator-indikator pelayanan publik antara lain:

- a. *Tangibles* (kualitas fisik);
- b. *Reliability* (kemampuan dan keandalan)
- c. *Responsiveness* (cepat tanggap)
- d. *Assurance* (jaminan/kepercayaan)
- e. *Emphaty* (perhatian)

2. Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dan Pengembangan Pendidikan Vokasional.

Sektor pendidikan akan tetap menjadi isu utama sebagai salah satu tolok ukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan, terutama di bidang pendidikan dasar dan menengah. Upaya pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih

tinggi perlu terus dilakukan terutama di wilayah perdesaan yang merupakan sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung.

Dengan menitikberatkan sektor pendidikan pada program-program yang mendukung pelaksanaan wajib belajar pada tingkat dasar dan menengah (12 Tahun) diharapkan adanya kemajuan yang berarti sebagai percepatan dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas secara merata. Program-program tersebut harus konsisten dilaksanakan melalui pelaksanaan pendidikan yang murah, pemberian insentif bagi pendidik dan pelajar yang berprestasi serta pemberdayaan komite sekolah dalam ikut serta secara aktif menanggulangi permasalahan pendidikan di sekolah. Hal yang tak kalah pentingnya adalah pengembangan program orang tua asuh terutama bagi masyarakat miskin perdesaan dan kerjasama pihak swasta melalui CSR.

Dalam memenuhi pasar kerja yang sesuai dan mempunyai keahlian yang mampu mengembangkan karir secara mandiri di berbagai bidang industri, pertanian dan perdagangan/jasa perlu dikembangkan sekolah kejuruan dan/atau sekolah terpadu yang mengacu pada standar nasional dan internasional. Lulusannya diharapkan selain memenuhi permintaan pasar kerja yang sesuai dengan keahliannya juga mampu menciptakan lapangan kerja yang mempunyai peluang untuk dikembangkan.

3. Aksesibilitas Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan.

Seperti halnya pendidikan, sektor kesehatan tetap akan menjadi isu utama penentu keberhasilan pembangunan. Distribusi sarana dan prasarana maupun tenaga kesehatan harus terus ditingkatkan terutama dalam rangka menghadapi munculnya penyakit baru sebagai akibat mutasi dan perubahan iklim yang tidak menentu. Hal tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Di lain pihak, jaminan kesehatan masyarakat miskin perlu diimbangi dengan pola pemberdayaan, peningkatan pengetahuan kesehatan masyarakat dan kerjasama swasta, melalui program CSR dan sistem subsidi silang. Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat diarahkan kepada system yang lebih mencerminkan pada pelayanan prima secara adil dan merata.

4. Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial

Kemiskinan dapat menyebabkan kemampuan masyarakat berkurang secara drastis dalam mengakses pelayanan dasar. Kemiskinan mempunyai sifat menurun sehingga perlu memotong jalur regenerasi melalui kebijakan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak. Sistem pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan dari pola bantuan ke sistem perguliran yang bertanggung jawab. Lembaga mikro dengan ciri khas tersendiri perlu dikembangkan terutama pemberdayaan komunitas dan pemuda

dalam melakukan inovasi dan revitalisasi sistem keuangan mikro, sehingga dapat diterima dan diadaptasi secara mudah dan mandiri oleh masyarakat miskin dan tidak bermodal.

Pengembangan sistem pertanian terpadu di perdesaan dan industri kecil terpadu di perkotaan diharapkan mampu menjadi sistem yang dapat melindungi masyarakat lemah, dapat berbagi ilmu pengetahuan, dapat bekerjasama dalam melaksanakan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas usaha bersama, dalam rangka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

5. Kualitas Pelayanan Sarana Prasarana Dasar Wilayah.

Sarana dan prasarana dasar wilayah merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya tingkat keberhasilan pembangunan. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, penyediaan air baku serta air bersih merupakan kebutuhan yang dapat dirasakan manfaat dan akibatnya secara langsung oleh masyarakat.

Infrastruktur harus dapat menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya terutama perwujudan infrastruktur strategis dan sistem yang dapat diadopsi dalam rangka pemerataan pembangunan bidang infrastruktur. Pembangunan Jalan tol, jalan lingkar, jalan poros/penghubung utama diharapkan menjadi faktor yang dapat memecahkan permasalahan yang ada. Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk permukiman perlu terus ditingkatkan, demikian pula dalam penyediaan air baku. Selanjutnya, dalam pemenuhan kebutuhan perumahan perlu diarahkan kepada rumah vertikal atau rumah susun terutama bagi masyarakat di perkotaan atau masyarakat perbatasan dengan kota Bandung. Hal ini untuk mengantisipasi semakin berkurangnya ruang terbuka serta dalam rangka mempermudah intervensi program dan kegiatan pembangunan.

Di lain pihak, diperlukan peningkatan kemampuan pengendalian dan pengawasan pembangunan infrastruktur terutama melalui perizinan yang konsisten dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku baik pada tingkat pusat maupun daerah.

6. Aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Sumber Daya.

Pada dasarnya masyarakat non buruh lebih banyak berperan sebagai pelaku usaha baik usaha kecil, menengah maupun besar. Kemampuan usaha kecil dan menengah dalam menghadapi krisis perlu mendapat dorongan dan pengarahan terutama dalam meningkatkan kemampuan permodalan, inovasi, kreativitas usaha serta perluasan pasar melalui promosi. Pengembangan lembaga dan asosiasi usaha kecil menengah diharapkan mampu menjadi wadah untuk lebih mengembangkan dan saling tukar informasi, pengetahuan dalam rangka meningkatkan usaha dan permodalan.

Lembaga koperasi perlu dikembangkan dari segi kualitas, kuantitas dan kemampuan pemberdayaan anggotanya. Sistem koperasi memerlukan revitalisasi agar dapat menitikberatkan pada kemampuan pemberdayaan anggota, melalui peningkatan pengetahuan dan kesempatan anggota dalam menentukan kebijakan. Selanjutnya, koperasi akan lebih baik bila diarahkan polanya menjadi sistem bagi hasil. Lembaga mikro lainnya memerlukan pendampingan dan pengawasan terutama terkait dalam perlindungan usaha kecil dan menengah. Selain itu, perlu dikembangkan pula pola kemitraan dengan perusahaan besar melalui program kemitraan dan/atau program CSR dan peningkatan kemampuan pengetahuan usaha kecil dan menengah dalam mengakses pembiayaan melalui sistem perbankan.

7. Kemampuan Daya Saing Produk Unggulan Daerah.

Komunitas usaha kecil dan menengah perlu mendapat dorongan dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan daya saing pasar bebas dan persaingan global. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah : penerapan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas usaha, penerapan sistem kemasan, standarisasi produk serta sertifikasi secara kolektif.

Diversifikasi produk dan penciptaan produk unggulan melalui penciptaan industri kreatif diharapkan dapat menjadi pendorong iklim usaha yang tahan terhadap krisis global.

8. Kerusakan Lingkungan dan Penanganan Bencana

Rusaknya lingkungan akibat bencana alam merupakan polemik yang tidak bisa dihindarkan. Dalam mengatasi hal tersebut, diperlukan perubahan pola berfikir dan bertindak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, yaitu dengan mengacu pada pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya dilakukan pada mekanisme kinerja pemerintahan, tetapi harus dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat melalui penegakan hukum.

Penanganan permasalahan pencemaran, baik pencemaran udara, pencemaran air maupun pencemaran tanah/padat perlu ditingkatkan, melalui peningkatan intensitas pengendalian dan pengawasan. Pencemaran merupakan akibat dari aktivitas manusia yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kepentingan umum, sehingga perlu menerapkan sanksi dan retribusi terhadap setiap kegiatan yang menghasilkan pencemaran termasuk limbah domestik.

Penerapan retribusi dapat dilakukan pada penanganan limbah domestik melalui pembangunan septick tank komunal. Masyarakat harus mulai belajar mengenai hak dan kewajibannya terhadap kepentingan umum. Namun demikian, efektivitas kegiatan tersebut akan sangat bergantung pada pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat perdesaan.

Upaya mendorong dan mengembangkan pola 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) pada penanganan persampahan perlu terus ditingkatkan dalam rangka mengurangi volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Penerapan teknologi tepat guna persampahan yang murah dan efisien perlu dikembangkan terutama pengomposan dan proses menghasilkan energi baru, dengan mengoperasikan kembali dan mengoptimalkan fungsi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui prinsip kerjasama saling menguntungkan baik dengan pihak swasta maupun masyarakat.

Sebagai wilayah yang rawan bencana, baik bencana banjir, longsor/gerakan tanah dan gempa, perlu dilakukan penyusunan prosedur, tahapan mitigasi serta penanganan bencana yang sederhana/mudah diterapkan sesuai dengan pengalaman selama ini. Upaya menghindari bencana lebih mudah dilakukan dan lebih murah dibandingkan setelah terjadi bencana. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain : menghindari pembangunan di daerah rawan bencana serta menindak pelaku pelanggaran, menghindari aktivitas budidaya pada daerah yang dapat daerah miring, bantaran sungai serta melindungi kawasan di bawahnya (kawasan lindung). Upaya-upaya tersebut harus bersinergi dengan program pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi di wilayah bencana sehingga dapat menghindari aktivitas pembangunan di daerah bencana tersebut.

9. Keterpaduan Pembangunan Daerah dan Wilayah Perdesaan.

Sebagai daerah yang mayoritas wilayahnya perdesaan, tumpuan pembangunan diarahkan pada wilayah tersebut. Adanya fenomena sistem informasi dan teknologi serta angkutan yang semakin murah dan mudah diharapkan mampu menjadi katalisator perwujudan masyarakat perdesaan yang maju dan mandiri dengan mengembangkan potensi yang sesuai dengan daerahnya. Dengan konsep OVOP (*One Village One Product*), setiap daerah mempunyai ciri khas usaha dan produk yang dapat menggali potensi wilayahnya baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Perwujudan tersebut akan mengurangi beban dan kewajiban wilayah perkotaan dalam menyediakan sistem pelayanan. Oleh karena itu hal yang menjadi prioritas pembangunan di wilayah perdesaan adalah pembangunan dan pemeliharaan akses terhadap pusat-pusat kegiatan perdesaan serta peningkatan sistem pembangunan pertanian secara terpadu yang meliputi usaha kecil dan menengah.

Perkuatan dan pengembangan kelembagaan desa harus mampu menampung aspirasi positif untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan secara mandiri.

10. Menjaga Stabilitas Keamanan dan ketertiban Masyarakat.

Penyelenggaraan pemilu pada periode 2011–2015 yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2010, memberikan dampak terhadap interaksi kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Dinamika antar pendukung para calon pasangan kepala daerah dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat.

Guna mengantisipasi kemungkinan tersebut terjadi, pemerintah berkewajiban untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta melindungi segenap masyarakat sebagaimana amanat peraturan perundang–undangan yang ada. Kegagalan pemerintah daerah untuk mengantisipasi konflik horizontal dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

11. Menjaga stabilitas ketahanan pangan

Kemampuan kabupaten Bandung untuk menyediakan tanaman pangan khususnya padi masih terbukti mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Dengan luas areal pertanian yang mencapai 48,6% dari luas wilayah kabupaten Bandung, hal ini ditunjukkan oleh pasokan beras yang mencapai 50 – 70 ton per hari ke Jakarta. Komoditas lain yang dipasok kabupaten Bandung ke luar wilayah antara lain: sayuran, susu sapi segar, benih ikan air tawar, produk perkebunan teh.

Potensi yang dimiliki oleh kabupaten Bandung di sektor pertanian perlu terus dikembangkan di masa mendatang. Peluang maupun tantangan terhadap penyediaan pangan, terutama diarahkan pada pemenuhan konsumsi minimal/standar untuk beberapa jenis komoditas terutama; daging, telur, ikan maupun susu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat baik yang bersumber dari nabati maupun hewani, sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia kabupaten Bandung.

Agenda pembangunan kemandirian pangan dilakukan pada pengembangan diversifikasi usaha pertanian yang lebih luas (bukan hanya padi), peningkatan konsumsi protein (hewani maupun nabati) per kapita, laju pertumbuhan produksi pertanian dengan jumlah penduduk, perlindungan konsumen terhadap hasil – hasil pertanian, serta meningkatnya alih fungsi luas lahan pertanian.

Tabel 2.6
Matriks Hubungan Isu Strategis
Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung

Nasional 2011	Prov. Jawa Barat 2011	RKPD Kab. Bandung 2011
Reformasi birokrasi dan tata kelola	Kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi	Kualitas pelayanan birokrasi
Pendidikan	Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan, pemuda dan olahraga	Rintisan wajib belajar 12 Tahun dan pengembangan pendidikan vokasional
Kesehatan	Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan	Aksesibilitas kualitas pelayanan kesehatan dan sarana prasarana kesehatan
Penanggulangan kemiskinan	Kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan	Masih tingginya angka kemiskinan
Ketahanan pangan	Ketahanan pangan masyarakat	Menjaga stabilitas kemandirian pangan
Infrastruktur	Ketersediaan dan infrastruktur wilayah	Kualitas pelayanan sarana prasarana dasar wilayah
Iklim investasi dan Iklim Usaha	Iklim usaha dan jaminan investasi	-
	Permodalan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Aksesibilitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap sumber daya Kemampuan daya saing produk unggulan daerah
Energi	Pemenuhan kebutuhan energi berkelanjutan	-
Lingkungan dan Pengelolaan Bencana	Kualitas lingkungan dan penanganan bencana	Kerusakan lingkungan dan penanganan bencana
Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik	Peningkatan desa membangun menuju desa peradaban	Pembangunan wilayah perdesaan
Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi	Apresiasi dan pengembangan budaya daerah serta menggali potensi wisata	-
Bidang polhukam	-	Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
Bidang perekonomian	-	-
Bidang kesejahteraan rakyat	-	-

Memperhatikan keterkaitan hubungan antar isu strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten memberi gambaran bahwa terdapat beberapa agenda bersama yang harus diselesaikan melalui program kegiatan pembangunan di Tahun 2011. Dalam rangka penyelesaian isu strategis tersebut, masing – masing tingkatan pemerintahan (nasional, provinsi dan kabupaten) dalam mengalokasikan anggaran.

Tabel 2.7
Kondisi dan Permasalahan Isu Strategis Tahun 2010

No.	Bidang/Kondisi berdasarkan isu RKPd 2010	Tolok Ukur	Kondisi		Keterangan / Permasalahan	Sumber Data
			2008	2009		
A.	BIDANG PENDIDIKAN					
1.	Pendidikan	a. IPM	72.5	73.39	IPM meningkat 0,89 point.	BPS Kab. Bandung, IPM Tahun 2008, 2009.
		- Indeks Pendidikan	85.58	85.61	Indeks pendidikan meningkat 0,0,3 point.	BPS Kab. Bandung, IPM Tahun 2008, 2009.
		- Indeks Kesehatan	72.36	73.23	Indeks kesehatan meningkat 0,87 point.	BPS Kab. Bandung, IPM Tahun 2008, 2009.
		- Indeks Daya Beli (PPP)	59.55	61.31	Indeks daya beli meningkat 1,76 point.	BPS Kab. Bandung, IPM Tahun 2008, 2009.
		b. RLS	8.86	8.87	RLS meningkat 0,01 point.	BPS Kab. Bandung, IPM Tahun 2008, 2009.
		c. AMH	98.84	98.87	AMH meningkat 0,03 point.	BPS Kab. Bandung, IPM Tahun 2008, 2009.
		d. Tingkat Partisipasi Sekolah :				BPS Kab. Bandung, IPM Tahun 2008, 2009.
		APK :				BPS Kab. Bandung, IPM Tahun 2008, 2009.
		- SD/MI	96.18	105.69	APK SD/MI meningkat 9,51 %.	BPS Kab. Bandung, IPM Tahun 2008, 2009.
		- SMP/MTs	80.06	88.2	APK SMP/MTs. meningkat 8,14 %.	BPS Kab. Bandung, IPM Tahun 2008, 2009.
		- SMA/SMK/MA	40.79	59.61	APK SMA/SMK/MA meningkat 18,82 %.	BPS Kab. Bandung, IPM Tahun 2008, 2009.
		- PT	13.59	8.24	APK PT menurun 5,35 %.	BPS Kab. Bandung, IPM Tahun 2008, 2009.
		APM :				BPS Kab. Bandung, IPM Tahun 2008, 2009.
		- SD/MI	85.54	93.17	APM SD/MI meningkat 7,63 %.	BPS Kab. Bandung, IPM Tahun 2008, 2009.
		- SMP/MTs	64.97	72.63	APM SMP/MTs. meningkat 7,66 %.	BPS Kab. Bandung, IPM Tahun 2008, 2009.
		- SMA/SMK/MA	34.41	43.27	APM SMA/SMK/MA meningkat 8,86 %.	BPS Kab. Bandung, IPM Tahun 2008, 2009.
		- PT	1.49	6.2	APM PT meningkat 4,71 %.	BPS Kab. Bandung, IPM Tahun 2008, 2009.
		e. Penduduk Usia 10 Tahun ke atas berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan :				
		- Jumlah penduduk tdk/blm punya Ijazah	438,454	395,523	Penduduk usia 10 Tahun ke atas yang tidak/belum punya ijazah menurun 9,79 %.	BPS Kab. Bandung, Suseda Tahun 2008, 2009.

No.	Bidang/Kondisi berdasarkan isu RKPD 2010	Tolok Ukur	Kondisi		Keterangan / Permasalahan	Sumber Data
			2008	2009		
		- Jumlah penduduk tamat SD/MI	942,228	925,106	Penduduk usia 10 Tahun ke atas yang tamat SD/MI menurun 1,82 %.	BPS Kab. Bandung, Suseda Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah penduduk tamat SMP/MTs.	610,161	654,167	Penduduk usia 10 Tahun ke atas yang tamat SMP/MTs meningkat 7,21 %.	BPS Kab. Bandung, Suseda Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah penduduk tamat SMA/MA/SMK	463,128	520,453	Penduduk usia 10 Tahun ke atas yang tamat SMA/MA/SMK meningkat 12,38 %.	BPS Kab. Bandung, Suseda Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah penduduk tamat PTN/PTS	84,984	111,997	Penduduk usia 10 Tahun ke atas yang tamat PTN/PTS meningkat 31,79 %.	BPS Kab. Bandung, Suseda Tahun 2008, 2009.
		Jumlah	2,538,955	2,607,246	Penduduk usia 10 Tahun ke atas yang tidak/belum punya ijazah + tamat sekolah meningkat 2,69 %.	BPS Kab. Bandung, Suseda Tahun 2008, 2009.
		f. Prosentase Jumlah Kelulusan Murid :				
		1) Prosentase Murid SD/MI yang lulus terhadap Jumlah Murid SD/MI Kelas VI	95.42	96.47	Jumlah murid SD/MI kelas VI yang lulus meningkat 1,05 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah murid SD/MI lulus	55,096	55,220		Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah murid SD/MI kelas VI	57,743	57,241		Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		2) Prosentase Murid SMP/MTs. yang lulus terhadap Jumlah Murid SMP/MTs Kelas III	86.53	95.93	Jumlah murid SMP/MTs. kelas III yang lulus meningkat 9,4 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah murid SMP/MTs lulus	37,490	42,550		Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah murid SMP/MTs. Kelas III	43,328	44,357		Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		3) Prosentase Murid SMA/MA/SMK yang lulus terhadap Jumlah Murid SMA/MS/MK Kelas III	84.40	86.06	Jumlah murid SMA/MA/SMK kelas III yang lulus meningkat 1,66 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah murid SMA/MA/SMK lulus	16,495	17,271		Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah murid SMA/MA/SMK kelas III	19,544	20,068		Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		g. Ketersediaan Ruang Kelas (kondisi baik + rsk ringan) terhadap Jumlah Rombel :				Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		1) Ketersediaan ruang kelas SD/MI terhadap jumlah Rombel SD/MI	1 : 1,54	1 : 1,58	Ketersediaan ruang kelas SD/MI terhadap jumlah Rombel SD/MI menurun.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah ruang kelas SD/MI	7,606	7,242	Jumlah ruang kelas SD/MI menurun 4,79 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.

No.	Bidang/Kondisi berdasarkan isu RKPD 2010	Tolok Ukur	Kondisi		Keterangan / Permasalahan	Sumber Data
			2008	2009		
		- Jumlah rombel SD/MI	11,724	11,474	Jumlah rombel SD/MI menurun 2,13 %	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		2) Ketersediaan ruang kelas SMP/MTs terhadap jumlah Rombel SMP/MTs.	1 : 1,07	1 : 1,01	Ketersediaan ruang kelas SMP/MTs terhadap jumlah Rombel SMP/MTs. meningkat.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah ruang kelas SMP/MTs	3,173	3,718	Jumlah ruang kelas SMP/MTs meningkat 17,18 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah rombel SMP/MTs	3,389	3,763	Jumlah rombel SMP/MTs meningkat 11,04 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		3) Ketersediaan ruang kelas SMA/MA/SMK terhadap jumlah Rombel SMP/ sederajat	1 : 1,14	1 : 1,2	Ketersediaan ruang kelas SMA/MA/SMK terhadap jumlah Rombel SMP/ sederajat menurun.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah ruang kelas SMA/MA/SMK	1,607	1,743	Jumlah ruang kelas SMA/MA/SMK meningkat 8,46 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah rombel SMA/MA/SMK	1,837	2,093	Jumlah rombel SMA/MA/SMK meningkat 13,94 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		f. Ketersediaan Guru terhadap Murid :				Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		1) Ketersediaan Guru SD/MI terhadap murid SD/MI :	1 : 26,6	1 : 25,7	Ketersediaan Guru SD/MI terhadap murid SD/MI meningkat.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah guru tetap SD/MI	9,479	9,479		Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah guru tidak tetap SD/MI	5,680	6,457	Jumlah guru tidak tetap SD/MI meningkat 13,68 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah guru tetap + tidak tetap SD/MI	15,159	15,936	Jumlah guru tetap + tidak tetap SD/MI meningkat 5,13 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah murid SD/MI	403,247	410,245	Jumlah murid SD/MI meningkat 1,74 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		2) Ketersediaan Guru SMP/MTs terhadap murid SMP/MTs :	1 : 14,63	1 : 14,34	Ketersediaan Guru SMP/MTs terhadap murid SMP/MTs meningkat.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah guru tetap SMP/MTs	2,956	2,569	Jumlah guru tetap SMP/MTs menurun 13,09 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah guru tidak tetap SMP/MTs	6,837	7,434	Jumlah guru tidak tetap SMP/MTs meningkat 8,73 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah guru tidak tetap + guru tetap SMP/MTs	9,793	10,003	Jumlah guru tidak tetap + guru tetap SMP/MTs meningkat 2,14 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah murid SMP/MTs	143,328	143,411	Jumlah murid SMP/MTs meningkat 0,06 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.

No.	Bidang/Kondisi berdasarkan isu RKPd 2010	Tolok Ukur	Kondisi		Keterangan / Permasalahan	Sumber Data
			2008	2009		
		3) Ketersediaan Guru SMA/MA/SMK terhadap murid SMA/MA/SMK :	1 : 10,55	1 : 10,01	Ketersediaan Guru SMA/MA/SMK terhadap murid SMA/MA/SMK meningkat.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah guru tetap SMA/MA/SMK	1,288	1,255	Jumlah guru tetap SMA/MA/SMK menurun 2,56 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah guru tidak tetap SMA/MA/SMK	5,109	5,715	Jumlah guru tidak tetap SMA/MA/SMK meningkat 11,86 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah guru tetap + tidak tetap SMA/MA/SMK	6,397	6,970	Jumlah guru tetap + tidak tetap SMA/MA/SMK meningkat 8,96 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Jumlah murid SMK/MA/SMK	67,476	69,799	Jumlah murid SMK/MA/SMK meningkat 3,44 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		g. Prosentase Guru Berpendidikan Sarjana Keguruan dan non Keguruan :				Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		1) Prosentase guru SD/MI Keguruan (tetap + tidak tetap)	89.85	87.95	Prosentase guru SD/MI berpendidikan Keguruan (tetap + tidak tetap) terhadap total jumlah guru menurun 1,91 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Keguruan	13,621	14,015	Jumlah guru SD/MI berpendidikan keguruan meningkat 2,89 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Non Keguruan	1,538	1,921	Jumlah guru SD/MI berpendidikan non keguruan meningkat 24,90 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Keguruan + Non Keguruan	15,159	15,936	Jumlah guru SD/MI berpendidikan keguruan + non keguruan meningkat 5,13 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		2) Prosentase guru SMP/MTs Keguruan (tetap + tidak tetap)	88.87	89.33	Prosentase guru SMP/MTs berpendidikan Keguruan (tetap + tidak tetap) terhadap total jumlah guru meningkat 0,46 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Keguruan	8,703	8,936	Jumlah guru SMP/MTs berpendidikan keguruan meningkat 2,68 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Non Keguruan	1,090	1,067	Jumlah guru SMP/MTs berpendidikan non keguruan menurun 2,11 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Keguruan + Non Keguruan	9,793	10,003	Jumlah guru SMP/MTs berpendidikan keguruan + non keguruan meningkat 2,14 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.

No.	Bidang/Kondisi berdasarkan isu RKPD 2010	Tolok Ukur	Kondisi		Keterangan / Permasalahan	Sumber Data
			2008	2009		
		3) Prosentase guru SMA/MA/SMK (tetap + tidak tetap)	87.87	86.59	Prosentase guru SMA/MA/SMK berpendidikan Keguruan (tetap + tidak tetap) terhadap total jumlah guru menurun 1,28 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Keguruan	5,621	6,035	Jumlah guru SMA/MA/SMK berpendidikan keguruan meningkat 7,37 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Non Keguruan	776	935	Jumlah guru SMA/MA/SMK berpendidikan non keguruan meningkat 20,49 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
		- Keguruan + Non Keguruan	6,397	6,970	Jumlah guru SMA/MA/SMK berpendidikan keguruan + non keguruan meningkat 8,96 %.	Disdikbud Kab Bandung, Statistik Pendidikan, Tahun 2008, 2009.
2.	Ketenagakerjaan	a. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) --- %	52.00	52.48	TPAK meningkat 0,48 %.	BPS Kab. Bandung, IPM 2008, 2009.
		1) TPAK Perempuan (%)	26.06	27.46	TPAK Perempuan meningkat 1,4 %.	BPS Kab. Bandung, IPM 2008, 2009.
		2) TPAK Laki-laki (%)	78.77	76.32	TPAK laki-laki menurun 2,45 %.	BPS Kab. Bandung, IPM 2008, 2009.
		b. Kesempatan kerja (%)	86.81	87.49	Kesempatan kerja meningkat 0,68 %.	BPS Kab. Bandung, IPM 2008, 2009.
		c. Tingkat pengangguran terbuka (%)	13.13	12.51	Tingkat pengangguran terbuka menurun 0,62 %.	BPS Kab. Bandung, IPM 2008, 2009.
		d. Penyerapan tenaga kerja :				
		1) Sektor pertanian (%)	20.66	21.87	Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian meningkat 1,21 %.	BPS Kab. Bandung, IPM 2008, 2009.
		2) Sektor industri (%)	2.27	29.87	Penyerapan tenaga kerja sektor industri meningkat 27,6 %.	BPS Kab. Bandung, IPM 2008, 2009.
		3) Sektor perdagangan (%)	19.51	18.75	Penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan menurun 0,76 %.	BPS Kab. Bandung, IPM 2008, 2009.
		4) Sektor jasa (%)	10.21	12.49	Penyerapan tenaga kerja sektor jasa meningkat 2,28 %.	BPS Kab. Bandung, IPM 2008, 2009.
		5) Sektor lainnya	22.54	17.02	Penyerapan tenaga kerja sektor lainnya menurun 5,52 %.	BPS Kab. Bandung, IPM 2008, 2009.
B.	BIDANG KESEHATAN					
1.	Kesehatan	a. AHH	68.42	68.94	AHH meningkat 0,52 point.	BPS Kab. Bandung, IPM 2008, 2009.
		b. AKB	37.36	36.02	AKB menurun 3,59 persen.	BPS Kab. Bandung, IPM 2008, 2009.

No.	Bidang/Kondisi berdasarkan isu RKPD 2010	Tolok Ukur	Kondisi		Keterangan / Permasalahan	Sumber Data
			2008	2009		
		c. Ketersediaan obat pelayanan kesehatan dasar	69 %	95 %	Ketersediaan obat pelayanan kesehatan dasar meningkat 26 %.	Dinas Kesehatan Kab. Bandung, Profil Kesehatan 2008, 2009.
		d. Angka kematian ibu maternal	41	41		Dinas Kesehatan Kab. Bandung, Profil Kesehatan 2008, 2009.
		e. Sarana kesehatan :				
		1) Rumah sakit	8	8		Dinas Kesehatan Kab. Bandung, Profil Kesehatan 2008, 2009.
		2) Puskesmas	61	61		Dinas Kesehatan Kab. Bandung, Profil Kesehatan 2008, 2009.
		f. Persentase penolong terakhir kelahiran balita :				
		1) Dokter	4.98	5.94	Persentase penolong terakhir kelahiran balita oleh dokter meningkat 0,96 %.	BPS Kab. Bandung, Suseda 2008, 2009.
		2) Bidan	60.54	59.01	Persentase penolong terakhir kelahiran balita oleh bidan menurun 1,53 %.	BPS Kab. Bandung, Suseda 2008, 2009.
		3) Tenaga medis lain	0.63	0.45	Persentase penolong terakhir kelahiran balita oleh tenaga medis lain menurun 0,18 %.	BPS Kab. Bandung, Suseda 2008, 2009.
		4) Dukun	31.86	34.43	Persentase penolong terakhir kelahiran balita oleh dukun meningkat 2,57 %.	BPS Kab. Bandung, Suseda 2008, 2009.
		5) Famili dan lainnya	1.99	0.17	Persentase penolong terakhir kelahiran balita oleh famili dan lainnya menurun 1,82 %.	BPS Kab. Bandung, Suseda 2008, 2009.
		g. Persentase balita mendapat ASI :				
		1) 1-5 bulan	8.00	8.61	Jumlah Balita mendapat ASI selama 1-5 bulan meningkat 0,61 %.	BPS Kab. Bandung, Suseda 2008, 2009.
		2) 6-11 bulan	8.31	8.41	Jumlah Balita mendapat ASI selama 6-11 bulan meningkat 0,10 %.	BPS Kab. Bandung, Suseda 2008, 2009.
		3) 12-17 bulan	26.33	19.47	Jumlah Balita mendapat ASI selama 12-17 bulan menurun 6,86 %.	BPS Kab. Bandung, Suseda 2008, 2009.
		4) 18-23 bulan	21.14	20.65	Jumlah Balita mendapat ASI selama 18-23 bulan menurun 0,49 %.	BPS Kab. Bandung, Suseda 2008, 2009.
		5) > 24 bulan	36.22	42.86	Jumlah Balita mendapat ASI selama > 24 bulan meningkat 6,64 %.	BPS Kab. Bandung, Suseda 2008, 2009.

No.	Bidang/Kondisi berdasarkan isu RKP 2010	Tolok Ukur	Kondisi		Keterangan / Permasalahan	Sumber Data
			2008	2009		
C.	BIDANG DAYA BELI					
1.	Kemiskinan	a. Jumlah Penduduk Miskin	185.064 kk	186.631 kk	Jumlah penduduk miskin meningkat	BPS Kab. Bandung
		b. Bantuan beras subsidi pada keluarga miskin	189.723 kk	186.631 kk	bantuan berkurang	BPS/BKPPP Kab. Bandung
		c. Jumlah keluarga miskin per wilayah - terendah tertinggi	terendah Margahayu (2.440kk) tertinggi Ciparay (13.419 kk)	terendah Margahayu (2.191kk) tertinggi Ciparay (13.484 kk)	Jumlah keluarga miskin pd kecamatan yang tertinggi meningkat sedangkan pd kecamatan yang terendah menurun	BPS/BKPPP Kab. Bandung
		d. Bimbingan sosial dan keterampilan bagi keluarga miskin	30 Orang	40 orang	jumlah yang mendapatkan binsos/pelatihan bertambah	LKPJ Bupati Bandung, 2009
		e. Keterampilan bagi ibu rumah tangga keluarga miskin (p2wkss)	90 orang	100 orang	Jumlah keluarga miskin yang terampil meningkat	LKPJ Bupati Bandung, 2009
		f. Bantuan operasional manajemen mutu-bagi siswa sma/smk miskin		7.552siswa	siswa miskin mendapatkan bantuan operasional meningkat	LKPJ Bupati Bandung, 2009
		g. Perawatan bagi masyarakat miskin	5.101 orang	4.392 orang	Perawatan bagi masyarakat miskin menurun	LKPJ Bupati Bandung, 2009
		h. Penanggulangan kemiskinan perkotaan (p2kp)	10 kecamatan	20 kec	Kecamatan Penanggulangan kemiskinan perkotaan (p2kp) meningkat	LKPJ Bupati Bandung, 2009
		i. Aset PPK utk masyarakat miskin	4 kecamatan	11 kecamatan	aset ppk utk masyarakat miskin meningkat	LKPJ Bupati Bandung, 2009
2.	Ketahanan Pangan	a. Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pertanian	Laju pertumbuhan 3,97% dan kontribusi 7,13%	LPE 5,4% dan kontribusi 7,36%	Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pertanian meningkat	PDRB semesteran Kab Bandung Tahun 2008
		1) <i>Tingkat produksi bahan pangan protein hewani dan hasil ternak dan ikan</i>			produksi bahan pangan protein hewani, hasil ternak dan perikanan rata-rata meningkat	Disnakkab Kab. Bandung
		- Produksi daging (ton)	39.275.392 ton	40.912.117 ton		
		- Produksi telur (ton)	5.881.985 ton	7.128.159 ton		
		- Produksi susu (ton)	57.171.658 ton	59.534.141 ton		
		2) <i>Tingkat hasil Produksi Pertanian Unggulan</i>			Tingkat produksi pertanian unggulan rata-rata meningkat	Distanhutbun Kab. Bandung
		-Padi	414.589 ton	473.749 ton		
		-Jagung	41.589 ton	50.849 ton		
		-Kentang	119.042 ton	140.973 ton		
		- Alpukat	20.599 ton	52.804 ton		
		-Rambutan	3.031 ton	5.706 ton		
		-Teh	36.790 ton	36.850 ton		
		-Kopi	607 ton	4.218 ton		

No.	Bidang/Kondisi berdasarkan isu RKPD 2010	Tolok Ukur	Kondisi		Keterangan / Permasalahan	Sumber Data
			2008	2009		
		-Cengkeh	77 ton	91 ton		
		3) <i>Angka konsumsi RT per kapita</i>			Angka konsumsi RT per kapita rata-rata meningkat	Disnakkan Kab. Bandung
		- Konsumsi daging (Kg/kap/thn)	9,485	9,488		
		- Konsumsi telur (Kg/kap/thn)	1,738	2,084		
		- Konsumsi susu (Kg/kap/thn)	8,377	8,619		
		4) Cakupan sistem penyuluhan : Pola Kemitraan Pelaku Agribisnis	6 Kecamatan	6 Kecamatan	kondisi tetap	
		5) <i>Tingkat Perkembangan budidaya perikanan</i>			Tingkat Perkembangan budidaya perikanan rata-rata meningkat	Disnakkan Kab. Bandung
		- Produksi ikan	7.336,68 ton	7.718,9 ton		
		- Produksi Benih ikan	932.258 Ribu ekor	1.000.706 ton		
		-Konsumsi Ikan	18,10 Kg/Kap/Thn	18,73 Kg/Kap/Thn		
		6) Ketersediaan sistem penyuluhan perikanan	4 orang Penyuluh Perikanan	4 orang Penyuluh Perikanan	Ketersediaan sistem penyuluhan perikanan tetap (kurang)	Disnakkan Kab. Bandung
		7) Tingkat pengelolaan produksi perikanan - produksi olahan ikan	5.600 ton	8.974,5 ton	Tingkat pengelolaan produksi perikanan - produksi olahan ikan meningkat	Disnakkan Kab. Bandung
		8) Tingkat pemasaran produksi perikanan	Pemasaran di Jawa Barat dan DKI	Pemasaran di Jawa Barat dan DKI	Tingkat pemasaran produksi perikanan masih tetap	Disnakkan Kab. Bandung
		9) Tingkat perkembangan kawasan budidaya air tawar	Adanya alih fungsi kawasan budidaya perikanan	Adanya alih fungsi kawasan budidaya perikanan	Tingkat perkembangan kawasan budidaya air tawar masih memprihatinkan	Disnakkan Kab. Bandung
		10) Cakupan penetapan kawasan hutan dalam tata ruang	Luas Hutan Rakyat 8.770,54 Ha	Luas Hutan Rakyat 8.770,54 Ha	Cakupan penetapan kawasan hutan dalam tata ruang dengan kondisi tetap	Disnakkan Kab. Bandung
			Luas Hutan Negara 76.604 Ha	Luas Hutan Negara 76.604 Ha		
		11) Persentase Koperasi aktif	49%	49%	kondisi tetap	Data Diskoperindag Kab. Bandung, 2008,2009
		12) Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perdagangan	LPE 6,07% dan kontribusi 15,69%	LPE 7,23 dan kontribusi 16,56%	Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perdagangan meningkat	PDRB Semesteran BPS Kab Bandung 2008,2009
		13) Ketersediaan program perlindungan konsumen	Terlaksananya Kegiatan Perlindungan Konsumen Pembinaan terhadap LPKSM di Kecamatan Soreang	70 UMKM	Kegiatan perlindungan konsumen meningkat	DISKOPERINDAG Kab. Bandung, 2008, 2009
		14) Promosi Perdagangan	4 event Pameran di Jakarta, Kota Bandung dan di Kabupaten Bandung	4 event (Hut Kab. Bandung, Indovest Expo 2009, WJIE/West Java Internasional Expo,	Promosi Perdagangan tetap terlaksana	DISKOPERINDAG Kab. Bandung, 2008,2009

No.	Bidang/Kondisi berdasarkan isu RKPD 2010	Tolok Ukur	Kondisi		Keterangan / Permasalahan	Sumber Data
			2008	2009		
				Temu Bisnis)		
		15) Prasarana Perdagangan	Pasar Tipe A: 8	Pasar Tipe A: 8	kondisi tetap	DISKOPERINDAG Kab. Bandung, 2008, 2009
			Pasar Tipe B: 7	Pasar Tipe B: 7		
			Pasar Tipe C: 6	Pasar Tipe C: 6		
			Pasar Desa: 41	Pasar Desa: 41		
		16) Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perindustrian	LPE: 5.5 ADH: 60,80	LPE: 3.38 ADH: 60	Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perindustrian menurun	PDRB Semesteran Kab. Bandung, Tahun 2008, 2009
		17) Tingkat kapasitas iptek sistem produksi	IKRT Kulit, IKRT Logam, IKRT Kayu, IKRT Gabah/Keramik, IKRT Anyaman, IKRT Kain/tenun, IKRT Mamin	IKRT Kulit, IKRT Logam, IKRT Kayu, IKRT Gabah/Keramik, IKRT Anyaman, IKRT Kain/tenun, IKRT Mamin	kondisi tetap	Data Diskoperindag Kab. Bandung Tahun 2007 dan 2008
		18) Tingkat penerapan standardisasi produk industri	2 Kecamatan (Baleendah dan Soreang)	2 Kecamatan (Baleendah dan Soreang)	kondisi tetap	Data Diskoperindag Kab. Bandung Tahun 2007 dan 2008
		19) Laju pertumbuhan industri kecil dan menengah	Industri Kecil : 345		Laju pertumbuhan industri kecil dan menengah menurun/meningkat	Data Diskoperindag Kab. Bandung Tahun 2007 dan 2008
			Industri Menengah: 249			
			Industri Besar : 194			
		20) Tingkat Pelayanan Perijinan sektor industri	Industri Kecil:			KBDA Kab. Bandung Tahun 2007
			Industri Menengah: 56			
			Industri Besar : 31			
		21) Ketersediaan sentra-sentra industri potensial	IKRT Kulit, IKRT Logam, IKRT Kayu, IKRT Gabah/Keramik, IKRT Anyaman, IKRT Kain/tenun, IKRT Mamin	IKRT Kulit, IKRT Logam, IKRT Kayu, IKRT Gabah/Keramik, IKRT Anyaman, IKRT Kain/tenun, IKRT Mamin	kondisi tetap	Diskoperindag Kab. Bandung 2008
E.	BIDANG INFRASTRUKTUR					
1.	Infrastruktur	a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	23,71%	32.71%	Panjang Jalan Kab. Mantap (Baik & Sedang) meningkat	Laport Dinas Bina Marga Kab. Bandung, 2008, 2009

No.	Bidang/Kondisi berdasarkan isu RKPD 2010	Tolok Ukur	Kondisi		Keterangan / Permasalahan	Sumber Data
			2008	2009		
		b. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi Sedang	38,18%	19.84%	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi Sedang turun	Laptah Dinas Bina Marga Kab. Bandung 2008, 2009
		c. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi Rusak	36,09%	27.67%	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi Rusak turun	Laptah Dinas Bina Marga Kab. Bandung 2008, 2009
		d. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi Rusak Berat	2%	19.80%	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi Rusak Berat naik	Laptah Dinas Bina Marga Kab. Bandung 2008, 2009
		e. Perencanaan Pembangunan Jalan	2 buah (DED Jalan Lingkar Timur Soreang dan DED Ruas Jalan Ciparay-Majalaya)	2 buah (strack out trace jalan Katapang- stadion dan strack out trace jalan akses jalan Tol Cincin – Parung Serab – Al- Fathu	kondisi tetap	Laptah Dinas Bina Marga Kab. Bandung 2008, 2009
		f. Perencanaan Pembangunan Jembatan	4 buah Dokumen Perencanaan Jembatan	4 ruas jalan : Penyusu-nan Laporan Penye-lidikan tanah Pemb. Jemb. Citi-is, DED : Pemb. Fly Over Sa-dang. Pemb. Jemb Citiis & Pemb. Jemb Leuwi gudang	kondisi tetap	Laptah Dinas Bina Marga Kab. Bandung 2008, 2009
		g. Pembangunan Jalan	4,75 Km (Jalan Lingkar Luar Selatan Soreang dan jalan lingkar majalaya)	1 ruas jalan 378 m : Jl. TKI-Pameantasan (Margaasih) 378 x 14 m.	Pembangunan Jalan Menurun	Laptah Dinas Bina Marga Kab. Bandung 2008, 2009
		h. Pembangunan Jembatan	6 buah jembatan	2 Buah : Pemb. Jemb. Pameantasan, Jemb. Ciririp,	Pembangunan Jembatan menurun	Laptah Dinas Bina Marga Kab. Bandung 2008, 2009
		i. Rehabilitasi Jembatan	21 buah jembatan	1.Rehab/Pemel = 51 Buah 2.Pemel Rutin = 56 Paket	Rehabilitasi Jembatan meningkat	Laptah Dinas Bina Marga Kab. Bandung 2008, 2009
		j. Pembebasan lahan utk Jalan	7 ha untuk 4 ruas jalan	Kegiatan Pembebasan lahan untuk jalan : Pembangunan Jalan: untuk jalan Tol Seroja, Pengukur-an bidang penyuluh-an/ sosiali-sasi	Pembebasan lahan utk Jalan berkurang	Laptah Dinas Bina Marga Kab. Bandung 2008, 2009

No.	Bidang/Kondisi berdasarkan isu RKPD 2010	Tolok Ukur	Kondisi		Keterangan / Permasalahan	Sumber Data
			2008	2009		
		g. Pembangunan Saluran Drainase Jalan	Di 8 lokasi	14 ruas jalan sepanjang 6.494,56 m	Pembangunan Saluran Drainase Jalan meningkat	Laptah Dinas Bina Marga Kab. Bandung 2008, 2009
		h. Pembangunan Talud / Turap / Bronjong	Di 74 lokasi dengan volume 7.425 m ³	51 ruas jalan sepanjang 6241,25 m ³	Pembangunan Talud / Turap / Bronjong menurun	Laptah Dinas Bina Marga Kab. Bandung 2008, 2009
		i. Pemeliharaan rutin jalan	231,52 km (53 ruas jalan)	281.300 m	Pemeliharaan rutin jalan meningkat	Laptah Dinas Bina Marga Kab. Bandung 2008, 2009
		j. Peningkatan Jalan	296,18 km (212 ruas jalan)	48.231 m	Peningkatan Jalan menurun	Laptah Dinas Bina Marga Kab. Bandung 2008, 2009
		k. Pemeliharaan Periodik	3,3 km (8 ruas jalan)	10.135 m	Pemeliharaan Periodik meningkat	Laptah Dinas Bina Marga Kab. Bandung 2008, 2009
		l. Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	10 ruas jalan		Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat menurun	Laptah Dinas Bina Marga Kab. Bandung 2008, 2009
		m. Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	3 buah jembatan		Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat menurun	Laptah Dinas Bina Marga Kab. Bandung 2008, 2009
		n. Kualitas pengelolaan Daerah Irigasi Pertanian	21 P3A dan 1 GP3A	21 P3A dan 1 GP3A	kondisi tetap	Laptah Dinas Bina Marga Kab. Bandung 2008, 2009
		o. Rasio jaringan irigasi	21,17%	21,17%	kondisi tetap	
		p. Cakupan luas lahan pertanian beririgasi (Daerah Irigasi):				Distanbunhut Kab. Bandung
		- Leuwikuray	- 640,1 Ha	- 640,1 Ha	kondisi tetap	
		- Cipajaran	- 60 Ha	- 60 Ha	kondisi tetap	
		- Situ Kuluwung	- 286 Ha	- 286 Ha	kondisi tetap	
		- Kiaraeunyeuh	- 230,2 Ha	- 230,2 Ha	kondisi tetap	
		- Juntihilir	- 191,5 Ha	- 191,5 Ha	kondisi tetap	
		- Cisabuk	- 180 Ha	- 180 Ha	kondisi tetap	
		- Cikalong	- 150 Ha	- 150 Ha	kondisi tetap	
		- Citarik	- 200 Ha	- 200 Ha	kondisi tetap	
		- Loajogo	- 155 Ha	- 155 Ha	kondisi tetap	
		- Ciranjang	- 205 Ha	- 205 Ha	kondisi tetap	
		- Cibodas	- 258 Ha	- 258 Ha	kondisi tetap	
		- Gunungkarung	- 150 Ha	- 150 Ha	kondisi tetap	
		q. Jumlah uji kir angkutan	50%	50%	kondisi tetap	Dishub Kab. Bandung
		r. Jumlah halte	12	12	kondisi tetap	
		s. Jumlah terminal	13	13	kondisi tetap	
		t. Prosentase Rumah Tidak Layak Huni yang sudah direhab	878 unit 141 desa 26 kecamatan.	616 unit di 114 Desa / 26 Kec	Prosentase Rumah Tidak Layak Huni yang sudah direhab meningkat/menurun	LKPJ Bupati Bandung 2008, 2009

No.	Bidang/Kondisi berdasarkan isu RKPD 2010	Tolok Ukur	Kondisi		Keterangan / Permasalahan	Sumber Data
			2008	2009		
		u. Persentase penduduk berakses air minum :				
		Air Kemasan	1.99%	18.54%	Penggunaan Air Kemasan untuk air minum meningkat	SUSEDA 2008, 2009
		Leding	9.46%	7.00%	Penggunaan Leding untuk air minum menurun	
		Pompa	4.34%	22.04%	Penggunaan Pompa untuk air minum meningkat	
		Sumur Terlindung	0.64%	30.08%	Penggunaan Sumur Terlindung untuk air minum meningkat	
		Sumur Tak Terlindung	20.55%	2.67%	Penggunaan Sumur Tak Terlindung untuk air minum menurun	
		Mata Air Terlindung	40.46%	16.38%	Penggunaan Mata Air Terlindung untuk air minum menurun	
		Mata Air Tak Terlindung	4.50%	2.97%	Penggunaan Mata Air Tak Terlindung untuk air minum menurun	
		Air Sungai	13.83%	0.03%	Penggunaan Air Sungai untuk air minum menurun	
		Air Hujan	2.49%	0.14%	Penggunaan Air Hujan untuk air minum menurun	
		Lainnya	1.73%	0.16%	Lainnya untuk air minum menurun	
		v. Persentase rumah tinggal bersanitasi :				
		- Menggunakan fasilitas sendiri	64.69%	70.82%	Sanitasi Menggunakan fasilitas sendiri meningkat	SUSEDA 2008, 2009
		- Bersama	19.69%	16.86%	Penggunaan fasilitas sanitasi Bersama menurun	
		- Umum	13.91%	10.78%	Penggunaan fasilitas sanitasi Umum menurun	
		- Tidak menggunakan fasilitas sebesar	1.71%	1,53%.	Tidak menggunakan fasilitas sebesar menurun	
		w. Tempat pemakaman umum per satuan penduduk	5%	5%	kondisi tetap	Dispertasih Kab. Bandung
		x. Ketersediaan RDTR	2 dokumen 0 perda RDTR	4 dokumen 0 perda RDTR	Rasio Ketersediaan RDTR Meningkat/menurun	Dispertasih Kab. Bandung
2.	Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	a. Penggunaan lahan (existing) :			kondisi tetap	BPN Kab. Bandung
		-Kawasan lindung	59.889,881 ha	59.889,881 ha		

No.	Bidang/Kondisi berdasarkan isu RKPD 2010	Tolok Ukur	Kondisi		Keterangan / Permasalahan	Sumber Data
			2008	2009		
		-Kawasan budidaya	115.649,769 ha	115.649,769 ha		
		-Kawasan lainnya	699,018 ha	699,018 ha		
		b. Tingkat kelengkapan rencana tata ruang	Perda No.3 Tahun 2008 tentang RTRW Kab.Bandung Tahun 2007-2027	tidak ada	Tidak ada dokumen operasional dalam penyelenggaraan penataan ruang	
		c. Tingkat kelengkapan rencana wilayah cepat tumbuh	tidak ada	tidak ada	tidak ada tindak lanjut hasil penyusunan dokumen agropolitan yg bersifat operasional	
		d. Tingkat penanganan wilayah strategis :	tidak ada	tidak ada	tidak ada tindak lanjut hasil penyusunan dokumen rtrw yg bersifat operasional untuk wilayah strategis	
		e. Beban Sungai Citarum:				
		BOD :		9.309,8 kg/hari	Kondisi tetap jauh di atas ambang batas	BPLH Kab. Bandung 2009
		- penduduk		125,080kg/hari		
		-peternakan		31.899 kg/hari		
		-pertanian		182.538 kg/hari		
		-industri		10.543 kg/hari		
		COD :				
		-penduduk		146.684 kg/hari		
		-peternakan		65.715 kg/hari		
		-pertanian		456.340 kg/hari		
		-industri		31.768 kg/hari		
		N :				
		-penduduk		6.097 kg/hari		
		-peternakan		330 kg/hari		
		-pertanian		15.766 kg/hari		
		-industri		136 kg/hari		
		P :				
		-penduduk		656,7 kg/hari		
		-pertanian		7.883 kg/hari		
		f. Prosentase Timbulan Sampah yang terangkut	8.30%	8.30%	Prosentase Timbulan Sampah yang terangkut meningkat/menurun	Dispertasih Kab. Bandung

No.	Bidang/Kondisi berdasarkan isu RKPD 2010	Tolok Ukur	Kondisi		Keterangan / Permasalahan	Sumber Data
			2008	2009		
		g. Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	32%	32%		Dispertasih Kab. Bandung
		h. Persentase penanganan sampah	15,4 %	15,4 %		Dispertasih Kab. Bandung
		i. Kerugian akibat Bencana :				
		1) Banjir				
		- menderita		61.392 kk, 182.567 jiwa	terjadi peningkatan intensitas Banjir	Bag. Sosial Setda Kab. Bandung
		- mengungsi		9.353 kk, 26.423 jiwa		
		- rumah rusak berat		319 unit		
		- rumah rusak sedang		67 unit		
		- rumah rusak ringan		1635 unit		
		- rumah terancam		761 unit		
		- bangunan terendam		48.228 unit		
		- sekolah		101 unit		
		- tempat ibadah		207 unit		
		- kantor		81 unit		
		- pabrik		21 unit		
		- sawah		764 ha		
		- darat		59 ha		
		- jalan		2.227 m		
		2) Longsor				
		- menderita		13 kk, 140 jiwa	terjadi peningkatan intensitas Longsor	Bag. Sosial Setda Kab. Bandung
		- meninggal		44 orang		
		- luka		4 orang		
		- dirawat		4 orang		
		- dalam pencarian		11 orang		
		- mengungsi		1.013 jiwa		
		- rumah rusak berat		53 unit		
		- rumah rusak sedang		1 unit		
		- rumah rusak ringan		33 unit		
		- rumah terancam		370 unit		
		- tempat ibadah		2 unit		
		- pabrik		2 unit		
		- gedung		3 unit		
		- sawah		50 ha		

No.	Bidang/Kondisi berdasarkan isu RKPD 2010	Tolok Ukur	Kondisi		Keterangan / Permasalahan	Sumber Data
			2008	2009		
		- Jalan		576 m		
		3) Angin Putting Beliung				
		- menderita		239 kk, 329 jiwa	terjadi peningkatan intensitas Angin Putting Beliung	Bag. Sosial Setda Kab. Bandung
		- mengungsi		560 jiwa		
		- rumah rusak berat		36 unit		
		- rumah rusak sedang		71 unit		
		- rumah rusak ringan		420 unit		
		- tempat ibadah		9 unit		
		- kantor		2 unit		
		4) Gempa				
		- menderita		51.714 KK, 196.551 jiwa	terjadi peningkatan intensitas gempa	Bag. Sosial Setda Kab. Bandung
		- meninggal		24 jiwa		
		- luka		681 jiwa		
		- dirawat		-		
		- dalam pencarian		-		
		- mengungsi		75.805 jiwa		
		- rumah rusak berat		10.527 unit		
		- rumah rusak sedang		13.453 unit		
		- rumah rusak ringan		27.734 unit		
		- rumah terancam		400 unit		
		- tempat ibadah		447 unit		
		- pasar & fasilitas ekonomi lain		302 unit		
		- gedung pemerintahan		46 unit		
		- sekolah		964 lokal		
		- Jalan		-		
3.	Ketersediaan Energi dan SDA lainnya	a. Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor listrik, gas	LPE: 4,79	LPE 5,43%	Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor listrik, gas meningkat	PDRB Tahun 2007
		b. Ketersediaan regulasi untuk pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Perda No.8 Tahun 2003 dan Perbup No 18 Tahun 2005	Perda No.8 Tahun 2003 dan Perbup No 18 Tahun 2005	kondisi tetap	Dinas SDAPE Kab. Bandung

No.	Bidang/Kondisi berdasarkan isu RKPD 2010	Tolok Ukur	Kondisi		Keterangan / Permasalahan	Sumber Data
			2008	2009		
		c. Ketersediaan sistem pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Terdapat kegiatan untuk pembinaan dan pengawasan 18 Perusahaan Pertambangan	Terdapat kegiatan untuk pembinaan dan pengawasan 18 Perusahaan Pertambangan	kondisi tetap	Dinas SDAPE Kab. Bandung
		d. Ketersediaan Pembangkit Listrik	PLTA:	PLTA:	kondisi tetap	Dinas SDAPE Kab. Bandung
			-Kec. Cimaung (Cikalong)	-Kec. Cimaung (Cikalong)		
			-Kec. Pangalengan (Kamojang dan Pulosari).	-Kec. Pangalengan (Kamojang dan Pulosari).		
			PLTP:	PLTP:		
			-Kec. Pangalengan (Wayang Windu)	-Kec. Pangalengan (Wayang Windu)		
			-Kec. Ibum (Kamojang)	-Kec. Ibum (Kamojang)		
E.	BIDANG SUPRASTRUKTUR					
1.	Kependudukan	a. Jumlah penduduk ber-KTP	1.524.005 jiwa	2.161.004 jiwa	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (- Jumlah penduduk ber-KTP, - Jumlah penduduk wajib ber-KTP) meningkat/menurun	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, Tahun 2007 dan 2008
		b. Jumlah penduduk > 17 / sdh menikah	2.419.056 jiwa	2.530.540 jiwa	Jumlah penduduk > 17 / sdh menikah meningkat	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, Tahun 2007 dan 2008
		c. Jumlah bayi lahir berakte kelahiran	21.571 jiwa	33.575 jiwa	Jumlah bayi lahir berakte kelahiran meningkat	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, Tahun 2007 dan 2008
		d. Jumlah total bayi lahir	47.798 jiwa	52.619 jiwa	Jumlah total bayi lahir meningkat	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, Tahun 2007 dan 2008
		e. Rasio pasangan berakte nikah	55%	62,57%.	Rasio pasangan berakte nikah meningkat	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, Tahun 2007 dan 2008
		f. Rata-rata jumlah anak per keluarga	1-2 anak	1-2 anak	kondisi tetap	BKBPP Kab. Bandung Tahun 2007 dan 2008
		g. Rasio akseptor KB	1:1	1:1	Rasio akseptor KB meningkat/menurun	BKBPP Kab. Bandung Tahun 2007 dan 2009
		h. Jumlah akseptor KB	426.405 jiwa	473.550 jiwa	Jumlah akseptor KB meningkat	BKBPP Kab. Bandung Tahun 2007 dan 2010

No.	Bidang/Kondisi berdasarkan isu RKPD 2010	Tolok Ukur	Kondisi		Keterangan / Permasalahan	Sumber Data
			2008	2009		
		i. Jumlah penduduk usia subur	575.767 jiwa	600.609 jiwa	Jumlah penduduk usia subur meningkat	BKBPP Kab. Bandung Tahun 2007 dan 2011
		j. Penyerapan tenaga kerja	3.839 jiwa	6.926 jiwa	Penyerapan tenaga kerja meningkat	
		k. Jumlah tenaga kerja/bekerja	1.367.585 jiwa	1.391.947 jiwa	Jumlah tenaga kerja/bekerja meningkat	LKPJ Bupati Bandung Tahun 2008
		l. Ketersediaan program penyuluhan bagi transmigrasi lokal/regional	1 Bulan 2 kali	1 Bulan 2 kali	Ketersediaan program penyuluhan bagi transmigrasi lokal/regional meningkat/menurun	Disnakertrans Tahun 2007 dan 2008
2.	Kinerja Pemerintahan	a. Tingkat perkembangan jumlah obyek pariwisata	49%	49%	kondisi tetap	Data potensi Pariwisata Tahun 2008
		b. Tingkat perkembangan kerjasama/kemitraan pemasaran pariwisata	Kerjasama Pariwisata dengan Indonesia Power, Perhutani dan PTPN	Kerjasama Pariwisata dengan Indonesia Power, Perhutani dan PTPN	kondisi tetap	Data potensi Pariwisata Tahun 2007 dan 2008
		c. Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	17	17	kondisi tetap	Data BPMP Tahun 2008
		d. Rasio Jumlah Satpol PP	0,31 per 1000 penduduk	0,31 per 1000 penduduk	kondisi tetap	
		e. Rasio jumlah Linmas	17,59 10000 penduduk	17,59 10000 penduduk	kondisi tetap	
		f. Rasio Pos Kamling per Jumlah Desa	18,03 buah per desa/kel	18,03 buah per desa/kel	kondisi tetap	
		g. Jumlah Desa	267	267	kondisi tetap	
		h. Jumlah Kecamatan	31	31	kondisi tetap	
		i. Jumlah RT dan RW	15946 RT 3.965 RW	16276 RT 4157 RW	Jumlah RT dan RW meningkat	
		j. Ketersediaan data	Suseda, IPM, Gini Rasio, PDRB, KBDA, ICOR, Tabel Input Output	Suseda, IPM, PDRB, KBDA.	Jumlah dokumen data perencanaan berkurang	
		k. Data Arsip Statis	383 Jenis di 5 SKPD	383 Jenis di 5 SKPD	kondisi tetap	
		l. System Kearsipan aktif	14 SKPD, 15 Kecamatan, 3 Kelurahan	14 SKPD, 15 Kecamatan, 3 Kelurahan	kondisi tetap	
		m. Fungsional Arsiparis	30 Orang	23 orang	jumlah fungsional arsiparis berkurang	LKPJ 2008, 2009
		n. Jumlah jaringan komunikasi (provider)	10 perangkat wireless, 7 ring backbone	10 perangkat wireless, 7 ring backbone	kondisi tetap	Dinas Perhubungan Kab. Bandung 2007
		o. Radio publik lokal	1	1	kondisi tetap	

No.	Bidang/Kondisi berdasarkan isu RKPD 2010	Tolok Ukur	Kondisi		Keterangan / Permasalahan	Sumber Data
			2008	2009		
		p. Ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan	Tersedianya dokumen SUSEDA, IPM, PDRB, Kabupaten Bandung Dalam Angka 2008, Tabel input-output, ICOR, Masterplan pendidikan dan Budget mapping	Tersedianya dokumen SUSEDA, IPM, PDRB, Kabupaten Bandung Dalam Angka 2009	Jumlah dokumen perencanaan berkurang	
		q. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah	Terlaksananya Musrenbang tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dengan hasil tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2009	Terlaksananya Musrenbang tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dengan hasil tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2010	kondisi tetap	
		r. Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan daerah	Dokumen: LKPJ 2007, RKPD 2009, KUA 2009, PPAS 2009	Dokumen: LKPJ 2008, RKPD 2010, KUA 2010, PPAS 2010	kondisi tetap	
		s. Jumlah kader PKK	7.477 kader	7.724 kader	kondisi tetap	
			· UED SP	· UED SP		
			· BKM PNPMP/UPK	· BKM PNPMP/UPK		
		t. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	· Terlaksananya MUSRENBANGDES di setiap desa	· Terlaksananya MUSRENBANGDES di setiap desa	Kondisi tetap	
			· Terlaksananya P2D di setiap desa dan adanya swadaya masyarakat.	· Terlaksananya P2D di setiap desa dan adanya swadaya masyarakat.		
3.	Nilai-nilai Religius	a. Jumlah pelestarian budaya sunda	8 dari 325 jenis	8 dari 325 jenis	kondisi tetap	LKPJ Bupati Bandung Tahun 2008
		b. Jumlah grup kesenian	608	803	Jumlah grup kesenian meningkat	LKPJ Bupati Bandung Tahun 2008
		c. jumlah pelestarian/pemeliharaan benda budaya	rumah ada 3 benda purbakala 89, belum ada yg dilestarikan	55 buah dari 196 buah benda purbakala dan 3 rumah adat	jumlah pelestarian/pemeliharaan benda budaya meningkat	LKPJ Bupati Bandung Tahun 2008
		d. Jumlah organisasi pemuda	399	459	Jumlah organisasi pemuda meningkat	LKPJ Bupati Bandung Tahun 2008

No.	Bidang/Kondisi berdasarkan isu RKPD 2010	Tolok Ukur	Kondisi		Keterangan / Permasalahan	Sumber Data
			2008	2009		
		e. Rasio Jumlah Klub Olahraga	1,95 /10.000 penduduk	3,96 /10.000 penduduk	Rasio Klub Olahraga meningkat	LKPJ Bupati Bandung Tahun 2008
		f. Jumlah organisasi olah raga	631	804	Jumlah organisasi olah raga meningkat	LKPJBupati Bandung Tahun 2008, 2009
		g. Rasio Jumlah gedung olahraga	1,129/10.000 penduduk	1,2./10.000 penduduk	Rasio Jumlah gedung olahraga menurun	LKPJBupati Bandung Tahun 2008, 2009
		h. Pembebasan lahan untuk Pembangunan sarana olahraga/jalak harapat	16.000 m2	54.862 m2	Pembebasan lahan untuk Pembangunan sarana olahraga/jalak harapatmeningkat	LKPJBupati Bandung Tahun 2008, 2009
		i. Jumlah perpustakaan	137	148	Jumlah perpustakaan meningkat	LKPJBupati Bandung Tahun 2008, 2009
		j. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah perTahun	9.405 orang	10.738 orang	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah perTahun meningkat	LKPJBupati Bandung Tahun 2008, 2009
		k. Jumlah Buku	26.198 buku	29.089 buku	Jumlah Buku perpustakaan meningkat	LKPJBupati Bandung Tahun 2008, 2009

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kondisi Perekonomian Daerah Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 serta Perkiraan Tahun 2011

PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2008 menurut harga berlaku sebesar Rp. 38,29 trilyun, pada Tahun 2009 meningkat sebesar Rp. 2,65 trilyun menjadi Rp. 40,94 trilyun, dan pada tahun 2010 diperkirakan meningkat sebesar Rp. 2,25 trilyun menjadi Rp. 43,19 trilyun sedangkan pada tahun 2011 diproyeksikan akan menjadi Rp. 45,78 trilyun. Sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan pada tahun 2008 sebesar Rp.19,67 trilyun, pada tahun 2009 meningkat sebesar Rp. 0,86 trilyun menjadi Rp. 20,53 trilyun, dan tahun 2010 diperkirakan akan meningkat sebesar Rp. 1,13 trilyun menjadi Rp 21,66 trilyun, sedangkan pada tahun 2011 diproyeksikan akan menjadi Rp. 22,96 trilyun.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung tahun 2008 mencapai 5,30 %, pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar -0,95 poin menjadi sebesar 4,35 %. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang rupiah, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja hampir pada seluruh sektor PDRB. Namun dengan membaiknya pemulihan ekonomi global maka proyeksi kenaikan LPE pada tahun 2010 akan mengalami kenaikan sebesar 5,50% dan pada tahun 2011 akan naik kembali sebesar 6,00%. Kenaikan LPE per sektor tahun 2009 tidak sebesar tahun 2008, yang mengalami kenaikan berkisar 3,38 – 7,23%. Kenaikan tertinggi terutama di sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, pertambangan dan galian serta pertanian. Melihat fakta yang ada, sumbangsih sektor – sektor tersier dan primer cenderung meningkat sehingga berpeluang bagi daerah untuk terus dikembangkan.

Tingkat inflasi di Kabupaten Bandung tahun 2009 relatif kecil, yaitu mencapai 2,49 %, lebih rendah bila dibandingkan inflasi tahun 2008 sebesar 9,11%. Hal ini menunjukkan bahwa dampak krisis global yang melanda di Indonesia relatif stabil. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar AS cenderung stabil selama tahun 2009 yaitu berada pada kisaran Rp.10.000 – 9.400 per dollar, walaupun pada awal tahun 2009 pernah berada pada kisaran Rp.11.980 per dollar. Membaiknya perekonomian dunia berpengaruh pada Indonesia tahun 2010, sehingga perkiraan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada pada kisaran Rp.10.000 – 9.500 dan terus membaik hingga pada tahun 2011 sebesar Rp.9.200 per dollar AS.

Tingkat suku bunga BI yang dipatok pada angka 6 – 6,5% per 3 bulan serta harga minyak mentah sebesar \$80,-/barel turut memberikan pengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi di daerah. Secara nasional target inflasi dipatok pada angka 5,3%. Instrumen-instrumen fiskal yang ditetapkan secara nasional tersebut akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan kecenderungan pada tahun 2011 memberikan gambaran positif bagi daerah.

Secara umum terdapat empat kelompok barang yang mempunyai peran yang besar terhadap tingkat harga (*inflasi*) yaitu :

- a. Komoditi yang berpengaruh dalam penentuan tingkat upah (*wage*) seperti beras.
- b. Komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah seperti bahan bakar minyak, tarif listrik dan beberapa jasa publik.
- c. Barang-barang yang tergolong *traded goods* di mana harganya ditentukan melalui keseimbangan di pasar global. Sebagian barang-barang tersebut dikenakan tata niaga baik dalam bentuk hambatan tarif maupun nontarif.
- d. Barang-barang yang tergolong *non traded goods* yang harganya merupakan keseimbangan permintaan dan penawaran.

Peran pemerintah daerah untuk mengurangi dampak dari inflasi antara lain melalui operasi Pasar (terutama sembako), subsidi/bantuan kepada masyarakat miskin, perbaikan distribusi dan peningkatan kapasitas produksi.

Tabel 3.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2008 – 2009

SEKTOR	TAHUN	
	2008 (Juta Rp.)	2009 (Juta Rp.)
1. PERTANIAN	1.424.992,98	1.502.003,49
1.1 Tanaman Bahan makanan	1.002.083,66	1.057.171,63
1.2 Perkebunan	217.140,10	228.775,99
1.3 Peternakan	164.117,38	172.980,14
1.4 Kehutanan	6.813,63	7.072,11
1.5 Perikanan	34.838,21	36.003,62
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	255.888,74	269.782,12
2.1 Minyak dan Gas Bumi	217.684,68	230.164,12
2.2 Pertambangan Tanpa Migas	-	-
2.3 Penggalian	38.204,05	39.617,99
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	12.110.396,65	12.519.327,64
3.1 Industri Migas	2,00	4,00
3.2 Industri Tanpa Migas	12.110.396,65	12.519.327,64
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	361.439,39	376.034,30
4.1 Listrik	351.196,77	365.540,66
4.2 Gas Kota	-	-
4.3 Air Bersih	10.242,62	10.493,64
5. BANGUNAN/KONTRUKSI	339.547,08	355.614,56

SEKTOR	TAHUN	
	2008 (Juta Rp.)	2009 (Juta Rp.)
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	2.994.763,36	3.211.263,99
6.1 Perdagangan Besar & Eceran	2.480.600,77	2.675.061,64
6.2 Hotel	2.888,40	3.040,38
6.3 Restoran	511.274,19	533.161,98
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	795.218,85	843.661,61
7.1 Pengangkutan	666.442,58	705.071,89
7.1.1 Angkutan Rel	7.282,91	7.145,57
7.1.2 Angkutan Jalan Raya	579.677,86	612.171,99
7.1.3 Angkutan laut	-	-
7.1.4 Angkutan Sungai & Penyebrangan	-	-
7.1.5 Angkutan Udara	-	-
7.1.6 Jasa Penunjang Angkutan	79.481,80	85.754,32
7.2 Komunikasi	128.776,27	138.589,71
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	436.277,90	451.138,21
8.1 Bank	69.435,37	71.571,50
8.2 Lembaga Keuangan lainnya	16.215,39	17.117,03
8.3 Sewa Bangunan	273.035,70	281.601,97
8.4 Jasa perusahaan	77.591,43	80.847,71
9. JASA – JASA	955.207,67	1.000.817,32
9.1 Pemerintahan Umum	483.667,34	512.082,80
9.2 Swasta	471.540,33	488.734,52
9.2.1 Jasa sosial kemasyarakatan	122.954,98	130.604,00
9.2.2 Jasa hiburan dan Rekreasi	5.763,68	5.842,28
9.2.3 Jasa perseorangan dan rumah tangga	342.821,67	352.288,24
PDRB	18.683.020,86	20.529.643,24

Sumber : BPS , PDRB 2008-2009

Tabel. 3.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2007 – 2008

SEKTOR	TAHUN	
	2008 (juta)	2009 (juta)
1. PERTANIAN	2.753.632,27	3.013.007,10
1.1 Tanaman Bahan makanan	1.947.856,46	2.128.822,89
1.2 Perkebunan	422.229,80	461.762,96
1.3 Peternakan	290.496,15	322.808,22
1.4 Kehutanan	12.573,69	13.865,99
1.5 Perikanan	80.476,17	85.747,04
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	468.303,80	526.035,13
2.1 Minyak dan Gas Bumi	405.469,78	458.460,35
2.2 Pertambangan Tanpa Migas	-	-
2.3 Penggalian	62.834,01	67.574,78
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	23.275.745,49	24.565.562,89
3.1 Industri Migas	-	-
3.2 Industri Tanpa Migas	23.275.745,49	24.565.562,89
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	642.658,74	674.520,69
4.1 Listrik	626.517,55	657.920,68
4.2 Gas Kota	-	-
4.3 Air Bersih	16.141,18	16.600,01
5. BANGUNAN/KONTRUKSI	648.394,06	696.720,83

SEKTOR	TAHUN	
	2008 (juta)	2009 (juta)
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	6.005.197,92	6.780.385,10
6.1 Perdagangan Besar & Eceran	5.032.873,36	5.689.588,60
6.2 Hotel	5.336,96	5.686,65
6.3 Restoran	966.987,60	1.085.109,85
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	1.766.609,79	1.795.161,77
7.1 Pengangkutan	1.485.897,80	1.551.713,42
7.1.1 Angkutan Rel	14.259,52	13.407,83
7.1.2 Angkutan Jalan Raya	1.320.246,62	1.378.881,88
7.1.3 Angkutan laut	-	-
7.1.4 Angkutan Sungai & Penyebrangan	-	-
7.1.5 Angkutan Udara	-	-
7.1.6 Jasa Penunjang Angkutan	151.391,67	159.423,72
7.2 Komunikasi	280.711,99	243.448,35
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	792.877,54	820.502,95
8.1 Bank	114.323,41	118.184,13
8.2 Lembaga Keuangan lainnya	33.163,61	35.052,46
8.3 Sewa Bangunan	491.201,64	506.581,27
8.4 Jasa perusahaan	154.188,88	160.685,09
9. JASA – JASA	1.936.315,52	2.069.321,52
9.1 Pemerintahan Umum	951.597,21	1.005.305,49
9.2 Swasta	984.718,31	1.064.016,03
9.2.1 Jasa sosial kemasyarakatan	234.203,27	253.710,92
9.2.2 Jasa hiburan dan Rekreasi	10.714,86	11.009,95
9.2.3 Jasa perseorangan dan rumah tangga	739.800,18	799.295,63
PDRB	38.289.735,12	40.941.217,98

Sumber : BPS , PDRB 2008-2009

Sejalan dengan pembangunan ekonomi, akan terjadi perubahan struktur permintaan domestik, struktur produksi dan struktur perdagangan antar daerah. Walaupun demikian, perubahan tersebut bukanlah sesuatu yang terjadi seketika melainkan proses yang memakan waktu yang panjang. Proses perubahan struktur ini seringkali disebut sebagai proses alokasi. Proses alokasi ini adalah hasil interaksi antara proses akumulasi di satu pihak, dengan proses perubahan pola konsumsi masyarakat yang timbul bersamaan dengan meningkatnya pendapatan per kapita di pihak lain. Interaksi tersebut pada gilirannya akan memberikan dampak berupa perubahan pada komposisi barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan.

Proses perubahan struktur produksi ini dapat diamati dengan mengamati perubahan rasio antara:

- a. NTB sektor pertanian terhadap PDRB
- b. NTB sektor-sektor nonpertanian terhadap PDRB.

Dengan membandingkan rasio-rasio tersebut akan terlihat apakah pertumbuhan pendapatan per kapita pada suatu daerah juga disertai dengan perubahan struktur yang umum terjadi. Berdasarkan cara tersebut, lapangan usaha yang ada dikelompokkan atas:

- a. Sektor primer (pertanian dan pertambangan)
- b. Sektor sekunder (industri dan bangunan)
- c. Sektor tersier (lapangan usaha lainnya)

Pada tahun 2008 dan 2009, kontribusi perekonomian terbesar masih tetap dipengaruhi oleh sektor utama yaitu sektor industri pengolahan (61,56 – 60,98%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (15,22 – 15,64%) dan sektor pertanian (7,24 – 7,32%). Berbeda dengan struktur PDRB, struktur mata pencaharian penduduk pada tahun 2009 menunjukkan hal yang berbeda. Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri (29,91%), kemudian berturut-turut pertanian (21,75%), perdagangan (18,72%), jasa (12,51%), dan pada sektor lainnya sebanyak 17,10 %.

Kontribusi sektor primer terhadap total PDRB mengalami peningkatan yaitu 8,35% tahun 2008 menjadi 8,64% tahun 2009, begitu pula sektor tersier dari 27,43% tahun 2008 naik menjadi 28,00% tahun 2009. Sedangkan sektor sekunder mengalami penurunan terhadap PDRB dari 64,17% pada tahun 2008 menjadi 63,35 % pada tahun 2009. Namun demikian struktur ekonomi kabupaten Bandung masih tetap akan didominasi oleh sektor sekunder dan tersier selama beberapa tahun ke depan.

Tabel 3.3
Peranan NTB Atas Dasar Harga Berlaku Setiap Kelompok Sektor
dalam Perekonomian Tahun 2008-2009
(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2008*)	2009**)
1. Primer	8,35	8,64
1. Pertanian	7,13	7,36
2. Pertambangan dan Penggalan	1,22	1,28
2. Sekunder	64,17	63,35
3. Industri Pengolahan	60,80	60,00
4. Listrik, Gas dan Air	1,68	1,65
5. Bangunan	1,69	1,70
3. Tertier	27,43	28,00
6. Pergadangan, Hotel dan Restoran	15,68	16,56
7. Pengangkutan dan Komunikasi	4,61	4,38
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,07	2,00
9. Jasa jasa	5,06	5,05
PDRB	100.00	100.00

Sumber: PDRB, 2008

Kontribusi sektor pertanian tahun 2008 - 2009 menunjukkan angka yang menurun, sedangkan sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan kontribusi yang meningkat. Namun demikian, walaupun kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan ternyata nilai total PDRB sektor pertanian mengalami peningkatan dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 21,75%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih sangat layak untuk

dikembangkan menjadi *core business* di Kabupaten Bandung. Di samping itu sektor pertanian merupakan sektor strategis yang harus didukung keberlangsungannya sebagai faktor pendorong percepatan pembangunan wilayah perdesaan. Demikian pula, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan akan meningkat kinerjanya di tahun 2010.

Terkait dengan kesejahteraan masyarakat, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, namun berbeda dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan yang mengalami pertumbuhan yang relatif kecil. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku tahun 2009 mencapai Rp.12.903.569,00 meningkat sebesar 5,38% dibandingkan tahun 2008 yang mencapai Rp. 12.224.847,00, sedangkan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan hanya mengalami peningkatan sebesar 2,84 % yaitu dari Rp. 6.291.552,00 pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp.6.470.391,00 pada tahun 2009.

Melihat proporsi belanja APBD kabupaten Bandung tahun 2009 yang mencapai Rp.1,784 trilyun atau 4,36% terhadap PDRB relatif masih kecil. Idealnya kontribusi belanja pemerintah menyumbang sebesar 10% terhadap PDRB. Begitu pula jika melihat proporsi pendapatan daerah terhadap PDRB tahun 2009 hanya mencapai 4,77% atau Rp.1,954 trilyun.

Komposisi jumlah penduduk kabupaten Bandung tahun 2009 sebesar 3.172.860 jiwa dan proyeksi penduduk 2010 sebesar 3.242.604 jiwa terhadap APBD tahun 2009 dan 2010, maka nilai APBD per kapita sebesar Rp.562 ribu tahun 2009 dan Rp.646 ribu tahun 2010.

Gambar 3.1
APBD Perkapita Tahun 2009 dan 2010*)



***)perkiraan**

Sumber:APBD 2009&2010, BPS

Dengan kondisi perekonomian tersebut, ternyata cukup memberi kontribusi terhadap peningkatan daya beli masyarakat dan mampu menunjang capaian angka IPM. Menurut data Suseda 2009, kemampuan daya beli penduduk mencapai Rp.565,32 ribu atau meningkat dari Rp. 557.680,00 pada tahun 2008 atau mengalami kenaikan sebesar 1,37 %. Dengan kenaikan ini, indeks daya beli menduduki posisi ketiga dalam memberi kontribusi bagi pencapaian angka IPM. Pada tahun 2008 Indeks Daya Beli sebesar 59,55 dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 61,31 poin.

Terkait indikator kinerja efisiensi ekonomi dapat digunakan ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Dengan asumsi ICOR sama dengan Nasional/JawaBarat yaitu sebesar 4,00 maka untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14% pada tahun 2009, dibutuhkan dana kurang lebih Rp. 13 triliun (berdasarkan harga berlaku). Mengingat kemampuan pemerintah relatif terbatas dan bersifat stimulan, maka diharapkan investasi masyarakat berperan besar dalam memenuhi kebutuhan investasi tersebut.

Berdasarkan statistik, investasi dunia usaha/masyarakat dapat mencapai 87 %, sedangkan investasi pemerintah 13 % yang didapat dari pembiayaan pembangunan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

Dari berbagai studi menunjukkan bahwa besarnya ICOR sangat dipengaruhi oleh:

a. Komposisi atau alokasi investasi menurut sektor produksi.

Hal ini terjadi karena tingkat penggunaan modal berbeda-beda menurut sektor tertentu. Di mana sektor industri cenderung lebih tinggi ICOR-nya dibandingkan sektor pertanian. Begitu pula dengan sektor pertambangan, sektor listrik, gas dan air minum yang relatif tinggi. Faktor lain adalah masa tenggang produksi dari berbagai sektor berbeda pula.

b. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE)

Formula di atas menunjukkan bahwa besar kecilnya ICOR berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, makin tinggi laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka makin rendah ICOR-nya, dan sebaliknya makin rendah laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka makin tinggi ICOR-nya. Hubungan tersebut dapat terjadi karena: *pertama*, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka makin kecil pula peranan penyusutan dalam total investasi; *kedua*, tingkat pemanfaatan kapasitas produksi makin tinggi dengan makin cepatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah; dan *ketiga*, kontribusi faktor produksi bukan modal cenderung makin besar jika laju pertumbuhan ekonomi makin meningkat.

- c. Tingkat pendapatan perkapita daerah.

ICOR suatu daerah cenderung meningkat dengan meningkatnya pendapatan perkapita. Hal ini berkaitan dengan perubahan struktur ekonomi yang makin mengarah pada sektor-sektor yang memiliki ICOR relatif tinggi atau karena terjadinya "*capital deepening*" di berbagai sektor produksi.

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan Tahun 2011

Dengan arah kebijakan ekonomi makro dan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, sasaran ekonomi makro ditandai dengan LPE dan tingkat inflasi, dimana proyeksi pada tahun 2010 dan 2011 yaitu:

Tabel 3.4
Proyeksi Indikator Makro Tahun 2010 dan 2011

No	Indikator	Proyeksi 2010	Proyeksi 2011
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.242.604	3.309.197
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,20	2,05
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,25	6,00
4	Inflasi PDRB (%)	3,00	5,41
5	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	43.962.226	45,784,564
6	PDRB atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah)	21.402.977	22,958,300
7	Jumlah Keluarga Miskin*)	19,65	18,57
8	Laju Pertumbuhan Investasi***) (%)	5,34	6,22
9	Pendapatan Perkapita pertahun (Rp)	13.320.462	13.835.551
10	IPM	73,85	75,92
11	Indeks Pendidikan	85,89	87,36
12	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,97	9,47
13	Angka Melek Huruf (%)	98,93	99,48
14	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,78	70,75
15	Indeks AHH	74,63	76,25
16	Indeks Daya Beli	61,98	64,16
17	Daya Beli (ribuan rupiah)	568,21	577,63

*)Hasil Olahan

Melihat cerminan angka proyeksi kondisi perekonomian dari 2 (dua) indikator pada tahun 2010 dan 2011, perlu beberapa kebijakan pemerintah untuk menstabilkan bahkan meningkatkan kondisi perekonomian daerah, yaitu sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga
- Stabilitas ekonomi terjaga baik, salah satunya tercermin dengan tingkat laju inflasi yang tidak terlalu tinggi (< 7 %).
- Terjaganya stabilitas ekonomi yang didukung oleh permintaan eksternal yang kuat untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya melambat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara bertahap yang semakin meningkat.
- Pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin semakin turun.
- Potensi yang relatif besar di sektor UMKM diharapkan bisa berperan dalam penciptaan lapangan kerja.

Untuk mencapai kondisi-kondisi tersebut di atas perlu dilakukan identifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah khususnya untuk tahun 2010 dengan lebih dahulu mengadakan analisis atas kondisi Internal (*strength*/kekuatan (S) dan *weakness*/kelemahan (W)) dan juga kondisi Eksternal (*opportunity*/peluang (O) dan *threat*/ancaman (T)) terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah.

3.2.1. Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan eksternal

Berdasarkan Isu strategis yang merupakan gambaran umum permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bandung, dapat diklasifikasikan dalam masing-masing isu aspek lingkungan internal dan eksternalnya, sebagai berikut:

- 1) Kualitas pelayanan birokrasi.
- 2) Rintisan wajib belajar 12 tahun dan pengembangan pendidikan vokasional.
- 3) Aksesibilitas kualitas pelayanan kesehatan dan sarana prasarana kesehatan.
- 4) Masih tingginya angka kemiskinan dan penyandang masalah sosial
- 5) Kualitas pelayanan sarana prasarana dasar wilayah.
- 6) Aksesibilitas usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) terhadap sumber daya.
- 7) Kemampuan daya saing produk unggulan daerah.
- 8) Penanganan bencana dan kerusakan lingkungan.
- 9) Keterpaduan pembangunan daerah dan wilayah pedesaan.
- 10) Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 11) Menjaga stabilitas ketahanan pangan

1. Kualitas pelayanan birokrasi

a. aspek internal:

- Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi
- Kemampuan SDM masih kurang dalam mendukung reformasi birokrasi yang ringkas dan efektif.
- Belum tersusunnya regulasi yang rinci
- Komitmen Pemerintah Daerah melalui peraturan daerah mengenai transparansi, partisipatif dan akuntabel/PERDA TPA.

b. aspek eksternal

- Investasi, baik PMA ataupun PMDN yang menuntut perbaikan iklim usaha dan perijinan
- Pelaksanaan perjanjian mengenai area perdagangan bebas yang menuntut kinerja birokrasi yang lebih intens, terutama dalam pengawasan dan penataan distribusi serta pemasaran
- Masih banyaknya investor "nakal" yang mencoba memotong jalur birokrasi dengan iming-iming uang.

Berdasarkan penentuan aspek-aspek di atas, maka analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

Interaksi Nilai Pembobotan	Strength	Weakness
<p>IFAS</p> <p>EFAS</p>	Komitmen Pemerintah Daerah melalui peraturan daerah mengenai transparansi, partisipatif dan akuntabel/PERDA TPA.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi - Kemampuan SDM masih kurang dalam mendukung reformasi birokrasi yang ringkas dan efektif. - Belum tersusunnya regulasi yang rinci
Opportunity	SO	WO
<ul style="list-style-type: none"> - Investasi, baik PMA ataupun PMDN yang menuntut perbaikan iklim usaha dan perijinan - Pelaksanaan perjanjian mengenai area perdagangan bebas yang menuntut kinerja birokrasi yang lebih intens, terutama dalam pengawasan dan penataan distribusi serta pemasaran 		<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat kemampuan aparatur - Optimalisasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi.
Threat	ST	WT
Masih banyaknya investor "nakal" yang mencoba memotong jalur birokrasi dengan iming-iming uang.		

Oleh karena itu, maka strategi yang dipilih untuk isu kualitas pelayanan birokrasi adalah strategi pemanfaatan peluang yang belum optimal, orientasi memihak pada kondisi yang lemah untuk menangkap peluang

2. Rintisan wajib belajar 12 tahun dan pengembangan pendidikan vokasional

a. aspek internal:

- infrastruktur belum memadai

- Partisipasi pendidikan masih rendah
- Anggaran penunjang program WAJAR
- Kebijakan peningkatan akses pendidikan melalui RLS

b. aspek eksternal

- Sekolah unggulan
- Kemudahan aksesibilitas pendidikan
- Kebijakan wajib belajar 12 tahun
- Pasar kerja terdidik

Berdasarkan penentuan aspek-aspek di atas, maka analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

Interaksi Nilai Pembobotan	Strength	Weakness
<p>IFAS</p> <p>EFAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran penunjang program WAJAR - Kebijakan peningkatan akses pendidikan melalui RLS 	<ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur belum memadai - Partisipasi pendidikan masih rendah
Opportunity	SO	WO
<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan wajib belajar 12 tahun - Pasar kerja terdidik 		
Threat	ST	WT
<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah unggulan - Kemudahan aksesibilitas pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi anggaran dalam perbaikan kualitas infrastruktur pendidikan dan tenaga pendidik - Peningkatan dan perluasan akses pendidikan melalui RLS 	

Oleh karena itu, maka strategi yang dipilih untuk isu rintisan wajib belajar 12 tahun dan pengembangan pendidikan vokasional adalah strategi memaksimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman dan merubahnya menjadi peluang.

3. Aksesibilitas kualitas pelayanan kesehatan dan sarana prasarana kesehatan

a. aspek internal:

- Kuantitas SDM Kesehatan yang masih belum memadai
- Sebaran SDM Kesehatan yang masih belum merata
- Dukungan Peralatan yang masih belum memadai
- Infrastruktur yang belum memenuhi SPM
- Tersedianya bidan desa di setiap desa
- Fasilitas kesehatan PUSTU semakin terjangkau.

b. aspek eksternal

- Kondisi geografis menghambat aksesibilitas kesehatan
- Peningkatan jumlah penduduk
- Telah berdiri sekolah pendidikan kesehatan di Kabupaten Bandung

Berdasarkan penentuan aspek-aspek di atas, maka analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

Interaksi Nilai Pembobotan	Strength	Weakness
<p>IFAS</p> <p>EFAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya bidan desa di setiap desa - Fasilitas kesehatan PUSTU semakin terjangkau. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuantitas SDM Kesehatan yang masih belum memadai - Sebaran SDM Kesehatan yang masih belum merata - Dukungan Peralatan yang masih belum memadai - Infrastruktur yang belum memenuhi SPM
Opportunity	SO	WO
<ul style="list-style-type: none"> - Telah berdiri sekolah pendidikan kesehatan di Kabupaten Bandung 		
Threat	ST	WT
<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi geografis menghambat aksesibilitas kesehatan - Peningkatan jumlah penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi peran dan peningkatan kemampuan bidan desa sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak - Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di PUSTU untuk memperluas akses pelayanan kesehatan 	

Oleh karena itu, maka strategi yang dipilih untuk isu Aksesibilitas kualitas pelayanan kesehatan dan sarana prasarana kesehatan adalah strategi memaksimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman dan merubahnya menjadi peluang

4. Masih tingginya angka kemiskinan dan penyandang masalah sosial

a. aspek internal:

- Kurangnya kemampuan SDM tenaga kerja dalam bersaing di pasar tenaga kerja
- Kurangnya jiwa kewirausahaan
- Kurang meratanya distribusi pendapatan
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin (kemudahan akses permodalan melalui lembaga keuangan mikro)
- Tersedianya fasilitas lumbung pangan desa

b. aspek eksternal

- Mekanisasi produksi yang bersifat padat modal, bukan padat karya
- Daya tarik kota yang menyebabkan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi, terutama angkatan kerja potensial
- Persaingan global (komoditas dan tenaga kerja)
- Potensi perekonomian desa yang belum tergali, seperti pariwisata perdesaan

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dilakukan analisa kondisi lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

Interaksi Nilai Pembobotan	Strength	Weakness
<p>IFAS</p> <p>EFAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin (kemudahan akses permodalan melalui lembaga keuangan mikro) - Tersedianya fasilitas lumbung pangan desa - Telah dilakukan pembinaan dan pelatihan usaha untuk meningkatkan kemampuan usaha agar bankable. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kemampuan SDM tenaga kerja dalam bersaing di pasar tenaga kerja - Kurangnya jiwa kewirausahaan - Kurang meratanya distribusi pendapatan
Opportunity	SO	WO
Potensi perekonomian desa yang belum tergali, seperti pariwisata perdesaan		
Threat	ST	WT
<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisasi produksi yang bersifat padat modal, bukan padat karya - Daya tarik kota yang menyebabkan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi, terutama angkatan kerja potensial - Persaingan global (komoditas dan tenaga kerja) 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akses permodalan untuk meningkatkan kemampuan usaha bagi masyarakat miskin - Peningkatan program pelatihan dan pembinaan Jiwa kewirausahaan untuk menghadapi persaingan global serta membuka lapangan kerja. 	

Oleh karena itu, maka strategi yang dipilih untuk isu Aksesibilitas kualitas pelayanan kesehatan dan sarana prasarana kesehatan adalah strategi memaksimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman dan merubahnya menjadi peluang

5. Kualitas pelayanan sarana prasarana dasar wilayah.

a. aspek internal:

- Masih kurangnya dukungan data teknis sarana prasarana dasar
- Telah tersusunnya rencana detail tata ruang kota
- Pembangunan jalan lingkar (ring road) sedang dalam proses untuk memecah kemacetan dan ketidakseimbangan volume kendaraan dengan jalan
- Terbatasnya jumlah ruas jalan penghubung dari wilayah satu ke wilayah lain.
- Belum lengkapnya bangunan pendukung jalan yang seringkali menyebabkan banjir dan cepat rusak)

- Belum adanya terminal yang memadai.

b. aspek eksternal

- Populasi penduduk yang terus meningkat
- Perluasan fungsi kota

Berdasarkan penentuan aspek-aspek di atas, maka analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

Interaksi Nilai Pembobotan	Strength	Weakness
<p>IFAS</p> <p>EFAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Telah tersusunnya rencana detail tata ruang kota - Pembangunan jalan lingkar (ring road) sedang dalam proses untuk memecah kemacetan dan ketidakseimbangan volume kendaraan dengan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya dukungan data teknis sarana prasarana dasar - Terbatasnya jumlah ruas jalan penghubung dari wilayah satu ke wilayah lain. - Belum lengkapnya bangunan pendukung jalan yang seringkali menyebabkan banjir dan cepat rusak) - Belum adanya terminal yang memadai
Opportunity	SO	WO
Perluasan fungsi kota	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan infrastruktur dalam perluasan fungsi kota dioptimalkan dengan pelaksanaan perencanaan tata ruang untuk memenuhi kebutuhan prasarana dasar 	
Threat	ST	WT
Populasi penduduk yang terus meningkat		

Oleh karena itu, maka strategi yang dipilih untuk isu kualitas sarana prasarana dasar wilayah adalah menggunakan kekuatan yang ada (keunggulan komparatif) didorong untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada.

6. Aksesibilitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap sumber daya

a. aspek internal:

- Belum tersusun data kondisi dan perkembangan UKM yang akurat
- Kurang optimalnya peran koperasi dalam perekonomian.
- Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan penyaluran kredit mikro
- Telah dilakukan pembinaan dan pelatihan usaha untuk meningkatkan kemampuan usaha agar *bankable*.
- Kemampuan UKM bertahan dalam krisis ekonomi

b. aspek eksternal

- Perdagangan bebas yang memungkinkan usaha asing turut bersaing dalam pengolahan sumber daya lokal
- Cukup banyak dan beragamnya lembaga ekonomi yang bisa menjadi mitra permodalan UKM melalui skema pembiayaan kredit mikro.

Berdasarkan penentuan aspek-aspek di atas, maka analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

Interaksi Nilai Pembobotan	Strength	Weakness
<p>IFAS</p> <p>EFAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan pembinaan dan pelatihan usaha untuk meningkatkan kemampuan usaha agar bankable. - Kemampuan UKM bertahan dalam krisis ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersusun data kondisi dan perkembangan UKM yang akurat - Kurang optimalnya peran koperasi dalam perekonomian. - Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan penyaluran kredit mikro
Opportunity	SO	WO
<ul style="list-style-type: none"> - Cukup banyak dan beragamnya lembaga ekonomi yang bisa menjadi mitra permodalan UKM melalui skema pembiayaan kredit mikro. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pembinaan dan pelatihan usaha untuk meningkatkan usaha UKM - Peningkatan akses permodalan UKM untuk memperkuat usaha UKM 	
Threat	ST	WT
<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan bebas yang memungkinkan usaha asing turut bersaing dalam pengolahan sumber daya lokal 		

Oleh karena itu, maka strategi yang dipilih untuk isu aksesibilitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap sumber daya adalah menggunakan kekuatan yang ada (keunggulan komparatif) didorong untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada.

7. Kemampuan daya saing produk unggulan daerah

a. aspek internal:

- Belum terumuskannya produk unggulan
- Masih rendahnya pengelolaan pasca panen
- Belum optimalnya penataan distribusi dan pemasaran
- Belum optimalnya promosi produk
- Beragamnya produk khas Kabupaten yang potensial.

b. aspek eksternal

- Perdagangan bebas yang memungkinkan usaha asing menyaingi kualitas produk lokal

- produk khas Kabupaten telah cukup dikenal luas di tingkat domestic, nasional bahkan regional dan internasional (wayang golek, kesenian, makanan khas dll)

Berdasarkan penentuan aspek-aspek di atas, maka analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

Interaksi Nilai Pembobotan	Strength	Weakness
<p>IFAS</p> <p>EFAS</p>	Beragamnya produk khas Kabupaten yang potensial	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terumuskannya produk unggulan - Masih rendahnya pengelolaan pasca panen - Belum optimalnya penataan distribusi dan pemasaran - Belum optimalnya promosi produk
Opportunity	SO	WO
<ul style="list-style-type: none"> - Produk khas Kabupaten telah cukup dikenal luas di tingkat domestic, nasional bahkan regional dan internasional (wayang golek, kesenian, makanan khas dll) 		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan produk unggulan yang mempunyai multiplier effect - Peningkatan pengawasan mutu dan fasilitasi sertifikasi produk UKM - Optimalisasi promosi produk unggulan.
Threat	ST	WT
Perdagangan bebas yang memungkinkan usaha asing menyaingi kualitas produk lokal		

Oleh karena itu, maka strategi yang dipilih untuk isu Kemampuan daya saing produk unggulan daerah adalah strategi pemanfaatan peluang yang belum optimal, orientasi memihak pada kondisi yang lemah untuk menangkap peluang.

8. Penanganan bencana dan kerusakan lingkungan

a. aspek internal:

- Belum tersedianya data bencana yang lengkap
- Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
- Rendahnya Pengawasan dan Penegakan hukum)
- Kondisi wilayah yang rawan bencana
- Lembaga mitigasi dan penanggulangan bencana belum terbentuk.
- *Acceptance* (penerimaan) masyarakat dalam pembinaan mengenai bencana dan kerusakan lingkungan masih cukup tinggi

b. aspek eksternal

- Permintaan Perumahan semakin meningkat
- Pendapatan masyarakat sekitar hutan rendah
- Regulasi dan anggaran untuk perbaikan lingkungan cukup tinggi
- Berhasilnya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dilakukan analisa kondisi lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

Interaksi Nilai Pembobotan	Strength	Weakness
<p>IFAS</p> <p>EFAS</p>	<p><i>Acceptance</i> (penerimaan) masyarakat dalam pembinaan mengenai bencana dan kerusakan lingkungan masih cukup tinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya data bencana yang lengkap - Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan - Rendahnya Pengawasan dan Penegakan hukum - Kondisi wilayah yang rawan bencana - Lembaga mitigasi dan penanggulangan bencana belum terbentuk.
Opportunity	SO	WO
<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi dan anggaran untuk perbaikan lingkungan cukup tinggi - Berhasilnya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan 		
Threat	ST	WT
<ul style="list-style-type: none"> - Permintaan Perumahan semakin meningkat - Pendapatan masyarakat sekitar hutan rendah 		<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan daerah rawan bencana - Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum - Peningkatan kesadaran pengelolaan lingkungan, terutama di daerah rawan bencana.

Oleh karena itu, maka strategi yang dipilih untuk isu kerusakan lingkungan dan Penanganan bencana adalah strategi paling sulit, yaitu strategi defensif untuk meminimalkan ancaman dan kelemahan.

9. Keterpaduan pembangunan daerah dan wilayah perdesaan

a. aspek internal:

- Masih rendahnya diversifikasi usaha di pedesaan
- Belum optimalnya perencanaan pembangunan desa
- Masih kuatnya tradisi dan tingginya kemampuan budidaya petani
- Masih tingginya partisipasi masyarakat dan petani dalam kelembagaan ekonomi desa dan kelompok tani

b. aspek eksternal

- Berpindahnya angkatan kerja potensial (urbanisasi)
- Masih banyak potensi pariwisata pedesaan yang belum tergali

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dilakukan analisa kondisi lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

Interaksi Nilai Pembobotan	Strength	Weakness
<p>IFAS</p> <p>EFAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kuatnya tradisi dan tingginya kemampuan budidaya petani - Masih tingginya partisipasi masyarakat dan petani dalam kelembagaan ekonomi desa dan kelompok tani 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya diversifikasi usaha di pedesaan - Belum optimalnya perencanaan pembangunan desa
Opportunity	SO	WO
<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak potensi pariwisata pedesaan yang belum tergali 		
Threat	ST	WT
<ul style="list-style-type: none"> - Berpindahnya angkatan kerja potensial (urbanisasi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi peran kelembagaan ekonomi dan pertanian dalam pemberdayaan masyarakat - Peningkatan keterkaitan usaha hulu-hilir pedesaan agar terjadi diversifikasi usaha 	

Oleh karena itu, maka strategi yang dipilih untuk isu penguatan pembangunan perdesaan adalah memaksimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman dan merubahnya menjadi peluang.

10. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

a. aspek internal:

- Masih rendahnya kemampuan SDM aparat dalam mengendalikan massa
- Keterbatasan Perlengkapan
- Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan
- Cukup banyaknya personil Linmas (sekurangnya ada 20 orang /desa)

b. aspek eksternal

- Pengaruh paham atau isu negatif yang dapat memecah belah
- Eksternalitas globalisasi informasi, di antaranya kebudayaan dan kebiasaan yang jauh dari nilai "ketimuran"
- Masih dijunjung norma dan nilai sebagai *filter*

Berdasarkan penentuan aspek-aspek di atas, maka analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

Interaksi Nilai Pembobotan	Strength	Weakness
IFAS EFAS	Cukup banyaknya personil Linmas (sekurangnya ada 20 orang /desa)	- Masih rendahnya kemampuan SDM aparat dalam mengendalikan massa - Keterbatasan Perlengkapan - Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan
Opportunity	SO	WO
- Masih dijunjung norma dan nilai sebagai filter		- Memperkuat kemampuan aparat - Meningkatkan peran masyarakat dalam keamanan lingkungan
Threat	ST	WT
- Pengaruh paham atau isu negatif yang dapat memecah belah - Eksternalitas globalisasi F2 di antaranya kebudayaan dan kebiasaan yang jauh dari nilai "ketimuran"		

Oleh karena itu, maka strategi yang dipilih untuk isu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat adalah strategi pemanfaatan peluang yang belum optimal, orientasi memihak pada kondisi yang lemah untuk menangkap peluang.

11. Menjaga stabilitas ketahanan pangan

a. aspek internal:

- Tersedianya fasilitas lumbung pangan desa
- Telah terbentuk Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung
- Masih belum optimalnya diversifikasi pangan
- Masih belum optimalnya distribusi pangan antar daerah
- Belum optimalnya pengawasan pangan

b. aspek eksternal

- Regulasi dan kebijakan prioritas nasional dan provinsi yang mendukung ketahanan pangan
- Pertambahan jumlah penduduk (tingkat konsumsi meningkat)
- Kawasan Perdagangan Bebas
- Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dilakukan analisa kondisi lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

Interaksi Nilai Pembobotan	Strength	Weakness
IFAS	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya fasilitas lumbung pangan desa - Telah terbentuk Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih belum optimalnya diversifikasi pangan - Masih belum optimalnya distribusi pangan antar daerah - Belum optimalnya pengawasan pangan
EFAS		
Opportunity	SO	WO
<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi dan kebijakan prioritas nasional dan provinsi yang mendukung ketahanan pangan 		
Threat	ST	WT
<ul style="list-style-type: none"> - Pertambahan jumlah penduduk (tingkat konsumsi meningkat) - Kawasan Perdagangan Bebas - Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi penggunaan dan pengelolaan lumbung pangan desa dalam memperkuat ketahanan pangan - Optimalisasi peran Dewan Ketahanan Pangan dalam pengawasan dan pelaksanaan program ketahanan pangan untuk mengantisipasi pertambahan penduduk serta alih fungsi lahan 	

Oleh karena itu, maka strategi yang dipilih untuk isu ketahanan pangan adalah memaksimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman dan merubahnya menjadi peluang

3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen Raperda RPJPD 2005-2025 terutama tahapan pembangunan kedua. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bandung tahun 2011 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan propinsi tahun 2011. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini akan dipedomani dalam kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Berikut arah kebijakan nasional dan propinsi sebagai dasar penyusunan arah kebijakan ekonomi 2011.

3.3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional

Arah kebijakan ekonomi nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011, yaitu pembangunan perekonomian akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan yang dilakukan melalui pendekatan *triple track strategy: pro-growth, pro-job, dan pro-poor*. Program pro-rakyat diarahkan pada 3(tiga) klaster, yaitu: berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan UMK. Sedangkan program keadilan diarahkan pada perlindungan bagi kelompok rentan.

Dengan diterbitkannya Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010 serta Inpres nomor 3 tahun

2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, maka secara nasional pertumbuhan ekonomi berada pada angka 6,0-6,3%, pengangguran 7,3-7,4%, kemiskinan 11,5-12,5%. Guna mewujudkan hal tersebut, tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2011 adalah *Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung pemantapan tata kelola dan sinergi pusat daerah*.

Kondisi perekonomian tahun 2011 diprediksi akan memasuki tahap pertumbuhan, hal ini tercermin dari kondisi perekonomian nasional tahun 2010 yang cenderung membaik pasca pengaruh krisis global yang melanda dunia tahun 2009. Seiring dengan trend apresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama US dollar, maka stabilitas ekonomi secara nasional dapat terjaga. Selain itu penurunan harga BBM internasional akan mendorong semakin menurunnya inflasi pada tahun mendatang. Beberapa tantangan perekonomian yang akan dihadapi tahun 2011 adalah: mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pertumbuhan ekonomi didorong dengan menjaga tingkat konsumsi masyarakat, meningkatkan investasi dan ekspor serta mendorong industri pengolahan. Ketersediaan pasokan barang dan jasa serta jangkauan harga bahan pokok menjadi faktor penentu dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Peningkatan investasi dan ekspor tetap diupayakan melalui peningkatan daya tarik investasi baik di dalam maupun di luar negeri, mengurangi hambatan prosedur perijinan, harmonisasi kebijakan baik pusat – daerah maupun lintas sektor, meningkatkan diversifikasi pasar ekspor, mendorong komoditi nonmigas yang bernilai tambah tinggi dan mendorong fasilitas ekspor.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Perbaikan iklim ketenagakerjaan akan terus ditingkatkan melalui penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, pelaksanaan negosiasi bipartit, serta standar kompetensi tenaga kerja. Upaya pengurangan angka kemiskinan dilakukan melalui berbagai program yang mengarah pada kegiatan ekonomi pro-rakyat miskin dengan berbasis masyarakat serta kemudahan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, disamping adanya jaminan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau dan mudah diakses.

Kebijakan dalam bidang moneter dan fiskal pemerintah akan dipengaruhi oleh membaiknya perekonomian global, iklim usaha dan investasi domestik tahun 2010. Nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp.9.200/US\$ yang cenderung stabil, suku bunga BI sebesar 6,5% untuk 3 bulan, harga minyak berada pada kisaran US\$ 80,74/barel, serta kenaikan PDB sebesar 6,3% akan mempengaruhi terhadap kapasitas keuangan negara. Perkiraan penerimaan negara dan hibah mencapai 15,6% terhadap PDB pada tahun 2011, yang terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar 12,1% PDB dan penerimaan bukan pajak sebesar 3,5% PDB. Sementara itu, belanja negara diperkirakan mencapai 17,3% dari PDB yang terdiri atas belanja pemerintah pusat 12,1% dari PDB dan

transfer ke daerah sebesar 5,2% dari PDB. Dengan demikian perkiraan defisit APBN tahun 2011 diupayakan sekitar 1,7% dari PDB, yang akan ditutup oleh pembiayaan dalam negeri dan luar negeri.

Arah kebijakan keuangan negara tahun 2011, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

- (1) Penyeimbang antara peningkatan alokasi anggaran dan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal;
- (2) Peningkatan penerimaan negara terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan kepabeanan, serta optimalisasi PNPB, baik dari jenisnya maupun perbaikan administrasinya;
- (3) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara;
- (4) Peningkatan pengelolaan pinjaman pemerintah diarahkan untuk menurunkan stok pinjaman luar negeri tidak saja relatif terhadap PDB, tetapi juga secara absolut.

Untuk membiayai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% pada tahun 2011 dibutuhkan investasi sebesar Rp.2.144,5 trilyun. Sebagian besar kebutuhan investasi tersebut Rp.1.870 trilyun atau 87 % dari total kebutuhan investasi diupayakan berasal dari masyarakat sedangkan sisanya berasal dari pemerintah.

3.3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Dinamika ekonomi Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara nasional dan global. Proyeksi ekonomi Jawa Barat diharapkan akan mencapai PDRB ADHK Rp.331,411 trilyun dengan pertumbuhan sebesar 5,2 – 6,2%. Distribusi pertumbuhan tersebut terjadi di sektor pertanian sebesar 3,0 – 4,0%, sektor industri 5,8 – 6,8% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 6,0 – 7,0%. Di sisi lain tingkat inflasi berada pada kisaran 4,0 – 6,0%. Tingkat pertumbuhan tersebut, didukung juga oleh nilai investasi (PMTB) sebesar Rp.131,578 trilyun dengan laju pertumbuhan sebesar 10,77%, dengan perkiraan akan terjadinya penyerapan tenaga kerja sebesar 17.606.782 angkatan kerja dengan laju penyerapan tenaga kerja 3,07%.

Karakteristik perekonomian Jawa Barat dilihat dari sisi produksi didominasi oleh industri 43%, perdagangan, hotel dan restoran 20% dan pertanian 13%. Sedangkan dari sisi penggunaan didominasi oleh konsumsi sebesar 65% dan investasi sebesar 18%. Konsekuensi dari karakteristik perekonomian Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh fluktuasi total nilai tambah ketiga sektor tersebut (sisi produksi) sehingga berimplikasi pada; peningkatan daya saing industri pengolahan, perbaikan struktur pasar, dan peningkatan produktivitas pertanian. Sedangkan dari sisi konsumsi tingginya prosentase tingkat konsumsi mencerminkan *domestic-demand led growth*, sehingga berimplikasi pada upaya menjaga ukuran pasar (*market size*) dan daya beli masyarakat, serta meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Jawa Barat diperlukan dukungan investasi/PMTB (pembentukan modal tetap bruto) sebesar Rp.131,58 triliun untuk mengejar proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 – 6,2%. Pemenuhan terhadap kebutuhan investasi tersebut berasal dari investasi pemerintah baik bersumber dari penerimaan pajak, dan bukan pajak, hibah dan lainnya. Sisa investasi lainnya diharapkan dipenuhi dari dunia usaha dan masyarakat (perbankan, lembaga keuangan non bank, pasar modal).

Pencapaian proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh tercapainya kondisi ideal berbagai faktor determinan sebagai berikut:

1. **Laju Pertumbuhan Ekonomi:** kondisi ekonomi global membaik dan kondusif, pergeseran kekuatan ekonomi global dari barat ke timur, berlakunya ACFTA, volatilitas rupiah terhadap dollar AS dan stabilitas moneter nasional, upaya perbaikan iklim investasi, perbaikan infrastruktur dan reformasi birokrasi, stabilitas produksi sektor-sektor ekonomi, meningkatnya permintaan domestik Jabar, alokasi stimulus fiskal dari APBD yang tepat sasaran, ekspektasi dan kepercayaan pada pemerintah meningkat.
2. **Inflasi** dipengaruhi oleh: adanya permintaan meningkat, pengaruh eksternal (harga minyak, harga komoditas pangan di pasar internasional, dan fluktuasi kurs rupiah – dollar AS).
3. **Investasi** (PMTB harga berlaku), dengan ketentuan pemulihan ekonomi berlanjut, iklim usaha membaik, dan perbaikan berbagai regulasi.
4. **Pengangguran** diharapkan semakin menurun prosentasenya melalui penguatan dan pengembangan ekonomi lokal.

Pada tahun 2011 merupakan tahap penguatan sektor yang sudah mendapatkan *special treatment* dari tahun 2009-2010, sehingga setiap tahun merupakan proses yang berkesinambungan. Berdasarkan kerangka pemikiran penyusunan rencana induk, sintesa permasalahan dan kerangka model pembangunan berkelanjutan, maka arah perekonomian Jawa Barat adalah:

- 1) Penambahan kegiatan ekonomi produktif di sektor pertanian atau perdesaan melalui pendekatan diversifikasi usaha dan berbagai pemberdayaan;
- 2) Peningkatan daya saing industri manufaktur;
- 3) Perluasan produk agroindustri melalui pendekatan peningkatan rantai nilai dari hulu sampai hilir;
- 4) Pengembangan ekowisata, agrowisata, wisata budaya didukung infrastruktur;
- 5) Menginternalisasikan masalah lingkungan dalam kebijakan pembangunan;
- 6) Mengintegrasikan aspek lingkungan dalam bisnis;

- 7) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai baik jalan, irigasi, listrik, bandara, pelabuhan, pusat pemasaran secara bertahap;
- 8) Utilisasi energi air dan panas bumi;
- 9) Perluasan akses pasar (lokal, regional, nasional dan internasional) bagi produk Jabar melalui promosi;
- 10) Peningkatan skill pelaku ekonomi melalui berbagai strata UKM dan industri, perdagangan yang bersifat terlatih;
- 11) Penguatan kelembagaan (regulasi dan kebijakan yang hati-hati, fokus dan tepat sasaran, transparan, keberpihakan, koordinasi dan sinergitas).

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2011, yang merupakan tahun midterm dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat, dimana tolok ukur kinerja pembangunannya adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.5.
Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Jawa Barat RPJMD 2008-2013

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (Tahun 2007)	Capaian Tahun 2009	Target Midterm (2011)	Target 2013
MISI PERTAMA : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing					
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,5 tahun	7,58 tahun ^{***)}	9 - 9,5 tahun	10 - 10,5 tahun
2	Angka Melek Huruf	95,32%	95,60% ^{***)}	95 - 96%	97 – 98%
3	Angka Kematian Bayi (Kelahiran Hidup/KH)	40,26/1.000 KH (2006)	38/1.000 KH ⁵⁾	35-36/1.000 KH	33-34/1.000 KH
4	Angka Kematian Ibu (Kelahiran Hidup/KH)	321/100.000 KH (2003)	321,15/100.000 KH ⁵⁾	215-220/100.000 KH	205-210/100.000 KH
5	Indeks Pembangunan Gender	60,8 (2006)	61,81 (2008) ¹⁰⁾	63-64	65-66
6	Indeks Pemberdayaan Gender	54,4 (2006)	55,51 (2008) ¹⁰⁾	61-63	64-65
MISI KEDUA : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,41% per tahun	4,29% per tahun ¹⁾	5 – 6% per tahun	6 – 6,5% per tahun
2	Daya Beli Masyarakat	Rp. 623.526,-	Rp. 630.010,- ¹⁾	Rp. 625.000,- – Rp 630.000,-	Rp. 630.000,- – Rp 640.000,-
3	Laju Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) atas dasar harga berlaku	16,5%	10,55% ¹⁾	10-12%	12 – 14%
4	Indeks Gini	0,21	0,282 (2008) ¹⁾	0,19-0,20	0,18 – 0,19
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	54,73%	62,89% ¹⁾	55-56%	56-57%
MISI KETIGA : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah					
1	Tingkat Kemantapan Jalan	87,31%	89,5% (Jalan Provinsi) ⁷⁾	91-92%	93-94%
2	Intensitas Tanam Padi	1.9	194% ⁶⁾	194-198%	Lebih dari 200%
3	Rasio elektrifikasi perdesaan	99,59%	99,74% ³⁾	100%	100%
4	Rasio elektrifikasi rumah tangga	60,41%	66,91% ³⁾	67-69%	71-73%
5	Cakupan pelayanan persampahan (perkotaan)	53%	54% ⁴⁾	57-62%	65-70%
6	Cakupan pelayanan air bersih (perkotaan)	45%	48,4% ⁴⁾	50-55%	60-65%

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (Tahun 2007)	Capaian Tahun 2009	Target Midterm (2011)	Target 2013
7	Cakupan pelayanan air limbah (domestik perkotaan)	51%	51,8% ⁴⁾	56-61%	67-72%
MISI KEEMPAT : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan					
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,84%	1,2%¹⁾	1,7-1,8%	1,6 – 1,8%
2	Tingkat status mutu sungai utama dan waduk besar	status mutu cemar berat	7 sungai utama, status mutu cemar berat.	status mutu cemar sedang	status mutu cemar ringan
3	Jumlah hari dengan kualitas udara perkotaan katagori baik	20 hari baik/tahun	9 hari	27-30 hari	32-35 hari baik/tahun
4	Capaian luas kawasan lindung terhadap luas Jawa Barat	27%	29.31%	30-31%	34-35%
5	Jumlah penerapan energi alternatif	N/A	N/A	3	4
MISI KELIMA : Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi					
1	Skala kepuasan masyarakat (skala 1-4)	N/A	N/A	2	3
-	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan	N/A	74,11 ⁹⁾	85	90
2	Skala Komunikasi Organisasi (skala 1-7)	N/A	N/A	4	5
3	Jumlah angka kriminalitas	N/A	89 kasus ¹¹⁾	Menurunnya angka kriminalitas	Menurunnya angka kriminalitas
4	Jumlah kasus korupsi	N/A	N/A	Menurunnya jumlah kasus korupsi	Menurunnya jumlah kasus korupsi
5	Tingkat partisipasi pemilih	67-70 %	Pilkada kepala daerah di kabupaten/kota 70% (2008) ⁸⁾	75-78 %	Meningkatnya partisipasi pemilih Pilkada 2013 lebih besar dari 78 %

3.3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bandung

Berkaitan dengan dampak krisis terhadap sektor riil, yaitu hilangnya pasar potensial bagi usaha yang berbasis ekspor maka perlu disusun arah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meminimalkan dampak tersebut. Bukan hanya Indonesia yang kehilangan pasar, tetapi juga negara-negara lain. "Hilang"-nya pasar potensial, bisa berakibat pada penumpukan supply yang lebih jauh dapat merugikan perusahaan dan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) serta beralihnya pasar negara lain ke dalam negeri.

Langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dapat ditingkatkan melalui koordinasi dan efektivitas kebijakan sektor riil. Pemilihan potensi komoditas unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing wilayah. Terkendalanya pengembangan daya saing wilayah yang berbasis potensi unggulan lokal merupakan resultan dari lemahnya keterpaduan kebijakan.

Terkait dengan pengembangan wilayah, Kabupaten Bandung memiliki potensi yang relatif besar di sektor pertanian yaitu Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ketela), Hortikultura (Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias, Lebah madu) dan Tanaman Keras (Cengkeh, Kopi, Kelapa, Bambu); dan peternakan (sapi perah, sapi potong, domba, kambing, ayam pedaging, ayam petelur, itik). Selain itu di sektor sekunder terdapat industri pengolahan yang ditandai dengan banyaknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdiri dari Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) Kulit, IKRT Kayu, IKRT Logam, IKRT Gabah/Keramik, IKRT Anyaman, IKRT Kain/Tenun dan IKRT Mamin. Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan konsep Pembangunan Tahun 2010, akan dirumuskan kebijakan untuk pengurangan kemiskinan melalui pengembangan kawasan ekonomi terpadu berbasis agribisnis dan potensi lokal dengan konsep keterkaitan hulu hilir, sehingga dapat mengkaitkan antar sektor antar wilayah. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan wilayah serta mendorong terwujudnya koordinasi sinkronisasi keterpaduan dan kerjasama antar sektor.

Pengembangan kawasan ekonomi terpadu berbasis potensi lokal dengan konsep keterkaitan hulu hilir bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan berusaha, memaksimalkan nilai tambah, tercapainya skala ekonomi, sinergitas program, efisiensi dan efektivitas anggaran, meningkatkan ketahanan dan kemandirian ekonomi serta menggerakkan perekonomian daerah.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, maka kebijakan ekonomi tahun 2011 diarahkan untuk meningkatkan investasi daerah, percepatan pembangunan prasarana, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, pemerataan distribusi pendapatan, memperkuat perekonomian masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka pencapaian kerangka ekonomi makro yang diinginkan tersebut pemerintah daerah akan selalu meningkatkan peranan dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan.

Berkaitan dengan arah kebijakan ekonomi tersebut, maka Pemerintah menetapkan beberapa strategi sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan tahun 2011, yaitu melalui:

- a. Peningkatan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif.

b. Percepatan pembangunan prasarana.

Percepatan pembangunan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

c. Dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran, Pemerintah Daerah berupaya mendorong peningkatan kemampuan perekonomian daerah untuk penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD), peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar melalui penerapan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pangan dilakukan upaya peningkatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan lumbung desa untuk mewujudkan desa mandiri pangan, diversifikasi pangan dan bantuan bagi transportasi distribusi Raskin.

d. Dalam rangka pemerataan distribusi pendapatan maka didorong percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah pengembangan, pengembangan kawasan-kawasan khusus seperti pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan sentra-sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial, percepatan pembangunan pertanian melalui program revitalisasi pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan melalui peningkatan produksi pangan, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat, pengembangan produk unggulan (*core business* daerah) yang meliputi: agribisnis, industri manufaktur, dan pariwisata.

e. Dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat, pemerintah daerah melakukan upaya pengembangan UMKM melalui penyediaan bantuan untuk permodalan bergulir, pengembangan lembaga penjaminan untuk usaha kecil dan menengah, optimalisasi lembaga-lembaga ekonomi mikro yang ada di pedesaan (UED SP, BKM, BMT, LKD, BUMDES dan lain-lain), fasilitasi dan pembinaan manajemen usaha-usaha UMKM, dan mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat.

- f. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan.

3.4. Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pada tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp.165.054.791.409,00 yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.57.575.700.000,00; Retribusi Daerah sebesar Rp.44.248.091.409,00; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.47.000.000.000,00; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.16.231.000.000,00.

Secara lengkap, proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011 yang dibandingkan dengan APBD Tahun 2009 dan Tahun 2010, ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Realisasi 2009, Rencana 2010 dan RAPBD Tahun 2011

Uraian	Realisasi 2009	Rencana 2010	Rencana 2011
A.Pajak Daerah	57,730,000,000	57,521,700,000	57,575,700,000
B. Retribusi Daerah	41,478,359,000	43,588,189,409	44,248,091,409
C. Hasil Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	36,600,000,000	47,000,000,000	47,000,000,000
D. Lain - Lain PAD Yang Sah	15,836,000,000	16,202,000,000	16,231,000,000
Jumlah	151,644,359,000	164,311,889,409	165,054,791,409

3.4.1. Dana Desentralisasi

Salah satu sumber pendanaan bagi APBD adalah dana perimbangan yang merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan ini dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada tahun 2011, mendapat dana perimbangan sebesar Rp.1.402.282.349.678,00 yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.197.096.439.678,00, Dana Alokasi Umum sebesar Rp.1.086.282.210.000,00 dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.118.903.700.000,00. Sesuai ketentuan dalam Permendagri No 30 tahun 2007, maka apabila target pendapatan belum dapat terukur maka target pendapatan tahun 2011 yang berasal dari Dana Perimbangan diambil dari target tahun 2010. Namun demikian, dalam tabel akan dipaparkan rencana pendapatan dana perimbangan.

Terkait dengan kedudukan Pemerintahan Desa sebagai daerah otonom, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Dengan adanya kewenangan Desa tersebut, maka konsekuensinya terdapat dana APBD yang dialokasikan untuk membiayai urusan-urusan yang telah diserahkan tersebut dalam bentuk Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD). Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Dalam struktur APBD, dana desentralisasi kepada Pemerintahan Desa dimasukkan ke dalam kode rekening Belanja Bagi Hasil.

Secara lengkap alokasi Dana Perimbangan Tahun 2011 yang dibandingkan dengan APBD Tahun 2009 dan Tahun 2010, ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Perbandingan Dana Perimbangan
Realisasi 2009, Rencana 2010 dan RAPBD Tahun 2011

Uraian	Realisasi 2009	Rencana 2010	Rencana 2011
A. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	181,377,224,029	174,455,685,919.00	197,096,439,678
B. Dana Alokasi Umum	1,080,215,507,000	1,086,282,210,000	1,086,282,210,000
C. Dana Alokasi Khusus	29,388,000,000	118,903,700,000	118,903,700,000
Jumlah	1,290,980,731,029	1,379,641,595,919	1,402,282,349,678

3.4.2. Dana Dekonsentrasi/APBN

Dana Dekonsentrasi pada dasarnya adalah dana yang berasal dari adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah (Kementrian/Lembaga) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah. Dengan demikian analisis dan perkiraan sumber dana dekonsentrasi hanya dilakukan dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi dan tidak dilakukan di dalam RKPD Kabupaten.

3.4.3. Dana Tugas Pembantuan/APBN

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari penugasan Pemerintah (Kementrian/Lembaga) kepada Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan/atau Desa dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui Kementrian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah. Selanjutnya kegiatan Tugas Pembantuan di daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pendanaan dari Kementrian/Lembaga yang merupakan tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Program/Kegiatan tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah antara lain urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Pertanian, Kependudukan dan Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat. Namun demikian, sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten belum mendapat informasi tentang Dana Tugas Pembantuan yang akan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung.

Dalam peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa pengadministrasian dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan melalui mekanisme APBN, sedangkan pengadministrasian dana Desentralisasi mengikuti mekanisme APBD. Menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah, Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan secara bertahap akan dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.

Pada Tahun 2011 alokasi Dana Lain-lain Pendapatan yang Sah diproyeksikan sebesar Rp.131.958.375.423,00 yang diperoleh dari Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.111.301.340.958,00; sedangkan alokasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan alokasi Bantuan Keuangan dari Pusat, Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya masih menunggu konfirmasi dari Pusat. Secara lengkap proyeksi alokasi dana Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun 2011 yang dibandingkan dengan APBD Tahun 2009 dan Tahun 2010, ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Perbandingan Dana Lain-lain Pendapatan yang Sah
Realisasi 2009, Rencana 2010 dan RAPBD Tahun 2011

Uraian	Realisasi 2009	Rencana 2010	Rencana 2011
Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi	112,697,189,073	113,544,297,523	111,301,340,958
Bantuan dana penyesuaian	20,957,343,565	-	-
Bantuan Keuangan dari propinsi	171,987,649,927	20,657,034,465	20,657,034,465
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	-	-	-
Penerimaan dari pemerintah daerah lainnya	44,266,548,000		
Dana Darurat			
Dana Penyesuaian Otonomi Khusus			
Jumlah	349,908,730,565	134,201,331,988	131,958,375,423

3.5. Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD TA 2009 yaitu sebagai berikut :

3.5.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan-kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2011 yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- Pajak Daerah yang diproyeksikan meningkat terutama dari pajak pusat yang diserahkan ke daerah (PBB dan BPHTB)
- Retribusi Daerah diproyeksikan akan mengalami penurunan terutama dari retribusi administrasi kependudukan yang dibebaskan menurut UU administrasi kependudukan
- Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diproyeksikan mengalami peningkatan meliputi penerimaan dari BUMD (PDAM, BPR dan Bank Jabar Banten).
- Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan terutama dari penerimaan Jasa Giro
- Dana Perimbangan dari transfer pemerintah sementara menggunakan asumsi tahun sebelumnya, namun cenderung mengalami peningkatan seperti DAU, DAK, Dana Bagi Hasil bukan pajak.
- Penyiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pusat ke Daerah.
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan mengalami penurunan, terutama dari bantuan keuangan dari provinsi yang sudah tidak memberikan bantuan untuk Porda maupun pemilukada.

Tabel 3.8
Target Pendapatan 2011

NO	URAIAN	APBD 2009 REALISASI Rp.	APBD 2010 Rp.	RAPBD 2011 Rp.	Δ2011 - 2010
1	PENDAPATAN	1,792,533,820,594	1,678,154,817,316	1,699,295,516,510	21,140,699,194
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	151,644,359,000	164,311,889,409	165,054,791,409	742,902,000
1.1.1	PAJAK DAERAH	57,730,000,000	57,521,700,000	57,575,700,000	54,000,000
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	41,478,359,000	43,588,189,409	44,248,091,409	659,902,000
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	36,600,000,000	47,000,000,000	47,000,000,000	-
1.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	15,836,000,000	16,202,000,000	16,231,000,000	29,000,000
1.2	DANA PERIMBANGAN	1,290,980,731,029	1,379,641,595,919	1,402,282,349,678	22,640,753,759
1.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	181,377,224,029	174,455,685,919	197,096,439,678	22,640,753,759

NO	URAIAN	APBD 2009 REALISASI Rp.	APBD 2010 Rp.	RAPBD 2011 Rp.	Δ2011 - 2010
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	1,080,215,507,000	1,086,282,210,000	1,086,282,210,000	-
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	29,388,000,000	118,903,700,000	118,903,700,000	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	349,908,730,565	134,201,331,988	131,958,375,423	(2,242,956,565)
1.3.1	BAGI HASIL PAJAK PROVINSI DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DARI PROVINSI	112,697,189,073	113,544,297,523	111,301,340,958	(2,242,956,565)
1.3.2	BANTUAN DANA PENYESUAIAN	20,957,343,565			-
1.3.3	BANTUAN KEUANGANDARI PROVINSI	171,987,649,927	20,657,034,465	20,657,034,465	-
1.3.4	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH	-	-	-	-
1.3.5	PENERIMAAN DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	44,266,548,000	-	-	-
1.3.6	DANA DARURAT	-	-	-	-
1.3.7	DANA PENYESUAIAN OTONOMI KHUSUS	-	-	-	-

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Pendataan dan penghitungan target berdasarkan data potensi yang akurat terutama objek pajak bumi dan bangunan (PBB) serta perkiraan jumlah transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- Review terhadap beberapa peraturan (Perda dan Perbup) yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah.
- Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan PAD.
- Peningkatan koordinasi antara SKPD dalam upaya meningkatkan PAD.
- Penerapan insentif dan disinsentif.
- Pendayagunaan asset daerah.
- Peningkatan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya terutama dalam hal dana perimbangan dan pendapatan lain – lain daerah yang sah.

3.5.2. Kebijakan Belanja Daerah

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/issue yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

- Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada program penguatan pembangunan perdesaan (P4), operasional perangkat desa dan BPD, RT, RW, dan LKMD/LPMD atau sebutan lainnya desa kelurahan.
- Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
- Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan yang melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat, yaitu: 1) Reformasi birokrasi; 2) Pengembangan Wajar 12 tahun dan pendidikan vokasional; 3) peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan; 4) pengurangan kemiskinan daerah dan penyandang masalah sosial; 5) peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah; 6) peningkatan kemudahan bagi pelaku KUMKM; 7) pengembangan produk unggulan; 8) rehabilitasi kerusakan lingkungan, penataan ruang dan penanganan bencana; 9) pembangunan daerah dan wilayah perdesaan; 10) pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta 11) ketahanan pangan
- Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

3.5.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2010, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan diarahkan yaitu untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah serta penyediaan fasilitas kredit bagi pelaku KUMKM.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi APBD 2009, APBD 2010 dan Proyeksi APBD Tahun 2011

NO	URAIAN	APBD 2009 REALISASI Rp.	APBD 2010 Rp.	TAMBAH/KURANG 2010 - 2009 Rp.	D (%)	SKENARIO RAPBD 2011 Rp.	TAMBAH/KURANG 2011 - 2010 Rp.	D (%)
1	PENDAPATAN	1.792.533.820.594,00	1.759.860.506.787,00	-32.673.313.807,00	-1,82	1.699.295.516.510,00	-60.564.990.277,00	-3,44
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	151.644.359.000,00	165.287.141.409,00	13.642.782.409,00	9,00	165.054.791.409,00	-232.350.000,00	-0,14
1.1.1	PAJAK DAERAH	57.730.000.000,00	57.575.700.000,00	-154.300.000,00	-0,27	57.575.700.000,00	0,00	0,00
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	41.478.359.000,00	44.480.441.409,00	3.002.082.409,00	7,24	44.248.091.409,00	-232.350.000,00	-0,52
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	36.600.000.000,00	47.000.000.000,00	10.400.000.000,00	28,42	47.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	15.836.000.000,00	16.231.000.000,00	395.000.000,00	2,49	16.231.000.000,00	0,00	0,00
1,2	DANA PERIMBANGAN	1.290.980.731.029,00	1.402.282.349.678,00	111.301.618.649,00	8,62	1.402.282.349.678,00	0,00	0,00
1.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	181.377.224.029,00	197.096.439.678,00	15.719.215.649,00	8,67	197.096.439.678,00	0,00	0,00
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	1.080.215.507.000,00	1.086.282.210.000,00	6.066.703.000,00	0,56	1.086.282.210.000,00	0,00	0,00
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	29.388.000.000,00	118.903.700.000,00	89.515.700.000,00	304,60	118.903.700.000,00	0,00	0,00
1,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	349.908.730.565,00	192.291.015.700,00	157.617.714.865,00	-45,05	131.958.375.423,00	-60.332.640.277,00	-31,38
1.3.1	BAGI HASIL PAJAK PROVINSI DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DARI PROVINSI	112.697.189.073,00	117.306.438.235,00	4.609.249.162,00	4,09	111.301.340.958,00	-6.005.097.277,00	-5,12
1.3.2	BANTUAN DANA PENYESUAIAN	20.957.343.565,00	0	-20.957.343.565,00	-100,00	0	0,00	0,00
1.3.3	BANTUAN KEUANGANDARI PROVINSI	171.987.649.927,00	0,00	-171.987.649.927,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5	PENERIMAAN DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	44.266.548.000,00	74.984.577.465,00	30.718.029.465,00	69,39	20.657.034.465,00	-54.327.543.000,00	-72,45
1.3.6	DANA DARURAT	-	-	-	-	-	-	-
1.3.7	DANA PENYESUAIAN OTONOMI KHUSUS	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	APBD 2009 REALISASI Rp.	APBD 2010 Rp.	TAMBAH/KURANG 2010 - 2009 Rp.	D (%)	SKENARIO RAPBD 2011 Rp.	TAMBAH/KURANG 2011 - 2010 Rp.	D (%)
2	BELANJA DAERAH	1.704.151.631.360,00	2.089.381.649.041,00	385.230.017.681,00	22,61	1.902.280.643.851,00	-187.101.005.190,00	-8,95
2,1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.202.305.931.496,00	1.333.984.810.117,00	131.678.878.621,00	10,95	1.194.186.580.103,00	-139.798.230.014,00	-10,48
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	972.942.002.750,00	1.031.998.485.103,00	59.056.482.353,00	6,07	1.031.998.485.103,00	0,00	0,00
2.1.2	BELANJA BUNGA	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	BELANJA HIBAH	29.715.148.000,00	117.739.902.454,00	88.024.754.454,00	296,23	24.901.000.000,00	-92.838.902.454,00	-78,85
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	36.507.178.750,00	31.871.121.280,00	-4.636.057.470,00	-12,70	9.624.566.000,00	-22.246.555.280,00	-69,80
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL	38.864.533.598,00	31.871.121.280,00	-6.993.412.318,00	-17,99	35.322.570.000,00	3.451.448.720,00	10,83
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	121.277.068.398,00	105.504.180.000,00	-15.772.888.398,00	-13,01	80.339.959.000,00	-25.164.221.000,00	-23,85
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	15.000.000.000,00	12.000.000.000,00	400,00	12.000.000.000,00	-3.000.000.000,00	-20,00
2,2	BELANJA LANGSUNG	501.845.699.864,00	755.396.838.924,00	253.551.139.060,00	50,52	708.094.063.748,00	-47.302.775.176,00	-6,26
2.2.1	BELANJA LANGSUNG DI SETIAP SKPD	79.773.887.004,00	102.713.584.855,00	22.939.697.851,00	28,76	105.659.429.708,00	2.945.844.853,00	2,87
2.2.2	BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHAN	422.071.812.860,00	652.683.254.069,00	230.611.441.209,00	54,64	602.434.634.040,00	-50.248.620.029,00	-7,70
3	PEMBIAYAAN NETTO	183.718.429.110,00	333.993.042.857,00	150.274.613.747,00	81,80	202.985.127.341,00	-131.007.915.516,00	-39,22
3,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	192.743.969.870,00	355.021.042.857,00	162.277.072.987,00	84,19	217.985.127.341,00	-137.035.915.516,00	-38,60
3.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (SILPA)	165.000.000.000,00	332.521.042.857,00	167.521.042.857,00	101,53	186.352.862.799,00	-146.168.180.058,00	-43,96
3.1.2	PENCAIRAN DANA CADANGAN	17.817.264.541,36	22.500.000.000,00	4.682.735.458,64	26,28	31.632.264.542,00	9.132.264.542,00	40,59
3.1.3	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	9.926.705.328,64	0,00	-9.926.705.328,64	-100,00	0	0,00	0,00
3.1.5	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAAN PINJAMAN	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	-	-	-	-	-	-	-
3,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.025.540.760,00	21.028.000.000,00	12.002.459.240,00	132,98	15.000.000.000,00	-6.028.000.000,00	-28,67
3.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN (PILKADA)	7.500.000.000,00	-	-7.500.000.000,00	-100,00	-	0,00	0,00
3.2.2	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	1.525.540.760,00	21.028.000.000,00	19.502.459.240,00	1.278,40	15.000.000.000,00	-6.028.000.000,00	-28,67
3.2.3	PENYERTAAN MODAL PD BPR	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	PENYERTAAN MODAL PT CBS	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 merupakan penjabaran dari Rancangan Perda RPJPD tahun 2005 – 2025 terutama pembangunan jangka menengah tahap ke-2 tahun 2011 – 2015. Selain itu, dengan melihat capaian hasil pembangunan tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2011, dan RKPD Provinsi Jawa Barat 2011.

4.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas pembangunan nasional tahun 2011, merupakan penjabaran dari sebagian RPJMN (2010 – 2014) yang mengusung visi Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan diemban melalui 3(tiga) misi yakni: (1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, (2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi, serta (3) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Dengan memperhatikan realisasi pembangunan tahun 2009 dan perkiraan capaian tahun 2010 maka tema pembangunan nasional tahun 2011 adalah: "*Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung oleh pementapan tata kelola dan sinergi pusat daerah*". Tema tersebut selanjutnya dilaksanakan ke dalam 11 prioritas pembangunan nasional dan 3 prioritas lainnya yaitu:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan iklim usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, teluar dan pasca konflik;
11. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.
12. Bidang politik, hukum dan keamanan;
13. Bidang perekonomian, serta;
14. Bidang kesejahteraan rakyat.

**SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2011**

No.	PEMBANGUNAN	SASARAN		
SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
1.	Ekonomi			
	a)	Pertumbuhan Ekonomi	6,3 persen	
	b)	Inflasi	5,7 persen	
	c)	Tingkat Pengangguran (terbuka)	7,3 persen	
	d)	Tingkat Kemiskinan	11,5 – 12,5 persen	
2.	Pendidikan			
			Status Awal (2008)	Target tahun 2011
	a)	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun)	7,50	7,75
	b)	Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas (persen)	5,97	5,17
	c)	Meningkatnya APM SD/SDLB/MI/Paket A (persen)	95,14	95,3
	d)	Meningkatnya APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (persen)	72,28	74,7
	e)	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C (persen)	64,28	76,0
	f)	Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (persen)	21,26	26,1
	g)	Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat		
3.	Pangan			
	a)	Produksi Padi	68,8 juta ton GKG	
	b)	Produksi Jagung	22,0 juta ton	
	c)	Produksi Kedelai	1,6 juta ton	
	d)	Produksi Gula	3,9 juta ton	
	e)	Produksi Daging Sapi	439 ribu ton	
	f)	Produksi Ikan	12,3 juta ton	
4.	Energi			
	a)	Peningkatan kapasitas pembangkit listrik	37 MW	
	b)	Meningkatnya rasio elektrifikasi	70,4 persen	
	c)	Meningkatnya produksi minyak bumi	970 ribu barrel per hari	
	d)	Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi	PLTP 1261 MW	
5.	Infrastruktur			
	a)	Pembangunan Jalan Lintas Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua	Total jalan yang dibangun 3,549 km	
b)	Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda	<p>► Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda</p>		

		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Terbangunnya sistem jaringan transportasi perkotaan dan perdesaan di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan dan pulau terdepan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang juga didorong melalui pelayanan perintis, Public Service Obligation (PSO), dan DAK bidang transportasi perdesaan; ▶ Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi. ▶ Meningkatnya keselamatan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi
c)	Penuntasan pembangunan Jaringan Serat Optik di Indonesia Bagian Timur	▶ Terselesaikannya pembangunan link Mataram - Kupang
d)	Perbaikan sistem dan jaringan transportasi d 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ penyelesaian detail engineering design untuk MRT Jakarta dan penilaian proyek monorail ▶ penyelesaian Bandung Urban Transport Master Plan ▶ penyusunan Surabaya Urban Transport Master Plan
SASARAN PERKUATAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI		
1.	Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia	Pada tahun 2011: Indeks Demokrasi Indonesia: 65
SASARAN PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM		
1	Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (<i>rule of law</i>) dan terjaganya ketertiban umum.	Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2011 3,0 yang meningkat dari 2,8 pada tahun 2009

4.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Prioritas pembangunan Jawa Barat diarahkan pada penyelesaian isu strategis dan permasalahan yang muncul dari hasil evaluasi pembangunan tahun 2009 dan tahun 2010 serta dengan melihat fakta permasalahan dan tantangan tahun 2011, maka Isu strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 adalah:

- 1) Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan, pemuda dan olahraga
- 2) Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat
- 3) Ketahanan pangan masyarakat
- 4) Iklim usaha dan jaminan investasi
- 5) Permodalan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
- 6) Kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan
- 7) Kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi
- 8) Kualitas lingkungan dan penanganan bencana

- 9) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah
- 10) Pemenuhan kebutuhan energi berkelanjutan
- 11) Peningkatan desa membangun menuju desa peradaban
- 12) Apresiasi dan pengembangan budaya daerah serta menggali potensi wisata

Dalam rangka menuntaskan isu strategis Jawa Barat tahun 2011, pencapaian pembangunan dilakukan melalui strategi common goals dan non-common goals. Program/kegiatan yang disinergikan melalui Common Goals merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi Jawa Barat 2008-2013, yang diwujudkan melalui sinergitas dengan pembagian peran OPD dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: OPD utama, OPD mitra utama dan OPD pendukung (kelompok OPD pendukung umum serta kelompok OPD penjaminan mutu dan akuntabilitas); serta dengan memberikan keberpihakan anggaran pada bidang-bidang pembangunan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Common Goals merupakan rencana kerja prioritas pembangunan yang dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) Common Goals sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Difokuskan pada meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan guna pencapaian AMH dan RLS melalui pelayanan pendidikan non formal dan formal dasar dan menengah diikuti dengan pendidikan luar biasa dan kemampuan baca tulis serta pengembangan pendidikan bertaraf internasional.

Sasaran:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A, B, dan C Plus Kewirausahaan;
- b. Penuntasan Jabar Bebas Biaya Sekolah Pendidikan Dasar 9 Tahun;
- c. Perintisan Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah Pendidikan Menengah 12 Tahun;
- d. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah Bertaraf Internasional;
- e. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Luar Biasa.
- f. Pelaksanaan Fasilitas Pendidikan Tinggi
- g. Pengembangan Infrastruktur Olahraga dan Pemuda

b. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Difokuskan pada pelayanan kesehatan dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sasaran:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- b. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
- c. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan;

- e. Menuju Universal coverage JPKM;
- f. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada Puskesmas dan RSUD;
- g. Meningkatkan Citra Kawasan Jatinangor sebagai Etalase Kawasan Pendidikan Jawa Barat.

c. Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Difokuskan pada Pengembangan aneka usaha yang bernilai tambah dan berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui prinsip masyarakat bekerja.

Sasaran:

- a. Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta perbaikan iklim investasi yang kondusif untuk mempertahankan dan menumbuhkan investasi;
- b. Meningkatnya peran kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat;
- c. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah dan berdaya saing;
- d. Terkendalinya tata niaga hulu-hilir dan perlindungan konsumen, dalam menghadapi persaingan global;
- e. Meningkatnya dukungan infrastruktur ekonomi di kawasan agribisnis dan kawasan industri.

d. Kemandirian Pangan

Difokuskan pada ketersediaan dan kecukupan aneka bahan pangan berbasis potensi lokal, yang berkualitas dan berkesinambungan.

Sasaran:

- a. Meningkatnya ketersediaan dan kesinambungan input produksi bahan pangan;
- b. Terkendalinya stock pangan dan keanekaragaman bahan pangan pada sentra produksi;
- c. Terkendalinya tingkat kerawanan pangan dan kecukupan gizi masyarakat;
- d. Terkendalinya distribusi dan stabilitas harga bahan pangan, serta perlindungan konsumen;
- e. Meningkatnya dukungan infrastruktur di sentra produksi pangan.

e. Peningkatan Kinerja Aparatur

Difokuskan pada meningkatkan profesionalisme aparatur dan kinerja pemerintahan daerah yang didukung oleh kualitas dan pengelolaan data dan informasi yang akurat dan handal dalam kerangka satu data untuk pembangunan Jawa Barat.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan *Good Governance*;
- b. Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat;
- c. Meningkatnya pembangunan hukum di daerah, ketertiban dan keamanan masyarakat;
- d. Meningkatnya harmonisasi pembangunan antar tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan.

f. Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Difokuskan pada pengembangan infrastruktur jalan, perhubungan, sumberdaya air dan irigasi serta permukiman

Sasaran :

- a. Meningkatkan efektivitas pergerakan orang, barang dan jasa di pusat kegiatan ekonomi;
- b. Penyediaan infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi;
- c. Tersedianya infrastruktur pengolahan sampah regional.

g. Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku

Difokuskan pada pengembangan energi alternatif dan listrik perdesaan, serta infrastruktur penyedia air baku

Sasaran:

- a. Tersedianya energi untuk mendukung pembangunan Jawa Barat;
- b. Pemenuhan kecukupan air baku untuk mendukung pembangunan Jawa Barat.

h. Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Difokuskan pada upaya pengurangan resiko bencana, percepatan penanganan korban manusia, penanggulangan akibat bencana serta pelestarian dan perluasan kawasan lindung

Sasaran:

- a. Meningkatkan efektivitas mitigasi dan percepatan penanganan bencana;
- b. Meningkatnya luas dan fungsi kawasan lindung dan pengendalian luasan lahan kritis.
- c. Meningkatnya kualitas lingkungan udara dan air

i. Pembangunan Perdesaan

Difokuskan pada Meningkatkan kemandirian masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan, kapasitas fiskal, infrastruktur dasar dan perekonomian perdesaan.

Sasaran:

Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pembangunan.

j. Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata

Difokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal serta destinasi wisata untuk kemajuan pembangunan Jawa Barat.

Sasaran:

- a. Terkelolanya eksplorasi dan pengembangan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal dalam proses pembangunan Jawa Barat;
- b. Terfasilitasinya gelar karya serta kreativitas seni dan budaya lokal;
- c. Terintegrasinya sistem pengembangan kepariwisataan daerah;
- d. Meningkatnya kegiatan kepariwisataan di Jawa Barat.

k. Non Common Goals

Non-Common Goals (Diferensial Goals) merupakan dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; pemenuhan belanja tetap dan mengikat OPD, serta kegiatan yang bersifat sektoral atau rintisan.

l. Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

Berdasarkan kewilayahan pembangunan daerah diarahkan pada 4(empat) Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) Jawa Barat, yaitu:

- (1) WKPP I mencakup: Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Depok, dengan program unggulan sebagai berikut: a) Integrasi sentra pengembalaan ternak sapi potong dan domba di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten/Kota Sukabumi; b) Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur; c) Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, bisnis kelautan dan pertambangan dalam rangka perintisan Pusat Kegiatan Nasional Provinsi (PKN Prov) Palabuhanratu yang diupayakan menjadi PKN pada tahun 2011; d) Pusat Pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi pasar regional dan internasional; e) Pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas.
- (2) WKPP II mencakup: Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, dengan program unggulan sebagai berikut: a) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Karawang-Bekasi; b) Pengembangan kawasan industri manufaktur; c) Pengembangan industri perberasan; d) Pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar dan air payau serta hutan mangrove; e) Pengembangan wisata sejarah dan kepurbakalaan.

- (3) WKPP III, meliputi: Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan dengan program unggulan sebagai berikut: a) Pengembangan agribisnis mangga; b) Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija; c) Pengembangan destinasi wisata berupa wisata budaya, eko wisata, wisata ziarah (pilgrimage) serta Pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai dan Taman Raya Kuningan; d) Pengembangan perikanan budidaya air payau serta hutan mangrove; e) Pengembangan batik, industri makanan dan minuman olahan.
- (4) WKPP IV, meliputi: Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat dengan program unggulan sebagai berikut: a) Pusat pengembangan pendidikan dan riset; b) Integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak unggas, budidaya ikan air tawar di Kab. Ciamis, Tasikmalaya dan Kota Banjar serta ternak sapi perah di Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Sumedang dan Garut, serta domba Garut di Garut dan jejaringnya; c) Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat dan Kota Cimahi; d) Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya; e) Pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran.

4.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung

Penentuan prioritas pembangunan kabupaten Bandung tahun 2011, disusun berdasarkan capaian hasil pembangunan tahun 2009 dan rencana capaian 2010, isu strategis dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam rancangan RPJPD 2005 – 2025 tahapan ke-2, juga disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan Jawa Barat tahun 2011. Selanjutnya, dalam RKPD Tahun 2011 yang menjadi Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2011 yaitu:

1. Reformasi birokrasi
2. Pengembangan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan vokasional
3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan
4. Pengurangan kemiskinan daerah dan penyandang masalah sosial;
5. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah
6. Peningkatan kemudahan bagi pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM)
7. Pengembangan produk unggulan;
8. Rehabilitasi kerusakan lingkungan, penataan ruang dan penanganan bencana

9. Pemantapan pembangunan daerah dan wilayah perdesaan.
10. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta;
11. Pemantapan ketahanan pangan

Hubungan prioritas pembangunan pada RKP 2011, RKPD Provinsi Jawa Barat 2011, dan RKPd Kabupaten Bandung Tahun 2011, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Matriks Hubungan Prioritas Pembangunan
Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung

Nasional 2011	Prov. Jawa Barat 2011	RKPD Kab. Bandung 2011
Reformasi birokrasi dan tata kelola	Peningkatan kinerja aparatur	Reformasi birokrasi
Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan	Pengembangan Wajib belajar 12 tahun dan pendidikan vokasional
Kesehatan	Peningkatan kualitas kesehatan	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan
Penanggulangan kemiskinan	Peningkatan daya beli masyarakat	Pengurangan kemiskinan daerah dan penyandang masalah sosial
Ketahanan pangan	Kemandirian pangan	Pemantapan ketahanan pangan
Infrastruktur	Pengembangan infrastruktur wilayah	Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah
Iklim investasi dan Iklim Usaha	-	Peningkatan kemudahan bagi pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM)
		Pengembangan produk unggulan
Energi	Pengembangan energi	-
Lingkungan dan Pengelolaan Bencana	Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup	Rehabilitasi kerusakan Lingkungan, Penataan Ruang dan Penanganan Bencana
Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik	Pembangunan perdesaan	Pemantapan pembangunan daerah dan wilayah perdesaan
Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi	Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata	-
Bidang polhukam	-	Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
Bidang perekonomian	-	-
Bidang kesejahteraan rakyat	-	-

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas program dan sasaran pencapaiannya disusun dengan memperhatikan 11 (sebelas) prioritas pembangunan sebagaimana diuraikan dalam sub-subbab sebelumnya. Prioritas pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2011 dijabarkan melalui beberapa program dan sasaran pembangunan seperti berikut ini:

1. **Reformasi birokrasi**, dimaksudkan untuk melakukan penatakelolaan pemerintahan yang lebih baik melalui peningkatan kinerja aparatur, penuh dedikasi, integritas, *the right man the right place*, pemenuhan formasi pegawai secara bertahap, akuntabel, transparan sehingga dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Program dan sasaran yang termasuk dalam prioritas pembangunan reformasi birokrasi:

Isu Strategis 2011	Prioritas Pembangunan 2011	Sasaran Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD
Kualitas pelayanan birokrasi	Reformasi birokrasi	Terselenggaranya penatakelolaan pemerintahan yang lebih baik melalui peningkatan kinerja aparatur, penuh dedikasi, integritas, kompeten, pemenuhan formasi pegawai, akuntabel, transparan, menuju pemerintahan yang efektif dan efisien	Perencanaan Pembangunan	
			Program perencanaan pembangunan daerah	Bappeda
			Program perencanaan sosial budaya	Bappeda
			Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Bappeda
			Kependudukan dan Catatan Sipil	
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinsosdukcasip
			Penanaman Modal	
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	BPMP
			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kependidikan dan Persandian	
			Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Setwan
			Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Setda
			Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DPPK dan Setda
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Setda, Inspektorat, Kec dan Kel
			Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Inspektorat
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Setda dan Setwan			

Isu Strategis 2011	Prioritas Pembangunan 2011	Sasaran Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD
			Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Setda
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKPP
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKPP
			Kearsipan	
			Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Bapapsi
			Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Bapapsi
			Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Bapapsi
			Komunikasi dan Informatika	
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Dishub, Bapapsi
			Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Bapapsi
			Program kerjasama informasi dengan media massa	Setda

2. **Pengembangan Wajib belajar 12 tahun dan pendidikan vokasional**, dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, berkesinambungan di tiap jenjang, serta mampu menyiapkan lulusan yang memenuhi kesempatan kerja yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Capaian keberhasilan pendidikan ditandai oleh meningkatnya indek pendidikan (RLS dan AMH) serta peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Salah satu wujud kebijakan pembangunan pendidikan diantaranya melalui pengembangan wajar 12 tahun serta perluasan sekolah – sekolah kejuruan yang diminati oleh pasar tenaga kerja. Program dan sasaran yang termasuk dalam prioritas pembangunan pengembangan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan vokasional:

Isu Strategis 2011	Prioritas Pembangunan 2011	Sasaran Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD
Rintisan wajib belajar 12 tahun dan pengembangan pendidikan vokasional	Pengembangan Wajib belajar 12 tahun dan pendidikan vokasional	Terselenggaranya pelayanan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, berkesinambungan tiap jenjang/tingkatan, serta mampu menyiapkan lulusan yang memenuhi kesempatan kerja yang dibutuhkan yang ditandai dengan peningkatan indek pendidikan (RLS dan AMH) dan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan	Pendidikan	
			Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dikbud
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dikbud
			Program Pendidikan Menengah	Dikbud
			Program Pendidikan Non Formal	Dikbud
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dikbud

Isu Strategis 2011	Prioritas Pembangunan 2011	Sasaran Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD	
		Kerja (TPAK)	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dikbud	
			Sosial		
			Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Dinsosdukcasip	
			Ketenagakerjaan		
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker	
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Disnaker	
			Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Disnaker	
			Kebudayaan		
			Program Pengembangan Nilai Budaya	Dikbud	
			Kepemudaan dan Olah Raga		
			Program peningkatan peran serta kepemudaan	Dispopar	
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Dispopar	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dispopar	
			Perpustakaan		
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Bapapsi		

3. **Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan**, dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata di setiap wilayah, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan dengan pendekatan kuratif, preventif, dan promotif. Capaian keberhasilan pelayanan kesehatan ditandai oleh peningkatan indeks kesehatan (UHH, AKI dan AKB) serta peningkatan kualitas lingkungan. Program dan sasaran yang termasuk dalam prioritas pembangunan peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan:

Isu Strategis 2011	Prioritas Pembangunan 2011	Sasaran Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD
Aksesibilitas kualitas pelayanan kesehatan dan sarana prasarana kesehatan	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan	Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata di setiap wilayah, berkeadilan bagi setiap status sosial ekonomi masyarakat, yang dicirikan oleh peningkatan indeks kesehatan (UHH, AKI dan AKB) dan kualitas lingkungan membaik.	Kesehatan	
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinkes
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes, RSD Majalaya dan RSUD Cicalengka
			Program Pengawasan Obat dan Makanan	Dinkes
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Dinkes, RSD Soreang dan RSUD Cicalengka
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinkes

Isu Strategis 2011	Prioritas Pembangunan 2011	Sasaran Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinkes
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinkes
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinkes dan RSUD Cicalengka
			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Dinkes
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	RSD Soreang, RSD Majalaya dan RSUD Cicalengka
			Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	RSD Soreang, RSD Majalaya dan RSUD Cicalengka
			Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Dinkes, RSD Soreang, Majalaya dan Cicalengka
			Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Dinkes
			Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Dinkes
			Pekerjaan Umum	
			Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	RSD Soreang
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	BKBPP
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	BKBPP
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	BKBPP
			Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
			Program Keluarga Berencana	BKBPP
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	BKBPP
			Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	BKBPP
			Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	BKBPP
			Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	BKBPP

Isu Strategis 2011	Prioritas Pembangunan 2011	Sasaran Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD
			Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	BKBPP

4. **Pengurangan kemiskinan daerah dan Penyandang Masalah Sosial**, dimaksudkan untuk melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui: pengembangan jaminan sosial (PKH, Jamkesmas, BOS, BOMM, Raskin), pembedayaan masyarakat (PNPM), dan pemberian kemudahan bagi masyarakat miskin dalam bekerja dan berusaha (KUR, pelatihan ketrampilan, skema pinjaman lunak daerah). Capaian keberhasilan pengurangan kemiskinan daerah dan penyandang masalah sosial ditandai oleh menurunnya jumlah keluarga miskin dan menurunnya angka penyandang masalah sosial. Program dan sasaran yang termasuk dalam prioritas pembangunan pengurangan kemiskinan daerah:

Isu Strategis 2011	Prioritas Pembangunan 2011	Sasaran Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD
Masih tingginya angka kemiskinan dan penyandang masalah sosial	Pengurangan kemiskinan daerah dan Penyandang Masalah Sosial	Terlaksananya upaya penanggulangan kemiskinan melalui jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan, kemudahan akses dalam pekerjaan dan berusaha bagi penduduk miskin	Kesehatan	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
			Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Dinkes
			Perumahan	
			Program Pengembangan Perumahan	Dispertasih
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Dispertasih
			Perencanaan Pembangunan	
			Program perencanaan pembangunan ekonomi	Bappeda
			Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
			Program Keluarga Berencana	BKBPP
			Sosial	
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinsosdukcasip
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinsosdukcasip
			Program pembinaan anak terlantar	Dinsosdukcasip
			Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Dinsosdukcasip
			Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Dinsosdukcasip
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Dinsosdukcasip			
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Dinsosdukcasip			

Isu Strategis 2011	Prioritas Pembangunan 2011	Sasaran Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD
			Ketransmigrasian	
			Program Transmigrasi Regional	Disnaker

5. **Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah**, dimaksudkan untuk penyediaan kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar secara proporsional di setiap wilayah sehingga mampu mendorong aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Capaian keberhasilan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah ditandai oleh membaiknya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar wilayah seperti; jalan, jembatan, irigasi, drainase, perumahan, permukiman, tata ruang, energi listrik, serta fasilitas sosial ekonomi lainnya. Program dan sasaran yang termasuk dalam prioritas pembangunan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah:

Isu Strategis 2011	Prioritas Pembangunan 2011	Sasaran Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD
Kualitas pelayanan sarana prasarana dasar wilayah	Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah	tersedianya sarana dan prasarana dasar wilayah yang mampu melayani setiap wilayah, mendorong aktifitas sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dengan ditandai oleh membaiknya kualitas sarana dan prasarana dasar wilayah seperti; jalan, jembatan, irigasi, drainase, perumahan, permukiman, tata ruang, energi listrik, serta fasilitas sosial ekonomi lainnya.	Pekerjaan Umum	
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
			Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Bina Marga
			Program Pembangunan turap/talud/brojong	Bina Marga
			Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
			Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Bina Marga
			Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Bina Marga
			Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Bina Marga
			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	SDAPE
			Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	SDAPE
			Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Bina Marga
			Perumahan	
			Program Pengembangan Perumahan	Dispertasih
			Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Dispertasih
			Program pengelolaan areal pemakaman	Dispertasih
			Perencanaan Pembangunan	
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Bappeda
			Perhubungan	
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dishub dan Bina Marga

Isu Strategis 2011	Prioritas Pembangunan 2011	Sasaran Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dishub
			Program peningkatan pelayanan angkutan	Dishub
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dishub
			Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Dishub
			Energi dan Sumberdaya Mineral	
			Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	SDAPE

6. **Peningkatan kemudahan bagi pelaku KUMKM**, dimaksudkan untuk menyediakan, memberikan dan memfasilitasi kepada pelaku koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya (permodalan, keberlanjutan pasar, kelembagaan, kapasitas dan kualitas produk). Capaian keberhasilan pembangunan ditandai dengan peningkatan nilai tambah netto (pendapatan) yang diterima oleh para pelaku KUMKM. Program dan sasaran yang termasuk dalam prioritas pembangunan peningkatan kemudahan bagi pelaku KUMKM:

Isu Strategis 2011	Prioritas Pembangunan 2011	Sasaran Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD
Aksesibilitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap sumber daya	Peningkatan kemudahan bagi pelaku KUMKM	Terlaksananya fasilitasi dan kemudahan bagi pelaku KUMKM terhadap permodalan, keberlanjutan pasar, kelembagaan, kapasitas dan kualitas produk, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah netto pelaku KUMKM	Perencanaan Pembangunan	
			Program perencanaan pembangunan ekonomi	Bappeda
			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
			Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Diskoperindag
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Diskoperindag
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Diskoperindag
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Diskoperindag
			Penanaman Modal	
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BPMP
			Perdagangan	
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Diskoperindag			

7. **Pengembangan produk unggulan**, dimaksudkan untuk mewujudkan berbagai jenis produk unggulan yang bisa menjadi ciri khas daerah terutama dari sektor – sektor yang memanfaatkan potensi lokal (*comparative advantage*) seperti pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata, budaya serta mendorong tumbuhnya produk – produk turunan yang memiliki daya saing (*competitive advantage*). Capaian keberhasilan pembangunan ditandai oleh meningkatnya nilai tambah bruto sektor – sektor usaha yang memiliki produk unggulan. Program dan sasaran yang termasuk dalam prioritas pembangunan pengembangan produk unggulan:

Isu Strategis 2011	Prioritas Pembangunan 2011	Sasaran Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD
Kemampuan daya saing produk unggulan daerah	Pengembangan produk unggulan	Terwujudnya berbagai jenis produk unggulan yang menjadi ciri khas daerah terutama sektor - sektor usaha yang memanfaatkan potensi lokal seperti pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata, budaya beserta produk turunannya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah	Perencanaan Pembangunan	
			Program perencanaan pembangunan ekonomi	Bappeda
			Penanaman Modal	
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BPMP
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.	BPMP
			Kebudayaan	
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dikbud
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Dikbud
			Pertanian	
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	BKP3 dan Distanbunhut
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	BKP3 dan Distanbunhut
			Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	BKP3 dan Distanbunhut
			Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Distanbunhut
			Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	BKP3
			Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Disnakan
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Disnakan
			Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Disnakan
			Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Disnakan dan BKP3
			Kehutanan	
			Preogram Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Hutan	BKP3
			Pariwisata	
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dispopar
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dispopar

Isu Strategis 2011	Prioritas Pembangunan 2011	Sasaran Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD
			Program Pengembangan Kemitraan	Dispopar
			Kelautan dan Perikanan	
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Disnakan
			Program Pengembangan sistim Penyuluhan Perikanan	BKP3
			Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Disnakan
			Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar	Disnakan
			Perdagangan	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Diskoperindag
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Diskoperindag
			Industri	
			Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Diskoperindag
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Diskoperindag
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Diskoperindag
			Program Penataan Struktur Industri	Diskoperindag
			Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Diskoperindag

8. **Rehabilitasi kerusakan lingkungan, Penataan Ruang dan Penanganan Bencana**, dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang telah mengalami penurunan daya dukung maupun daya tampungnya. Upaya perbaikan lingkungan dilakukan melalui pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam, yang ditandai oleh: pengurangan luas lahan kritis, peningkatan kualitas lingkungan (baku mutu pencemaran) serta adanya peningkatan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Sejalan dengan upaya perbaikan lingkungan, pengelolaan bencana yang kerap melanda seperti (banjir, longsor, gempa, angin puting beliung maupun kebakaran) dilakukan secara terarah dan terpadu. Program dan sasaran yang termasuk dalam prioritas pembangunan rehabilitasi kerusakan lingkungan dan penanganan bencana:

Isu Strategis 2011	Prioritas Pembangunan 2011	Sasaran Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD
Penanganan bencana dan kerusakan lingkungan	Rehabilitasi kerusakan lingkungan, Penataan Ruang dan Penanganan Bencana	terlaksananya perbaikan, pengendalian lingkungan dan sumber daya alam yang ditandai oleh pengurangan lahan kritis, peningkatan kualitas lingkungan (baku mutu pencemaran), daya dukung dan tampung meningkat, menurunnya kuantitas dan kualitas bencana, serta penanganan bencana yang terarah dan terpadu.	Kesehatan	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
			Pekerjaan Umum	
			Program pengendalian banjir	SDAPE
			Perumahan	
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Dispertasih
			Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Dispertasih
			Penataan Ruang	
			Program Perencanaan Tata Ruang	Dispertasih
			Program Pemanfaatan Ruang	Bappeda
			Program Pemanfaatan Ruang	Dispertasih
			Perencanaan Pembangunan	
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Bappeda
			Lingkungan Hidup	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dispertasih
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	BPLH
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	BPLH
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	BPLH
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi	BPLH
			Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Dispertasih
			Sosial	
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinsosdukcasip
			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
			Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesbanglinmas
			Kehutanan	
			Program rehabilitasi hutan dan lahan	Distanbunhut
			Energi dan Sumberdaya Mineral	
			Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	SDAPE
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	SDAPE			

9. **Pemantapan Pembangunan Daerah dan Wilayah Perdesaan**, dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan daerah, pembangunan antar wilayah desa dan wilayah perkotaan. Wujud keseimbangan pembangunan antar wilayah ditandai oleh adanya peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pemenuhan sarana prasarana tingkat desa, serta mendorong terbentuknya desa mandiri dan sejahtera. Program dan sasaran yang termasuk dalam prioritas pembangunan Penguatan pembangunan perdesaan:

Isu Strategis 2011	Prioritas Pembangunan 2011	Sasaran Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD
Keterpaduan pembangunan daerah dan wilayah pedesaan	Pemantapan Pembangunan Daerah dan Wilayah Perdesaan	tercapainya keseimbangan pembangunan daerah, antar wilayah desa dan di pelbagai sektor pembangunan serta mampu mendorong terbentuknya desa mandiri dan sejahtera	Perencanaan Pembangunan	
			Program Pengembangan data/informasi	Bappeda
			Program Kerjasama Pembangunan	Bappeda
			Program perencanaan pembangunan daerah	Bappeda
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	BPMPD
			Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	BPMPD
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	BPMPD
			Program peningklatan kapasitas aparatur Pemerintah desa	BPMPD
			Statistik	
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Bappeda			

10. **Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat**, dimaksudkan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif pasca diselenggarakannya pemilukada. Capaian keberhasilan pembangunan ditandai oleh situasi aman dan tertib di setiap wilayah desa, kecamatan dan kabupaten, terselenggaranya pembangunan dan pemerintahan. Program dan sasaran yang termasuk dalam prioritas pembangunan pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat:

Isu Strategis 2011	Prioritas Pembangunan 2011	Sasaran Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD
Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	terpeliharanya situasi dan kondisi lingkungan yang aman, dan tertib di setiap pelosok wilayah desa, kecamatan dan kabupaten.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesbanglinmas dan Satpol PP
			Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kesbanglinmas dan Satpol PP
			Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kesbanglinmas

Isu Strategis 2011	Prioritas Pembangunan 2011	Sasaran Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD
			Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Satpol PP
			Program pendidikan politik masyarakat	Kesbanglinmas

11. **Ketahanan pangan**, dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pangan baik ketersediaan maupun kemudahan mendapatkannya. Capaian keberhasilan pembangunan ditandai oleh pemenuhan konsumsi masyarakat terhadap beberapa jenis komoditas seperti daging, telur, ikan maupun susu diharapkan mampu mendekati standar minimal per kapita per tahun, produktivitas komoditas pertanian meningkat, peningkatan diversifikasi pangan, serta peningkatan ekspor produk – produk pertanian ke luar wilayah.

Isu Strategis 2011	Prioritas Pembangunan 2011	Sasaran Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD
Menjaga stabilitas ketahanan pangan	Pemantapan Ketahanan Pangan	Terpenuhinya ketersediaan pangan dan kemudahan memperolehnya yang dicirikan oleh peningkatan konsumsi pangan masyarakat sesuai standar minimal, produktivitas komoditas pertanian meningkat, diversifikasi pangan dan peningkatan ekspor produk pertanian ke luar wilayah.	Ketahanan Pangan	
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Distanbunhut
			Pertanian Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan	BKP3

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran(output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana prioritas pembangunan kabupaten (PPK) dan matrik rencana kerja satuan kerja perangkat daerah(SKPD).

Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2011 disusun berdasarkan nomen klatur permendagri nomor 13 tahun 2006 juncto permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan – kegiatan strategis yang diusung oleh SKPD dan wilayah

RKPD 2011 Kabupaten Bandung merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2009 dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2010. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Bandung. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Rencana penganggaran pada tahun 2011 direncanakan untuk biaya program dan kegiatan prioritas Kabupaten Bandung sebesar Rp 1.899.084.143.851,00, anggaran tersebut dibagi ke dalam 2 belanja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.1.:

Tabel: 5.1
Rekapitulasi Belanja Tahun 2011

No	Uraian	Anggaran	Prosentase
1.	Belanja Tidak Langsung	1.194.186.580.103,00	62,78
a.	Belanja Pegawai	1.031.998.485.103,00	54,25
b.	Belanja Hibah	24.901.000.000,00	1,31
c.	Belanja Bantuan Sosial	9.624.566.000,00	0,51
d.	Belanja Bagi Hasil	35.322.570.000,00	1,86
e.	Belanja Bantuan Keuangan	80.339.959.000,00	4,22
f.	Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000,00	0,63
2.	Belanja Langsung	708.094.063.748,00	37,22
a.	Belanja Langsung Urusan di Setiap SKPD	105.659.429.708	5,55
b.	Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan	602.434.634.040	31,67
	Jumlah Total Belanja	1.902.280.643.851,00	100,00

Sedangkan untuk alokasi anggaran Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp 602.434.634.040,00 direncanakan untuk membiayai 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan, dengan jumlah program sebanyak 150 program terdiri atas 119 program urusan wajib dan 31 program Urusan Pilihan. Adapun jumlah anggaran untuk Urusan Wajib sebesar Rp 571.338.444.040 atau 94,84% dan Urusan Pilihan sebesar Rp 31.046.190.000,00 atau 5,16%.

Jika kita melihat komposisi anggaran perurusan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka Urusan Pekerjaan Umum merupakan urusan yang paling besar mendapatkan porsi anggaran pada Tahun 2011 mencapai 27,96%, hal ini terkait dengan agenda peningkatan kualitas infrastruktur sebagai daya dukung penunjang roda perekonomian masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Urusan Wajib Pendidikan menempati urutan kedua mencapai 21,86%, hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dan Nasional serta sejalan dengan fokus pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2011 yaitu meningkatkan IPM. dan Urusan Wajib Kesehatan menempati urutan ketiga mencapai 15,19% dalam rangka meningkatkan kualitas fisik dan kemampuan SDM, sehingga diharapkan kualitas SDM Kabupaten Bandung meningkat dari sisi kualitas derajat kesehatannya.

Anggaran Program Prioritas Kabupaten Bandung dan Urusan setiap SKPD (belanja rutin), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.2 dan 5.3 di bawah ini:

Tabel: 5.2

**Rekapitulasi Anggaran Program Prioritas Kabupaten
Berdasarkan Isu Tahun 2011**

No	PPK/Urusan/Program	Anggaran	SKPD	Proporsi
1	Reformasi birokrasi	55.328.180.040		9,18
	Urusan Wajib	55.328.180.040		9,18
6)	Perencanaan Pembangunan	950.000.000		0,16
1	Program perencanaan pembangunan daerah	150.000.000	Bappeda	0,02
2	Program perencanaan sosial budaya	600.000.000	Bappeda	0,10
3	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	200.000.000	Bappeda	0,03
10)	Kependudukan dan Catatan Sipil	3.675.000.000		0,61
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.675.000.000	Dinsosdukcasip	0,61
16)	Penanaman Modal	145.000.000		0,02
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	145.000.000	BPMP	0,02
20)	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kependidikan dan Persandian	48.090.640.040		7,98
1	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	12.092.258.700	Setwan	2,01
2	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1.433.450.000	Setda	0,24
3	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.391.327.000	DPPK dan Setda	1,06
4	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	16.316.853.040	Setda, Inspektorat, Kec dan Kel	2,71
5	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	100.000.000	Inspektorat	0,02
6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	3.086.751.300	Setda dan Setwan	0,51
7	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	1.485.000.000	Setda	0,25
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.760.000.000	BKPP	0,79
9	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.425.000.000	BKPP	0,40
24)	Kearsipan	592.460.000		0,10
1	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	75.000.000	Bapapsi	0,01
2	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	400.000.000	Bapapsi	0,07
3	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	117.460.000	Bapapsi	0,02
25)	Komunikasi dan Informatika	1.875.080.000		0,31
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.415.480.000	Dishub, Bapapsi	0,23
2	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	136.950.000	Bapapsi	0,02
3	Program kerjasama informasi dengan media massa	322.650.000	Setda	0,05
2	Pengembangan Wajib belajar 12 tahun dan pendidikan vokasional	163.864.990.000		27,20
	Urusan Wajib	163.864.990.000		27,20
1)	Pendidikan	131.692.310.000		21,86
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.859.506.000	Dikbud	0,31
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	92.230.130.000	Dikbud	15,31
3	Program Pendidikan Menengah	27.162.491.000	Dikbud	4,51
4	Program Pendidikan Non Formal	2.710.518.000	Dikbud	0,45
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.200.795.000	Dikbud	1,03
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.528.870.000	Dikbud	0,25
13)	Sosial	210.500.000		0,03
1	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	210.500.000	Dinsosdukcasip	0,03
14)	Ketenagakerjaan	12.095.680.000		2,01
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	8.537.180.000	Disnaker	1,42
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	2.858.500.000	Disnaker	0,47

No	PPK/Urusan/Program	Anggaran	SKPD	Proporsi
3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	700.000.000	Disnaker	0,12
17)	Kebudayaan	14.331.000.000		2,38
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	14.331.000.000	Dikbud	2,38
18)	Keperguruan dan Olah Raga	4.640.000.000		0,77
1	Program peningkatan peran serta kepemudaan	240.000.000	Dispopar	0,04
2	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	600.000.000	Dispopar	0,10
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	3.800.000.000	Dispopar	0,63
26)	Perpustakaan	895.500.000		0,15
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	895.500.000	Bapapsi	0,15
3	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan	68.570.420.000		11,38
	Urusan Wajib	68.570.420.000		11,38
2)	Kesehatan	64.491.980.000		10,71
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	16.215.000.000	Dinkes	2,69
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	13.614.410.000	Dinkes, RSD Majalaya dan RSUD Cicalengka	2,26
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	312.770.000	Dinkes	0,05
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1.110.000.000	Dinkes, RSD Soreang dan RSUD Cicalengka	0,18
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2.591.840.000	Dinkes	0,43
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.100.000.000	Dinkes	0,18
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6.106.457.500	Dinkes	1,01
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	691.230.000	Dinkes dan RSUD Cicalengka	0,11
9	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	8.190.552.500	Dinkes	1,36
10	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	9.683.700.000	RSD Soreang, RSD Majalaya dan RSUD Cicalengka	1,61
11	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1.576.000.000	RSD Soreang, RSD Majalaya dan RSUD Cicalengka	0,26
12	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	1.960.000.000	Dinkes, RSD Soreang, RSD Majalaya dan RSUD Cicalengka	0,33
13	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	244.500.000	Dinkes	0,04
14	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1.095.520.000	Dinkes	0,18
3)	Pekerjaan Umum	2.000.000.000		0,33
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	2.000.000.000	RSD Soreang	0,33
11)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	583.170.000		0,10
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	358.750.000	BKBPP	0,06
2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	132.890.000	BKBPP	0,02
3	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	91.530.000	BKBPP	0,02
12)	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1.495.270.000		0,25
1	Program Keluarga Berencana	638.650.000	BKBPP	0,11
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	231.490.000	BKBPP	0,04
3	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	418.160.000	BKBPP	0,07
4	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	22.310.000	BKBPP	0,00
5	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	43.290.000	BKBPP	0,01
6	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	141.370.000	BKBPP	0,02

No	PPK/Urusan/Program	Anggaran	SKPD	Proporsi
4	Pengurangan kemiskinan daerah dan Penyandang Masalah Sosial	44.489.750.000		7,38
	Urusan Wajib	44.289.750.000		7,35
2)	Kesehatan	26.800.000.000		4,45
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100.000.000	Dinkes	0,02
2	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	26.700.000.000	Dinkes	4,43
4)	Perumahan	13.289.750.000		2,21
1	Program Pengembangan Perumahan	3.289.750.000	Dispertasih	0,55
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	10.000.000.000	Dispertasih	1,66
6)	Perencanaan Pembangunan	200.000.000		0,03
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	200.000.000	Bappeda	0,03
12)	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	345.500.000		0,06
1	Program Keluarga Berencana	345.500.000	BKBPP	0,06
13)	Sosial	3.654.500.000		0,61
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	923.908.500	Dinsosdukcasip	0,15
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	760.000.000	Dinsosdukcasip	0,13
3	Program pembinaan anak terlantar	185.000.000	Dinsosdukcasip	0,03
4	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	140.000.000	Dinsosdukcasip	0,02
5	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	185.000.000	Dinsosdukcasip	0,03
6	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	185.000.000	Dinsosdukcasip	0,03
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.275.591.500	Dinsosdukcasip	0,21
	Urusan Pilihan	200.000.000		0,03
8)	Ketransmigrasian	200.000.000		0,03
1	Program Transmigrasi Regional	200.000.000	Disnaker	0,03
5	Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah	180.130.260.500		29,90
	Urusan Wajib	176.515.260.500		29,30
3)	Pekerjaan Umum	155.361.452.500		25,79
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	43.000.000.000	Bina Marga	7,14
2	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	6.912.000.000	Bina Marga	1,15
3	Program Pembangunan turap/talud/brojong	5.939.500.000	Bina Marga	0,99
4	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	79.974.460.000	Bina Marga	13,28
5	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	1.000.000.000	Bina Marga	0,17
6	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	250.000.000	Bina Marga	0,04
7	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1.600.000.000	Bina Marga	0,27
8	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	13.185.492.500	SDAPE	2,19
9	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	800.000.000	SDAPE	0,13
10	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	2.700.000.000	Bina Marga	0,45
4)	Perumahan	8.502.848.000		1,41
1	Program Pengembangan Perumahan	7.552.848.000	Dispertasih	1,25
2	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	800.000.000	Dispertasih	0,13
3	Program pengelolaan areal pemakaman	150.000.000	Dispertasih	0,02
6)	Perencanaan Pembangunan	350.000.000		0,06
1	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	350.000.000	Bappeda	0,06
7)	Perhubungan	12.300.960.000		2,04
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	5.519.960.000	Dishub dan Bina Marga	0,92
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	292.500.000	Dishub	0,05

No	PPK/Urusan/Program	Anggaran	SKPD	Proporsi
3	Program peningkatan pelayanan angkutan	897.500.000	Dishub	0,15
4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	5.100.000.000	Dishub	0,85
5	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	491.000.000	Dishub	0,08
	Urusan Pilihan	3.615.000.000		0,60
3)	Energi dan Sumberdaya Mineral	3.615.000.000		0,60
1	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	3.615.000.000	SDAPE	0,60
6	Peningkatan kemudahan bagi pelaku KUMKM	7.895.000.000		1,31
	Urusan Wajib	7.635.000.000		1,27
3)	Pekerjaan Umum	5.000.000.000		0,83
1	Program Pembangunan pasar perdesaaan	5.000.000.000	Diskoperindag	0,83
6)	Perencanaan Pembangunan	250.000.000		0,04
1	Program perencanaan pembangunan ekonomi	250.000.000	Bappeda	0,04
15)	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.235.000.000		0,37
1	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	125.000.000	Diskoperindag	0,02
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	900.000.000	Diskoperindag	0,15
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	565.000.000	Diskoperindag	0,09
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	645.000.000	Diskoperindag	0,11
16)	Penanaman Modal	150.000.000		0,02
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	150.000.000	BPMP	0,02
	Urusan Pilihan	260.000.000		0,04
6)	Perdagangan	260.000.000		0,04
1	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	260.000.000	Diskoperindah	0,04
7	Pengembangan produk unggulan	24.249.890.000		4,03
	Urusan Wajib	2.180.000.000		0,36
6)	Perencanaan Pembangunan	150.000.000		0,02
1	Program perencanaan pembangunan ekonomi	150.000.000	Bappeda	0,02
16)	Penanaman Modal	1.680.000.000		0,28
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.420.000.000	BPMP	0,24
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.	260.000.000	BPMP	0,04
17)	Kebudayaan	350.000.000		0,06
1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	160.000.000	Dikbud	0,03
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	190.000.000	Dikbud	0,03
	Urusan Pilihan	22.069.890.000		3,66
1)	Pertanian	14.884.890.000		2,47
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.581.700.000	BKP3 dan Distanbunhut	0,26
2	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	725.000.000	BKP3 dan Distanbunhut	0,12
3	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	3.207.000.000	BKP3 dan Distanbunhut	0,53
4	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	2.203.500.000	Distanbunhut	0,37
5	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	360.000.000	BKP3	0,06
6	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	596.500.000	Disnakan	0,10
7	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	2.182.370.000	Disnakan	0,36
8	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	536.500.000	Disnakan	0,09
9	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	3.492.320.000	Disnakan dan BKP3	0,58
2)	Kehutanan	425.000.000		0,07

No	PPK/Urusan/Program	Anggaran	SKPD	Proporsi
1	Preogram Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Hutan	425.000.000	BKP3	0,07
4)	Pariwisata	1.510.000.000		0,25
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	160.000.000	Dispopar	0,03
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.050.000.000	Dispopar	0,17
3	Program Pengembangan Kemitraan	300.000.000	Dispopar	0,05
5)	Kelautan dan Perikanan	2.120.000.000		0,35
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.140.000.000	Disnakan	0,19
2	Program Pengembangan sistim Penyuluhan Perikanan	164.000.000	BKP3	0,03
3	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	533.000.000	Disnakan	0,09
4	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar	283.000.000	Disnakan	0,05
6)	Perdagangan	1.150.000.000		0,19
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	150.000.000	Diskoperindag	0,02
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.000.000.000	Diskoperindag	0,17
7)	Industri	1.980.000.000		0,33
1	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	360.000.000	Diskoperindag	0,06
2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	600.000.000	Diskoperindag	0,10
3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	800.000.000	Diskoperindag	0,13
4	Program Penataan Struktur Industri	150.000.000	Diskoperindag	0,02
5	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	70.000.000	Diskoperindag	0,01
8	Rehabilitasi kerusakan lingkungan, Penataan Ruang dan Penanganan Bencana	38.148.959.500		6,33
	Urusan Wajib	34.297.659.500		5,69
2)	Kesehatan	200.000.000		0,03
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	200.000.000	Dinkes	0,03
3)	Pekerjaan Umum	6.085.507.500		1,01
1	Program pengendalian banjir	6.085.507.500	SDAPE	1,01
4)	Perumahan	5.580.000.000		0,93
1	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.300.000.000	Dispertasih	0,22
2	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	4.280.000.000	Dispertasih	0,71
5)	Penataan Ruang	3.600.000.000		0,60
1	Program Perencanaan Tata Ruang	2.400.000.000	Dispertasih	0,40
2	Program Pemanfaatan Ruang	900.000.000	Bappeda	0,15
3	Program Pemanfaatan Ruang	300.000.000	Dispertasih	0,05
6)	Perencanaan Pembangunan	50.000.000		0,01
1	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	50.000.000	Bappeda	0,01
8)	Lingkungan Hidup	17.412.152.000		2,89
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	12.437.152.000	Dispertasih	2,06
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.700.000.000	BPLH	0,28
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	425.000.000	BPLH	0,07
4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	200.000.000	BPLH	0,03
5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	1.600.000.000	BPLH	0,27
6	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1.050.000.000	Dispertasih	0,17
13)	Sosial	270.000.000		0,04
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	270.000.000	Dinsosdukcasip	0,04
19)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1.100.000.000		0,18
1	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1.100.000.000	Kesbanglinmas, Dinsosdukcasip	0,18
	Urusan Pilihan	3.851.300.000		0,64
2)	Kehutanan	1.826.300.000		0,30

No	PPK/Urusan/Program	Anggaran	SKPD	Proporsi
1	Program rehabilitasi hutan dan lahan	1.826.300.000	Distanbunhut	0,30
3)	Energi dan Sumberdaya Mineral	2.025.000.000		0,34
1	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	925.000.000	SDAPE	0,15
2	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	1.100.000.000	SDAPE	0,18
9	Pemantapan Pembangunan Daerah dan Wilayah Perdesaan	7.345.000.000		1,22
	Urusan Wajib	7.345.000.000		1,22
6)	Perencanaan Pembangunan	1.950.000.000		0,32
1	Program Pengembangan data/informasi	400.000.000	Bappeda	0,07
2	Program Kerjasama Pembangunan	150.000.000	Bappeda	0,02
3	Program perencanaan pembangunan daerah	1.400.000.000	Bappeda	0,23
22)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.245.000.000		0,70
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	2.817.000.000	BPMPD	0,47
2	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	50.000.000	BPMPD	0,01
3	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1.153.000.000	BPMPD	0,19
4	Program peningklatan kapasitas aparatur Pemerintah desa	225.000.000	BPMPD	0,04
23)	Statistik	1.150.000.000		0,19
1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	1.150.000.000	Bappeda	0,19
10	Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	8.309.184.000		1,38
	Urusan Wajib	8.309.184.000		1,38
19)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	8.309.184.000		1,38
1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	6.923.584.000	Kesbanglinmas dan Satpol PP	1,15
2	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	885.600.000	Kesbanglinmas dan Satpol PP	0,15
3	Program pengembangan wawasan kebangsaan	250.000.000	Kesbanglinmas	0,04
4	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	100.000.000	Satpol PP	0,02
5	Program pendidikan politik masyarakat	150.000.000	Kesbanglinmas	0,02
11	Pemantapan Ketahanan Pangan	4.103.000.000		0,68
	Urusan Wajib	3.003.000.000		0,50
21)	Ketahanan Pangan	3.003.000.000		0,50
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	3.003.000.000	Distanbunhut	0,50
				0,00
	Urusan Pilihan	1.100.000.000		0,18
1)	Pertanian	1.100.000.000		0,18
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	1.100.000.000	BKP3	0,18
	Jumlah	602.434.634.040		100

Tabel: 5.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Urusan di Setiap SKPD
Tahun 2011

No	SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Proporsi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.683.574.000	4,43
2	Dinas Tenaga Kerja	896.301.683	0,85
3	Dinas Kesehatan	2.733.611.050	2,59
4	RSUD Majalaya	2.124.164.500	2,01
5	RSUD Soreang	2.544.400.000	2,41
6	RSUD Cicalengka	2.022.106.000	1,91
7	Dinas Bina Marga	2.227.000.000	2,11
8	Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan	2.610.482.230	2,47
9	Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi	909.930.000	0,86
10	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	5.422.569.000	5,13
11	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	992.500.000	0,94
12	Dinas Peternakan dan Perikanan	1.052.220.000	1,00
13	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	2.954.411.000	2,80
14	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	2.720.442.000	2,57
15	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil	6.205.744.500	5,87
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.400.140.000	2,27
17	Dinas Perhubungan	2.342.665.000	2,22
18	Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	558.832.360	0,53
19	Badan Penanaman Modal dan Perijinan	1.006.574.600	0,95
20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	416.821.800	0,39
21	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	443.974.150	0,42
22	Satuan Polisi Pamong Praja	536.949.600	0,51
23	DPRD		-
24	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-
25	Sekretariat Daerah		-
	- Bag. Humas	559.620.000	0,53
	- Bag. Umum	8.293.913.920	7,85
26	Sekretariat DPRD	12.468.746.640	11,80
27	Inspektorat	1.406.364.000	1,33
28	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	18.448.920.899	17,46
29	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.890.426.500	2,74
30	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa	630.002.500	0,60
31	Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi	1.714.500.000	1,62
	Kecamatan		
32	Cileunyi	326.428.800	0,31
33	Cilengkrang	193.000.000	0,18
34	Cimencyan	333.892.000	0,32
35	Bojongsoang	179.863.200	0,17
36	Margahayu	330.881.600	0,31
37	Margaasih	194.064.800	0,18
38	Dayeuhkolot	233.995.200	0,22
39	Katapang	230.468.000	0,22
40	Pameungpeuk	295.734.400	0,28
41	Arjasari	193.352.000	0,18
42	Pangalengan	538.980.000	0,51

No	SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Proporsi
43	Cimaung	290.282.400	0,27
44	Banjaran	680.012.000	0,64
45	Cicalengka	195.473.600	0,19
46	Rancaekek	210.440.800	0,20
47	Cikancung	310.855.576	0,29
48	Nagreg	348.523.000	0,33
49	Baleendah	235.993.600	0,22
50	Pacet	192.515.200	0,18
51	Kertasari	193.185.600	0,18
52	Ciparay	232.980.000	0,22
53	Majalaya	558.484.000	0,53
54	Ibun	541.899.200	0,51
55	Paseh	202.487.120	0,19
56	Solokanjeruk	516.586.880	0,49
57	Pasirjambu	492.744.000	0,47
58	Ciwidey	367.954.400	0,35
59	Rancabali	523.993.200	0,50
60	Soreang	287.639.600	0,27
61	Cangkuang	205.120.000	0,19
62	Kutawaringin	192.744.000	0,18
	Kelurahan		
63	Pasawahan	76.136.000	0,07
64	Padasuka	229.808.000	0,22
65	Andir	82.097.600	0,08
66	Baleendah	80.201.200	0,08
67	Manggahang	232.097.600	0,22
68	Cibenying	479.881.600	0,45
69	Jelegong	82.100.000	0,08
70	Wargamekar	272.097.600	0,26
71	Sulaeman	76.528.000	0,07
	Jumlah	105.659.429.708	100

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran tahun 2011, program dan kegiatan diarahkan untuk menyelesaikan Program Prioritas Kabupaten (PPK), sebagaimana terlampir dalam buku Matriks Kerja PPK.

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas maupun perluasan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 tersebut, SKPD dan Pemerintah Kabupaten Bandung wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, dilaksanakan melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang. Proses dan tahapannya dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, sampai Musrenbang Kabupaten (Musrenbangkab).

RKPD Tahun 2011 merupakan acuan bagi SKPD dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD 2011 sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2011 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi Pemerintah dan Pelayanan Publik, tetapi juga memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh Stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan Dunia Usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 ini dengan sebaik-baiknya.

3. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Jawa Barat maupun yang bersumber dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
5. Bagi Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota), RKP Tahun 2011 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi daerah perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2011 sebagai berikut:
 - a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2011, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota;
 - b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2011, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) diatas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah pusat;
 - d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2011 dari masing-masing SKPD, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah.
6. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

- berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;
7. Pada akhir Tahun Anggaran 2011, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD Propinsi/APBD/CSR, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya;
 8. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2011, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan Sinergitas RKPD Tahun 2011 ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2011 serta Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara SKPD Tahun 2011.

**LAMPIRAN MATRIKS RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011**

**LAMPIRAN MATRIKS KERJA
PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TAHUN 2011**

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD

: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD				
				TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012						
1														
1	01									Dikbud				
1	01	01	15							Dikbud				
1	01	01	15	07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain	Tersedianya Sarana dan sarana bermain	5 lembaga PAUD di 5 kecamatan dapat sarana dan prasarana bermain	5	5	Lembaga	107.500.000	118.250.000	Kabupaten	Dikbud
1	01	01	15	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa PAUD sesuai standar	30 lembaga PAUD di 16 kecamatan dapat Alat Praktik dan Peraga siswa	30	30	Lembaga	971.500.000	1.068.650.000	16 Kecamatan	Dikbud
1	01	01	15	57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Meningkatnya Kompetensi Pedagogik Tenaga Pendidik PAUD	62 Tutor PAUD dari 31 Kecamatan dapat pelatihan Pedagogik PAUG	62	62	Tutor PAUD	32.010.000	35.211.000	Kabupaten	Dikbud
1	01	01	15	58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Terpenuhinya standar mutu dan kelembagaan PAUD Rintisan	31 lembaga PAUD dapat kategori rintisan mutu dan kelembagaan	31	31	lembaga	378.720.000	416.592.000	Kabupaten	Dikbud
1	01	01	15	59	Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya PAUD di masyarakat pedesaan, perkotaan, perkebunan, dan perumahan serta lingkungan pemerintahan	6 lembaga PAUD di 6 kecamatan dapat dirintis pengembangan kelembagaannya	6	6	lembaga	197.800.000	217.580.000	Kabupaten	Dikbud
1	01	01	15	60	Pengembangan Data dan Informasi PAUD, Sosialisasi dan Hari Anak Nasional	Tersedianya data based PAUD Tk. Desa/Kecamatan/ Kabupaten	3 Dokumen data based PAUD, tk Desa, Kecamatan, dan Kabupaten dapat diperoleh	25	25	set	113.456.000	124.801.600	Kabupaten	Dikbud
1	01	01	15	62	Pengembangan Kurikulum Bahan ajar dan Model pembelajaran PAUD	Tersedianya Kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD yang menjadi standar muatan lokal Kabupaten	31 bahan ajar dan model pembelajaran PAUD Standar muatan lokal dapat diperoleh	10	10	doumen	30.000.000	33.000.000	Kabupaten	Dikbud
1	01	01	15	63	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD	Terjalinya koordinasi dan kerjasama PAUD antar unit sistem dan sektor penanggungjawab tk kabupaten	4 SKPD dan organisasi pemerhati pendidikan memiliki komitmen dalam penangan PAU Terpadu tk. Desa, Kecamatan, dan Kabupaten	1	1	kegiatan	28.520.000	31.372.000	Kabupaten	Dikbud
1	01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Usia Wajib Belajar					-		Dikbud
1	01	01	16	01	Pembangunan Gedung Sekolah	Tersedianya tanah sesuai standar untuk Unit Sekolah Baru (USB) Jenjang pendidikan dasar	5 lokasi tanah untuk USB jenjang pendidikan Dasar, di empat kecamatan dapat tersedia	4	4	lahan	5.777.500.000	6.355.250.000		Dikbud
1	01	01	16	02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Tersedianya rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah di kecamatan kutawaringin	1 lokasi SD, di 1 kecamatan dapat pembangunan rumah dinas kepala, guru, penjaga sekolah	1	1	unit	40.000.000	44.000.000	Kutawaringin	Dikbud
1	01	01	16	03	Penambahan ruang kelas sekolah	Terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah pada jenjang pendidikan dasar	238 ruang kelas di 17 kecamatan dapat penambahan ruang kelas	238	238	Lokal	11.783.018.000	12.961.319.800	17 Kecamatan	Dikbud
1	01	01	16	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya Sarana air bersih dan penataan sanitary pendidikan dasar	52 sekolah di 8 kecamatan dapat pembangunan sarana air bersih dan penataan sanitary	52	52	unit	479.051.390	526.956.529	8 Kecamatan	Dikbud
1	01	01	16	15	Pengadaan buku-buku dan alat Tulis Siswa (Rapot SD dan SMP)	Tersedianya buku raport jenjang pendidikan dasar	80 ribu siswa SD, 45 ribu siswa SMP dapat menerima raport	80000, 45000	80000, 45000	eksemplar SD, eksemplis SMP	2.046.640.000	2.251.304.000		Dikbud
1	01	01	16	16	Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah	Terlaksananya bantuan seragam sekolah untuk siswa dari keluarga tidak mampu di jenjang pendidikan dasar daerah terpencil	17 000 siswa jenjang pendidikan dasar dari 31 kecamatan berasal dari keluarga tidak mapu dapat bantuan seragam sekolah	17000	17000	siswa	997.050.000	1.096.755.000		Dikbud
1	01	01	16	18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya Alat praktik dan peraga siswa jenjang pendidikan dasar sesuai standar	59 sekolah jenjang pendidikan dasar dari 31 kecamatan dapat Alat Praktik dan peraga siswa	59	59	sekolah	1.197.700.000	1.317.470.000		Dikbud
1	01	01	16	19	Pengadaan mebeluer sekolah	Terpenuhinya mebeluar pengganti pada jenjang pendidikan dasar	214 lokal/ruangan kelas dari 14 kecamatan dapat mebeluar pengganti	214	214	Lokal	1.691.356.000	1.860.491.600	14 Kecamatan	Dikbud
1	01	01	16	24	Pemeliharaan sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Terpeliharanya rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah pada jenjang pendidikan dasar	41 rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah dari 3 kecamatan dapat pemeliharaan	41	41	Unit Rum dinas	982.514.610	1.080.766.071	3 Kecamatan	Dikbud
1	01	01	16	30	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terpeliharanya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir unit sekolah jenjang pendidikan dasar	19 sekolah dari 6 kecamatan dapat pemeliharaan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	19	19	Unit	795.700.000	875.270.000	6 Kecamatan	Dikbud
1	01	01	16	33	Pemeliharaan rutin/berkala Perpustakaan Sekolah	Terpeliharanya perpustakaan sekolah unit sekolah jenjang pendidikan dasar	2 perpustakaan Sekolah di 2 kecamatan dapat pemeliharaan	2	2	unit	40.000.000	44.000.000	2 kecamatan	Dikbud
1	01	01	16	42	Pemeliharaan sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Terlaksananya renovasi rumah kepala sekolah, guru, penjaga sekolah jenjang pendidikan dasar	12 rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah dari 2 kecamatan dapat belanja renovasi	12	12	Unit	1.530.000.000	1.683.000.000	2 Kecamatan	Dikbud
1	01	01	16	44	Pemeliharaan sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya renovasi ruang kelas sekolah jenjang pendidikan dasar	252 lokal ruang kelas sekolah dari 25 kecamatan dapat pemeliharaan sedang/berat ruang kelas sekolah	252	252	Lokal	22.722.800.000	24.995.080.000	25 Kecamatan	Dikbud
1	01	01	16	45	Pemeliharaan sedang/berat ruang guru sekolah	Terlaksananya renovasi ruang guru jenjang pendidikan dasar	1 ruang guru sekolah dari 1 kecamatan dapat pemeliharaan sedang/berat	1	1	Lokal	40.000.000	44.000.000	1 Kecamatan	Dikbud
1	01	01	16	51	Pemeliharaan sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	terlaksananya renovasi taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir pada jenjang pendidikan dasar	69 lokal taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir sekolah dari 8 kecamatan dapat pemeliharaan sedang/berat (renovasi)	69	69	lokal	1.769.250.000	1.946.175.000	8 Kecamatan	Dikbud

1	01	01	16	56	Pemeliharaan sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	terlaksananya renovasi sarana air bersih dan sanitary unit sekolah pada jenjang pendidikan dasar	6 lokal sarana air bersih dan sanitary sekolah dari 2 kecamatan dapat pemeliharaan sedang/berat (renovasi)	6	6	lokal	85.000.000	93.500.000	2 kecamatan	Dikbud
1	01	01	16	58	Pelatihan Kompetensi Siswa berprestasi Pendidikan Dasar	Munculnya Siswa-siswa berprestasi tk.kec/kab/prov, maupun nasional pada jenjang pendidikan dasar	496 siswa jenjang pendidikan dasar dari 31 kecamatan mengikuti kompetensi siswa berprestasi tk. kabupaten	8	8	kegiatan	227.525.000	250.277.500	SKPD	Dikbud
1	01	01	16	59	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD dan SMP	Tersedianya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) bermuatan lokal pada jenjang pendidikan dasar	186 Guru dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dari 31 kecamatan dapat pelatihan penyusunan master KTSP	186	186	guru	147.890.000	162.679.000	SKPD	Dikbud
1	01	01	16	61	Pembinaan SMP Terbuka	Terbinanya unsur-unsur standar nasional pendidikan pada SMP terbuka Kabupaten Bandung	21 TKB dari 10 Kecamatan dapat mengikuti Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) tk. Kabupaten dan Provinsi	21	21	TKB	30.050.000	33.055.000	SKPD	Dikbud
1	01	01	16	63	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD dan SMP	Terpenuhinya Pendanaan Operasional Sekolah pada jenjang pendidikan dasar	410.565 Siswa SD dan sederajat, 153.666 Siswa SMP dan sederajat dari 31 Kecamatan dapat pendanaan bantuan Operasional Sekolah (BOS)	410.565	410.565	Siswa SD Siswa SMP	33.407.325.000	36.748.057.500	SKPD	Dikbud
1	01	01	16	66	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs	Terbinanya unsur-unsur standar nasional pendidikan pada sekolah-sekolah model dan rintisan jenjang pendidikan dasar	1 TK PEMBINA, 1 SD RSBI, 5 SD RSSN, 2 SMP SBI, 19 SMP SSN, 1 SMP AKSEL, DAN 1 SBL Serta 31 SD Model pengembangan mutu pembelajaran dapat terbina melalui 8 SPN	61	61	sekolah	1.980.000.000	2.178.000.000	SKPD	Dikbud
1	01	01	16	67	Penyelenggaraan Paket A setara SD	Terlaksananya penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A Setara Sekolah Dasar	620 Warga Belajar Paket A Setara SD di 31 kecamatan dapat bersekolah kesetaraan	31	31	kelompok	137.885.000	151.673.500	SKPD	Dikbud
1	01	01	16	68	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	Terlaksananya penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket B Setara SMP	4012 Warga Belajar Paket A Setara SMP di 31 Kecamatan dapat bersekolah kesetaraan	200	200	kelompok	1.604.950.000	1.765.445.000	SKPD	Dikbud
1	01	01	16	69	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Terbinanya sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang menerapkan MBS	258 sekolah berbasis MBS jenjang pendidikan dasar dapat terbina secara kelembagaan, mutu pendidik dan tenaga kependidikan, kesiswaan, dan pembelajaran	258	258	sekolah	1.293.925.000	1.423.317.500	SKPD	Dikbud
1	01	01	16	70	Pembinaan Minat bakat dan kreativitas siswa SD,SMP, SMA/SMK, PNF, DAN BUDAYA termasuk PASKIBRA	Terpenuhinya wadah minat, bakat, dan kreativitas siswa seluruh jenjang pendidikan dalam unjuk kebolehan dan prestasi	30 Kegiatan Minat, Bakat dan kreativitas siswa bidang pendidikan dapat dilaksanakan	30	30	kegiatan	1.423.000.000	1.565.300.000	SKPD	Dikbud
1	01	01	17		Program Pendidikan Menengah	Terlaksananya Pendidikan Menengah								Dikbud
1	01	01	17	01	Pembangunan Gedung Sekolah	Tersedianya tanah sesuai standar untuk Unit Sekolah Baru (USB) Jenjang pendidikan Menengah	4 lokasi tanah untuk USB jenjang pendidikan Menengah, di empat kecamatan dapat disediakan	4	4	lokal	3.085.516.000	3.394.067.600	SKPD, Kertasari	Dikbud
1	01	01	17	03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah pada jenjang pendidikan Menengah	55 ruang kelas di 11 kecamatan dapat penambahan ruang kelas	55	55	lokal	4.400.000.000	4.840.000.000	SKPD, Nagreg	Dikbud
1	01	01	17	05	Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah (Lab. Bahasa, komputer, IPA,IPS, dan lain-lain)	Tersedianya bangunan laboratorium dan ruang prtikum sekolah jenjang pendidikan menengah	12 laboratorium dan ruang praktikum sekolah di 8 kecamatan dapat dibangun	12	12	lab	1.065.000.000	1.171.500.000	SKPD, Margaasih	Dikbud
1	01	01	17	09	Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir	Tersedianya taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir yang representatif pada sekolah-sekolah jenjang pendidikan menengah	Lingkungan SMA Negeri Margaasih sepanjang 350 m dapat dipagar	350	350	m'	40.000.000	44.000.000	Margaasih	Dikbud
1	01	01	17	14	Pembangunan Sarana Air bersih dan sanitary	Tersedianya sarana air bersih dan sanitary yang memadai pada sekolah-sekolah jenjang pendidikan menengah	SMA Negeri nagreg dapat dibangun sarana air bersih dan sanitary	1	1	unit	30.000.000	33.000.000	Nagreg	Dikbud
1	01	01	17	19	Pengadaan Meubelair SMA/SMK	Terpenuhinya meubelair pengganti yang sesuai standar	96 lokal ruang belajar jenjang pendidikan menengah dari 19 kecamatan dapat meubelair pengganti	96	96	lokal	1.112.800.000	1.224.080.000	SKPD, Nagreg, Rancabali	Dikbud
1	01	01	17	44	Rehabilitasi Sedang/Berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya renovasi ruang kelas sekolah jenjang pendidikan menengah	13 lokal sekolah SMA/SMK dari 8 kecamatan dapat renovasi ruang kelas sekolah	13	13	lokal	1.047.200.000	1.151.920.000	SKPD,Rancaekek, Rancabali	Dikbud
1	01	01	17	53	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan sekolah	Terlaksananya renovasi perpustakaan sekolah jenjang pendidikan menengah	SMA Negeri Bojongsong dapat dibangun Perpustakaan Sekolah	1	1	unit	180.000.000	198.000.000	SMAN Bojongsong	Dikbud
1	01	01	17	58	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMA/SMK	Meningkatnya kemampuan guru sma/smk dalam menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada jenjang pendidikan menengah	95 Guru dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dari 19 kecamatan dapat pelatihan penyusunan master KTSP	95	95	Guru	24.830.000	27.313.000	SKPD	Dikbud
1	01	01	17	61	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA/SMK	Tersedianya Bantuan operasional Manajemen Mutu (BOMM) , melalui pendanaan beasiswa siswa dari keluarga tidak mampu dalam rangka rintisan wajar 12 tahun	15000 Siswa jenjang pendidikan menengah dari keluarga tidak mampu dapat beasiswa rintisan wajar 12 tahun	1500	1500	siswa	15.092.875.000	16.602.162.500	SKPD	Dikbud
1	01	01	17	63	Penyelenggaraan Paket C setara SMA	Terlaksananya penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket C Setara SMA	65 kelompok belajar paket C setara SMA di 31 kecamatan dapat diselenggarakan	1306	1306	warga belajar	522.650.000	574.915.000	SKPD	Dikbud
1	01	01	17	64	Pembinaan kelembagaan dan manajemen, sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMA/SMK	Terbinanya sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan menengah yang menerapkan MBS	19 sekolah berbasis MBS jenjang pendidikan menengah dapat terbina secara kelembagaan, mutu pendidik dan tenaga kependidikan, kesiswaan, dan pembelajaran	19	19	sekolah	203.670.000	224.037.000	SKPD	Dikbud
1	01	01	17	65	Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan TIK SMA/SMK	Tersediannya Pengadaan Sarana Belajar Mengajar dengan fasilitas TIK untuk sekolah pada jenjang pendidikan menengah	3 Sekolah jenjang pendidikan menengah dapat peralatan pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan TIK	3	3	unit TIK	324.340.000	356.774.000	SKPD	Dikbud
1	01	01	17	68	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah SMA/SMK	Terlaksananya Akreditasi Sekolah pada jenjang pendidikan menengah	19 sekolah SMA/SMK dapat akreditasi	19	19	sekolah	33.610.000	36.971.000	SKPD	Dikbud
1	01	01	18		Program Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Pendidikan Non Formal								Dikbud
1	01	01	18	02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Tersedianya penunjang operasional lembaga-lembaga penyelenggara PNF	31 kelompok/ lembaga penyelenggara PNF dapat Bantuan operasional	31	31	kelompok/ lembaga	51.670.000	56.837.000	SKPD	Dikbud

1	01	ga	18	03	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Terbinanya lembaga-lembaga kursus secara teknis edukatif, administrasi, kelembagaan dan keorganisasian	71 lembaga pendidikan kursus dari tiga rumpun penyelenggara life skill dapat terbina secara teknis maupun administratif	71	71	lembaga kursus	71.350.000	78.485.000	SKPD	Dikbud		
1	01	01	18	04	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) Lanjutan	Terlaksananya penyelenggaraan Kelompok Belajar Keaksaraan fungsional (KF) Pelestarian Baca-Tulis-Hitung	4700 Warga Belajar di 31 kecamatan dapat mengikuti Kegiatan Keaksaraan Fungsional	470	470	kelompok KF	1.175.750.000	1.293.325.000	SKPD	Dikbud		
1	01	01	18	05	Pengembangan Pendidikan Kecakapan hidup	Terlaksananya penyelenggaraan Kelompok Belajar Kecakapan Hidup melalui KBU, Usaha Mandiri, Magang, Kursus Keterampilan, pemuda produktif, link and match	35 kelompok dari 31 kecamatan dapat bantuan pengembangan pendidikan kecakapan hidup	31	31	kelompok life skill	715.000.000	786.500.000	SKPD	Dikbud		
1	01	01	18	06	Penyediaan sarana dan prasarana non formal	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan non formal paket KF, Paket A setara SD, Paket B Setara SMP, dan Paket C Setara SMA	Revitalisasi bangunan UPTD SKB dan penyediaan sarana dan prasarananya dapat terpenuhi	1	1	Unit	600.000.000	660.000.000	SKPD	Dikbud		
1	01	01	18	07	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal	Tersedianya data based Pendidikan Non Formal Tk. Desa/Kecamatan/ Kabupaten	3 Dokumen data based Pendidikan Non Formal, tk. Desa, Kecamatan, dan Kabupaten dapat diperoleh	10	10	set	50.000.000	55.000.000	SKPD	Dikbud		
1	01	01	18	09	Pengembangan Kurikulum Bahan ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan non formal	Tersedianya Kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Non Formal yang menjadi standar dan bermuatan lokal Kabupaten	31 bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Non Formal Standar muatan lokal kabupaten dapat diperoleh	10	10	Dokumen	21.570.000	23.727.000	SKPD	Dikbud		
1	01	01	18	10	Penyelenggaraan Sertifikasi Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Sertifikasi Lembaga-lembaga Pendidikan Non Formal berdasarkan Standar Nasional Pendidikan	5 rumpun Kursus dapat tersertifikasi kelembagaannya	25	25	Lembaga kursus	25.178.000	27.695.800	SKPD	Dikbud		
1	01	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					-			Dikbud		
1	01	01	20	01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SD/SMP/SMA/SMK	Terpenuhinya operasional tim pengelola pemberkasan sertifikasi pendidik SD/SMP/SMA/SMK	3000 berkas sertifikasi tenaga pendidik tingkat SD/SMP/SMA/SMK dapat terpenuhi pengeloannya secara operasional	3000	3000	berkas usulan	300.000.000	330.000.000	SKPD	Dikbud		
1	01	01	20	04	Pembinaan kelompok Kerja Guru (KKG) TK,SD, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP, SMA, dan SMK	Terbinanya Mutu Kelembagaan kelompok Kerja Guru (KKG) TK,SD dan MGMP SMP, SMA, SMK	90 KKG SD, 15 MGMP SMP, dan 15 MGMP SMA/SMK dapat terbina secara kelembagaan, mutu	120	120	KKG/MGMP	600.000.000	660.000.000	SKPD	Dikbud		
1	01	01	20	07	Pendidikan Lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi, jenjang TK,SD,SMP,SMA, dan SMK	Terpenuhinya pemberian beasiswa bagi pendidik yang melanjutkan pendidikan untuk memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan pada jenjang Dikdas, dan Dikmen	1005 Tenaga pendidikan TK,SD,SMP,SMA/SMK dari 31 kecamatan dapat stimulan melanjutkan pendidikan dlm memenuhi standar kualifikasi	1005	1005	Tenaga Pendidik	2.010.285.000	2.211.313.500	SKPD	Dikbud		
1	01	01	20	08	Pengembangan Mutu dan Kualitas program pendidik dan pelatihan bagi pendidikan dan tenaga kependidikan Jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK	Terpenuhinya standar mutu program, dan pelatihan pendidikan dan tenaga kependidikan seluruh jenjang pendidikan	2.840 tenaga kependidikan jdari jenjang TK,SD,SMP,SMA, dan SMK terbantu pengembangan mutu/kualitas, dan pelatihan	2840	2840	tenaga kependidikan	2.840.510.000	3.124.561.000	SKPD	Dikbud		
1	01	01	20	09	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tersedianya Sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh unit sistem pendidikan	1 sistem utama, dan 8 sistem pengolah pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan terwujud	1	8	1	8	sistem utama sistem pengolah	450.000.000	495.000.000	SKPD	Dikbud
1	01	01	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Manajemen Pelayanan Pendidikan					-			Dikbud		
1	01	01	22	01	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan TK/SD, SMP, SMA/SMK, dan PNF (Data-Monev)	Tersedianya Instrumen, dan hasil Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan Formal dan Non Formal	8 bidang hasil evaluasi kinerja bidang pendidikan formal dan non formal tersedia	8	8	Bidang kajian/evaluasi	186.870.000	205.557.000	SKPD	Dikbud		
1	01	01	22	02	Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan di bidang Pendidikan (Data)	Tersedianya Data Based Bidang Pendidikan Formal maupun Formal seluruh jenjang	dapat didokumentasikan 20 eks buku rangkuman data, 50 eks buku statistik, 50 eks buku profil, dan 500 eks buku saku	620	620	eksemplar	295.000.000	324.500.000	SKPD	Dikbud		
1	01	01	22	04	Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang PAUD, TK,Pendidikan Dasar (SD,SMP), Menengah, Pendidikan Non Formal,	Terlaksananya Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah bidang pendidikan kepada masyarakat pengelola sekolah, para tokoh dan stakeholder dlm masyarakat, pemerhati, serta aparat pemerintahan mengenai PAUD, TK,SD,SMP,SMA,SMK dan PNF	457 dari 31 kecamatan pengelola sekolah/lembaga PAUD,TK,SD,SMP,SMA,SMK dan PNF/Diklusemas dapat sosialisasi perundang-undangan Bidang pendidikan	457	457	lembaga	457.000.000	502.700.000	SKPD	Dikbud		
1	01	01	22	07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Tersedianya bahan, sistem manemen informasi, serta terlaksananya pemberian informasi secara klasikal, elektrik, media maupun ajng pameran pembangunan	2 even pameran pembangunan tk. Provinsitk.kabupaten dandapat diikuti	2	2	kegiatan	240.000.000	264.000.000	SKPD	Dikbud		
1	01	01	22	10	Sinergitas Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan Pendidikan	Tersusunnya secara sinergis rencana dan program pembangunan pendidikan					350.000.000	385.000.000	SKPD	Dikbud		
1	17				KEBUDAYAAN											
1	17	01	15		Program Pengembangan Nilai Budaya	Terlaksananya Pengembangan Nilai Budaya						-		Dikbud		
1	17	01	15	01	Pelestarian dan adan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya kabupaten Bandung	25 sanggar seni terpenuhi peralatannya	25	25	set	221.000.000	243.100.000	2 Kecamatan	Dikbud		
1	17	01	15	06	Pembangunan Gedung Kebudayaan (Kesenian) Kabupaten Bandung Tahap 2	Terlaksananya pembangunan gedung Kebudayaan (kesenian) kabupaten Bandung Tahap Penyelesaian	Unit Gedung Kebudayaan Kabupaten Bandung terpenuhi	1	1	Unit	14.000.000.000	-	Kab	Dikbud		
1	17	01	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terlaksananya Pengelolaan Kekayaan Budaya						-		Dikbud		

1	17	01	16	02	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	Terlaksananya upaya pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno kabupaten Bandung	3 kandungan bahan pustaka dapat terealisasi pendokumentasiannya	91	91	eks	60.000.000	66.000.000	SKPD	Dikbud
1	17	01	16	05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peningkatan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Terlaksananya upaya pengelolaan dan pengembangan pelestarian sejarah purbakala, museum potensi kabupaten Bandung	3 Situs di tiga kecamatan dapat pengelolaan dan pengembangan pelestariannya	3	3	situs	110.000.000	121.000.000	SKPD, Cileunyi, Kutawaringin	Dikbud
1	17	01	16	07	Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah	Terlaksananya pengembangan nilai dan geografi sejarah	3 kegiatan pengembangan nilai dan geografi sejarah dapat dilaksanakan	3	3	kegiatan	50.000.000	55.000.000	SKPD	Dikbud
1	17	01	16	13	Pengembangan, Penyusunan Data Base sistem informasi sejarah dan kepurbakalaan	Tersusunnya Data Based serta sistem informasi sejarah dan kepurbakalaan	3 Dokumen data based sistem informasi sejarah dan kepurbakalaan tk Desa, Kecamatan, dan Kabupaten dapat diperoleh	10	10	dokumen	50.000.000	55.000.000	SKPD	Dikbud
1	17	01	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terlaksananya Pengelolaan Keragaman Budaya					-			Dikbud
1	17	01	17	01	Proragam pengembangan kesenian dan kekayaan daerah	terlaksananya penyediaan alat kesenian yang merupakan kekayaan daerah	1 sanggar kesenian kecamatan cileunyi dan 8 sekolah model keterampilan kesenian memperoleh alat kesenian kekayaan daerah	1	1	unit gamelan	190.000.000	209.000.000	SKPD, Cileunyi	Dikbud
Jumlah 1											146.373.310.000	145.610.641.000		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD

: DINAS TENAGA KERJA

KODE REKENING		URUSAN/PROGRAM KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)		SASARAN		TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD	
1	14							TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012			
1	14				KETENAGAKERJAAN									Disnaker	
1	14	xx	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja									Disnaker	
1	14	xx	15	02	Pembangunan balai latihan kerja	Terbangunnya workshop	Pencari kerja	500	3000	M2	6.000.000.000	30.000.000.000	Kab. Bandung	Disnaker	
1	14	xx	15	06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Terlatihnya pencari kerja pada bidang industri, agribisnis dan aneka kejuruan dan tersertifikasinya kompetensi	Pencari kerja	765	1120	orang	2.537.180.000	3.920.498.500	31 Kecamatan	Disnaker	
1	14	xx	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja									Disnaker	
1	14	xx	16	04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Penempatan Lokal, AKAL 2497 orang AKAN 200 org, Penempatan mulai BKK sebanyak 150 org	Pencari kerja, kelompok usaha mandiri dan kelompok usaha rumah tangga	240	560	orang	900.000.000	2.100.000.000	Kab. Bandung	Disnaker	
1	14	xx	16	04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Meningkatkan keterampilan untuk menongkalkan ekonomi masyarakat		410	360	orang	1.876.000.000	1.650.000.000			
1	14	xx	16	04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Pelatihan dasar managerial dan permodalan untuk kelompok usaha rumah tangga		30	100	orang	82.500.000	275.000.000			
1	14	xx	17		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan									Disnaker	
1	14	xx	17	04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Tercapainya peningkatan pembentukan LKS Bipartit	Pekerja dan Pengusaha				500.000.000	600.000.000	Kab. Bandung 2 Zona Industri	Disnaker	
1	14	xx	17	04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Tercapainya peningkatan organisasi pengusaha dan pekerja pembentukan LKS Bipartit	Pekerja dan Pengusaha								
1	14	xx	17	04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Terekomendasikannya UMK Tahun 2012	Pekerja dan Pengusaha								
1	14	xx	17	05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Terselenggaranya bimtek waktu kerja dan istirahat.	Para Pengusaha dan Pekerja	20	20	Perusahaan	200.000.000	300.000.000	Kab. Bandung 2 Zona Industri	Disnaker	
1	14	xx	17	05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Terselenggaranya Bimtek P2K3	Para Pengusaha dan Pekerja	20	20	Perusahaan					Disnaker
1	14	xx	17	05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Terselenggaranya pengawasan tenaga kerja wanita dan anak	Para Pengusaha dan Pekerja	60	60	Perusahaan					Disnaker
2	08				TRANSMIGRASI									Disnaker	
2	08	xx	17		Program Transmigrasi Regional									Disnaker	
2	08	xx	17	03	Monitoring dan Penempatan Transmigrasi	Terselenggaranya penjagaan dan peninjauan ke daerah penempatan transmigrasi	Para calon transmigrasi	4 Provinsi, 60 kk	4 Provinsi, 60 kk	KK	200.000.000	200.000.000	Kaltim, Gorontalo, Sumsel dan Sumut	Disnaker	
Jumlah 2											12.295.680.000	39.045.498.500		Disnaker	

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD : DINAS KESEHATAN

KODE REKENING		URUSAN/PROGRAM KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)		SASARAN		TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD
1	02							TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012		
1	02		15		KESEHATAN									
1	02		15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya obat dan perbekalan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan dasar	Pengelola obat, Puskesmas, masyarakat, apotek, toko obat, RS, LS, LP							Dinkes
1	02	xx	15	01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya obat pelayanan kesehatan dasar (PKD), kesehatan ibu dan anak (KIA), pencegahan dan pemberantasan penyakit (P2P) dan gizi; Tersedianya bahan habis pakai kesehatan; Tersedianya reagen laboratorium; Tersusunnya rencana kebutuhan obat (RKO) dan pe	Pengelola obat, Puskesmas, masyarakat	61 puskesmas, 61 pengelola obat, 1.700.000 jiwa masy	61 puskesmas, 61 pengelola obat, 1.745.073 jiwa masy		16.000.000.000	17.500.000.000	Kab Bandung	Dinkes
1	02	xx	15	02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Terlaksananya distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke puskesmas; Terlaksananya evaluasi dan monitoring pengelolaan obat di puskesmas	Pengelola obat di puskesmas	45 pengelola obat di 45 puskesmas	48 pengelola obat di 48 puskesmas		45.000.000	50.000.000	Kab Bandung	Dinkes
1	02	xx	15	04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Terlaksananya pengelolaan obat yang baik di apotik dan toko obat dan tercapainya pemahaman mengenai penggunaan obat rasional	Pengelola obat di Apotik dan Toko obat, Pengelola obat puskesmas dan rumah sakit	45 apotek, 105 toko obat, 61 pengelola obat puskesmas dan RS	50 apotek, 110 toko obat, 70 pengelola obat puskesmas dan RS		120.000.000	135.000.000	Kab Bandung	Dinkes
1	02	xx	15	05	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan dalam penggunaan obat secara rasional di 61 Puskesmas, Muspika kecamatan, PKK, Kader, Tokoh masyarakat, meningkatnya kualitas kemitraan dengan Tokoh Pemuda, Lintas Sektor dan Lintas Program	Pengelola obat puskesmas, LS, LP, dan tokoh masyarakat	80	80 orang		50.000.000	55.000.000	Kab Bandung	Dinkes
1	02		16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat miskin, anak sekolah, dan masyarakat di lokasi bencana	Keluarga miskin dengan penyakit kronis dan risiko tinggi, Guru UKS SD/MI, Anak Sekolah SD/MI, SMP/SMA, masyarakat di lokasi bencana							Dinkes
1	02	xx	16	01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	Terlaksananya pelayanan kunjungan rumah bagi penderita penyakit kronis dan risiko tinggi	Keluarga miskin dengan penyakit kronis dan risiko tinggi	2200	2220 orang		100.000.000	56.000.000	Kab. Bandung	Dinkes
1	02	xx	16	09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Terlaksananya penjurangan kesehatan bagi murid sekolah dasar dan sekolah lanjutan; Terlaksananya pengadaan KMS anak sekolah; Terlaksananya pelatihan guru UKS, dokter kecil, dan kader kesehatan remaja; Terlaksananya pembinaan sekolah sehat	Guru UKS SD/MI, Anak Sekolah SD/MI dan SPM/SMA	25 guru, 25 kader kes remaja, 713 SD	30 guru UKS, 30 kader kes remaja, 715 SD/MI		174.410.000	192.000.000	Kab. Bandung	Dinkes
1	02	xx	16	11	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Terlaksananya posko rawan bencana dan terlayannya pasien korban bencana dan terlaksananya posko hari-hari besar; Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana	Puskesmas rawan bencana & rawan kecelakaan	20 lokasi bencana & 10 lokasi hari-hari besar	20 lokasi bencana & 10 lokasi hari-hari besar		200.000.000	220.000.000	Kab. Bandung	Dinkes
1	02	xx	16	12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terlayannya kesehatan masyarakat Kabupaten Bandung dan calon jemaah haji	Calon jemaah haji, Petugas Puskesmas	61	61 orang		500.000.000	550.000.000	Kab. Bandung	Dinkes
1	02	xx	16	13	penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Tersedianya biaya operasional	Puskesmas DTP, Puskesmas TTP, UPTD lab, tenaga operasional sukwan	5 puskesmas DTP, 56 puskesmas TTP, UPTD lab, 171 tenaga operasional sukwan	5 puskesmas DTP, 56 puskesmas TTP, UPTD lab, 171 tenaga operasional sukwan		6.500.000.000	7.100.000.000	Kab. Bandung	Dinkes
1	02	xx	16	16	Dst... (Pengembangan Masyarakat Sehat (Bandung Sehat)	Terlaksananya pengembangan Bandung Sehat di seluruh kecamatan dalam mendukung Kabupaten Bandung Sehat	Kecamatan, Tim Pembina dan Forum Kab. Bandung Sehat	31 kec, 100 orang	31 kec, 100 orang		50.000.000	55.000.000	Kab. Bandung	Dinkes

1	02	xx	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Terawasinya makanan dan minuman serta obat yang beredar di masyarakat sesuai dengan standar kesehatan	IRTP, Puskesmas, Apotik, Toko Obat										Dinkes
1	02	xx	17	02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Terindikasinya pangan yang mengandung bahan berbahaya/ terkontaminasi; Terbinanya toko obat dan apotik; Tertibnya pangan yang beredar	Jajanan anak sekolah, produk pangan olahan industri rumah tangga, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang belum berijin, IRTP yang sudah berijin	7 sekolah, 7 pasar, 125 IRTP belum berijin, 125 IRTP sudah berijin, 6 kecamatan	8 sekolah, 8 pasar, 130 IRTP belum berijin, 130 IRTP sudah berijin, 6 kecamatan				140.000.000	155.000.000	Kab. Bandung		Dinkes
1	02	xx	17	03	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	Terdeteksinya bahan makanan/makanan yang mengandung formalin; Terjaminnya makanan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat	UPTD Yankes	10	10	UPTD			120.000.000	133.000.000	Kab. Bandung		Dinkes
1	02	xx	17	04	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan	Tertibnya apotik, toko obat, produsen makanan yang beroperasi di Kabupaten Bandung	Apotik, Toko Obat, IRTP	50 apotik, 30 toko obat, 30 IRTP, 25 ks temuan BBPOM	55 apotik, 35 toko obat, 35 IRTP, 30 ks temuan BBPOM				52.770.000	58.050.000	Kab. Bandung		Dinkes
1	02	xx	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terselenggaranya upaya penyebarluasan informasi dan promosi kesehatan di masyarakat	Stasiun radio, Puskesmas, Desa, Forum dan Masyarakat Desa Siaga										Dinkes
1	02	xx	19	01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Tersosialisasikannya program-program kesehatan melalui 8 Stasiun Radio kepada 61 Pusk., 31 Kec., 276 desa	Stasiun radio, Puskesmas, Desa	8 stasiun radio, 61 puskesmas, 276 desa	8 stasiun radio, 61 puskesmas, 276 desa				625.000.000	138.000.000	Kab. Bandung		Dinkes
1	02	xx	19	02	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	Terbinanya desa siaga di Kabupaten Bandung	Forum Desa Siaga, Masyarakat Desa Siaga	60 org ketua forum ds siaga, 775 org pengurus ds siaga, 50 org pendamping MMD	60 org ketua forum ds siaga, 775 org pengurus ds siaga, 50 org pendamping MMD				250.000.000	72.000.000	Kab. Bandung		Dinkes
1	02	xx	19	03	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Terbinanya UKBM dan terlaksananya kegiatan Saka Bakti Husada	Petugas Pembina Saka Bakti Husada (SBH)	5 kwartir SBH, 61 puskesmas	5 kwartir SBH, 61 puskesmas				75.000.000	405.000.000	Kab. Bandung		Dinkes
1	02	xx	19	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Termonitor dan terevaluasinya kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	Petugas promosi kesehatan puskesmas	61	61	orang			70.000.000	75.000.000	Kab. Bandung		Dinkes
1	02	xx	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya status gizi masyarakat terutama kelompok risiko tinggi seperti, bayi, balita, ibu hamil dan ibu menyusui	Anak balita di seluruh desa, Petugas Gizi Puskesmas, Lintas Program, Lintas Sektor, balita gizi buruk, bumil KEK, ibu menyusui										Dinkes
1	02	xx	20	01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Terpetakannya status gizi balita dalam Peta Rawan Pangan dan Gizi	Anak balita di seluruh desa, Petugas Gizi Puskesmas, Lintas Program, Lintas Sektor	276 desa, 61 TPG puskesmas, 250 org LS & LP dari 10 kec	276 desa, 61 TPG puskesmas, 250 org LS & LP dari 10 kec				227.370.000	250.100.000	Kab. Bandung		Dinkes
1	02	xx	20	02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Terdistribusikan dan terkonsuminya vitamin A bayi, balita, dan ibu nifas; PMT pada Balita Gizi Buruk dan Bumil KEK	Bayi & balita gizi buruk dan gizi kurang, Bumil KEK	1200 bayi & balita gizi buruk dan kurang, 220 bumil KEK	1200 bayi & balita gizi buruk dan kurang, 230 bumil KEK				1.500.000.000	1.650.000.000	Kab. Bandung		Dinkes
1	02	xx	20	03	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Tercapainya pemberian Fe pd Bumil, tercapainya desa dg konsumsi garam beryodium baik, tersedianya data prevalensi anemia dan GAKI	Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) puskesmas, SD/MI	61 TPG puskesmas, 276 SD/MI	61 TPG puskesmas, 276 SD/MI				864.470.000	950.950.000	Kab. Bandung		Dinkes
1	02	xx	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Terwujudnya lingkungan sehat	rumah rawan penyakit berbasis lingkungan, desa rawan bencana/KLB, desa rawan DBD										Dinkes
1	02	xx	21	01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Terkajinya data kesehatan lingkungan, tersedianya sarana sanitasi serta terlaksananya kegiatan sanitasi	rumah rawan penyakit berbasis lingkungan, desa rawan bencana/KLB, desa rawan DBD	200 rrmh, 20 KLB, 36 ds	210 rrmh, 20 KLB, 36 ds				1.100.000.000	550.000.000	Kab. Bandung		Dinkes
1	02	xx	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Menurunnya tingkat kesakitan akibat penyakit menular di masyarakat	Masyarakat lokasi rawan penyakit menular										Dinkes
1	02	xx	22	01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Tertanggulangnya penyakit yang disebabkan oleh vektor nyamuk	Penduduk di lokasi terjangkit dan masyarakat di wilayah endemis DBD	500 titik fokus DBD, 63 lokasi daerah endemis DBD & 25 lokasi penyakit demam Chikungunya	500 titik fokus DBD, 63 lokasi daerah endemis DBD & 25 lokasi penyakit demam Chikungunya				150.000.000	407.000.000	Kab. Bandung		Dinkes
1	02	xx	22	02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Tersedianya alat fogging	Insektisida Cypermethrin, Larvasida	300 ltr, 300 kg	300 ltr, 300 kg				497.927.500	338.000.000	Kab. Bandung		Dinkes
1	02	xx	22	04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Tercegahnya penyakit PD31	Puskesmas, SD/MI	61 Pusk, 1600 SD/MI	61 Pusk, 1600 SD/MI				400.000.000	440.000.000	Kab. Bandung		Dinkes
1	02	xx	22	05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Tercegahnya penyebaran penyakit menular seperti TBC, Kusta, ISPA, Diare dan HIV/AIDS	Penduduk lokasi terjangkit dan daerah rawan pnemonia, diare, TBC dan penduduk di daerah rawan penyakit menular	61 Puskesmas, 4 RS	61 Puskesmas, 4 RS				750.000.000	1.800.000.000	Kab. Bandung		Dinkes

1	02	xx	22	06	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Meningkatnya upaya pencegahan penyakit endemik/epidemik (filarisis), AFP dan campak	Masyarakat Kabupaten Bandung	Seluruh masy Kab Bandung, minimal 15 kasus AFP	Seluruh masy Kab Bandung, minimal 15 kasus AFP					Dinkes	
1	02	xx	22	08	Peningkatan Imunisasi	Terpeliharanya vaksin dan cold chain serta teranalisisnya program	Puskesmas	61 Puskesmas	61 Puskesmas		2.508.530.000	2.800.000.000	Kab. Bandung	Dinkes	
1	02	xx	22	09	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Tergambarnya dan tertanggulangnya epidemiologis kejadian KLB penyakit menular dan bencana	Lokasi KLB, masyarakat, rumah sakit	70 Lokasi KLB, 15 kasus KIPI, 5 RS	70 Lokasi KLB, 15 kasus KIPI, 5 RS		900.000.000	1.430.000.000	Kab. Bandung	Dinkes	
1	02	xx	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan	Tim Pengkaji Bapel, UPTD Yankes, Pengelola Program		1 paket, 61 puskesmas				Kab. Bandung	Dinkes	
1	02	xx	23	01	Penyusunan standar kesehatan	Tersusunnya Raperda ttg jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk	Tim Pengkaji Bapel, UPTD Yankes, Pengelola Program	7 org, 31 UPTD, 30 orang	7 org, 31 UPTD, 30 orang		150.000.000	165.000.000	Kab. Bandung	Dinkes	
1	02	xx	23	02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya evaluasi kinerja puskesmas	Kepala UPTD/UPF, Puskesmas	31 orang, 3 puskesmas	31 orang, 3 puskesmas		56.230.000	62.000.000	Kab. Bandung	Dinkes	
1	02	xx	23	03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Tersusunnya Perda SKD dan inventori data	Dinkes, Puskesmas	54 orang	54 orang		125.000.000	140.000.000	Kab. Bandung	Dinkes	
1	02	xx	23	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisa data profil, dokumen profil kesehatan dan pemutakhiran data	Dokumen profil kesehatan dan laporan tahunan bidang kesehatan	1	1	1 paket		300.000.000	350.000.000	Kab. Bandung	Dinkes
1	02	xx	24		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Masyarakat miskin di luar kuota jamkesmas, RS							Dinkes	
1	02	xx	24	11	Dst ... (Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin)	Meningkatnya status kesehatan masyarakat miskin	Masyarakat miskin di luar kuota jamkesmas, sistem rujukan, RS	13% masy miskin, 61 Pusk & 23 RS Mitra	15% masy miskin, 61 Pusk & 23 RS Mitra		26.700.000.000	41.000.000.000	Kab. Bandung	Dinkes	
1	02	xx	25		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Meningkatnya pelayanan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan di masyarakat	Puskesmas, Pustu, Posyandu, Puskesmas							Dinkes	
1	02	xx	25	01	Pembangunan puskesmas	Tersedianya gedung rawat inap Pkm DTP Rancaekek dan gedung puskesmas Cangkulang	Puskesmas DTP Rancaekek dan Puskesmas Cangkulang	2	3	unit	3.054.000.000	1.500.000.000	Cangkulang, Rancaekek, Pangalengan	Dinkes	
1	02	xx	25	02	Pembangunan puskesmas pembantu	Tersedianya puskesmas pembantu	Puskesmas Pembantu	4	4	Pustu	1.821.562.500	1.000.000.000	Cilengkrang, Kutawaringin, Margaasih, Rancaekek	Dinkes	
1	02	xx	25	06	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas	Puskesmas	4	4	Puskesmas	930.000.000	2.500.000.000	Kab. Bandung, Rancaekek, Majalaya, Ciwidey	Dinkes	
1	02	xx	25	14	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	Terpeliharanya kualitas sarana dan prasarana puskesmas	Puskesmas				2.302.500.000	600.000.000	Kab. Bandung	Dinkes	
1	02	xx	25	17	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling	Terpeliharanya kualitas sarana dan prasarana puskesmas keliling	Puskesmas Keliling				82.500.000	250.000.000	Kab. Bandung	Dinkes	
1	02	xx	28		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Meningkatnya kemampuan SDM kesehatan	dokter dan paramedis							Dinkes	
1	02	xx	28	05	kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Meningkatnya kualitas dokter dan paramedis	dokter dan paramedis	120 orang dokter dan paramedis	130 dokter dan paramedis	orang	600.000.000	650.000.000	Kab. Bandung	Dinkes	
1	02	xx	30		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Meningkatnya derajat kesehatan lansia	kelompok lansia, dokter, perawat, tenaga administrasi							Dinkes	
1	02	xx	30	03	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan	Tersedianya perawat PHN yang ahli dan perawatan kesehatan lansia	dokter Puskesmas, Perawat, Tenaga Administrasi	20	28	orang	44.500.000	49.000.000	Kab. Bandung	Dinkes	
1	02	xx	30	04	Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan	Tersedianya puskesmas dan petugas santun lansia	Lansia, Masyarakat	5	7	puskesmas	200.000.000	620.000.000	Kab. Bandung	Dinkes	
1	02	xx	32		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Menurunnya angka kematian ibu dan bayi	Dokter, Bidan, Perawat, Kader, Masyarakat, Ibu Hamil, Ibu Balita							Dinkes	
1	02	xx	32	02	Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Menurunnya kejadian kematian ibu dan bayi	Dokter, Bidan, Perawat, Kader, Masyarakat, Ibu Hamil, Ibu Balita	75	90	orang	1.095.520.000	1.200.000.000	Kab. Bandung	Dinkes	
Jumlah 3											72.332.280.000	88.651.100.000		Dinkes	

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD

: RSD MAJALAYA

KODE REKENING				URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD	
1	02						TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012			
1	02			KESEHATAN										
1	02	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung upaya kesehatan masyarakat	Karyawan dan Pasien rumah sakit								
1	02	02	16	13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Terlayannya Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap di Rumah Sakit	3.694 Pasien Rumah Sakit dan BOR 70%	3.694	5.172	Orang	3.000.000.000	4.200.000.000	Cipaku Paseh	RSUD Majalaya
1	02	02	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Tersedianya dana pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Karyawan, Pasien dan Pengunjung rumah sakit								
1	02	02	26	18	Pengadaan alat-alat rumah sakit	Terlayannya Pasien Rawat dan Rawat Inap di rumah sakit	78.500 Pasien Rumah Sakit dan BOR 70%	78.500	109.900	Orang	1.000.000.000	1.400.000.000	Cipaku Paseh	RSUD Majalaya
1	02	02	26	18	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	Terlayannya Pasien Rawat dan Rawat Inap di rumah sakit	78.500 Pasien Rumah Sakit dan BOR 88,60%	78.500	109.900	Orang	420.000.000	588.000.000	Cipaku Paseh	RSUD Majalaya
1	02	02	26	21	Pengadaan mebelur rumah sakit	Terealisasinya peningkatan kenyamanan pasien rawat jalan dan pengunjung rawat inap.	7 unit alat mebelair pendukung pelayanan	7	9	Unit	340.700.000	476.980.000	Cipaku Paseh	RSUD Majalaya
1	02	02	26	22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Terealisasinya peningkatan kenyamanan pengunjung rumah sakit	10 unit alat perlengkapan rumah tangga pendukung pelayanan	10	14	Rasio	110.000.000	154.000.000	Cipaku Paseh	RSUD Majalaya
1	02	02	26	25	Pengembangan tipe rumah sakit	Terlaksananya akreditasi rumah sakit	12 pelayanan rumah sakit	12	16	Pelayanan	728.000.000	1.019.200.000	Cipaku Paseh	RSUD Majalaya
1	02	02	27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Tersedianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	Pengunjung rumah sakit								
1	02	02	27	01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	Bangunan rumah sakit	5	7	Unit	98.000.000	137.200.000	Cipaku Paseh	RSUD Majalaya
1	02	02	27	16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Terpeleiharannya bangunan IPAL	IPAL rumah sakit	1	2	Unit	98.000.000	137.200.000	Cipaku Paseh	RSUD Majalaya
1	02	02	28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Tersedianya dana kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Karyawan rumah sakit								
1	02	02	28	05	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Tercapainya Tingkat pendidikan Tenaga Medis/Paramedis dan Non Medis sesuai dengan Standar Rumah Sakit	Tenaga kesehatan yang belum mendapatkan pendidikan penyeteraan	9	12	Orang	560.000.000	784.000.000	Cipaku Paseh	RSUD Majalaya
				Jumlah 4							6.354.700.000	8.896.580.000		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD

: RSD SOREANG

KODE REKENING				URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD
1	02						TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012		
1	02	03	19	KESEHATAN									
1	02	03	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat									
1	02	03	19	05 Promosi Kesehatan dan Rujukan Rumah Sakit.	Terlaksananya kegiatan PKRS	leaflet / pameran	5000 / 1	7000 / 1	lembar / kegiatan	70.000.000	25.000.000	Ds. Pamekaran Soreang	RSUD Soreang
1	02	03	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit /rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata									
1	02	03	26	17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit	Terehabnya gedung Instalasi Pelayanan	Ruang Perinatologi, Ruang Anyelir, Ruang Flamboyan, OK, ICU	750	400	M2	1.300.000.000	700.000.000	Ds. Pamekaran Soreang	RSUD Soreang
1	02	03	26	18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Tersedianya alat medis penunjang layanan kesehatan RS	Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Penunjang	30 / 97	40 / 140	jenis / unit	1.300.000.000	1.600.000.000	Ds. Pamekaran Soreang	RSUD Soreang
1	02	03	26	22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Terpenuhinya kebutuhan inventaris ruang pasien dan perlengkapan dapur RS	Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gizi	44 / 3630	44 / 3800	jenis/ item	1.200.000.000	600.000.000	Ds. Pamekaran Soreang	RSUD Soreang
1	02	03	26	25 Pengembangan tipe rumah sakit	Terlaksananya kegiatan persiapan RS menjadi Tipe B, terevaluasi Penerapan BLUD, terevaluasinya penerapan Akreditasi	manajemen, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Penunjang	6/12	6/12	dokumen / jenis layanan	70.000.000	70.000.000	Ds. Pamekaran Soreang	RSUD Soreang
1	02	03	26	26 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya audit internal unit kerja RS	Satuan pengawas Internal	10	10	obrik	30.000.000	25.000.000	Ds. Pamekaran Soreang	RSUD Soreang
1	02	03	27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata									
1	02	03	27	01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Tersedianya anggaran pendukung outsourcing jasa cleaning services dan bahan baku pemeliharaan gedung dan lingkungan RS selama 1 tahun	7398 M2 / 12 bulan	7398 /10547	7398 /10547	M2/buah	980.000.000	800.000.000	Ds. Pamekaran Soreang	RSUD Soreang
1	02	03	27	16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Terpeliharanya limbah cair RS	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	1 /12	1 /12	unit/bulan	90.000.000	88.000.000	Ds. Pamekaran Soreang	RSUD Soreang
1	02	03	27	17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Terpelihara dan Terfungsikannya alkes RS	80% alkes Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Penunjang	102	110	jenis alat	70.000.000	90.000.000	Ds. Pamekaran Soreang	RSUD Soreang
1	02	03	28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan									
1	02	03	28	05 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	terlaksananya kegiatan peningkatan di bidang teknis pelayanan kesehatan	dokter dan paramedis	401	450	HOK	700.000.000	770.000.000	Ds. Pamekaran Soreang	RSUD Soreang
1	03	03	23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan									
1	03	03	23	04 Pengadaan alat-alat berat	Tersedianya elevator dan kelengkapannya	Gedung Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu	1		unit	2.000.000.000		Ds. Pamekaran Soreang	RSUD Soreang
				Jumlah 5						7.810.000.000	4.768.000.000		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD

: RSUD CICALENGKA

1	02				URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD
								TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012		
1	02				KESEHATAN									
1	02		16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat									
1	02	xx	16	12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terpenuhinya jumlah dan jenis SDM pelayanan dan termotivasi aparat kesehatan dalam peningkatan kinerja pelayanan RS	Tenaga medis, paramedis, administrasi dan penunjang pelayanan	130	160	CB	3.390.000.000	5.085.000.000	Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat								Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	19	01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Terlaksananya penyebaran informasi pelayanan kesehatan RSUD melalui media cetak dan pameran	Pengguna pelayanan RS/Masyarakat	1	1	Kegiatan	20.000.000	37.500.000	Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	23	01	Penyusunan standar kesehatan	Tersedianya standar operasional pelayanan medis dan administrasi RS.	Prosedur pelayanan teknis fungsional dan administrasi	12	20	Dokumen	60.000.000	90.000.000	Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	26		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata									
1	02	xx	26	07	Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi	Peningkatan kualitas pasien bedah		1	1	Unit	200.000.000	300.000.000	Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	26	18	Pengadaan alat-alat rumah sakit	meningkatkan fasilitas pelayanan pasien rawat inap dan rawat jalan.	sarana pelayanan pasien	4	8	Paket	250.000.000	525.000.000	Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	26	19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Terpenuhinya jumlah, jenis dosis obat, gas, media dan bahan habis pakai sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan	Pengobatan pasien	2	2	Paket	1.400.000.000	2.250.000.000	Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	26	21	Pengadaan mebeuler rumah sakit	Terpenuhinya pelayanan dalam gedung RS.	Fasilitas pelayanan rumah sakit	32	40	Unit/Set	60.000.000	90.000.000	Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	26	22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Meningkatnya sarana penunjang pelayanan pasien RS	Fasilitas pelayanan dapur, laundry dan ruang pasien rumah sakit.	4	6	Paket	40.000.000	75.000.000	Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	26	23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Terpenuhinya kebutuhan bahan pelayanan penunjang medis dan makan pasien rawat inap rumah sakit	Laboratorium, radiologi dan pasien rawat inap	5	6	Paket	1.100.000.000	1.831.200.000	Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	26	24	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	Tersedianya bahan cetakan dalam pelayanan administrasi pasien RS.	Pelayanan adm. Pasien RS.	182500	277250	Lbr	50.000.000	75.000.000	Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	26	25	Pengembangan tipe rumah sakit	Terpenuhinya akreditasi 5 pelayanan	Pelayanan manajemen IGD, medik, keperawatan dan rekam medik.	5	12	Dokumen	70.000.000	120.000.000	Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	26	26	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya laporan dan data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengadaan sarana dan prasarana RS.	Laporan bendahara barang, dokumen aset hasil pengadaan sarana dan prasarana	1	1	Paket	15.000.000	22.500.000	Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	27		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata								Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	27	01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Terpeliharanya sarana pelayanan RS.	Sarana/gedung pelayanan RS.	1	1	Paket	150.000.000	225.000.000	Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	27	14	Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium	Terkalibrasinya peralatan laboratorium RS	Peralatan laboratorium	4	4	Kali/th	20.000.000	30.000.000	Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	27	16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Terlaksananya pengelolaan limbah RS.	Limbah medis dan non medis	1	1	Unit	20.000.000	30.000.000	Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	27	17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Terpeliharanya alat-alat kesehatan RS.	Alat Kesehatan RS.	70	84	Unit	20.000.000	30.000.000	Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	27	20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Terpeliharanya perlengkapan RS. Dan IPRS	Peralatan penunjang RS (Genset, Intalasi Air, Listrik dll)	5	7	Unit	30.000.000	45.000.000	Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	28		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan								Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	28	01	kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Meningkatnya kompetensi petugas dan pelayanan kerjasama penyelenggaraan asuransi kesehatan	Keahlian asuransi kesehatan dan stakeholders asuransi kesehatan	5	8	Orang/Kegiatan	15.000.000	30.000.000	Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	28	05	kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Meningkatnya kompetensi petugas medis dan non medis dalam pelayanan kesehatan RS	Dokter, Perawat, Bidan dan Administrator	30	40	Ok	50.000.000	75.000.000	Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	28	06	kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan	Terkoordinasinya sistem ..	Dokter, Puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan	2	4	Kegiatan	20.000.000	30.000.000	Kab. Bandung	RSD Cicalengka
1	02	xx	28	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya laporan dan data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan kerja dan pelaksanaan program RS.	Pelaksanaan kegiatan dan struktural	30	40	OK	15.000.000	22.500.000	Kab. Bandung	RSD Cicalengka
Jumlah 6											6.995.000.000	11.018.700.000		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD : BINA MARGA

KODE REKENING				URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD	
1	03						TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012			
1	03		15	PEKERJAAN UMUM										
1	03		15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Menghubungkan daerah - daerah yang terisolir, Meningkatkan pergerakan arus barang dan jasa, Meningkatkan perekonomian masyarakat.								
1	03	xx	15	01	Perencanaan pembangunan jalan					-	200.000.000	Kab. Bandung	Bina Marga	
1	03	xx	15	03	Pembangunan jalan	Terbangunnya jalan	- Jln. Katapang-Baleendah - Jln Tol Gedebage-Majalaya - Jln. Kolektor Cileunyi - Jln Tol Soraja	1	1	Paket	41.000.000.000	30.000.000.000	Kab. Bandung	Bina Marga
1	03	xx	15	04	Perencanaan pembangunan jembatan						-	200.000.000	Kab. Bandung	Bina Marga
1	03	xx	15	05	Pembangunan jembatan	Terbangunnya jembatan		1		Buah	2.000.000.000	2.000.000.000	Cangkuang, Kutawaringin	Bina Marga
1	03	xx	16		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		Adanya gorong - gorong dan draenase pada daerah rawan banjir, Meningkatnya pelayanan jalan pada musim hujan, Berkurangnya jalan - jalan yang digenangi air pada saat musim hujan							
1	03	xx	16	01	Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan draenase dan gorong2		7		Dokumen	350.000.000	700.000.000	Kab. Bandung	Bina Marga
1	03	xx	16	03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Adanya saluran draenase/gorong-gorong untuk menanggulangi banjir pada ruas jalan					6.562.000.000	8.000.000.000	Arjasari, Baleendah, Banjaran, Bojongsong, Cangkuang, Cicalengka, Cikancung, Cilengkrang, Cileunyi, Ciparay, Ciwidey, Dayeuhkolot, Ibum, Katapang, Kertasari, Kutawaringin, Majalaya,	Bina Marga
1	03	xx	17		Program Pembangunan turap/talud/bronjong		Adanya dokumen perencanaan turap/talud/bronjong, Terlaksananya pembangunan turap/talud / bronjong							
1	03	xx	17	01	Perencanaan turap/talud/bronjong	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan turap/talud/bronjong		1		Dokumen	150.000.000	300.000.000	Kab. Bandung	Bina Marga
1	03	xx	17	03	Pembangunan turap/talud/bronjong	Adanya tembok penahan tanah untuk menanggulangi longsor yang dapat mengganggu kelancaran lalintas		16.541		M	5.789.500.000	7.000.000.000	Arjasari, Baleendah, Cangkuang, Cicalengka, Cikancung, Cilengkrang, Cileunyi, Cimaung, Cimenyan, Ciparay, Dayeuhkolot, Ibum, Katapang, Kertasari, Kutawaringin, Majalaya, Margaasih	Bina Marga
1	03	xx	18		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Adanya dokumen perencanaan pemeliharaan jalan dan Jembatan, Terlaksananya kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, Waktu tempuh rata-rata meningkat, Meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat.							
1	03	xx	18	01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Adanya dokumen perencanaan teknis pemeliharaan jalan		7		Dokumen	1.200.000.000	2.000.000.000	Kab. Bandung	Bina Marga
1	03	xx	18	02	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Adanya dokumen perencanaan teknis pemeliharaan jembatan		7		Dokumen	1.200.000.000	1.700.000.000	Kab. Bandung	Bina Marga
1	03	xx	18	03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Terpeliharanya jalan kabupaten		50		Km	65.842.460.000	100.000.000.000	Kab. Bandung	Bina Marga
1	03	xx	18	04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Terpeliharanya jembatan pada jalan kabupaten		54		Buah	11.282.000.000	15.000.000.000	Arjasari, Baleendah, Banjaran, Bojongsong, Cangkuang, Cicalengka, Cilengkrang, Cimaung, Ciparay, Ciwidey, Dayeuhkolot, Katapang, Kertasari, Margaasih, Margahayu, nagreg, Pangalengan	Bina Marga
1	03	xx	18	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	termonitornya kegiatan ke-bina marga-an sebagai dasar untuk penyusunan program					450.000.000	500.000.000	Kab. Bandung	Bina Marga
1	03	xx	20		Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan		Adanya dokumen inspeksi kondisi jalan dan jembatan							
1	03	xx	20	01	Inspeksi Kondisi Jalan	Tersedianya dokumen inspeksi jalan		7		Wilayah	1.000.000.000	1.500.000.000	Kab. Bandung	Bina Marga
1	03	xx	22		Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan		Tersedianya data base jalan Kabupaten Bandung, Adanya data base jalan sebagai dasar rencana program penanganan jalan kabupaten							
1	03	xx	22	01	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Tersedianya dokumen data base jalan		7		Wilayah	250.000.000	400.000.000	Kab. Bandung	Bina Marga

1	03	xx	23		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Baiknya Kondisi alat berat darat, Meningkatnya pelayanan pembangunan jalan dan jembatan, Meningkatnya PAD dari Sewa alat berat dan laboratorium, Meningkatnya pelayanan pembangunan jalan dan jembatan, Meningkatnya pelayanan Laboratorium, Meningkatnya pela								
1	03	xx	23	04	Pengadaan Alat Berat	Tersedianya alat berat stom wals untuk menunjang kegiatan pemeliharaan jalan		1	Unit	400.000.000	2.000.000.000	Kab. Bandung	Bina Marga	
1	03	xx	23	06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Tersedianya alat - alat laboratorium		5	Paket	500.000.000	500.000.000	Kab. Bandung	Bina Marga	
1	03	xx	23	10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Terpeliharanya alat - alat berat		20	Unit	600.000.000	700.000.000	Kab. Bandung	Bina Marga	
1	03	xx	23	10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Terpeliharanya alat - alat berat UPCA		1	Unit	100.000.000	100.000.000	Kab. Bandung	Bina Marga	
1	03	xx	29		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur, Terlaksananya pembangunan pengembangan infrastruktur, Meningkatnya tingkat jalan untuk kegiatan perekonomian di wilayah strtegis								
1	03	xx	29	01	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur		7	Dok	700.000.000	1.000.000.000	Kab. Bandung	Bina Marga	
1	03	xx	29	02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Terbangunnya infratstruktur pada wilayah strategis dan cepat tumbuh		7	Wilayah	2.000.000.000	2.000.000.000	Baleendah, Banjaran, Cicalengka, Cimaung, Ciparay, Ciwidey, Dayeuhkolot, Majalaya Margahayu dan Soreang	Bina Marga	
1	07	xx	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terbangunnya dan baiknya kondisi jaringan penerangan jalan umum, berkurangnya kecelakaan lalunlntas akibat tidak adanya penerangan jalan umum.								
1	07	xx	15	09	Dst. Pembangunan dan Pemeliharaan PJU	Terbangun dan terpeliharanya penerangan jalan umum (PJU)		7	Wilayah	4.497.300.000	6.000.000.000	Bojongsong, Cangkung, Cimaung, Cimenyan, Dayeuhkolot, Katapang, Kutawaringin, Margaasih, Nagreg, Pameungpeuk, Pangalengan, Pasirjambu, Rancabali, Solokanjeruk, Soreang	Bina Marga	
Jumlah 7										145.873.260.000	181.800.000.000			

Matriks Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2011

SKPD

: DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN

1	04	xx	15	URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD	
							TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012			
1	04	xx	15	PERUMAHAN										
1	04	xx	15	Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengembangan perumahan	Meningkatnya upaya pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan hunian perumahan masyarakat yang sehat dan layak teknis								
1	04	xx	15	09	Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan dalam rangka pendataan perumahan terorganisir	Tersusunnya pendataan perumahan terorganisir dalam bentuk peta digital	Tersedianya data base perumahan terorganisir berbentuk peta digital skala 1 : 1000	1	1	Dok	75.000.000	100.000.000	Tahun 2011 : Margahayu, Katapang, Soreang, Cileunyi (lanjutan). Tahun 2012 : Kutawaringin, Rancaekek	Dispertasih
1	04	xx	15	10	Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan dalam rangka penyusunan raperda serah terima fasos fasum	Tersusunnya raperda serah terima fasos fasum perumahan	Adanya kepastian hukum bagi masyarakat/warga Kab.Bandung dalam pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman	1	-	Dok	50.000.000	-	Kab. Bandung	Dispertasih
1	04	xx	15	11	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) dalam rangka Review RPIJM	Tersusunnya rencana program investasi jangka menengah bidang keciptakaryaan	Kemudahan sasaran pembangunan bidang keciptakaryaan secara terpadu	1	1	Dok	75.000.000	100.000.000	Kab. Bandung	Dispertasih
1	04	xx	15	12	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) dalam rangka penyusunan harga satuan bangunan gedung negara dan prasarana dasar lingkungan permukiman	Tersusunnya standar harga satuan bangunan gedung negara dan prasarana dasar lingkungan permukiman	Tersedianya acuan dasar Perbup harga satuan tahun 2012 dan 2013	1	1	Paket	75.000.000	75.000.000	Kab. Bandung	Dispertasih
1	04	xx	15	13	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) dalam rangka pendampingan program	Tersedianya DED/Movev	Kemudahan pembangunan secara terpadu	1	-	Dok	200.000.000	250.000.000	Kutawaringin, Pangalengan, Margaasih, Dayeuhkolot, Margahayu, Cileunyi	Dispertasih
					- Terlaksananya pendampingan program penataan kawasan program Pemerintah Pusat	- Keterpaduan program yang dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten	1	1	Paket	-	-			
					- Terlaksananya pendampingan program penataan kawasan perbatasan Pemerintah Pusat	- Keterpaduan program yang dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten di daerah perbatasan	1	1	Paket	-	-			
1	04	xx	15	03	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Terlaksananya verifikasi dan serah terima prasarana sarana dan utilitas umum perumahan	Termanfaatkannya prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan peruntukan oleh masyarakat Kab.Bandung	1	1	Paket	77.848.000	150.000.000	Kab. Bandung	Dispertasih
1	04	xx	15	06	Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Terlaksananya rehabilitasi rumah dan prasarana tidak layak huni	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tidak mampu / miskin	600	600	Unit	3.289.750.000	3.289.750.000	Tahun 2011 lokasi hasil Musrenbang 2010; dan tahun 2012 lokasi hasil Musrenbang 2011	Dispertasih
1	04	xx	15	07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana	- Pendamping program TMMD - Pendamping program P2WKSS - Pendamping program BBGRM - Pendamping program TMSS/BSMSS - Pendamping program PLP - Pendamping program stimulan	Meningkatnya kesehatan lingkungan permukiman	1	1	Desa	800.000.000	800.000.000	Kab. Bandung	Dispertasih
								1	1	Desa				
								1	1	Desa				
								1	1	Desa				
								5	5	Desa				
								1	1	Desa				
1	04	xx	15	07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana	- Pemeliharaan Rumah Susun Sewa - Tersedianya Kajian Kelayakan Teknis Rusun Sewa	Terpenuhinya kebutuhan sewa hunian bagi	2	2	Unit	150.000.000	100.000.000	Tahun 2011 dan 2012 wilayah Baleendah	Dispertasih
								1	-	Dok				
1	04	xx	15	07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dalam rangka penataan sarana sanitasi	- Penyusunan studi kelayakan dan masterplan air limbah domestik - Pembangunan sarana air limbah komunal - Pemberdayaan komunitas sanitasi	Kemudahan Akses Pelayanan sanitasi permukiman melalui sarana sanitasi setempat dan	1	-	Dok	3.000.000.000	9.900.000.000	Tahun 2011 : Cileunyi, Cimencyan, Margaasih, Nagreg, Pangalengan, Pacet,	Dispertasih
								10	25	Desa				
								1	1	Paket				
1	04	xx	15	07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dalam rangka penataan prasarana rusunawa	Tertatanya Prasarana dan Sarana luar bangunan Rusun Baru	Terpenuhinya kebutuhan sewa hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah	2	1	Unit	2.400.000.000	1.500.000.000	Baleendah	Dispertasih
1	04	xx	15	07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dalam rangka pendampingan program penanggulangan kemiskinan perkotaan	Terlaksananya pendampingan program penanggulangan kemiskinan perkotaan	Meningkatnya kesehatan lingkungan permukiman	185	185	Desa	600.000.000	500.000.000	Lokasi program PNPM Menpera / Cipta Karya	Dispertasih
1	04	xx	15	09	Dst... (Penyusunan data bangunan pemerintah)	Terlaksananya pendataan bangunan gedung pemerintah	Tersedianya data bangunan pemerintah sampai dengan tahun 2012 di 23 kecamatan	2	3	Kec	50.000.000	100.000.000	Tahun 2011 Ciparay, dan Pameungpeuk, Tahun 2012 Majalaya, Solokan Jeruk dan Paseh	Dispertasih

1	04	xx	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terwujudnya upaya penataan sarana dan prasarana lingkungan sehat perumahan dan permukiman masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan lingkungan perumahan dan permukiman masyarakat											
1	04	xx	16	02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Peningkatan cakupan pelayanan air minum pedesaan dari 14% menjadi 16% (Penyusunan DED, supervisi, pendampingan DAK dan pembangunan SPAM pedesaan)	Kemudahan akses untuk mendapatkan Air Minum dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	35	58	Desa	10.000.000.000	17.000.000.000	tahun 2011 = 35 desa hasil musrenbang tahun 2010 dan tahun 2012 = 58 desa hasil musrenbang tahun 2011	Dispertasih				
1	04	xx	16	07	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang dalam rangka penyusunan CAP	Tersusunnya dokumen Community Action Plan (CAP) sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan	Keterpaduan pembangunan sarana perumahan dan permukiman	1	1	Dok	400.000.000	450.000.000	Tahun 2011: Cilengkrang, Cimenyan. Tahun 2012: Rancaekek, Majalaya	Dispertasih				
1	04	xx	16	08	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang dalam rangka implementasi CAP	Peningkatan Sapras Lingkungan Permukiman Implementasi CAP RPP	Meningkatnya kesehatan lingkungan permukiman	1	1	Desa	900.000.000	1.000.000.000	Tahun 2011: Ciwidey, Baleendah. Tahun 2012: Soreang, Kutawaringin, Margahayu	Dispertasih				
1	04	xx	17		Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pengelola air bersih dan sanitasi	Meningkatnya upaya pengembangan sarana air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat											
1	04	xx	17	02	Fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat	- Pembinaan/monitoring terhadap 26 KPPABD pada Tahun 2011 dan 35 KPPABD pada Tahun 2012	Meningkatnya kemampuan pengelolaan Air Minum Pedesaan yang berkonsekuensi terhadap kontribusi peningkatan cakupan pelayanan Air	26	35	Kelompok	800.000.000	900.000.000	Tahun 2011: 26 desa dan Tahun 2012: 35 desa	Dispertasih				
						- Pendampingan program Multi Village Pooling (MVP)		1	1	Paket								
						- Penilaian kinerja KPPABD dan Cakupan Pelayanan		1	1	Paket								
1	04	xx	19		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Terwujudnya pengurangan kerugian masyarakat terhadap bahaya kebakaran											
1	04	xx	19	04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Tersosialisasinya Peraturan perundangan PERDA No. 7 Tahun 2009 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta Terlaksananya Pemeriksaan Berkala terhadap Sistem Proteksi Kebakaran (APAR, Hydrant, sprinkler, dll) pada 300	Terlaksananya pemeriksaan berkala kepada seluruh obyek bangunan	31	31	Kec	50.000.000	65.000.000	Kab. Bandung	Dispertasih				
1	04	xx	19	05	Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan	Terlatihnya Petugas Pemadam kebakaran di bidang	Tersedianya 20 SDM terlatih bidang	10	10	orang	60.000.000	100.000.000	Kab. Bandung	Dispertasih				
1	04	xx	19	06	Pelatihan Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran	Terlatihnya dan terbentuknya SATLAKAR (satuan Relawan Kebakaran) di setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung dalam upaya pencegahan dan penanggulungannya di lingkungannya, sesuai dengan amanat PERDA No. 7 Tahun 2009 dan KepMen PU : 11/KPT	Tersedianya 400 org SATLAKAR yang tersebar di 20 kecamatan	120	150	Satlakar	70.000.000	100.000.000	Tahun 2011 : Kutawaringin, Margaasih, Cileunyi, Nagreg, Cimenyan, Cilengkrang, Dayeuhkolot, Bojongsong, Banjaran, Majalaya. Tahun 2012 : Ciwidey, Majalaya, Baleendah, Katapang, Dayeuhkolot, Margaasih, Ciparay, Cicalengka, Kertasari, Arjasari	Dispertasih				
1	04	xx	19	07	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terciptanya Sistem Ketahanan Lingkungan Kebakaran (SKLK) di setiap Desa/Kelurahan sesuai dengan PERDA No. 7 Tahun 2009 berupa peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran.	Terbentuknya SKLK di setiap desa/kelurahan di 10 wilayah kecamatan	1	1	Paket	50.000.000	80.000.000	Tahun 2011 : Ciwidey, Cimaung, Margahayu, Paseh, Cikancung. Tahun 2012 : Rancaekek, Pacet, Solokan Jeruk, Margahayu, Pangalengan, Rancabali, Pasir Jambi	Dispertasih				
1	04	xx	19	08	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	- Pengadaan mobil pemadam kebakaran	Tersedianya peralatan rescue dan alat uji Hydrant/detector	2	-	Unit	2.750.000.000	500.000.000	Kab. Bandung	Dispertasih				
						- Pengadaan peralatan Rescue berupa :												
						a. Selang pemadam		60	60	roll								
						b. Alat uji			5	Unit								
						c. Flooting pump			6	Unit								
1	04	xx	19	09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terpeliharanya sarana prasarana mobil unit pemadam kebakaran dan kelengkapannya agar selalu dalam kondisi siap pakai untuk operasional penanggulangan kebakaran.	Terciptanya kesiapan kondisi mobil damkar untuk operasional	7	12	mobil	450.000.000	600.000.000	Kab. Bandung	Dispertasih				
1	04	xx	19	11	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Terpenuhinya Honorarium piket jaga dan mamihar harian petugas Damkar dalam kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	Terpeliharanya motivasi kesiapsiagaan petugas damkar dalam pelaksanaan tugas	56	70	orang	850.000.000	1.000.000.000	Kab. Bandung	Dispertasih				
1	04	xx	20		Program pengelolaan areal pemakaman	Terlaksananya upaya optimalisasi pengelolaan areal pemakaman yang dikuasai pemerintah	Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan areal pemakaman yang representatif											
1	04	xx	20	07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Optimalisasi penggunaan TPU dari pengembang	Terbangunnya TPU yang representatif	1	2	lokasi	150.000.000	500.000.000	Tahun 2011 : Soreang, Bojongsong. Tahun 2012: Bojongsong, Margaasih	Dispertasih				

1	05				PENATAAN RUANG													
1	05	xx	15		Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya RDTRK yang mengacu kepada RTRW 2007 - 2027	Tersedianya Pedoman Penataan Ruang yang lebih detail											
1	05	xx	15	16	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL dalam rangka penyusunan raperda RDTRK	Tersedianya Raperda RDTRK dan zoning regulation	Tersedianya dokumen RDTRK yang mengacu kepada RTRW sebanyak 11 dokumen dari +/- 30 dokumen RDTRK Kab. Bandung sampai dengan tahun 2011	2	-	Dok	100.000.000	-	Majalaya, Banjaran	Dispertasih				
1	05	xx	15	02	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	Tersedianya Raperda RDTRK dan zoning regulation		-	4	Dok	-	150.000.000	Ciueunyi, Margahayu, Pangalengan dan Ciwidey	Dispertasih				
1	05	xx	15	17	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL dalam rangka penyusunan RDRK Ciueunyi	Penyusunan RDTRK dan zoning regulation Ciueunyi		1		Dok	450.000.000	-	Ciueunyi	Dispertasih				
1	05	xx	15	18	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL dalam rangka penyusunan RDRK Margahayu	Penyusunan RDTRK dan zoning regulation Margahayu		1		Dok	450.000.000	-	Margahayu, Margaasih	Dispertasih				
1	05	xx	15	19	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL dalam rangka penyusunan RDRK Pangalengan	Penyusunan RDTRK dan zoning regulation Pangalengan		1		Dok	300.000.000	-	Pangalengan	Dispertasih				
1	05	xx	15	20	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL dalam rangka penyusunan RDRK Ciwidey	Penyusunan RDTRK dan zoning regulation Ciwidey		1		Dok	450.000.000	-	Ciwidey (Kaw. Agropolitan)	Dispertasih				
					Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL dalam rangka penyusunan RDRK Ciueunyi	Penyusunan RDTRK dan zoning regulation		-	1	Dok	-	450.000.000	Ciparay	Dispertasih				
					Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL dalam rangka penyusunan RDRK Ciueunyi			-	1	Dok	-	500.000.000	Rancaekek	Dispertasih				
					Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL dalam rangka penyusunan RDRK Ciueunyi			-	1	Dok	-	450.000.000	Margaasih	Dispertasih				
					Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL dalam rangka penyusunan RDRK Ciueunyi			-	1	Dok	-	450.000.000	Bojongsong	Dispertasih				
1	05	xx	15	21	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL dalam rangka penyusunan RTBL Soreang	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RTBL Soreang	Tersedianya rencana tata ruang yang lebih teknis	1	-	Dok	-	-	Soreang	Dispertasih				
1	05	xx	17		Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya Dokumen Foto Udara dan Peta skala 1:1000 sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang	Bertambahnya base map Kab. Bandung skala 1:1000 sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang											
1	05	xx	15	13	Survey dan pemetaan	Terlaksananya Survei dan Pemetaan Skala 1:1000	Tersedianya foto udara skala 1 : 1000 dan peta garis digitas seluas +/- 31.500 Ha dari luas Kab.	5000	5000	Ha	650.000.000	750.000.000	Tahun 2011 sebagian Margaasih, sebagian Margahayu, sebagian Ciueunyi.	Dispertasih				
1	05	xx	17	05	Pengawasan pemanfaatan ruang	Pengawasan dan pengendalian Pembangunan Banguan Pemerintah dan Masyarakat	Terlaksananya keterlibatan/keteraturan pembangunan bangunan	31	31	Kec	300.000.000	300.000.000	31 kecamatan/Kab. Bandung	Dispertasih				
1	08				LINGKUNGAN HIDUP													
1	08	xx	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya upaya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dalam bentuk pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan dari 8,2 % pada tahun 2010 menjadi 10 % pada tahun 2011 dan 12 % tahun 2012											
1	08	xx	15	13	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah dalam rangka pengelolaan sampah efektif dan efisien	- Penyusunan pola pengelolaan sampah lebih efektif dan efisien - Kajian manajemen pengelolaan persampahan - Studi tarif	Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan dari 8,2 % pada tahun 2010 menjadi 10 % pada	1	-	Paket	100.000.000	-	Kab. Bandung	Dispertasih				
1	08	xx	15	14	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah dalam rangka penyusunan Rencana Induk Penataan TPA Babakan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Penataan TPA Babakan		1	-	Dok	350.000.000	-	TPA Babakan	Dispertasih				
1	08	xx	15	02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan	- Pool kendaraan wilayah Timur - Pengadaan lahan SPA Metropolitan Bandung - Perencanaan pengembangan TPA Babakan - Peningkatan Kualitas Sistem TPA Babakan - Pengadaan TPST - Intensifikasi pengelolaan kompos di UPS eksisting - Pengadaan TPS Tipe A - Pengadaan truk 6 m3 - Pengadaan alat berat - Pengadaan container 6 m3		-	1	paket	4.400.000.000	26.370.000.000	Kab. Bandung	Dispertasih				
								-	1	paket	-							
								-	1	paket	-							
								-	1,21	paket, unit	-							
								4	4	unit	-							
								400.000	400.000	kg	-							
								5	10	Unit	-							
								6	5	unit	-							
								-	1	unit	-							
								5	15	unit	-							
1	08	xx	15	15	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan TPA Babakan	- Operasional Pengelolaan TPA Babakan		1	1	lokasi	1.100.000.000	1.200.000.000	Ciparay	Dispertasih				
1	08	xx	15	16	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan UPTD Pengangkutan Wilayah Soreang	- Operasional UPTD Wilayah Soreang		1	1	Wilayah	2.404.000.000	2.404.000.000	Wilayah Soreang	Dispertasih				
1	08	xx	15	17	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek	- Operasional UPTD Wilayah Rancaekek		1	1	Wilayah	1.495.152.000	1.495.152.000	Wilayah Rancaekek	Dispertasih				
1	08	xx	15	18	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah	- Operasional UPTD Wilayah Baleendah		1	1	Wilayah	1.370.000.000	1.507.000.000	Wilayah Baleendah	Dispertasih				
1	08	xx	15	19	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Ciparay	- Operasional UPTD Wilayah Ciparay		1	1	Wilayah	693.000.000	693.000.000	Wilayah Ciparay	Dispertasih				
1	08	xx	15	06	Bimbingan Teknis Persampahan	Terlaksananya peningkatan kinerja UPS		2	-	Unit	150.000.000	-	Katapang, Pangalengan	Dispertasih				

1	08	xx	15	10	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan		1	1	Paket	75.000.000	75.000.000	4 lokasi UPTD Rancaekek, UPTD Soreang, UPTD Ciparay, UPTD Baleendah	Dispertasih
1	08	xx	15	11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terbentuknya pola pikir masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan persampahan di komunitasnya untuk mempersiapkan implementasi pembangunan TPST TA 2011 (diutamakan pada desa yang belum dilayani dan mengusulkan pada Musrenbang 2010)		6	8	desa	300.000.000	400.000.000	Banjaran, Pameungpeuk, Solokan Jeruk, Katapang, Kutawaringin, Margaasih, Cimaung, Rancabali	Dispertasih
1	08	1.04.01	24		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terwujudnya pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota di Kab. Bandung							
1	08	xx	24	11	Penataan RTH dalam rangka dukungan program Adipura	Pendukung adipura (penataan RTH)	Terbangunnya RTH perkotaan di kota Soreang	1	1	Paket	200.000.000	300.000.000	Soreang, Katapang	Dispertasih
1	08	xx	24	12	Penataan RTH dalam rangka dukungan program penataan RTH Si Jalak Harupat	Pendampingan Program Pemerintah Pusat dalam rangka penataan RTH Jalak Harupat	Keterpaduan pembangunan RTH antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten	1	1	Paket	150.000.000	150.000.000	Kutawaringin	Dispertasih
1	08	xx	24	06	Pemeliharaan RTH	Pengelolaan sarana dan prasarana taman	Terlaksananya pengelolaan taman secara berkesinambungan	9	9	lokasi	700.000.000	850.000.000	Kab. Bandung	Dispertasih
Jumlah 8											43.559.750.000	77.653.902.000		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD : DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD
				TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012		
1 03	PEKERJAAN UMUM									
1 03 xx 24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Meningkatnya kemampuan jaringan irigasi dalam pelayanan terhadap kebutuhan air							
1 03 xx 24 01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Penyusunan DED konstruksi 2012	Pembangunan Jaringan Irigasi yang terarah	4	4	Dokumen	530.000.000	675.000.000	4 UPTD di Kab. Bandung	SDAPE
1 03 xx 24 03	Perencanaan pembangunan reservoir	Penyusunan DED DI Cikondang dan Parung Jebug	Tersedianya dokumen perencanaan Reservoir untuk 2 (dua) UPTD	2	2	Dokumen	175.000.000	260.000.000	Cimaung, Pasirjambu	SDAPE
1 03 xx 24 05	Perencanaan normalisasi saluran sungai	Terarahnya perencanaan dan pelaksanaan normalisasi saluran sungai/Tersedianya dokumen Outline Plan dan DED Drainase	Sungai dan Saluran Pembuang yang tersebar di 4 (empat) UPTD	5	6	Dokumen	1.300.000.000	1.600.000.000	Rancaekek, Bojongsong, Dayeuhkolot, Soreang, dan 4 UPTD Sub DAS	SDAPE
1 03 xx 24 07	Pembangunan reservoir	Kondisi Jaringan Irigasi baik	Meningkatnya kemampuan jaringan irigasi dalam pelayanan terhadap kebutuhan air	6		DI	2.800.000.000	5.800.000.000	Kab. Bandung	SDAPE
1 03 xx 24 08	Sosialisasi Peraturan Daerah Kab. Bandung tentang Irigasi	Sosialisasi Perda Irigasi	Masyarakat Pengguna dan Pemfaat Air adanya acuan pembangunan	1		kali	35.000.000		Kab. Bandung	SDAPE
1 03 xx 24 10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Terpeliharanya jaringan irigasi	Daerah Irigasi (DI)	4		UPTD	6.205.492.500	5.775.000.000	Kab. Bandung	SDAPE
1 03 xx 24 14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Mengurangi lamanya genangan/Pembuatan trase dan tanggul saluran drainase	Saluran Pembuang	1	2	Paket	640.000.000	768.000.000	Desa Cingcin Kecamatan Soreang	SDAPE
1 03 xx 24 15	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Meningkatkan kemampuan jaringan irigasi dalam pelayanan terhadap kebutuhan air irigasi	4		UPTD	1.200.000.000	1.500.000.000	Kab. Bandung	SDAPE
1 03 xx 24 16	Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) /WISMP	Terlaksananya Pembinaan terhadap kelembagaan pengelola irigasi	Meningkatkan kemampuan pengelola air irigasi	12		Kelompok	200.000.000	350.000.000	Kab. Bandung	SDAPE
1 03 xx 24 16	Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) /WISMP	Pembangunan dan Rehabilitasi saluran Drainase Cingcin - Cikambuy (Lanjutan)							Soreang	SDAPE
1 03 xx 24 18	Kajian Status Irigasi	Kajian status 4 DI		4		UPTD	100.000.000		Kab. Bandung	
1 03 xx 26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Terarahnya pengembangan dan pengelolaan sumber daya air	Daerah Irigasi, Sungai dan Sumber Daya Air							
1 03 xx 26 08	Master Plan Sumber Daya Air	Terarahnya pengembangan dan pengelolaan sumber daya air/Tersedianya dokumen rencana induk Irigasi dan Drainase	Daerah Irigasi, Sungai dan Situ	1	2	Dokumen	800.000.000	900.000.000	Kab. Bandung	SDAPE
1 03 xx 28	Program pengendalian banjir	Tertanganinya banjir	Sungai							
1 03 xx 28 03	Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Berkurangnya daya rusak air/pembuatan dan perbaikan tanggul	Sungai	23	30	Paket	5.175.000.000	6.000.000.000	Kab. Bandung	SDAPE
1 03 xx 28 05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir	Berkurangnya daya rusak air/Terlaksananya sosialisasi dan pengadaan bahan banjir (penganggulangan sementara)	Masyarakat disekitar wilayah sungai	4	4	Kali	450.000.000	500.000.000	Kab. Bandung	SDAPE
1 03 xx 28 07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Mengurangi lamanya genangan/Pengerukan Saluran Sungai	Sungai	3	6	Paket	460.507.500	1.000.000.000	Sungai Cimariuk, Sungai Cikungkurak, dan Sungai Citarik	SDAPE
2 03 xx 17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Terwujudnya pembangunan ketenagalistrikan							
2 03 xx 17 01	Koordinasi pengembangan ketenaga listrik	Pengawasan Pengendalian pendistribusian tataniaga Minyak dan Gas Bumi	Dipatuhinya pedoman tata niaga usaha hilir migas, kualitas penyediaan, penyaluran dan harga migas di tingkat SPBU, SPPBE, Depot, Agen dan Pangkalan Migas	56 3	56 3	unit usaha kali	3.615.000.000	4.000.000.000	Kab. Bandung	SDAPE
		Sosialisasi Desa Mandiri Energi	Terdapatnya 30 % penggunaan energi alternatif non migas disatu desa	3	3	Desa				SDAPE
		Monitoring evaluasi dan pelaporan	Wilayah pengusaha pengelola panas bumi dan instansi yang terkait	4	4	Kec				SDAPE
		Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di Bidang pertambangan	Peningkatan pengetahuan/Pemahaman dan kepedulian masyarakat pada sektor panas bumi	4	4	Kec				SDAPE
		Penyusunan Regulasi mengenai kegiatan Penambangan panas bumi	Terdapatnya kajian ilmiah untuk payung hukum kepanasbumian	1	1	Dok Kajian				SDAPE
		Monitoring dan Evaluasi bidang keenergian	Termonitornya aktifitas penggunaan energi	15	15	Desa				SDAPE
		Koordinasi Ketenaga listrik	Terlaksananya Kegiatan Listrik Pedesaan di 16 Kec. 33 Desa.	1980 16 33	1980 16 33	KK Kec Desa				SDAPE
		Penyusunan regulasi mengenai kegiatan ketenagalistrikan	Terdapatnya kajian ilmiah untuk payung hukum ketenagalistrikan	1	1	Dok Kajian				SDAPE
		Study Pendahuluan Potensi Mikrohidro	Terdapatnya data potensi sumber energi listrik mikrohidro	2	2	Desa				SDAPE
		Sosialisasi hemat energi dan air	Terdapatnya penghematan penggunaan energi dan air oleh penduduk Kab. Bandung	25 2	25 2	Orang Kali				SDAPE
2 03	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL									

2	03	xx	15		Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Terbinanya pengawasan dan pengendalian bidang pertambangan	Industri/Pengusaha Pengguna Air							
2	03	xx	15	02	Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C	Tersosialisasinya Peraturan di bidang air tanah pada seluruh steak holder (Pertambangan)	200 orang dari Stakeholder Pertambangan	4	8	Kali	100.000.000	-	Margaasih, Dayeuhkolot, Majalaya, dan Rancaekek	SDAPE
2	03	xx	15	03	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C	Terlaksananya pembangunan demplot reklamasi (Pertambangan)	Kecamatan	1	2	Unit	150.000.000	-	Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah	SDAPE
2	03	xx	15	05	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C	Terbitnya kegiatan pertambangan secara teknis dan administratif (petambangan)	Pengusaha Galian C	20	24	Perusahaan	75.000.000	90.000.000	Margaasih, Soreang, Kutawaringin, Baleendah, Cikancung, Cicalengka, Nagreg dan Pameungpeuk	SDAPE
2	03	xx	15	07	Dst... Sosialisasi Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) Air Tanah	Terpahaminya cara perhitungan nilai perolehan air (NPA) air tanah (Pertambangan)	Industri/Pengusaha Pengguna Air	125		Perusahaan	100.000.000	-	Margaasih, Dayeuhkolot, Majalaya dan Rancaekek	SDAPE
2	03	xx	15	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pembangunan sumur imbuhan dalam di 3 (tiga) kecamatan	Kecamatan	3	5		500.000.000	1.500.000.000	Banjaran, Majalaya dan Rancaekek	SDAPE
2	03	xx	16		Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Terkendalinya pengambilan dan pemanfaatan air tanah	Industri/Pengusaha Pengguna Air							
2	03	xx	16	01	Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat	Terkendalinya pengambilan dan pemanfaatan air tanah	Industri/Pengusaha Pengguna Air	75	100	Perusahaan	200.000.000	300.000.000	Margaasih, Katapang, Dayeuhkolot, Baleendah	SDAPE
2	03	xx	16	03	Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi	Tersedianya peta daerah rawan bencana geologi	Tersusunnya Peta rawan bencana geologi	8	8		900.000.000	1.400.000.000	Pangalengan, Pacet Cimaung, Cikancung, Ciwidey, Pasirjambu, Nagreg, paseh	SDAPE
					Jumlah 9						25.711.000.000	32.418.000.000		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD : DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING		URUSAN/PROGRAM KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)		SASARAN		TARGET		SATUAN		PAGU INDIKATIF		LOKASI		SKPD	
1	03							TAHUN 2011	TAHUN 2012			TAHUN 2011	TAHUN 2012				
1	03	xx	30		PEKERJAAN UMUM												
1	03	xx	30		Pembangunan pasar perdesaaan	Terbangunnya pasar	Masyarakat										
1	03	xx	30	04	Pembangunan pasar perdesaaan	Terbangunnya pasar	Masyarakat	1	1	Paket		5.000.000.000	5.000.000.000	Banjaran		Diskoperindag	
1	15				KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH												
1	15	xx	15		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan bagi para pelaku UMKM tentang kebijakan dan perundang - undangan.	UMKM dan Koperasi										
1	15	xx	15	08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terselenggaranya sosialisasi tentang kebijakan UMKM dan perundang - undangan	UMKM	160	200	UMKM		125.000.000	165.000.000	Kab. Bandung		Diskoperindag	
1	15	xx	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan tentang manajerial UMKM dan Perkeroperasian.	UMKM dan Koperasi										
1	15	xx	16	03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terfasilitasinya pertemuan UMKM dengan BUMN/BUMS/Perbankan	UMKM	80	200	UMKM		170.000.000	210.000.000	Kutawaringin		Diskoperindag	
1	15	xx	16	06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Terselenggaranya pelatihan Kewirausahaan bagi para pelaku UMKM.	UMKM	160	350	UMKM		250.000.000	280.500.000	Banjaran, Canguang, Cimenyan, Kutawaringin, Majalaya, Cilengkrang, Soreang, Nagreg, Cwidley, Pangalengan, Rancaekek, Solokanjeruk		Diskoperindag	
1	15	xx	16	07	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	- Terselenggaranya pelatihan Akuntansi Koperasi bagi Bendahara koperasi. - Terselenggaranya pelatihan pengawas Koperasi bagi pengawas koperasi. -Terselenggaranya pelatihan dasar-dasar perkeroperasian bagi koperasi baru dan pengurus koperasi baru. -Terselenggaranya Pelatihan kewirausahaan bagi pengurus koperasi.	Bendahara koperasi	120	62	Orang		480.000.000	194.000.000	Canguang, Cimaung, Margaasih, Pangalengan, Pasirjambu		Diskoperindag	
1	15	xx	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan bagi pelaku UMK/IKM dalam melakukan adaptasi produk sesuai permintaan pasar, meningkatnya legalitas hak paten produk UKM dan terlabelisasinya (PIRT dan Halal) produk UKM serta meningkatnya pengetahuan dalam mengakse	UMKM										
1	15	xx	17	01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Terselenggaranya sosialisasi ttg informasi, penyediaan permodalan	UMKM	80	80	org		160.000.000	120.000.000	Dayeuhkolot/ Kab. Bandung		Diskoperindag	
1	15	xx	17	08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Terselenggaranya fasilitasi PIRT dan Halal dalam produk UMKM.	UMKM	5	3	Kec.		205.000.000	150.000.000	Pasirjambu, Ciparay, Dayeuhkolot, Cimaung, Banjaran		Diskoperindag	
1	15	xx	17	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Termonitornya dan terbinaanya dan teridentifikasi UMKM.	UMKM	561	600	UMKM		200.000.000	250.000.000	Kab. Bandung		Diskoperindag	
1	15	xx	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi												
1	15	xx	18	04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Terselenggaranya sosialisasi pemahaman perkoperasian bagi anggota karang taruna, masyarakat.	Koperasi	100	400	Orang		200.000.000	300.000.000	Kab. Bandung		Diskoperindag	
1	15	xx	18	05	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi.	Terselenggaranya penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam sesuai dengan PP. 9 thn 95. pemingkatan koperasi	Koperasi	300	600	koperasi		250.000.000	300.000.000	Kab. Bandung		Diskoperindag	
1	15	xx	18	06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Terselenggaranya temu wicara/Usaha antara pengurus koperasi dengan perbankan, BUMN/BUMS.	Koperasi	200	250	Orang		115.000.000	175.000.000	Kab. Bandung		Diskoperindag	
1	15	xx	18	08	Rintisan penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Modern pada jenis usaha koperasi	Terselenggaranya Bimbingan teknis penerapan manajemen moderen pada jenis usaha koperasi.	Koperasi	31	150	Orang		80.000.000	100.000.000	Kab. Bandung		Diskoperindag	

2	06				PERDAGANGAN													
2	06	xx	15		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya kesadaran para pelaku usaha /pedagang dalam penyediaan barang yang berkualitas dan memenuhi standar SNI, meningkatnya ketaatan dan kepatuhan para pedagang dalam menggunakan UTTP yang sah dan layak pakai, hubungan kerja dengan LPKSM-PK dalam p												
2	06	xx	15	03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terselenggaranya pengawasan produk teknologi informasi elektronik, SPBU, Pos ukur ulang, standarisasi barang yang beredar di pasaran dan sosialisasi undang-undang no.2 thn 1981 tentang metrologi legal.	Para pelaku usaha/Pedagang elektronik, dan SPBU.	15	15	Kec.	150.000.000	165.000.000	Kertasari, Pacet, Ibum, Paseh, Pangalengan, Nagreg, Cicalengka, Cikancung, Solokanjeruk, Majalaya, Ciparay, Bojongsong, Dayeuhkolot, Banjaran, Soreang	Diskoperindag				
2	06	xx	15	01	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Terlaksananya koordinasi dan hubungan kerja dengan LPKSM dalam melaksanakan pengawasan peredaran barang dan jasa.	LPKSM-PK	10	10	Kec.	30.000.000	50.000.000	Ciwidey, Soreang, Katapang, Banjaran, Pameungpeuk, Pangalengan, Majalaya, Rancaekek, Cileunyi, Cicalengka	Diskoperindag				
2	06	xx	15	04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetroloran daerah	Terlaksananya operasional ukur ulang barang kebutuhan pokok masyarakat dan pendataan alat UTTP.	Para Pedagang Pasar Tradisional	10	10	Pasar	80.000.000	120.000.000	Baleendah, Margahayu, Banjaran, Ciwidey, Soreang, Cileunyi, Rancaekek, Majalaya, Cicalengka, Pangalengan	Diskoperindag				
2	06	xx	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pemahaman tentang kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor bagi eksportir dan calon importir.												
2	06	xx	17	02	Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	Pembuatan buku dan CD daftar informasi perusahaan tentang eksportir.	Para Pelaku usaha Eksportir.	60	60	Org	150.000.000	100.000.000	Kab. Bandung	Diskoperindag				
2	06	xx	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Profil perusahaan, teridentifikasinya harga kepok mas, barang strategis lainnya, dan terjalinnya hubungan kerja antara pemerintah dengan pelaku usaha.								Diskoperindag				
2	06	xx	18	01	Penyempurnaan Perangkat peraturan, kebijakan, dan pelaksanaan operasional	Tersedianya data pasar/toko modern	Para kapala/Tu dan pegawai UPTD serta Perusahaan yang ada di 7 wilayah kecamatan.	31	31	Kec.	200.000.000	350.000.000	7 Kec dan 12 pasar tradisional	Diskoperindag				
2	06	xx	18	03	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Terlaksanan kegiatan event pameran hasil produk UKM/IKM baik tingkat Kabupaten, Propinsi dan tingkat Nasional.	Para Pelaku usaha UKM dan IKM.	8	8	Event	600.000.000	700.000.000	JJC, PRJ, Graha Manggala Siliwangi, Ciwalk, Katapang, Soreang	Diskoperindag				
2	06	xx	18	06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Pengaksesan data perusahaan dan monitoring harga bahan pokok dan strategis lainnya, distribusi pupuk bersubsidi, dan distribusi semen sewilayah Kab. Bandung.	Perusahaan dan Para Pedagang Kepokmas dan barang strategis lainnya, Pupuk dan Semen bersubsidi, Media elektronik.	9	9	UPTD Pasar	200.000.000	500.000.000	9 UPTD & Radio swasta	Diskoperindag				
2	07				INDUSTRI													
2	07	xx	17		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatkan daya saing produk dengan mutu dan desain yang lebih vreatif.												
2	07	xx	17	01	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Terselenggaranya pelatihan teknologi produksi IK pegrajin sale pisang, pengrajin IK krupuk, IK Tape, aneka kue, pengrajin sablon, pengrajin bata merah, batako, briket batu bara, makanan ringan, olahan strawberry, pelatihan manajemen, pelatihan industri kecil, jambu batu Kemasan, Monitorn sentra IKM (Starawbery (OVOP), Gula Aren, Logam, Jambu Batu Merah), Pelatihan Manajemen (OVOP), SOSIALISAI JNP (lokasi OVOP) Tenaga Pendamping,	Pelaku Industri Kecil Menengah.	180	180	Org	800.000.000	750.000.000	Kutawaringin, Katapang, Cimencyan, Ciwidey, Banjaran, Ibum, Cangukang, Majalaya, Cicalengka, Rancabali dan Margahayu, Pasirjambu	Diskoperindag				
2	07	xx	19		Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Tersedianya data informasi dan leaflet Kelompok pengolahan strawberry, jambu batu, gula aren, IKM logam												
2	07	xx	19	02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Pendataan dan pembuatan leaflet dan profil strawberry, jambu merah, gula aren, dan Industri Logam alat-alat pertanian	Pelaku Industri Kecil Menengah.	400	400	eks	70.000.000	90.000.000	Pasirjambu dan Rancabali Ciwidey	Diskoperindag				
2	07	xx	18		Program Penataan Struktur Industri	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan para pengusaha IKM Strawberry dan diharapkan terjadinya kerjasama yang saling menguntungkan.												
2	07	xx	18	03	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	Terlaksananya studibanding dan peninjauan ke industri besar dan industri olahan di daerah lain dengan membawa IKM lokal.	Perusahaan pengolahan strawberry dan Buah-buahan lainnya.	50	50	Paket	150.000.000	120.000.000	Kab. Bandung	Diskoperindag				

2	07	xx	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya daya saing produk dengan mutu dan desain yang lebih variatif.								
2	07	xx	16	02	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan kluster Industri	Terlaksananya pembinaan teknik industri bagi pengrajin konveksi, pengrajin kesed, dan industri bambu, IKM kulit dan Program TMMD, TMSS, P2WKSS dan Pelatihan bordir.	Pelaku Industri Kecil Menengah	16	16	Kel	600.000.000	900.000.000	Kab. Bandung	Diskoperindag
2	07	xx	15		Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Meningkatnya daya saing produk dengan mutu dan desain yang lebih variatif.								
2	07	xx	15	05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Terselenggaranya pelatihan produksi bagi pelaku usaha IK Tahu, Makanan krupuk, kripik singkong, telur asin, pengolahan hasil pertanian, ikan dan pelatihan kemasan.	Pelaku Industri Kecil Menengah	11	6	Kel	360.000.000	250.000.000	Cimaung, Banjaran, Pacet, Ibum	Diskoperindag
Jumlah 10											10.625.000.000	11.339.500.000		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD

: DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

KODE REKENING				URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD	
1	21	xx	16				TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012			
1	21	xx	16		KETAHANAN PANGAN									
1	21	xx	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan								Distanbunhut	
1	21	xx	16	02	Penyusunan data base potensi produk pangan	Tersusunnya data base potensi pertanian berbasis tanaman pangan,hortikultura,perkebunan	Data dan informasi statistik produk pangan ,Kebun, Hortikultura dan Tanaman Hutan serta data Bencana Alam dan OPT	31	31	Kecamatan	150.000.000	800.000.000	Kab. Bandung	Distanbunhut
1	21	xx	16	02	Penyusunan data base potensi produk pangan	Tersusunnya data base potensi kehutanan Kabupaten Bandung	Tersajinya Data Laporan Tahunan, Semesteran, Triwulanan dan Bulanan, Perkembangan Luas Areal Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten				175.000.000		Kab. Bandung	Distanbunhut
1	21	xx	16	02	Penyusunan data base potensi produk pangan	Pengembangan database komputer dalam bentuk website dan multimedia	Tersajinya Data Program Pembangunan Pertanian				225.000.000		Kab. Bandung	Distanbunhut
1	21	xx	16	02	Penyusunan data base potensi produk pangan	Pengembangan Perangkat lunak perencanaan pembangunan pertanian berbasis komputerisasi	Pengembangan Perangkat lunak perencanaan pembangunan pertanian berbasis komputerisasi				200.000.000		Kab. Bandung	Distanbunhut
1	21	xx	16	12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Meningkatnya kualitas dan nilai tambah produk pertanian unggulan daerah,berupa peningkatan produk kemasan dan diversifikasi produk olahan untuk komoditas serealida dan palawija melalui pembentukan 3 unit usaha kelompokkani	Kelompok Tani untuk Komoditas Tanaman Jagung dan Padi sebanyak 3 Kelompok Tani melalui Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Produk Olahan	10	12	Kecamatan	100.000.000	175.000.000	Nagreg,Pangalengan, Ciparay,Arjasari, Cimaung,Solokanjeruk, Banjaran,Cicalengka, Soreang,Pacet	Distanbunhut
1	21	xx	16	12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Terfasilitasinya sarana pasarana pengolahan hasil pertanian untuk komoditas serealida dan palawija	Kelompok Tani disentra Produksi Padi berupa Power Thraser 4 Unit	4	5	Kelompok	100.000.000	130.000.000	Nagreg,Pangalengan, Ciparay,Arjasari, Cimaung,Solokanjeruk, Banjaran,Cicalengka, Soreang,Pacet	Distanbunhut
1	21	xx	16	12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Menurunnya jumlah kehilangan hasil (lossis) untuk komoditas serealida dan palawija (terutama komoditas padi,yaitu dari 12,81% menjadi 12,00%)	Peremajaan Penggilingan Padi dan Kelompok Tani melalui Bimbingan Teknis	4	5	Kelompok	100.000.000	150.000.000	Solokanjeruk,Ciparay, Majalaya,Soreang, Kutawaringin,Baleendah, Bojongsong, Rancaekek,Paseh, Banjaran.	Distanbunhut
1	21	xx	16	12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Pengawasan dan pemantauan fluktuasi harga komoditas serealida dan palawija ditingkat petani,pasar tradisional dan pasar induk	Sentra Produksi Serealida dan Palawija melalui Informasi Harga Pasar, di 10 Kecamatan Sentra Produksi Padi dan Jagung	10	10	Kecamatan	100.000.000	120.000.000	Solokanjeruk,Ciparay, Majalaya,Soreang, Kutawaringin,Baleendah, Bojongsong, Rancaekek,Paseh, Banjaran.	Distanbunhut
1	21	xx	16	15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Meningkatnya hasil produksi dan komoditas padi dan palawija	16 Kecamatan Sentra Produksi Padi melalui Program Bantuan Benih Unggul berupa Padi Hibrida , dan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu	16	16	Kecamatan	320.000.000	400.000.000	Majalaya Ciparay Baleendah Pameungpeuk Pacet Ibum Banjaran Cangkuang Arjasari Nagreg Cicalengka Soreang Kutawaringin Cimaung Cikancung Paseh	Distanbunhut

1	21	xx	16	15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Penerapan teknologi pemupukan berimbang sebesar 65% dari luas tanam padi dan penerapan benih berlabel sebesar 75 % dari luas tanam padi	16 Kecamatan Sentra Produksi Padi melalui Program Bimbingan Teknis Pemupukan Berimbang serta Benih Berlabel	16	16	Kecamatan	200.000.000	300.000.000	Majalaya Ciparay Baleendah Pameungpeuk Pacet Ibun Banjaran Cangkuang Arjasari Nagreg Cicalengka Soreang Kutawaringin Cimaung Cikancung Paseh	Distanbunhut
1	21	xx	16	15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Penerapan teknologi budidaya dengan metode System Rice Intensification (SRI) atau pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)	500 Ha di 7 Kecamatan Sentra Produksi Padi berupa Bimbingan Teknis	500	600	Ha	325.000.000	500.000.000	Soreang (70) Pameungpeuk (70) Kutawaringin (70) Katapang (70) Cileunyi (70) Rancaekek (70) Majalaya (80)	Distanbunhut
1	21	xx	16	15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Terlatihnya tenaga kerja petani dalam hal standarisasi teknologi pengelolaan hasil (HACCP, GHP dan GMP) komoditas serealida dan palawija	Kelompok Tani di sentra Produksi Padi dan Jagung melalui bimbingan teknis dan Standarisasi Pengolahan Hasil	14	18	Kelompok	37.500.000	70.000.000	Soreang Pameungpeuk Kutawaringin Katapang Cileunyi Rancaekek Majalaya	Distanbunhut
1	21	xx	16	15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Terbentuknya pola pengelolaan usaha agribisnis dalam bentuk corporate farming sebanyak 2 unit untuk komoditas padi dan jagung	Kelompok Usaha Petani / Gapoktan di Sentra Produksi Jagung dan Padi	2	3	Unit	250.000.000	350.000.000	Nagreg, Solokanjeruk	Distanbunhut
1	21	xx	16	16	Pengembangan diversifikasi tanaman	Berkembangnya aktivitas usaha agribisnis hulu dan hilir komoditas sorghum, talas, ubi jalar, ubi kayu.	Kelompok Tani pengembang Usaha Tani Shorgum, Ubi Jalar dan Ubi Kayu	3	4	Kelompok	178.000.000	230.000.000	Kab. Bandung	Distanbunhut
1	21	xx	16	20	Pengembangan perbibinan/perbibitan	Pengembangan Padi Organik	Pengembangan Padi Organik				10.000.000	300.000.000	Cipinang, Cimaung	Distanbunhut
1	21	xx	16	20	Pengembangan perbibinan/perbibitan	Pengembangan Padi organik (demplot)	Pengembangan Padi organik (demplot)				10.000.000		Jagabaya, Cimaung	Distanbunhut
1	21	xx	16	20	Pengembangan perbibinan/perbibitan	Meningkatnya ketersediaan bibit/benih padi unggul bersertifikat	Meningkatnya ketersediaan bibit/benih padi unggul bersertifikat				240.000.000		Solokanjeruk Baleendah	Distanbunhut
1	21	xx	16	20	Pengembangan perbibinan/perbibitan	Demplot Padi Organik	Demplot Padi Organik				30.000.000		Sukamaju, Cimaung	Distanbunhut
1	21	xx	16	25	Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian dan Perkebunan		Meningkatnya PSK Kelompok tani dalam pengelolaan Tanaman Perkebunan	5 kelompok			202.500.000		Pangalengan, Nagreg, Pasirjambu, Ciwiday dan Kertasari	Distanbunhut
1	21	xx	16	25	Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian dan Perkebunan		Tersusunnya Mekanisme Pemasaran Pemasaran Komoditas Perkebunan	1 paket			50.000.000		31 Kecamatan	Distanbunhut
2					URUSAN PILIHAN									
2	01				PERTANIAN									
2	01	xx	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani									
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Meningkatkan Wawasan dan pengetahuan petani dan pelaku agribisnis	Pelatihan Teknik Budidaya Tanaman	15 orang			5.000.000	500.000.000	Cileunyi	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Pelatihan pengolahan hasil buah-buahan, nangka, jeruk dan singkong				30.000.000		Cileunyi	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Pelatihan agribisnis				40.000.000		Cileunyi	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Pelatihan dan pembinaan Jeruk Cikoneng	100 orang			20.000.000		Cileunyi	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Kursus wanita tani	2 Unit (70 orang)			35.000.000		Solokanjeruk	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Pelatihan Petani Organik	1 Kel			20.500.000		Katapang	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Pelatihan Pertanian Organik	150 Orq			70.500.000		Katapang	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Pelatihan Petani Organik	1 Kel			20.500.000		Katapang	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Peningkatan kesejahteraan Petani	1 paket			10.000.000		Kutawaringin	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Pelatihan petani & pelaku agribisnis	4 klp			25.000.000		Kutawaringin	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Pelatihan Produksi Kripik Singkong	1 kelompok			10.000.000		Banjaran	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Pelatihan Budidaya Jamur	1 paket			8.000.000		Banjaran	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Pelatihan Pemuda Tani	1 paket			5.000.000		Banjaran	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Kursus wanita tani	1 unit			25.000.000		Banjaran	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Pelatihan agribisnis pertanian	1 unit			25.000.000		Banjaran	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Penyuluhan SLPHT	100 orang			12.500.000		Banjaran	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Pelatihan Teknis Pertanian	1 Paket			5.000.000		Pangalengan	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Pelatihan Pasca Panen	1 Paket			5.000.000		Pangalengan	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Pelatihan Pengolahan Pasca Panen Produk Pertanian	13 paket			13.000.000		Pangalengan	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi Sawah	10 Klpk			30.000.000		Bojongsong	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Pelatihan aneka olahan Strawberry	4 Klpk			25.000.000		Pasirjambu	Distanbunhut

2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Pelatihan Pembuatan Dodol,Sirup dan Karamel				5.000.000		Pasirjambu	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Pelatihan Budidaya Tanaman Hias				5.000.000		Pasirjambu	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Kemasan	3000 set			7.500.000		Rancabali	Distanbunhut
2	01	xx	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Pengembangan Limbah Kompos				50.000.000		Kertasari	Distanbunhut
2	01	xx	17		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan									
2	01	xx	17	01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Terpantaunya dan terdeteksinya fluktuasi harga dan jaringan pasar komoditas hortikultura	Kawasan Agribisnis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Bandung	4 kali			25.000.000	300.000.000	Nagreg,Solokanjeruk, Majalaya,Ciparay, Banjaran,Pacet, Pangalengan,Arjasari, Rancabali,Soreang, Kertasari	Distanbunhut
2	01	xx	17	01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Tersusunnya profil pelaku usahatani di Kabupaten Bandung		5 buku			25.000.000		Pangalengan,Rancabali, Pasirjambu,Cimaung, Ciwidey	Distanbunhut
2	01	xx	17	01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Terjalannya kemitraan antara pelaku usahatani dengan pasar		8 Kelompok			25.000.000		Pangalengan,Pasirjambu,Ciwidey,Rancabali, Cimaung,Pacet, Ciengkrag	Distanbunhut
2	01	xx	17	01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Penyusunan database pelaku usaha agribisnis hortikultura sebagai dasar pengembangan website investasi hortikultura		5 buku			25.000.000		31 Kecamatan	Distanbunhut
2	01	xx	17	01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan jaringan informasi pasar di tingkat Desa		1 paket			25.000.000		31 Kecamatan	Distanbunhut
2	01	xx	17	01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Terfasilitasinya petugas pengumpul informasi pasar		31 orang			25.000.000		31 Kecamatan	Distanbunhut
2	01	xx	17	01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya usaha promosi produk unggulan hortikultura		4 kali			25.000.000		31 Kecamatan	Distanbunhut
2	01	xx	17	01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Fasilitasi jaringan kerjasama anantara petani hortikultura dengan pelaku pasar melalui kegiatan temu investasi		5 kali			25.000.000		Pangalengan,Pasirjambu, Ciwidey,Rancabali, Ciengkrag,Cimeunyan	Distanbunhut
2	01	xx	17	07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Terselenggaranya Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah		1 Paket	1 Paket	Paket	50.000.000	50.000.000	Kab. Bandung	Distanbunhut
2	01	xx	17	09	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan	Terbentuknya 2 unit usaha rumah kemasan di Kecamatan Ciwidey dan Pangalengan Meningkatkan mutu produksi pemasaran pertanian	Kelompok Tani	2 unit			100.000.000	400.000.000	Pangalengan dan Ciwidey	Distanbunhut
2	01	xx	17	09	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan	Fasilitasi sarana bangunan rumah kemasan		2 paket			100.000.000		Pangalengan dan Ciwidey	Distanbunhut
2	01	xx	17	09	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan	Fasilitasi sarana prasarana pengolahan kemasan produk segar		2 paket			100.000.000		Pangalengan dan Ciwidey	Distanbunhut
2	01	xx	18		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan									
2	01	xx	18	01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna		Pengembangan Padi Unggulan Lokal &SRI/Organik	3 Paket			36.000.000		Cileunyi	Distanbunhut
2	01	xx	18	01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna		Fasilitasi Demplot pertanian pola SRI	14 ha			168.000.000		Solokanjeruk	Distanbunhut
2	01	xx	18	01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terfasilitasinya sarana dan prasarana teknologi pertanian ,10 unit Pompa air, 15 unit traktor 4 unit rumah kompos , 3 unit pemipil jagung, 4 unit cold stroge , 5 unit missblower, 10 buah pedal trasier, 2 unit RMU dan 200 kg Rodentisida	penerapan teknologi pertanian tepat guna (SLPHT) dan SLPTT)	10 unit (15 jt/unit)			150.000.000	2.000.000.000	Baleendah (2) Banjaran (1), Ciparay(1), Solokanjeruk (1), Rancaekek(2), Majalaya (2), Cimaung (1)	Distanbunhut
2	01	xx	18	01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna		meningkatnya jumlah kelompok usaha hasil produk Pertanian dan Perkebunan	15unit (25 jt/unit)			337.500.000		Majalaya,Baleendah, Pameungpeuk,Pacet, Ibum, Banjaran, Cangkuang, Arjasari,Nagreg, Cicalengka,Soreang, Kutawaringin, Cimaung, Cikancung,Solokanjeruk.	Distanbunhut
2	01	xx	18	01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna		kelompok usaha hasil produk Pertanian dan Perkebunan	4 unit (50 jt/unit)			200.000.000		Cicalengka,Ibum,Arjasari,Katapang,Majalaya	Distanbunhut
2	01	xx	18	01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna			3 unit (35 jt/unit)			90.000.000		Cicalengka,Arjasari, Soreang	Distanbunhut
2	01	xx	18	01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna			4 Unit (15 jt/unit)			240.000.000			Distanbunhut
2	01	xx	18	01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna			5 unit			37.500.000			Distanbunhut

2	01	xx	18	01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna				10 buah (3,5 jt/unit)		35.000.000		Solokanjeruk (2), Baleendah (2) Bojongsong (2) Banjaran (2) Cileunyi (2)	Distanbunhut
2	01	xx	18	01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna				2 unit (50 jt/unit)		100.000.000		Pameungpeuk, Bojongsong.	Distanbunhut
2	01	xx	18	01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna				4 unit					Distanbunhut
2	01	xx	18	01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna				200 Kg		402.500.000			Distanbunhut
2	01	xx	18	01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna				1 Paket		20.500.000		Katapang	Distanbunhut
2	01	xx	18	01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna				2 unit		30.000.000		Pangalengan	Distanbunhut
2	01	xx	18	01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna				4 unit		30.000.000		Arjasari	Distanbunhut
2	01	xx	18	01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna				2 Unit		50.000.000		Ciparay	Distanbunhut
2	01	xx	18	03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	JIDES (250)	Jaringan Irigasi Pedesaan yang mengalami kerusakan di 5 Kecamatan		5 unit(50 jt/unit)		250.000.000	1.000.000.000	Solokanjeruk,Kutawaringin,Majalaya,Rancaekek, Pasirjambu	Distanbunhut
2	01	xx	18	03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	JITUT (300)	Jaringan irigasi ditingkat usaha Tani , guna memperlancar suply air untuk kegiatan produksi di 5 Kecamatan sentra padi		10 unit		350.000.000		Soreang (2),Katapang Cimaung ,Banjaran, Cikancung	Distanbunhut
2	01	xx	18	03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	JUT (5 Km)	Jalan Usaha Tani di sentra Produksi Tanaman Padi guna Memperlancar pengangkutan hasil Pertanian di 4 Kecamatan		5 Km		100.000.000		Solokanjeruk (0,5), Nagreg (2Km) Cimeunyan (1 Km) Cicalengka (1,5 Km)	Distanbunhut
2	01	xx	18	03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Rehabilitasi bangunan	Rumah Pompa guna mengamankan Keberadaan Pompa Air di lokasi		2 unit		100.000.000		Solokanjeruk,Nagreg	Distanbunhut
2	01	xx	18	03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jaringan Irigasi Desa (JIDES)	Sarana Pengairan		500 Meter		45.000.000		Katapang	Distanbunhut
2	01	xx	18	03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Pembangunan irigasi Hanja-Pasirkunci	Jaringan Irigasi Perdesaan (JIDES)				60.000.000		Cilengkrang	Distanbunhut
2	01	xx	19		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan									Distanbunhut
2	01	xx	19	02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan agribisnis berbasis komoditas perkebunan Teh	10 Kelompok tani				100.000.000	700.000.000		Distanbunhut
2	01	xx	19	02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan agribisnis berbasis komoditas perkebunan kopi	Meningkatnya Kualitas Produksi Perkebunan							Distanbunhut
2	01	xx	19	02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan agribisnis berbasis komoditas perkebunan cengkeh	Terjadinya Kerjasama Kemitraan Antara Petani Dengan Pengusaha				100.000.000			Distanbunhut
2	01	xx	19	02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya kualitas dan nilai tambah produk pertanian unggulan daerah, berupa peningkatan produk kemasan dan diversifikasi produk olahan untuk komoditas perkebunan					100.000.000			Distanbunhut
2	01	xx	19	02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Pengawasan dan pemantauan fluktuasi harga komoditas perkebunan di tingkat petani, pasar tradisional dan pasar induk.					100.000.000		31 kecamatan	Distanbunhut
2	01	xx	19	02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Terlatihnya tenaga kerja petani dalam hal standarisasi teknologi pengelolaan hasil (HACCP, GHP dan GMP) komoditas perkebunan					100.000.000		Pangalengan, Kertasari, Pacet, Cilengkrang	Distanbunhut
2	01	xx	19	02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya fasilitas lembaga permodalan bagi petani					100.000.000		Pangalengan, Kertasari, Pacet, Cilengkrang	Distanbunhut
2	01	xx	19	02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Bantuan Bibit tanaman Kopi		1000 pohon			3.500.000		Cileunyi	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan agribisnis berbasis komoditas hortikultura	Kelompok Tani	1 Paket			100.000.000	1.750.000.000	Pangalengan, Kertasari	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Pengembangan pembibitan tanaman hortikultura		1 Paket			50.000.000		Pangalengan, Cimaung	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Meningkatnya produksi tanaman hortikultura sesuai GAP		1 Paket			50.000.000		Soreang, Pasirjambu, Rancabali	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Meningkatnya produksi tanaman hortikultura sesuai GAP: Kentang		5 Ha			200.000.000		Pangalengan, Kertasari	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Meningkatnya produksi tanaman hortikultura sesuai GAP: Bawang merah		5 Ha			100.000.000		Pangalengan, Pacet, Kertasari, Cimeunyan	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Meningkatnya produksi tanaman hortikultura sesuai GAP: Cabe					100.000.000		Pangalengan, Cimaung dan Cilengkrang	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Meningkatnya produksi tanaman hortikultura sesuai GAP: Tomat					75.000.000		Pangalengan, Soreang, Cilengkrang, Pasirjambu	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Pengembangan sentra buah-buahan (GAP & SLPHT Strawberry & jeruk, Pematapan Kebun & Register Kebun, Penerapan Panen/Pasca Panen sesuai GMP		4 Ha			75.000.000		Pasirjambu, Cwidey, Rancabali, Cileunyi	Distanbunhut

2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Pengembangan pembibitan buah-buahan di Kecamatan Pangalengan		1 Unit			75.000.000		Pangalengan	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Pengembangan Agribisnis sayuran di Kecamatan Pangalengan dan Cimencyan					75.000.000		Pangalengan dan Cimencyan	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Pengembangan usaha agribisnis berbasis tanaman hias di Kecamatan Canguang, Pasirjambu, Kertasari, Ciwidey dan Soreang		5 paket			75.000.000		Canguang, Pasirjambu, Kertasari, Ciwidey dan Soreang	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Meningkatnya kualitas dan nilai tambah produk pertanian unggulan daerah berupa peningkatan produk kemasan dan diversifikasi produk olahan untuk komoditas hortikultura		2 unit			75.000.000		Pangalengan, Ciwidey	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Pengawasan dan pemantauan fluktuasi harga komoditas hortikultura di tingkat petani, pasar tradisional dan pasar induk		4 kali			50.000.000		31 kecamatan	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Terlathinya tenaga kerja petani dalam hal standarisasi teknologi mutu produksi hortikultura (HACCP, GHP dan GMP)		5 kelompok			50.000.000		Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali, Cileunyi	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Meningkatnya fasilitas lembaga permodalan bagi petani		2 Kelompok			50.000.000		Ciengkrang, Pasirjambu	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Pengadaan bibit Kopi dan Tembakau		4000 pohon			6.000.000		Cileunyi	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Bantuan Pengadaan Benih Kopi		1 klp			15.000.000		Kutawaringin	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Bantuan Benih Tanaman Pelindung dan Tanaman Buah		1000 pohon			10.000.000		Kutawaringin	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Bantuan benih pelindung tanaman & buah2an		1000 pohon			10.000.000		Kutawaringin	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Bantuan Benih Tanaman Pelindung dan Tanaman Buah		1000 pohon			10.000.000		Kutawaringin	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Bantuan Benih Tanaman Pelindung dan Tanaman Buah-Buahan		1000 pohon			10.000.000		Kutawaringin	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Tanaman Pohon Durian					6.000.000		Margaasih	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Pengadaan Bibit Buah-buahan		300 Pohon			30.000.000		Nadreg	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Pengadaan Bibit Kopi Arabika					12.500.000		Banjaran	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Bibit Kopi dan Teh		100.000 phn			20.000.000		Pangalengan	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Pengadaan Mesin Pengupas Kulit Kopi		2 unit			25.000.000		Pangalengan	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Bantuan Bibit Kopi		25000 pohon			25.000.000		Ciwidey	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Pengadaan Bibit Kopi		15000			22.500.000		Pasirjambu	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Pelatihan Kelompok Tani		6Klp			10.000.000		Pasirjambu	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Demplot Pupuk Organik					55.000.000		Pasirjambu	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	PERAJANG ORGANIK		1 UNIT			3.000.000		Soreang	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Pengadaan bibit kopi		1 paket			30.000.000		Ibun	Distanbunhut
2	01	xx	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Budidaya tanaman haramay		1 paket			100.000.000		Ibun	Distanbunhut
2	02				KEHUTANAN									Distanbunhut
2	02	xx	16		Program rehabilitasi hutan dan lahan						2.000.000.000			Distanbunhut
2	02	xx	16	02	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	Bantuan Bibit Tanaman Keras (kayu-kayuan) Ekalipus, Mangga	Kelompok Tani Sekitar Hutan dan Kebun	27000 Phn			40.500.000		Pasirjambu	Distanbunhut
2	02	xx	16	02	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	PENGADAAN BIBIT TAN KERAS		1 PAKET			50.000.000		Soreang	Distanbunhut
2	02	xx	16	02	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	PENGADAAN BIBIT TAN KERAS		1000			2.000.000		Soreang	Distanbunhut
2	02	xx	16	02	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	PENGADAAN BIBIT TAN KERAS		20 PAKET			25.000.000		Soreang	Distanbunhut
2	02	xx	16	02	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan									Distanbunhut
2	02	xx	16	06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Fasilitas sarana dan prasarana penataan usaha masyarakat di sekitar hutan melalui kegiatan pengembangan usaha lebah madu tanaman hasil produksi hutan					412.300.000			Distanbunhut
2	02	xx	16	06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan hasil hutan dalam mendukung rehabilitasi serta konservasi hutan dan lahan	Kelompok Tani Sekitar Hutan dan Kebun				400.000.000			Distanbunhut
2	02	xx	16	06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Penanaman lahan kritis seluas 3000 Ha		3000 Ha			150.000.000			Distanbunhut
2	02	xx	16	06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Pengembangan pembibitan tanaman hutan					200.000.000			Distanbunhut
2	02	xx	16	06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Pembinaan dan pengembangan hutan Kota					150.000.000			Distanbunhut
2	02	xx	16	06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Penghijauan, Pencegahan Longsor, meningkatkan kesuburan lahan	Bantuan bibit pohon 2 KEL	4000 Pohon			40.000.000		Pameungpeuk	Distanbunhut
2	02	xx	16	06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Jl. Protokol Desa	Penanaman Pohon Pelindung	1000 Ph			10.000.000		Katapang	Distanbunhut
2	02	xx	16	06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Jl. Protokol Desa	Penanaman Pohon Pelindung	1000 Ph			10.000.000		Katapang	Distanbunhut
2	02	xx	16	06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Jl. Protokol Desa	Penanaman Pohon Pelindung	1000 Ph			10.000.000		Katapang	Distanbunhut
2	02	xx	16	06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Penyediaan Bibit	Persemaian Bibit kayu-kayuan	100000 btg			12.500.000		Kutawaringin	Distanbunhut
2	02	xx	16	06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Masyarakat	Pengadaan Bibit Penghijauan RW.1- 20	3000 pohon			30.000.000		Ciengkrang	Distanbunhut
2	02	xx	16	06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Pencegahan longsor	Konservasi Lahan	10 Ha			20.000.000		Banjaran	Distanbunhut

2	02	xx	16	06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Pencegahan erosi Banjir	Rehabilitasi lahan kritis	25 Ha			25.000.000		Arjasari	Distanbunhut
2	02	xx	16	06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Menjaga dan melestarikan lahan dan hutan produktif	Penghijauan Lahan dan Hutan	125 Ha			200.000.000		Ciwidey	Distanbunhut
2	02	xx	16	06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan		BUDIAYA LEBAH MADU	3unit			22.500.000		Soreang	Distanbunhut
2	02	xx	16	06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan		* AGROFORESTRI	1 unit			16.500.000		Soreang	Distanbunhut
2	02	xx	16	06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Penghijauan, Pencegahan Longsor, meningkatkan kesuburan lahan								Distanbunhut
Jumlah 11											10.922.300.000	12.225.000.000		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD

: DINAS PERNAKAN DAN PERIKANAN

2	01	xx	21	PERTANIAN	URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD
								TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012		
2	01	xx	21		Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Meningkatnya produktivitas usaha dan jaminan keamanan pangan asal ternak melalui pengendalian penyakit secara efektif dan perbaikan pengawasan peredaran produk peternakan yang HAUS	Ternak, HPR, peternak dan Kader vaksinator tingkat desa							
2	01	xx	21	02	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular	Terlaksananya Vaksinasi dan surveillance PHMS (AI, ND, Rabies, Brucellosis dan Anthrax)	unggas tertular AI di kecamatan tertular tahun. 2009 dan Kecamatan tertular baru di 2010; HPR dan sapi perah di kecamatan potensial serta TPH dan Pasar hewan	351.800	458.500	dosis	287.040.000	203.000.000	31 Kecamatan	Disnakan
2	01	xx	21	02	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan PHMS	Penyediaan obat-obatan dan peralatan penunjang pengendalian PHMS	1	1	paket	56.000.000	190.000.000	31 Kecamatan	Disnakan
2	01	xx	21	02	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular	Terlaksananya pengawasan kesehatan ternak terhadap hewan kurban	Ternak ruminansia di lokasi penjualan ternak kurban	1	1	paket	18.000.000	20.000.000	31 Kecamatan	Disnakan
2	01	xx	21	02	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular	Terselenggaranya KIE penanggulangan penyakit hewan	kader vaksinator	60	75	orang	39.000.000	75.000.000	31 Kecamatan	Disnakan
2	01	xx	21	03	Kegiatan Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	Terlaksananya Focal Culling secara selektif Unggas terjangkit AI dan eliminasi HPR	Unggas terjangkit AI dan HPR liar/dilarkan	1050	1100	ekor	19.000.000	21.000.000	31 Kec	Disnakan
2	01	xx	21	06	Kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Laboratorium	Terlaksananya pelayanan keswan secara aktif, semi aktif dan pasif oleh UPTD Puskeswan dan Laboratorium	masyarakat, peternak dan pelaku usaha peternakan	12	12	bulan	111.270.000	297.000.000	14 kecamatan	Disnakan
2	01	xx	21	07	Kegiatan Pengawasan dan pembinaan penerapan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya pelatihan teknis petugas pemotongan dan pelaku usaha pemotongan ternak	Petugas pemotongan RPH, RPU dan DKM	90	110	orang	17.480.000	18.000.000	Soreang, Bojongsong, Margaasih, Pangalengan, Baleendah, Solokanjeruk	Disnakan
2	01	xx	21	07	Kegiatan Pengawasan dan pembinaan penerapan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya pengawasan dan penyuluhan bagi pelaku usaha perdagangan daging	Pedagang daging di pasar tradisional dan waralaba	11	12	lokasi	11.970.000	13.000.000	10 kecamatan	Disnakan
2	01	xx	21	07	Kegiatan Pengawasan dan pembinaan penerapan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya pemeriksaan produk asal hewan/ternak	Pedagang daging di pasar tradisional dan waralaba	150	150	sampel	36.740.000	37.500.000	10 kecamatan	Disnakan
2	01	xx	22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Berkembangnya kapasitas peternak dan pelaku usaha peternakan dalam menunjang peningkatan produksi daging, telur dan susu	Peternak, Pelaku usaha dan koperasi peternakan							
2	01	xx	22	01	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perbibitan Ternak	Terselenggaranya pemeliharaan ternak dan kandang	UPTD Pembibitan Ternak	12	12	bulan	132.600.000	140.400.000	UPTD Pembibitan Ternak Kec. Pasirjambu	Disnakan
2	01	xx	22	01	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perbibitan Ternak	Tersedianya sarana penunjang pemeliharaan kandang	UPTD Pembibitan Ternak	1	1	paket	55.000.000	65.000.000	UPTD Pembibitan Ternak Kec. Pasirjambu	Disnakan
2	01	xx	22	01	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perbibitan Ternak	Tersedianya pakan ternak dan obat selama 1 tahun	UPTD Pembibitan Ternak	2	2	paket	167.270.000	185.500.000	UPTD Pembibitan Ternak Kec. Pasirjambu	Disnakan
2	01	xx	22	02	Pembibitan Dan Perawatan Ternak	Terlaksananya inseminasi buatan (IB) pada domba serta IB sapi potong sebagai penunjang kegiatan P2SDS	Peternak pembibitan domba dan sapi potong	2	2	paket	25.000.000	85.000.000	Paseh, Soreang, Kutawaringin, Arjasari, Cikancung, Ciminyan, Banjaran, Pacet	Disnakan
2	01	xx	22	02	Pembibitan Dan Perawatan Ternak	Tersedianya peralatan IB sapi perah	Koperasi persusuan	3	1	unit	45.000.000	25.000.000	Ciwidey, Cilengkrang, Arjasari	Disnakan
2	01	xx	22	02	Pembibitan Dan Perawatan Ternak	Peningkatan kapasitas Pos IB dan Inseminator (sarana kantor, pelatihan dan konsolidasi)	Pos IB Solokan Jeruk dan Inseminator tk Kabupaten	3	3	kegiatan	86.000.000	6.000.000	Pos IB Solokanjeruk dan Inseminator tk Kabupaten	Disnakan
2	01	xx	22	02	Pembibitan Dan Perawatan Ternak	Terselenggaranya peran serta peternak dalam Kontes bibit ternak tingkat provinsi	Pembudidaya ternak unggul	1	1	kali	16.000.000	20.000.000	Prov. Jabar	Disnakan
2	01	xx	22	04	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Terselenggaranya Pelatihan budidaya sapi potong, sapi perah, domba, itik, kelinci dan ayam	Pembudidaya ternak di 13 kecamatan	390	350	orang	224.500.000	200.000.000	Arjasari, Baleendah, Banjaran, Cileunyi, Cimaung, Ciminyan, Ciparay, Kutawaringin, Majalaya, Pacet, Pameungpeuk, Paseh, Soreang	Disnakan
2	01	xx	22	04	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Terlaksananya intensifikasi usaha budidaya sapi perah	Kelompok ternak	6	8	kelompok	495.000.000	400.000.000	Pangalengan, Kertasari, Arjasari, Cilengkrang, Pasirjambu	Disnakan
2	01	xx	22	04	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Terlaksananya pengembangan usaha peternak domba dan kambing perah secara intensif	Kelompok ternak pembibitan domba dan kambing perah	15	7	kelompok	350.000.000	175.000.000	Banjaran, Cimaung, Baleendah, Cilengkrang, Arjasari, Soreang, Kutawaringin, Pasirjambu, Majalaya	Disnakan
2	01	xx	22	04	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Terlaksananya penunjang kegiatan P2SDS	Kelompok ternak pembibitan sapi potong	3	2	kelompok	120.000.000	250.000.000	Banjaran, Cimaung, Cikancung, Solokanjeruk	Disnakan
2	01	xx	22	04	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Terlaksananya penunjang penanggulangan kemiskinan melalui usaha budidaya kelinci dan ayam buras	Terciptanya lapangan usaha baru/tambahan bagi masyarakat miskin	65	115	orang	65.000.000	110.000.000	Rancabali, Soreang, Paseh, Kutawaringin, Pangalengan, Ciwidey, Arjasari, Pasirjambu, Kertasari, Pacet, Cangkruang	Disnakan
2	01	xx	22	04	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Terlaksananya pengembangan usaha budidaya itik di daerah potensial	Kelompok tani ternak	1	2	kelompok	50.000.000	80.000.000	Bojongsong	Disnakan
2	01	xx	22	04	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan higienitas kandang ternak	Peternak dan kelompok ternak	8		lokasi	171.000.000		Bojongsong, Cimaung, Pacet	Disnakan

2	01	xx	22	04	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Terlaksananya fasilitasi program dan kegiatan tk. Kabupaten dan provinsi (HKP, P2WKSS, TMMD, TMSS, BBGRM)	Masyarakat, peternak dan kelompok ternak	5	5	paket	100.000.000	100.000.000	Prov. Jabar dan Kab. Bandung	Disnakan
2	01	xx	22	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta fasilitasi perencanaan program dinas	Lokasi sasaran kegiatan dan aparatur pelaksana kegiatan	1	1	paket	80.000.000	100.000.000	31 kecamatan, Prov. Jabar	Disnakan
2	01	xx	23		Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Berkembangnya kapasitas pelaku usaha pengolahan hasil ternak dan pemasaran produk ternak	Peternak, Pelaku usaha dan koperasi peternakan							
2	01	xx	23	01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Terselenggaranya fasilitasi kemitraan usaha peternakan	Peternak dan pelaku usaha peternakan	5	2	lokasi	32.500.000	15.000.000	Arjasari, Paseh, Cicalengka, Nagreg, Cilengkrang	Disnakan
2	01	xx	23	01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Terselenggaranya pelatihan dan fasilitasi manajemen pengolahan dan pemasaran hasil ternak	Pelaku usaha pemasaran dan pengolahan hasil ternak	230	200	orang	169.000.000	120.000.000	Arjasari, Ciwidey, Cilengkrang, Pacet, Pangalengan, Pasirjambu, Rancabali	Disnakan
2	01	xx	23	01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan higienitas pasca panen dan pengolahan hasil ternak	Pelaku usaha pemasaran dan pengolahan hasil ternak	13	10	paket	215.000.000	180.000.000	Arjasari, Cikancung, Cilengkrang, Kutawaringin, Margahayu, Pasirjambu, Rancabali, Rancaekek, Solokanjeruk	Disnakan
2	01	xx	23	01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Terlaksananya pengumpulan data dan informasi pasar komoditas peternakan dan hasil olahannya	Pelaku usaha pemasaran dan pengolahan hasil ternak, pasar tradisional dan perusahaan peternakan	12	12	bulan	10.000.000	12.000.000	Kab. Bandung	Disnakan
2	01	xx	23	07	Kegiatan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Terlaksananya peran serta dinas dalam promosi produk peternakan serta sosialisasi gerakan minum susu	masyarakat, peternak dan pelaku usaha peternakan	3	3	paket	60.000.000	60.000.000	Kab. Bandung	Disnakan
2	01	xx	24		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Optimalisasi penerapan teknologi peternakan	Peternak, kelompok ternak, Koperasi ternak dan UPTD RPH							Disnakan
2	01	xx	24	02	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Terlaksananya pengelolaan limbah ternak menjadi biogas	peternak	149	50	unit	753.000.000	300.000.000	17 kecamatan	Disnakan
2	01	xx	24	02	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Terlaksananya pengelolaan limbah ternak menjadi kompos	Peternak dan kelompok ternak	110	50	paket	885.000.000	300.000.000	12 kecamatan	Disnakan
2	01	xx	24	02	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan limbah ternak dan penerapan teknologi peternakan	Peternak dan kelompok ternak	210	80	orang	349.500.000	85.000.000	Arjasari, Canguang, Cimaung, Kutawaringin, Majalaya, pacet, Pangalengan, Pasirjambu, Rancabali, Soreang	Disnakan
2	01	xx	24	02	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pakan ternak	Peternak dan kelompok ternak	19	3	paket	339.000.000	60.000.000	Arjasari, Cikancung, Cilengkrang, Ciwidey, Kutawaringin, Pangalengan, Pasirjambu, Rancabali	Disnakan
2	01	xx	24	02	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Terlaksananya pemeriksaan unsur hara kompos dan mutu pakan ternak	Peternak pengolah kompos limbah ternak, koperasi peternakan dan pelaku usaha peternakan	45	70	sampel	22.000.000	35.000.000	16 kecamatan	Disnakan
2	01	xx	24	02	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Terlaksananya sarana penunjang dan penanaman Hijauan Makanan Ternak	Kelompok Ternak	50	20	Ha	150.000.000	60.000.000	Arjasari, Cilengkrang, Cimenyan, Pangalengan, Pasirjambu, Rancabali, Cikancung dan Cimaung	Disnakan
2	01	xx	24	02	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Terlaksananya penerapan teknologi penetasan telur dan pemeliharaan sapi perah	Kelompok ternak	45	30	paket	250.000.000	150.000.000	16 kecamatan	Disnakan
2	01	xx	24	07	Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasaran Teknologi Rumah Potong Hewan	Terlaksananya pengawasan terhadap pemotongan dan kualitas pemotongan ternak di 9 RPH	RPH swasta dan pemerintah	90	90	kali	18.000.000	18.000.000	5 RPH Pemerintah dan 4 RPH Swasta	Disnakan
2	01	xx	24	07	Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasaran Teknologi Rumah Potong Hewan	Tersedianya sarana penunjang pemotongan ternak di RPH Pemerintah	RPH Pemerintah	4	5	paket	50.000.000	75.000.000	5 RPH Pemerintah (UPTD RPH)	Disnakan
2	01	xx	24	07	Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasaran Teknologi Rumah Potong Hewan	Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan terhadap daging masuk	Pedagang daging di pasar tradisional	10	15	lokasi	25.000.000	50.000.000	Pasar Soreang, Canguang, Ciwidey, Baleendah, Majalaya, Cicalengka, Bojongsong, Sayati, Cileunyi, Ciparay	Disnakan
2	01	xx	24	07	Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasaran Teknologi Rumah Potong Hewan	Terlaksananya Peningkatan sarana RPH Solokanjeruk	RPH Solokanjeruk	1	1	paket	90.000.000	20.000.000	RPH Solokanjeruk	Disnakan
2	01	xx	24	07	Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasaran Teknologi Rumah Potong Hewan	Tersedianya sarana penunjang RPH Baleendah	RPH Baleendah	1	1	paket	335.820.000	20.000.000	RPH Baleendah	Disnakan
2	01	xx	24	07	Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasaran Teknologi Rumah Potong Hewan	Terlaksananya Relokasi RPH	RPH Pangalengan	1	1	paket	45.000.000	300.000.000	Pangalengan	Disnakan
2	05	xx	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Diterapkannya proses pembenihan dan budidaya ikan sesuai dengan standar teknis dalam mendorong pencapaian produksi ikan	Pembudidaya, UPR dan Kelompok pembenihan, pendederan dan pembesaran ikan serta UPTD Pembenihan Ikan							
2	05	xx	20	01	Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Terselenggaranya fungsi UPTD Pembenihan ikan dalam upaya pelayanan pencetakan benih dan calon induk ikan unggul	Tersedianya sarana dan prasarana operasional UPTD Pembenihan Ikan	12	12	bulan	220.750.000	270.200.000	UPTD Pembenihan Ikan Ciparay	Disnakan
2	05	xx	20	02	Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Terlaksananya penerapan teknologi budidaya perikanan CPIB komoditas unggulan dan UPR	Kelompok pembudidaya ikan dan UPR	14	16	Unit	200.000.000	250.000.000	Ciparay, Pacet, Majalaya, Banjaran, Rancaekek	Disnakan
2	05	xx	20	02	Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Terfasilitasinya UPP dan penyelenggaraan sosialisasi Manajer Pengendali Mutu (MPM) benih ikan	Pembudidaya ikan, petugas UPP dan MPM	4	1	kali	25.000.000	25.000.000	Kab. Bandung	Disnakan
2	05	xx	20	02	Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi produksi benih ikan	pembudidaya pembenihan ikan, pengumpul, PPL Perikanan	4	4	kali	20.000.000	30.000.000	Kab. Bandung	Disnakan
2	05	xx	20	02	Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Terlaksananya forum pembenihan Kabupaten Bandung	pembudidaya ikan, pengumpul, ASPAT, PPL perikanan	4	4	kali	28.000.000	30.000.000	Kab. Bandung	Disnakan

2	05	xx	20	02	Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Terlaksananya pendampingan program pemerintah pusat dan provinsi	Kelompok pembenihan ikan	1	1	paket	30.000.000	30.000.000		
2	05	xx	20	03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Terlaksananya penataan sarana dan prasarana dalam upaya sertifikasi budidaya ikan lele dan nila	Kelompok budidaya ikan yang telah mengikuti pelatihan CBIB	20	20	kelompok	270.000.000		Arjasari, Banjaran, Bojongsong, Cilengkrang, Cileunyi, Cimaung, Ciparay, Majalaya, Margahayu, Pasirjambu, Soreang	Disnakan
2	05	xx	20	03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Terselenggaranya pelatihan budidaya ikan	Pembudidaya ikan	80	120	orang	42.000.000	48.000.000	Margahayu, Banjaran	Disnakan
2	05	xx	20	03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana budidaya ikan unggul	Kelompok budidaya ikan unggul	33	20	kelompok	254.250.000	180.000.000	Arjasari, Banjaran, Bojongsong, Cilengkrang, Pasirjambu, Soreang, Cimaung	Disnakan
2	05	xx	20	03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi produksi ikan	Pembudidaya ikan, pengumpul dan PPL Perikanan	4	4	kali	20.000.000	25.000.000	Kab. Bandung	Disnakan
2	05	xx	20	03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Tersedianya fasilitasi program dan kegiatan tingkat kabupaten (P2WKSS, TMMD, TMSS, Ds. Mandiri Pangan, Bulan Bhakti LKMD, Wnita tanam dan pelihara)	Masyarakat, pembudidaya ikan dan kelompok budidaya ikan	6	6	paket	30.000.000	36.000.000	Kab. Bandung	Disnakan
2	05	xx	23		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Berkembangnya produksi hasil olahan yang sehat, higienis dan berdaya saing dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan	Masyarakat, Anak sekolah, Pelaku usaha/ kelompok pemasaran dan pengolahan ikan						Kab. Bandung	Disnakan
2	05	xx	23	01	Kegiatan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Terselenggaranya gerakan makan ikan penunjang kegiatan P2WKSS dan UKS	Masyarakat dan pelajar	2	2	kali	12.000.000	15.000.000	pm	Disnakan
2	05	xx	23	01	Kegiatan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Terselenggaranya pelatihan dan fasilitasi manajemen pengolaan dan pemasaran hasil ikan	Pelaku usaha dan kelompok pengolahan dan pemasaran ikan	20	30	kelompok	324.000.000	350.000.000	Arjasari, Baleendah, Banjaran, Bojongsong, Majalaya, Pacet, Rancaekek	Disnakan
2	05	xx	23	01	Kegiatan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan	Pelaku usaha dan kelompok pengolahan dan pemasaran ikan	13	20	paket	150.000.000	220.000.000	Baleendah, Banjaran, Cileunyi, Ciwidey, Bojongsong, Majalaya, Soreang, Rancaekek	Disnakan
2	05	xx	23	01	Kegiatan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Terlaksananya pengujian dan pengawasan mutu hasil ikan dan olahannya	Pelaku usaha dan kelompok pengolahan dan pemasaran ikan	50	80	sampel	10.000.000	16.000.000	Kab. Bandung	Disnakan
2	05	xx	23	01	Kegiatan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana depo pasar benih ikan	Pelaku usaha dan kelompok pengolahan dan pemasaran ikan	1		paket	27.000.000		Ds. Sagaracipta Ciparay	Disnakan
2	05	xx	23	01	Kegiatan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Terlaksananya apengumpulan data dan informasi hasil olahan ikan	pedagang, pelaku pengolahan ikan	12	12	bulan	10.000.000	10.000.000	Kab. Bandung	Disnakan
2	05	xx	24		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar									
2	05	xx	24	01	Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Terlaksananya pengendalian penyakit ikan	pembudidaya pembenihan, pendederan dan pembesaran ikan	3	3	paket	53.000.000	95.000.000	Kab. Bandung	Disnakan
2	05	xx	24	01	Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Terlaksananya penerapan program CBF (Culture Based Fisheries)	pembudidaya pembenihan, pendederan dan pembesaran ikan	3	4	kegiatan	55.000.000	100.000.000	Baleendah, Pangalengan, Rancaekek, Rancabali, Pangalengan	Disnakan
2	05	xx	24	01	Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Terlaksananya restocking ikan di perairan umum	Danau dan situ	300.000	250.000	ekor	132.500.000	100.000	Baleendah, Ciwidey, Cileunyi, Rancaekek, Rancabali, Pangalengan	Disnakan
2	05	xx	24	01	Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Terlaksananya pemeriksaan penyakit KHV dan logam berat pada ikan	pembudidaya pembenihan, pendederan dan pembesaran ikan	100	100	sampel	42.500.000	50.000.000	Kab. Bandung	Disnakan
											8.533.690.000	6.456.700.000		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD

: BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD	
				TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012			
2 01	xx 15										
PERTANIAN											
2 01	xx 15										
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani											
2 01	xx 15 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Pekan Nasional (PENAS) XIII Tahun 2011	KTNA Kabupaten Bandung	1	1	Paket	238.200.000		Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur	BKP3
2 01	xx 15 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Hari Krida Pertanian TK. Propinsi dan Kabupaten	KTNA Kabupaten dan Kecamatan	1	1	Paket	50.000.000	55.000.000	Kab. Bandung	BKP3
2 01	xx 15 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Mimbar Saresehan	KTNA Kabupaten dan Kecamatan	1	1	Paket	25.000.000	27.500.000	PM dan Kab. Bandung	BKP3
2 01	xx 15 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Lomba Penyuluh dan Kelompok Tani	Pengurus Kelompoktani dan Penyuluh	6	6	Orang	25.000.000	27.500.000	Kab. Bandung	BKP3
2 01	xx 15 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Pelatihan Integrasi Padi ternak (IPT)	Petani padi	25	25	Orang	50.000.000	55.000.000	Kab. Bandung	BKP3
2 01	xx 15 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Pelatihan Pembenhinan Lele	Pembuddidaya Lele	25	25	Orang	25.000.000	27.500.000	Kab. Bandung	BKP3
2 01	xx 15 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Pelatihan Ternak Kelinci	Petani peternak Kelinci	25	25	Orang	25.000.000	27.500.000	Kab. Bandung	BKP3
2 01	xx 15 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Penilaian Kelompok dan Penyuluh Berprestasi	Petani dan Penyuluh	6	6	Orang	35.000.000	38.500.000	Kab. Bandung	BKP3
2 01	xx 15 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Penyuluhan Agribisnis	Pelaku Utama dan pelaku usaha	150	150	Orang	20.000.000	22.000.000	Cangkuang	BKP3
2 01	xx 15 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Pelatihan Pembuatan padi	Pelaku utama/pelaku usaha agribisnis padi	25	25	Orang	15.000.000	16.500.000	Banjaran	BKP3
2 01	xx 15 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Integrasi Lutidjani (Belut, Padi, Ayam)	Pelaku utama/petani	25	25	Orang	50.000.000	55.000.000	Banjaran	BKP3
2 01	xx 15 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Demplo Uolap Pembuatan pakan ternak	Pelaku utama/pelaku usaha peternakan	5	5	Paket	50.000.000	55.000.000	Banjaran	BKP3
2 01	xx 15 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Pelatihan Pelaku utama Agribisnis Kedelai dan Laboratorium Lapangan	Pelaku utama/pelaku usaha komoditas palawija	25	25	Orang	30.000.000	33.000.000	Bojongsong	BKP3
2 01	xx 15 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	Pemuda dan wanita tani	100	100	Orang	36.000.000	39.600.000	Bojongsong	BKP3
2 01	xx 15 02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Rakor PUAP; Pelatihan Penyuluh Pendamping dan Gapoktan PUAP;	Tim Teknis, Penyuluh Pendamping dan Pengurus Gapoktan	150	150	Orang	275.000.000	302.500.000	Kab. Bandung	BKP3
2 01	xx 15 03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Output:								
2 01	xx 15 03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Terlaksananya verifikasi, pemantauan, sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok penerima LDPM, Usaha Ekonomi Produktif dan Alat Pengolah Pupuk Organik	Kelompok penerima LDPM, UEP.	3	3	Gapoktan LDPM	125.000.000	137.500.000	Kec. Paseh, Pacet, Ibum dan Banjaran (LDPM 2009 -2010), Kec Kutawaringin, Ciwidey, Cicalengka (LDPM 2011)	BKP3
2 01	xx 15 03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Outcome:								
2 01	xx 15 03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Terlaksananya distribusi pangan di kelompok LDPM dalam stabilitas harga pangan wilayah dan meningkatnya kemampuan kelompok Produktif Masyarakat Perdesaan		60	60	Kelompok UEP			Kec. Cilengkrang, Kertasari, Nagreg, Cileunyi, Cimeunyan, Cikancung, Solokanjeruk, Bojongsong, Margahayu, Margaasih, Banjaran, Cimaung, Cangkuang, Soreang, Katapang, Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali, Arjasari, Pameungpeuk dan Dayeuhkolot (UEP 2011)	
2 01	xx 16										
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan											
2 01	xx 16 01	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terlaksananya kegiatan peramalan dan kegiatan pemantauan/pengamatan situasi pangan dan gizi serta pembuatan peta kerawanan pangan sebagai bahan informasi untuk sinergitas kebijakan pembangunan ketahanan pangan.	Peta rawan pangan	1	1	paket	250.000.000	275.000.000	Kec. Paseh, Ibum, Pacet, Cikancung, Kertasari, Ciparay, Majalaya, Nagreg, Bojongsong, Baleendah, Pameungpeuk, Pasirjambu dan Rancabali	BKP3
2 01	xx 16 01	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terlaksananya pemantapan program ketahanan pangan dan antisipasi dini masalah gizi buruk di Kabupaten Bandung								
2 01	xx 16 03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Pencarian/pengumpulan (Updating data), Verifikasi data dan pengolahan data untuk laporan NBM dan PPH.	Data NBM dan PPH	10	10	buku	100.000.000	110.000.000	Kab. Bandung	BKP3
2 01	xx 16 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan	Monitoring, Sosialisasi, dan Evaluasi Program Raskin ke setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS)	Raskin ke setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS)	1	1	paket	125.000.000	137.500.000	Kab. Bandung	BKP3
2 01	xx 16 13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Pembinaan dan fasilitasi permodalan pengelolaan lumbung pangan desa/masyarakat (Kodering Bantuan)	Lumbung pangan Desa	15	15	unit	100.000.000	110.000.000	Kec. Ibum, Pacet, Paseh, Cikancung, Nagreg, Kertasari, Banjaran, Pasirjambu, Solokanjeruk dan Cimaung	BKP3
2 01	xx 16 14	Pengembangan desa mandiri pangan	Terlaksananya Tahap Persiapan, Sosialisasi, Penyusunan, Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Desa Mandiri Pangan (Demapan)	7	7	Demapan	200.000.000	220.000.000	Kec. Paseh, Ibum, Pacet, Cikancung, Kertasari, Rancabali dan Pangalengan	BKP3
2 01	xx 16 16	Pengembangan Diversifikasi Tanaman/Pangan	Percepatan penganeka ragam konsumsi Pangan dan gizi masyarakat yang beragam, seimbang, aman yang berbasis sumber daya lokal.	Kelompok KWT dan PKK	10	10	Kel./Desa	100.000.000	110.000.000	Kec. Ibum, Pacet, Paseh, Cikancung, Nagreg, Kertasari, Banjaran, Pasirjambu, Solokanjeruk dan Cimaung	BKP3
2 01	xx 16 22	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Output	Pengusaha dan Petani	1	1	paket	100.000.000	110.000.000	Kec. Ibum, Pacet, Paseh, Cikancung, Nagreg, Kertasari, Banjaran, Pasirjambu, Solokanjeruk dan Cimaung	BKP3
2 01	xx 16 22	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya Peran Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam menangani keamanan pangan sesuai standar dan ketentuan.								

2	05	xx	22	01	Kajian sistim penyuluhan perikanan	Integrasi LUTDIPIYAMPAYUR (Belut Padi Sapi Ayam Palawija Sayuran)	Penyuluh perikanan	2	2	unit	60.000.000	66.000.000	UPT PPP Solokan Jeruk	BKP3
2	05	xx	22	01	Kajian sistim penyuluhan perikanan	Kaji Terap budidaya Lele Sistem Terpal	Penyuluh perikanan	1	1	paket	10.000.000	11.000.000	UPT PPP Pacet	BKP3
2	05	xx	22	01	Kajian sistim penyuluhan perikanan	Demonstrasi cara diversifikasi pengolahan ikan	Penyuluh perikanan	2	2	unit	20.000.000	22.000.000	UPT PPP bojongsong dan Banjaran	BKP3
2	05	xx	22	01	Kajian sistim penyuluhan perikanan	Magang kewirausahaan penyuluh perikanan ke kab. Sukabumi	Penyuluh perikanan	12	12	org	24.000.000	26.400.000	BKPPP Kab. Bandung	BKP3
2	05	xx	22	01	Kajian sistim penyuluhan perikanan	Pelathan managemen untuk penyuluh perikanan swadaya	Penyuluh perikanan	30	30	org	30.000.000	33.000.000	BKPPP Kab. Bandung	BKP3
2	05	xx	22	01	Kajian sistim penyuluhan perikanan	Seminar hasil pemberdayaan, kaji terap, demonstrasi evaluasi	Penyuluh	4	4	paket	20.000.000	22.000.000	Kab. Sukabumi	BKP3
Jumlah 13											3.903.200.000	4.031.500.000		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANAAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD
				TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012		
				TARGET			PAGU INDIKATIF			
KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TAHUN 2011	TAHUN 2012	SATUAN	TAHUN 2011	TAHUN 2012	LOKASI	SKPD
1 11										
1 11 xx 16	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1 11 xx 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Menurunnya jumlah trafficking dan KDRT, serta meningkatnya organisasi PPA, dan terbenukan P2TP2 tingkat Kabupaten	korban trafficking korban KDRT organisasi PPA Organisasi P2TP2	30 40 1 1		org org kelompok kelompok				
1 11 xx 16 03	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	tersedianya data potensi organisasi yang berperan dalam PPA	basis data organisasi PPA		31	buku	190.800.000	250.800.000	Kab. Bandung	BKBPP
1 11 xx 16 08	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	tersedianya data potensi wilayah yang rawan trafficking dan kdrt	basis data wilayah rawan trafficking		31	buku	50.000.000	91.000.000	Kab. Bandung	BKBPP
1 11 xx 16 02	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	terfasilitasinya kegiatan P2TP2	P2TP2 tingkat Kabupaten		1	Kelompok	117.950.000	152.950.000	Kab. Bandung	BKBPP
1 11 xx 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	kader posyandu mendapat pengetahuan tentang ekonomi dan kesejahteraan keluarga	kader posyandu, pos KB, PKK	248 orang		Org				
1 11 xx 17 01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Pembinaan para kader posyandu melalui kegiatan jambore untuk meningkatkan pengetahuan ekonomi dan kesejahteraan keluarga	kader posyandu, pos KB, PKK	248 orang		Org	132.890.000	147.000.000	Kab. Bandung	BKBPP
1 11 xx 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	tercapai 1 desa binaan Program P2WKSS dengan terbina 100 KK miskin	Keluarga Miskin	100 KK	200 KK	Org/desa				
1 11 xx 18 03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	pembinaan 100 KK miskin secara terpadu melalui kegiatan P2WKSS dengan kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan	Keluarga miskin	100 KK	200 KK	Org/desa	91.530.000	101.000.000	Kab. Bandung	BKBPP
1 12										
1 12 xx 15	KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA									
1 12 xx 15	Program Keluarga Berencana	tercapainya pelayanan Keluarga Berencana melalui : pelayanan KB MOP dan MOW Kesepakatan Pelayanan Dengan Medis Pelayanan KB Paska Pelayanan	akseptor KB baru MO	450 orang 16 orang 1200 masyarakat 1paket 1paket 250 orang 1000 orang 1050 orang 250 orang 31 kelompok 31	500 orang 20 orang 1500 orang masyarakat 1 paket 1 paket 300 orang 1200 Orang 1300 orang 300 orang 40 kelompok	Org org pkt org org				
1 12 xx 15 01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Pelayanan terpusat akseptor MO Pertemuan Medis Teknis pelayanan paska persaninan Perjalanan dinas	Para akseptor MO Medis(dokter, Bidan) akseptor KB 31 kecamatan	450 Orang 16 Orang 1200 orang 31 kecamatan	500 orang 20 orang 1500 31 kecamatan	Org Org kecamatan	345.500.000	457.000.000	Kab. Bandung	BKBPP
1 12 xx 15 02	Pelayanan KIE	Melakukan kegiatan KIE melalui : Masa, siaran radio, penyusunan materi KIE Mengikuti Pameran Pembangunan Pelaksanaan hari Keluarga Nasional Pembinaan Pramuka	Kie seluruh masyarakat Pameran Pembangunan Keluarga se Kabupaten	masyarakat 1 paket 1 paket 1 250 orang 250 orang	masyarakat 1 paket 1 paket 1 300 orang 300 orang	Paket Org Org	196.870.000	235.500.000	Kab. Bandung	BKBPP
1 12 xx 15 04	Promosi Pelayanan Khiba	Pembinaan Kelompok GSI Pembinaan Kelompok Paguyuban MOP	31 kelompok GSI 31 kelompok Paguyuban MOP	31 kel 31 kel	31 40 kelompok	Kelompok kelompok	83.850.000	97.500.000	Kab. Bandung	BKBPP
1 12 xx 15 05	Pembinaan Keluarga Berencana	Verifikasi pendataan keluarga miskin untuk Gakin	Keluarga Pra sejahtera dan KSI I	276 Desa/kel	276 desa/kel	desa/kel	357.930.000	525.750.000	Kab. Bandung	BKBPP
1 12 xx 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatkan Pengetahuan Remaja tentang kesehatan reproduksi yang dilakukan melalui: Lokakarya remaja Pembentukan Kelompok PKIR Pertemuan PIKR Percontohan	Remaja Maham Te	150 peserta 31 kelompok 5 kelompok pontren 5 SLTA 10 desa 31 kelompok	200 peserta 35 kelompok 10 kelompok 6 pontren 10 SLTA 12 desa 35 kelompok	Org kelompok kelompok kelompok desa kelompok				

1	12	xx	16	02	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Terlaksananya Kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang reproduksi sehat melalui : Lokakarya remaja Pembentukan Kelompok PKIR	Remaja Maham Te	150 peserta 31 kelompok 5 kelompok pontren 5 SLTA 10 desa 31 kelompok	200 peserta 35 kelompok 10 kelompok 6 pontren 10 SLTA 12 desa 35 kelompok	Org kelompok kelompok kelompok desa kelompok	231.490.000	279.500.000	Kab. Bandung	BKBPP
1	12	xx	18		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB di setiap desa	Pos KB Desa berperan aktif dalam Kegiatan Program KB Sub Pos KB desa berperan aktif dalam Kegiatan Program KB	300 Orang 930 orang	331 orang 1200 orang	Org Org org				
1	12	xx	18	01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam program melalui Kegiatan Pos KB desa dan Sub Pos KB desa	Peningkatan Peran Pos KB Desa dalam Kegiatan Program KB Peningkatan peran Sub Pos KB desa dalam Kegiatan Program KB	300 Orang 930 orang	331 orang 1200 orang	org Org org	418.160.000	575.000.000	Kab. Bandung	BKBPP
1	12	xx	21		Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Menurunkan kasus penularan Penyakit HIV/AIDS	Pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS	200 orang	300 orang	Org				
1	12	xx	21	01	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Perubahan Sikap dan perilaku masyarakat tentang bahaya narkoba, PMS dan Penyakit HIV/AIDS melalui peringatan hari AIDS sedunia	Generasi muda dan masyarakat mengerti tentang bahaya narkoba, Penyakit Menular Seksual dan Penyakit HIV/AIDS	200 orang	300 orang	Org	22.310.000	60.000.000	Kab. Bandung	BKBPP
1	12	xx	22		Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Tersedianya data Potensi tentang Pengasuhan anak. Meningkatnya pengetahuan ibu melalui kartu kembang anak	Data dasar tentang tumbuh kembang anak Kartu KKA	31 buku 1 paket	31 buku 1 paket	buah Pkt				
1	12	xx	22	01	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Tersedianya Informasi tentang pengasuhan anak. Tersedianya Kartu Kembang Anak	Data dasar tentang tumbuh kembang anak Kartu KKA	31 buku 1 paket	31 buku J687 1 paket	buah Pkt	43.290.000	53.250.000	Kab. Bandung	BKBPP
1	12	xx	23		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Meningkatkan peran kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS di tingkat kecamatan	Pendamping Kelompok BKB pendamping Kelompok BKR Pendamping Kelompok BKL Pendamping Kelompok UPPKS	504 orang 155 orang 155 orang 372 orang	700 orang 250 orang 250 orang 504 orang	org Org org org				
1	12	xx	23	01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS untuk ketahanan keluarga di tingkat kecamatan	Pendamping Kelompok BKB pendamping Kelompok BKR Pendamping Kelompok BKL Pendamping Kelompok UPPKS	504 orang 155 orang 155 orang 372 orang	700 orang 250 orang 250 orang 504 orang	org Org org org	141.370.000	181.000.000	Kab. Bandung	BKBPP
Jumlah 14											2.423.940.000	3.207.250.000		

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD				
				TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012						
1														
1	10													
1	10	xx	15											
1	10	xx	15	03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Terselenggaranya pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu dengan Pengambilan Sidik Jari dan Foto waib KTP	2,3 juta wajib KTP	2.300.000	2.875.000	orang	2.000.000.000	2.500.000.000	31 Kecamatan	Dinsosdukcasip
1	10	xx	15	04	Implementasi Sistem Ad ministrasi Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka pengoperasian SIAK On Line	10 orang	10	13	Orang	25.000.000	31.250.000	Depdagri, Propinsi dan Kecamatan	Dinsosdukcasip
1	10	xx	15	05	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Peningkatan kapasitas sarana data dan pemeliharaan dokumentasi pencatatan sipil		276	345	orang	200.000.000	250.000.000	31 Kecamatan	Dinsosdukcasip
1	10	xx	15	08	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	Pelaksanaan koordinasi dengan pengadilan negeri tentang penetapan akta kelahiran terlambat	Aparatur dan Masyarakat	276	345	orang	75.000.000	93.750.000	31 Kecamatan	Dinsosdukcasip
1	10	xx	15	09	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan tersedianya data pencatatan sipil yang lengkap, akurat	276 Desa dan 31 Kecamatan	276	345	orang	200.000.000	250.000.000	276 Desa dan 31 Kecamatan	Dinsosdukcasip
1	10	xx	15	09	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Bantuan Pembuatan Akta Gratis Bagi Masyarakat Gakin ke Pengadilan	276 Desa dan 31 Kecamatan	276	345	orang	200.000.000	250.000.000	Kecamatan Baleendah, Lokasi TMMD dan TMSS	Dinsosdukcasip
1	10	xx	15	10	Penyusunan kebijakan kependudukan	Pengembangan data base kependudukan	Aparatur Kecamatan	31	39	orang	125.000.000	156.250.000	31 Kecamatan	Dinsosdukcasip
1	10	xx	15	11	Peningkatan Kapasitas aparat Kependudukan dan Casip	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparat segagai Tenaga Pelaksana Adminduk di Kecamatan	Aparatur Kecamatan 31 Kecamatan	31	39	orang	400.000.000	500.000.000	31 Kecamatan	Dinsosdukcasip
1	10	xx	15	12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Terbitnya Kepub dan petunjuk pelaksanaannya	31 Kecamatan	31	39	orang	100.000.000	125.000.000	31 Kecamatan	Dinsosdukcasip
1	10	xx	15	12	Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi kependudukan	Terselenggaranya Sosialisasi Perda ttg adm kependudukan	31 Kecamatan	31	39	orang	100.000.000	125.000.000	31 Kecamatan	Dinsosdukcasip
1	10	xx	15	14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya Monitoring Realisasi Pencapaian target PAD	Aparatur Kecamatan	31	39	orang	250.000.000	312.500.000	31 Kecamatan	Dinsosdukcasip
1	13													
1	13	xx	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Terbinanya Klg Fakir Miskin, WRSE, LU Terlantar, Korban Kekerasan, Trafiking, TKS dan PMKS lainnya.	Keluarga Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi Lanjut Usia Terlantar, Korban Kekerasan, Trafiking dan PMKS lainnya.							
1	13	xx	15	02	Bimbingan Teknis bagi Pendamping PMKS di Kecamatan	Terselenggaranya BinteK bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK)	31	39	orang	100.000.000	125.000.000	31 Kecamatan	Dinsosdukcasip
1	13	xx	15	03	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Terselenggaranya Latihan keterampilan bagi Fakir Miskin dan Keterampilan Berusaha dalam memenuhi Kebutuhan Hidupnya	Keluarga Fakir Miskin	313	391	orang	300.000.000	375.000.000	Kec. Paseh, Ibut, Cileunyi, Ciparay, Pangalengan, Soreang, Majalaya, Banjaran, Margaasih, Nagreg	Dinsosdukcasip
1	13	xx	15	04	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin	KTK, Korban Trafiking	20	25	orang	30.000.000	37.500.000	Kec. Pangalengan, Paseh, Ciwidey dan Banjaran	Dinsosdukcasip
1	13	xx	15	05	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi Keluarga Miskin dan Keterampilan Berusaha dalam memenuhi Kebutuhan Hidupnya	BinteK Lanjut FM	66	83	orang	250.000.000	312.500.000	Kec. Soreang, Banjaran, Paseh, Pacet, Cikancung, dan Solokan Jeruk	Dinsosdukcasip
1	13	xx	15	06	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan bagi PMKS Wanita Rawan Sosial Ekonomim	WRSE 150	150	188	orang	243.908.500	304.885.625	Kec. Paseh, Pangalengan, Kutawaringin, Soreang, Pameungpeuk dan Lokasi P2WKSS	Dinsosdukcasip
1	13	xx	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terbinanya Penyandang cacat, Anak nakal, Eks Napza, Tuna Susila, Lu Terlantar, Korban Bencana Alam	Penyandang cacat, Anak nakal, Eks Napza, Tuna susila, LU terlantar, Korban Bencana Alam						Kab Bandung	
1	13	xx	16	01	Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Terjalinnnya Koordinasi dengan Dirjen Pelayanan Rehabilitasi Sosial		20	25	orang	10.000.000	12.500.000	Dinsosdukcasip	Dinsosdukcasip
1	13	xx	16	02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Tersosialisasikan dan terwujudnya Penanganan Korban Tindak Kekerasan	50 Orang Korban Tindak Kekerasan, 25 orang Tim Jejaring Kerja Penanggulangan KTK	75	94	orang	120.000.000	150.000.000	Kec. Soreang, Margahayu, Ciwidey, dan Arjasari	Dinsosdukcasip
1	13	xx	16	03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terselenggaranya Bimbingan Sosial Bagi Kader Pencegah Tuna Susila	60 Tomas, PSM/KT, PKK, dan Perangkat Desa	60	75	orang	50.000.000	62.500.000	Kec. Pangalengan, Cimaung, Cileunyi, dan Arjasari	Dinsosdukcasip
1	13	xx	16	04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Terbinanya Anak Nakal dan Eks Napi dan Keterampilan Berusaha dalam memenuhi Kebutuhan Hidupnya	30 Orang Anak Nakal,dan 20 Orang Eks Napi	50	63	Orang	200.000.000	250.000.000		Dinsosdukcasip
1	13	xx	16	04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan dan praktek belajar kerja bagi Anak Cacat dalam pemenuhan hak dasar anak	100 Orang Anak Cacat	100	125	Orang	250.000.000	312.500.000	Kec. Paseh, Majalaya, Cicalengka, dan Rancaekek	Dinsosdukcasip
1	13	xx	16	07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Terselenggaranya Bimbingan Sosial Bagi Keluarga dengan Anak Cacat	60 Orang Tua Paca, Pengurus IKDAC, FK KDAC Kab. Bandung	60	75	Orang	55.000.000	68.750.000	Kec. Pangalengan, Bojongsong, Nagreg, Ciparay dan Katapang, Rancabali, Ciwidey	Dinsosdukcasip

1	13	xx	16	10	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Tersosialisasinya UU No 24/2007 dan Terbinanya Tagana	135 Tagana, 120 Tomas	255	319	Orang	270.000.000	337.500.000	31 Kecamatan	Dinsosdukcasip
1	13	xx	16	12	Pelayanan Sosial Bagi Lansia	Terselenggaranya pelayanan terhadap Lanjut Usia dan Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Lanjut Usia Terlantar	90 Orang Lanjut Usia Terlantar	90	113	Orang	75.000.000	93.750.000	Kec. Margaasih, Bojong Soang, dan Cileunyi	Dinsosdukcasip
1	13	xx	17		Program pembinaan anak terlantar	Terbinanya Anak Terlantar dan Anak Jalanan	Anak Terlantar, Anak Jalanan							
1	13	xx	17	02	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	40 Orang Anak Putus Sekolah	40	50	Orang	60.000.000	75.000.000	Kec. Soreang, Kutawaringin, Katapang, Dan Pasir Jambu	Dinsosdukcasip
1	13	xx	17	02	Kegiatan Peningkatan Keterampilan tenaga pembina anak terlantar	Terbinanya tenaga pembina anak terlantar	40 org. OT anak terlantar	40	50	Orang	75.000.000	93.750.000	Banjaran, Pangalengan, cimaung dan cangkuang	Dinsosdukcasip
1	13	xx	17	07	Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar melalui Penguatan Usaha Ekonomi Keluarga	Terlaksananya Bimbingan Sosial dan Keterampilan Berusaha melalui Penguatan Usaha Ekonomi Keluarga	40 orang OT anak terlantar	40	50	Orang	50.000.000	62.500.000	Banjaran, Pangalengan, cimaung dan cangkuang	Dinsosdukcasip
1	13	xx	18		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Terbinanya Penyandang cacat melalui Pelatihan keterampilan dan Loka Bina Karya	Penyandang Cacat							
1	13	xx	18	02	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma	Tersedianya Fasilitas Alat Bantu bagi Penyandang Cacat (Tuna Netra, Tuna Rungu dan Tuna Daksa)	30 orang Penyandang Cacat	30	38	Orang	20.000.000	25.000.000	Kec. Margaasih, Paseh, Kertasari, Ibum, Pangalengan dan Cimaung	Dinsosdukcasip
1	13	xx	18	03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Terselenggaranya Pengiriman kalayan ke BBRSBD Solo dan BBRSBVC Bogor	10 orang Penyandang Cacat Tuna Daksa	10	13	Orang	20.000.000	25.000.000	Pengiriman kalayan ke BBRSBD Solo dan BBRSBVC Bogor	Dinsosdukcasip
1	13	xx	18	04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Terselenggaranya Sosialisasi bagi Perusahaan untuk Terserapnya kuaota 1 % Tenaga Kerja Paca di Perusahaan	20 Perusahaan	20	25	Orang	100.000.000	125.000.000	31 Kecamatan	Dinsosdukcasip
1	13	xx	18	05	Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik	Terselenggaranya Bimbingan Sosial bagi Kader Rehabilitasi Paca berbasis Masyarakat	70 orang Puskesmas, Kasi Sosial, Toma, Kader PKK Tk. Desa dan Kec.	70	88	Orang	60.500.000	75.625.000	Kec. Kertasari, Ibum, Paseh, Nagreg, Rancabai dan Pangalengan	Dinsosdukcasip
1	13	xx	18	05	Pelatihan Paca di Loka Bina Karya (LBK) Paseh	Terselenggaranya Pelatihan Penyandang Cacat	20 Orang Paca	20	25	Orang	150.000.000	187.500.000	LBK Kec. Paseh	Dinsosdukcasip
1	13	xx	19		Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Terbinanya Lanjut Usia Terlantar, Pengurus panti asuhan/ jompo.	Lanjut Usia Terlantar, Pengurus Panti Asuhan/Jompo							
1	13	xx	19	04	Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus panti asuhan/ jompo	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pengurus Panti Asuhan/Jompo	60 orang Pengurus Panti Sosial	60	75	Orang	100.000.000	125.000.000	Kec. Pacet, Ciparay, Cimenyan, Cileunyi, Rancaekek, Banjaran, Paseh, Margahayu, Arjasari dan Margaasih	Dinsosdukcasip
1	13	xx	19	07	Pelayanan Sosial Bagi Peningkatan taraf Kesejahteraan Sosial Lanjut Usai.	Terselenggaranya Pelayanan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Pokok Lanjut Usia Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	200	250	Orang	85.000.000	106.250.000	Kec. Cicalengka, Pameungpeuk, Nagrek, Ciparay, Majalaya dan Solokan Jeruk	Dinsosdukcasip
1	13	xx	20		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Terbinanya Wanita Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Eks. Narapidana, Narkoba dan penyakit sosial lainnya.	Wanita Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Eks. Narapidana, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya							
1	13	xx	20	01	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi wanita Tuna Sosial, eks. Gelandangan dan pengemis	30 orang wanita Tuna Sosial dan 20 orang eks gelandangan dan pengemis	50	63	Orang	50.000.000	62.500.000	Kec. Majalaya, Cicalengka, Cikancung dan Cileunyi	Dinsosdukcasip
1	13	xx	20	04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Tersedianya data Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan) BWBP melalui UEP	20 orang	20	25	Orang	60.000.000	75.000.000	Kec. Margahayu, Majalaya, Cicalengka, Cileunyi, Pasirjambu dan Cikancung	Dinsosdukcasip
1	13	xx	20	06	Bimbingan Sosial dan Latihan bagi eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Terselenggaranya Bimbingan Sosial dan Latihan bagi eks. Penyandang Penyakit Sosial	50 orang	50	63	Orang	75.000.000	93.750.000	Kec. Banjaran, Pangalengan, Cangkuang, Dayeuhkolot, Ciparay dan Pasir Jambu	Dinsosdukcasip
1	13	xx	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terbinanya Karang Taruna, PSM, PKRI, Orsos, Pani Asuhan dan Dunia Usaha	Karang Taruna, PSM, PKRI, Orsos, Panti dan Dunia Usaha							
1	13	xx	21	01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan Dunia Usaha Mengenai Pengumpulan Dana dan Undian	93 orang	93	116	Orang	26.000.000	32.500.000	31 Kecamatan	Dinsosdukcasip
1	13	xx	21	03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Terselenggaranya Penilaian KT Berprestasi, PSM berprestasi, Bimbingan Sosial Dasar KT, Bimbingan Sosial Dasar PSM, Bintek UEP KT, Bintek UEP PSM, Bantuan Stimulan KT, Bantuan Stimulan PSM.					317.000.000	396.250.000	31 Kecamatan dan Lokasi TMMD dan TMSS)	Dinsosdukcasip
1	13	xx	21	04	Peringatan Hari Pahlawan, Pemeliharaan TMB dan Tugu Perjuangan	Terselenggaranya Peringatan Hari Pahlawan serta terpeliharanya TMB dan Tugu perjuangan	Peringatan Hari Pahlawan, 3 TMB dan 1 Tugu Perjuangan dan PKRI	4	5	unit	175.000.000	218.750.000	Kec. Soreang, Pangalengan, Majalaya dan Baleendah	Dinsosdukcasip
1	13	xx	21	05	Pendidikan dan Pelatihan Bagi pengurus Yayasan Orsos	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengurus Orsos	25 orang pengurus Orsos	25	31	Orang	50.000.000	62.500.000	Orsos di Kabupaten Bandung	Dinsosdukcasip
1	13	xx	21	06	Sosialisasi UU No 11 Tahun 2009	Tersosialisasinya UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kessos	Aparat Kabupaten dan Kecamatan	267	334	orang	332.591.500	415.739.375	31 Kecamatan	Dinsosdukcasip
1	13	xx	21	07	Updating Data PMKS dan PSKS	Tersedianya Data PMKS dan PSKS secara lengkap dan akurat	Updating Data PMKS & PSKS	267	334	orang	100.000.000	125.000.000	31 Kecamatan	Dinsosdukcasip
1	13	xx	21	07	Peningkatan Koordinasi pelaksanaan Bidang Kesejahteraan sosial	Tersusunnya perencanaan dan evaluasi program kesos secara partisipatif	30 orang	30	38	orang	75.000.000	93.750.000	Dinsosdukcasip	Dinsosdukcasip
1	13	xx	21	08	Penambahan Pagar Bangunan Panti Rehabilitasi PMKS	Terpeliharanya sarana dan prasarana Panti Rehabilitasi PMKS	Panti Rehabilitasi PMKS	1	1	unit	200.000.000	250.000.000	Kec. Balendah	Dinsosdukcasip
1	19	xx	22		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Terlaksananya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Korban bencana							Dinsosdukcasip

1	19	xx	22	04	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Terlaksananya pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana		1	1	Paket	1.000.000.000	1.000.000.000	Kab. Bandung	Dinsosdukasip
					Jumlah 15						8.810.000.000	10.762.500.000		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD
				TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012		
1 05	xx 16	PENATAAN RUANG							Kab. Bandung	BAPPEDA
1 05	xx 16	Program Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya ketersediaan data spasial berupa foto udara, peta dan data yang akurat untuk keperluan penataan ruang.						Kab. Bandung	BAPPEDA
1 05	xx 16 05	Survey dan pemetaan	Data spasial berupa foto udara, peta dan data yang akurat untuk keperluan penataan ruang.	Photo Citra Peta Garis	130000 130000	130000 130000	ha	900.000.000 900.000.000	Kab. Bandung	BAPPEDA
1 06		PERENCANAAN PEMBANGUNAN							Kab. Bandung	BAPPEDA
1 06	xx 15	Program Pengembangan data/informasi	Meningkatkan Pengembangan data/informasi						Kab. Bandung	BAPPEDA
1 06	xx 15 02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya enyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	SKPD dan Stakeholder Pembangunan	1	1	Dokumen	400.000.000 450.000.000	Kab. Bandung	BAPPEDA
1 06	xx 16	Program Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah Kabupaten/kota se jabar dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Kab. Bandung dengan Provinsi Jabar					Kab. Bandung	BAPPEDA
1 06	xx 16 04	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Pembangunan daerah terlaksana secara sinergis antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;	Pemerintah Kab. Bandung dengan Provinsi Jabar	1	1	Paket	150.000.000 150.000.000	Kab. Bandung	BAPPEDA
			Hasil penyusunan perencanaan yang baik dan dapat menjawab permasalahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat;	Pemerintah Kab. Bandung dengan Provinsi Jabar	1	1	Paket		Kab. Bandung	BAPPEDA
			Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif yang melibatkan seluruh pelaku pembangunan;	Pemerintah Kab. Bandung dengan Provinsi Jabar	1	1	Paket		Kab. Bandung	BAPPEDA
			Tersedianya data, informasi dan hasil perencanaan yang dapat di akses oleh komponen masyarakat.	Pemerintah Kab. Bandung dengan Provinsi Jabar	1	1	Paket		Kab. Bandung	BAPPEDA
1 06	xx 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Terwujudnya Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar						Kab. Bandung	BAPPEDA
1 06	xx 19 02	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan fisik serta terarah dan terpadunya program kegiatan sektor transportasi.	Masyarakat dan stakeholders transportasi	1	1	Dokumen	100.000.000 150.000.000	Kab. Bandung	BAPPEDA
1 06	xx 19 03	Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial	Terlaksananya koordinasi dan terintegrasinya penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung	Stakeholders dan masyarakat yang terkena bencana (Banjir, Gempa Bumi, Longsor dsb)	1	1	Dokumen	50.000.000 75.000.000	Kab. Bandung	BAPPEDA
1 06	xx 19 09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	- Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan. - Tersusunnya dokumen perencanaan berupa strategi sanitasi perkotaan (SSK)	Masyarakat, pengusaha, Konsultan, PDAM dan Stakeholders Air disektor air minum, drainase dan sanitasi	1	1	Dokumen	250.000.000 300.000.000	Kab. Bandung	BAPPEDA
1 06	xx 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait	Stakeholders dan pemangku kepentingan					Kab. Bandung	BAPPEDA
1 06	xx 21 06	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Terselenggaranya Musrenbang RPJMD 2011-2015	Stakeholders dan pemangku kepentingan	1	1	Dokumen	200.000.000	Kab. Bandung	BAPPEDA
1 06	xx 21 07	Penetapan RPJMD	Tersusunnya Raperda RPJMD 2011-2015	Stakeholders dan pemangku kepentingan	1	1	Dokumen	250.000.000	Kab. Bandung	BAPPEDA
1 06	xx 21 08	Penyusunan rancangan RKPD	Tersusunnya Rancangan Awal RKPD 2012	Stakeholders dan pemangku kepentingan	1	1	Dokumen	75.000.000 100.000.000	Kab. Bandung	BAPPEDA
1 06	xx 21 09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Tersusunnya Prioritas Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2012	Stakeholders dan pemangku kepentingan	1	1	Dokumen	400.000.000 500.000.000	Kab. Bandung	BAPPEDA
1 06	xx 21 10	Penetapan RKPD	Tersusunnya Perbub RKPD Tahun 2012	Stakeholders dan pemangku kepentingan	1	1	Dokumen	225.000.000 300.000.000	Kab. Bandung	BAPPEDA
			Tersusunnya KUA/PPAS Perubahan Tahun 2011	Stakeholders dan pemangku kepentingan	1	1	Dokumen		Kab. Bandung	BAPPEDA
			Tersusunnya KUA/PPAS Tahun 2012	Stakeholders dan pemangku kepentingan	1	1	Dokumen		Kab. Bandung	BAPPEDA
1 06	xx 21 12	Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Stakeholders dan pemangku kepentingan	150	150	Eks	150.000.000 200.000.000	Kab. Bandung	BAPPEDA
1 06	xx 21 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Tersusunnya daftar kegiatan per Kecamatan Kabupaten Bandung.	Stakeholders dan pemangku kepentingan	50	50	Eks	250.000.000 300.000.000	Kab. Bandung	BAPPEDA
			Tersusunnya laporan triwulanan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung.	Stakeholders dan pemangku kepentingan	60	60	Eks		Kab. Bandung	BAPPEDA
			Tersusunnya evaluasi pelaksanaan pembangunan	Stakeholders dan pemangku kepentingan	25	25	Eks		Kab. Bandung	BAPPEDA
			Tersusunnya Laporan Monitoring kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung.	Stakeholders dan pemangku kepentingan	20	20	Eks		Kab. Bandung	BAPPEDA

1	06	xx	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan perekonomian dari berbagai sektor (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan & energi, industri, perdagangan, pariwisata dan penanaman modal daerah) agar dapat bersinergi								Kab. Bandung	BAPPEDA
1	06	xx	22	03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Tersedianya grand design pengembangan ekonomi masyarakat	Pelaku ekonomi dan masyarakat	1	1	Dokumen	250.000.000	300.000.000		Kab. Bandung	BAPPEDA
1	06	xx	22	04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah, serta semakin terarahnya dan terpadunya program kegiatan pembangunan di Kab. Bdg.	SKPD lingkup bidang ekonomi	1	1	Dokumen	150.000.000	200.000.000		Kab. Bandung	BAPPEDA
1	06	xx	22	06	Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya program penanggulangan kemiskinan di Kab. Bandung	Masyarakat miskin dan dunia usaha	1	1	Dokumen	200.000.000	350.000.000		Kab. Bandung	BAPPEDA
1	06	xx	23		Program perencanaan sosial budaya	Tercapainya Kesepakatan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan sebagai bahan perencanaan pembangunan lingkup bidang sosial tahun 2011.	Stakeholders dan pemangku kepentingan							Kab. Bandung	BAPPEDA
1	06	xx	23	03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang sosial budaya dengan Stakeholders terkait, wilayah dan SKPD sehingga terarah terpadu program dan kegiatan dibawah koordinasi bidang perencanaan kesos dan pemerintahan.	Stakeholders dan pemangku kepentingan	1	1	Dokumen	600.000.000	700.000.000		Kab. Bandung	BAPPEDA
						Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Kabupaten, Provinsi dan Pusat.	Stakeholders dan pemangku kepentingan	1	1	Dokumen				Kab. Bandung	BAPPEDA
						Rumusan perencanaan bidang sosial yang aspiratif, transparan, obyektif dan akuntabel.	Stakeholders dan pemangku kepentingan	1	1	Dokumen				Kab. Bandung	BAPPEDA
1	06	xx	24		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Terlaksananya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam								Kab. Bandung	BAPPEDA
1	06	xx	24	04	Dst... (Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan kewilayahan)	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup.	Stakeholder dan masyarakat	1	1	Dokumen	200.000.000	300.000.000		Kab. Bandung	BAPPEDA
						Terlaksananya kegiatan Water Irigation and Recouces Management Project/WISMP	Masyarakat petani, dan staholders dibidang irigasi dan perijinan	1	1	Dokumen				Kab. Bandung	BAPPEDA
1	23				STATISTIK									Kab. Bandung	BAPPEDA
1	23	xx	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Meningkatnya kualitas data perstatistikan untuk menunjang perencanaan	Stakeholders dan pemangku kepentingan							Kab. Bandung	BAPPEDA
1	23	xx	15	02	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Tersusunnya Buku Data Sosial Ekonomi (SUSEDA) Kab. Bandung	Stakeholders dan pemangku kepentingan	1	1	Dokumen	850.000.000	900.000.000		Kab. Bandung	BAPPEDA
						Tersusunnya buku IPM Kab. Bandung	Stakeholders dan pemangku kepentingan	1	1	Dokumen				Kab. Bandung	BAPPEDA
						Tersusunnya buku Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA)	Stakeholders dan pemangku kepentingan	1	1	Dokumen				Kab. Bandung	BAPPEDA
						Tersusunnya Buku IKM Kabupaten Bandung.	Stakeholders dan pemangku kepentingan	1	1	Dokumen				Kab. Bandung	BAPPEDA
						Tersusunnya Buku IHK Kabupaten Bandung.	Stakeholders dan pemangku kepentingan	1	1	Dokumen				Kab. Bandung	BAPPEDA
1	23	xx	15	04	Pengolahan, updating dan analisis data PDRB	Tersusunnya Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten	Stakeholders dan pemangku kepentingan	1	1	Dokumen	300.000.000	350.000.000		Kab. Bandung	BAPPEDA
						Tersusunnya Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan	Stakeholders dan pemangku kepentingan	1	1	Dokumen				Kab. Bandung	BAPPEDA
Jumlah 16											5.950.000.000	6.525.000.000			

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD				
				TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012						
1	07	xx	15	PERHUBUNGAN										
1	07	xx	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan prasarana perhubungan dan ketertiban lalu lintas	- MAT - Dokumen Penilaian WTN - Rakorlintas - Pengetahuan pengemudi/pemilik Angkum - Lokasi terminal sewa - Buku Master Plan Lalu Lintas								
1	07	xx	15	01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Tersedianya Dokumen Matriks Perjalanan di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung (OD Survey)	Matriks Asal Tujuan (MAT)	1	-	Buku	332.500.000	-	Kab. Bandung	Dishub
1	07	xx	15	03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terlaksananya lomba Tertib Lalu Lintas Wahana Tata Nugraha (WTN) dan Tim Korlintas	- Dokumen Penilaian Lomba WTN - Rakorlintas	1	12	1 Buku Kali	50.000.000	50.000.000	Kab. Bandung	Dishub
1	07	xx	15	04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Terlaksananya sosialisasi Undang-undang No 22 tahun 2009 dan Kebijakan Bidang Perhubungan bagi pengemudi/pemilik kendaraan angkutan penumpang umum	- Pengemudi - Pemilik	234	156	- Orang Orang	100.000.000	-	Kab. Bandung	Dishub
1	07	xx	15	07	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Terlaksananya sewa lahan untuk terminal	Lokasi terminal sewa	10	10	Lokasi	190.160.000	22.000.000	Kab. Bandung	Dishub
1	07	xx	15	09	Dst. Master Plan Lalu Lintas	Dokumen Master Plan Lalu Lintas ruas jalan di wilayah Kabupaten Bandung	Buku Master Plan Lalu Lintas	1	-	Buku	350.000.000	-	Kab. Bandung	Dishub
1	07	xx	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terpeliharanya standar kualitas Prasarana dan Fasilitas LLAJ	- 12 Item alat PKB - 3 Terminal								
1	07	xx	16	01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat penguji kendaraan bermotor	Terlaksananya kalibrasi alat PKB	Item-item alat PKB	12	12	Item	150.000.000	170.000.000	Kab. Bandung	Dishub
1	07	xx	16	04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Terpeiharanya terminal	Terminal Cicalengka, Terminal Majalaya, Terminal Banjaran	3	3	Terminal	142.500.000	120.000.000	Kab. Bandung	Dishub
1	07	xx	17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Peningkatan pelayanan dan kedisiplinan pengguna lalu lintas dan angkutan jalan	- PAM Lalin - Penyuluhan Siswa 6 SLTP/SLTA - Buku Evaluasi Jaringan Trayek								
1	07	xx	17	04	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Tersedianya peralatan perbengkelan	Kendaraan Wajib Uji	1	0	Paket	50.000.000	750.000.000	Kab. Bandung	Dishub
1	07	xx	17	05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Terlaksananya PAM Lalu Lintas Rutin, Lebaran, dan Tahun Baru	PAM Lalu Lintas di 7 Pos	7	7	Lokasi	600.000.000	750.000.000	Kab. Bandung	Dishub
1	07	xx	17	02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Terlaksananya penyuluhan tertib lalu lintas dan angkutan bagi siswa SLTP/SLTA	- Siswa 3 Sekolah SLTP - Siswa 3 Sekolah SLTA	120	120	120 Orang 120 Orang	97.500.000	75.000.000	Kab. Bandung	Dishub
1	07	xx	17	11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Tersedianya dokumen evaluasi jaringan trayek existing dan usulan jaringan trayek baru di seluruh wilayah Kabupaten Bandung	Buku evaluasi jaringan trayek existing dan usulan jaringan trayek baru	1	0	Buku	150.000.000	-	Kab. Bandung	Dishub
1	07	xx	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Peningkatan pembangunan prasarana terminal	- Dokumen Perkiraan Harga Lahan Terminal Soreang - Lahan Terminal Soreang								
1	07	xx	18	01	Pembangunan gedung terminal	Pembebasan lahan untuk terminal Soreang	- Dokumen Perkiraan Harga Lahan Terminal Soreang - Lahan Terminal Soreang	1	5000	- Dokumen m2	5.100.000.000	-	Kab. Bandung	Dishub
1	07	xx	19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Peningkatan pembangunan fasilitas dan perlengkapan LLAJ	- Rambu Portabel, Rambu Lalu Lintas, RPPJ, GuardRail, Countdown, Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas - Marka Jalan								
1	07	xx	19	01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Tersedianya Rambu Portable, Terpasangnya Rambu Lalu Lintas, RPPJ, Guardrail, Countdown dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Existing	- Rambu Portabel - Rambu Lalu Lintas - RPPJ - GuardRail	40 60 10 100 4 100	60	- Buah - Buah - Buah - Buah - Buah	366.000.000	250.000.000	Kab. Bandung	Dishub
1	07	xx	19	02	Pengadaan marka jalan	Terpasangnya marka jalan di ruas jalan di wilayah Kabupaten Bandung	Marka Jalan	800	1500	m2	125.000.000	250.000.000	Kab. Bandung	Dishub
1	25	xx	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pengembangan sistem informasi dan database perhubungan	- Database penyelenggara Radio dan Warnet - Sistem informasi data base pelayanan PKB							Kab. Bandung	Dishub
1	25	xx	15	02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Tersedianya database penyelenggaraan Radio dan Warnet di wilayah Kabupaten Bandung	Data penyelenggara Radio dan Warnet di wilayah Kabupaten Bandung	1	0	Buku	40.000.000	-	Kab. Bandung	Dishub
1	25	xx	15	06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Tersedianya sistem informasi data base dan pelayanan pelayanan PKB	Sistem informasi data base pelayanan PKB	1	1	Paket	90.000.000	155.000.000	Kab. Bandung	Dishub
Jumlah 17											7.933.660.000	2.592.000.000		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD

: BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING				URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD	
1	08						TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012			
1	08	xx	16	LINGKUNGAN HIDUP										
1	08	xx	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Terseleenggaranya Koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan								
1	08	xx	16	01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Meningkatnya peran serta Stake holder dalam penanganan kota sehat/adipura	Terseleenggaranya Koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program Adipura Kota Soreang	1	1	Sosialisasi dan koordinasi	100.000.000	250.000.000	Kab. Bandung	BPLH
1	08	xx	16	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Pemantauan lingkungan pada 150 industri, 11 RS/puskesmas, 10RPH/peternakan, 10 agroindustri, 3 hotel, 1 tambang, 2 TPA, 70 lokasi pengambilan air sungai, 4 lokasi pengujian ambien udara dan pengujian kualitas limbah B3	- Tersusunnya rekomendasi pengendalian pencemaran lingkungan untuk sektor kota/kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat; Meningkatnya pemenuhan kewajiban para penanggung jawab kegiatan/usah	- 150 - 11 - 10 - 10 - 3 - 1 - 2 - 70 - 4	- 150 - 11 - 10 - 10 - 3 - 1 - 2 - 70 - 4	- Industri - Rs/Puskesmas - RPH/Peternakan - Agroindustri - Hotel - Tambang - TPA - Sungai - Lok	750.000.000	1.000.000.000	Kab. Bandung	BPLH
1	08	xx	16	03	Evaluasi IPAL Cisirung	Meningkatnya kinerja IPAL Cisirung	Tersusunnya rekomendasi untuk peningkatan kinerja IPAL Cisirung	1	1	paket	200.000.000	350.000.000	Kab. Bandung	BPLH
1	08	xx	16	04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	- Tersusunnya Draft Raperda; Terlaksananya operasi penerbitan pengelolaan lingkungan Terlaksananya pengandaan dokumen pengelolaan lingkungan	- 1 - 5 - 20 - 3	- 1 - 5 - 20 - 3	- Raperda - Dok Penerbitan - Dok.Pengelolaan lingkungan - Dok penyidikan	100.000.000	250.000.000	Kab. Bandung	BPLH
1	08	xx	16	07	Pengkajian dampak lingkungan	Penyusunan KLHS	Terlaksananya penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bandung	1	-	Dokumen KLHS	350.000.000		Kab. Bandung	BPLH
1	08	xx	16	11	Pengembangan produksi ramah lingkungan	Pembinaan sertifikasi manajemen lingkungan dan sosialisasi produksi bersih serta teknologi tepat guna	Terseleenggaranya penerapan produksi bersih pada industri dan IKM/cluster. Terlaksananya model penerapan Program Produksi Bersih di Industri dan IKM/cluster	- 4 - 4 - 1	- 6 - 4 - 2	- Industri - SKPD terkait Cluster IKM	75.000.000	200.000.000	Kab. Bandung	BPLH
1	08	xx	16	14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Meningkatnya pemahaman pengelolaan lingkungan pada Guru dan siswa sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama dan masyarakat	Terseleenggaranya : Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) - Pengusulan penilaian SBL - Adiwiyata	- 4 2 - 1	- 6 2 - 1	- Sekolah - Sekolah - kegiatan	75.000.000	250.000.000	Kab. Bandung	BPLH
1	08	xx	16	16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pemantauan kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL	Terlaksananya pemantauan kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL	100	125	perusahaan	50.000.000	150.000.000	Kab. Bandung	BPLH
1	08	xx	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Sosialisasi penanganan kerusakan hutan, lahan, koservasi air dan kampanye lingkungan	Masyarakat dan para pemangku kepentingan								
1	08	xx	17	06	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Sosialisasi penanganan kerusakan hutan dan lahan	Terseleenggaranya : Sosialisasi pengendalian kerusakan hutan dan lahan	- 1	1	kegiatan dengan peserta 75 orang	50.000.000	150.000.000	Kab. Bandung	BPLH
1	08	xx	17	07	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	Sosialisasi konservasi air dan terlaksananya kampanye lingkungan	Terseleenggaranya : Sosialisasi biopori Pembersihan sungai	- 1 - 3	- 1 - 3	- sosialisasi - kegiatan pembersihan sungai	75.000.000	400.000.000	Kab. Bandung	BPLH
1	08	xx	17	08	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	Meningkatnya kualitas lingkungan	Tersusunnya laporan Program Menuju Indonesia Hijau (MIH)	- 1	- 1	kegiatan/ dokumen	150.000.000	200.000.000	Kab. Bandung	BPLH
1	08	xx	17	10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Meningkatnya perlindungan keanekaragaman hayati	Terseleenggaranya pembuatan demplot keanekaragaman hayati	- 1	- 1	kegiatan	50.000.000	150.000.000	Kab. Bandung	BPLH
1	08	xx	17	14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	meningkatkan peran serta masyarakat dalam konservasi SDA	- Terselenggaranya bantuan untuk kegiatan P2WKSS,TMMD, BSSS, Posyandu, Bulan Bhakti Gotong Royong; Kampanye lingkungan Balad Kuring - Peringatan Hari LH	- 1	- 1	kegiatan	100.000.000	200.000.000	Kab. Bandung	BPLH

1	08	xx	19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas dan akses informasi pengendalian pencemaran lingkungan	Tersedianya data, informasi dan dokumentasi kondisi/status lingkungan di Kabupaten Bandung							
1	08	xx	19	02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Meningkatnya kualitas dan akses informasi pengendalian pencemaran lingkungan	- Tersedianya buku Status Lingkungan Hidup (SLH) Kabupaten Bandung yang berisi data, informasi dan dokumentasi kondisi/status lingkungan untuk seluruh stakeholder di Kabupaten Bandung dan Basis Data; - Terbangunnya sist	- 20	- 20	Dokumen/buku (10 buku SLH dan 10 buku basis data)	200.000.000	350.000.000	Kab. Bandung	BPLH
1	08	xx	20		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pengendalian pencemaran lingkungan								
1	08	xx	20	02	Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	Tersedianya data kualitas udara ambien di lokasi industri sebagai bahan pengambilan kebijakan pengolahan kualitas udara	- 1	- 1	kegiatan (10 titik pengujian sampel)	200.000.000	180.000.000	Kab. Bandung	BPLH
1	08	xx	20	03	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Meningkatnya kualitas pemantauan dan pengujian limbah padat dan cair.	Tersedianya laporan hasil pengujian sampel kualitas air dan limbah padat	- 1	- 1	kegiatan (325 sampel)	400.000.000	800.000.000	Kab. Bandung	BPLH
1	08	xx	20	04	Pembangunan tempat pembuangan limbah padat/cair yang menimbulkan polusi	menurunkan tingkat pencemaran air sungai Citarum dari sumber RPH domestik dan industri	Terbangunnya demplot pengolahan air limbah domestik, RPH dan industri kecil	- 3	-	Unit	600.000.000		Kab. Bandung	BPLH
1	08	xx	20	05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pengendalian pencemaran lingkungan		- 6	- 6	kegiatan (500 peserta)	100.000.000	100.000.000	Kab. Bandung	BPLH
1	08	xx	20	07	Pengadaan mobil laboratorium	Meningkatnya mobilitas dalam pengujian sampel di lapangan	Tersedianya sarana kendaraan dan alat untuk pengambilan sampel, penanganan sampel dan pengujian parameter lapangan (ph, suhu, DO, SO2, NO2 dan O3)	- 1	- 1	unit kendaraan (mobil lab+sarana prasarana)	300.000.000		Kab. Bandung	BPLH
Jumlah 18											3.925.000.000	4.980.000.000		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD

: BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERJINAN

KODE REKENING				URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD
1	16						TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012		
1	16			PENANAMAN MODAL									BPMP
1	16	xx	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi									BPMP
1	16	xx	15	01 Kegiatan peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah	Output : Naskah kesepakatan dan kerjasama antara pengusaha KUKM dengan pengusaha besar, kecil dan menengah OutCome : Terjalainya kemitraan antara pengusaha besar, menengah dan kecil dalam peningkatan kapasitas usaha investasi	Pengusaha besar, menengah, kecil dan investor	- Kelompok 5 buah, KUKM 10 buah -5 Pengusaha besar, menengah dan kecil	Kelompok 5 buah, KUKM 10 buah 5 Pengusaha besar, menengah dan kecil	1 kali	150.000.000	165.000.000	Kabupaten Bandung	BPMP
1	16	xx	15	03 Kegiatan pengembangan basis data penanaman modal daerah dan perjinan.	Output :	100PMA, 100 PMDN dan Non 100 PMA/PMDN.	100 PMA, 100 PMDN dan Non 100 PMA/PMDN.	100 PMA, 100 PMDN dan Non 100 PMA/PMDN.	1 kali	150.000.000	192.500.000	Kabupaten Bandung	BPMP
1	16	xx	15	06 Kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Output :	Aparatur penanaman modal (Pemerintah) dan dunia usaha (investor dan masyarakat)	5 FS	5 FS	5 kali	150.000.000	165.000.000	Kabupaten Bandung	BPMP
1	16	xx	15	08 Kegiatan peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Output :	Perusahaan PMA, PMDN yang telah berproduksi secara komersial	100 PMA, 100 PMDN, 100 Non PMA/PMDN	100 PMA, 100 PMDN, 100 Non PMA/PMDN	1 kali	100.000.000	165.000.000	Kabupaten Bandung	BPMP
1	16	xx	15	09 Kegiatan peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Output :	SDM Aparatur penyelenggara pelayanan perjinan (PPTSP).	Aparatur BPMP	Aparatur BPMP	30 orang	150.000.000	165.000.000	Kabupaten Bandung	BPMP
1	16	xx	15	10 Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi.	Output :	Calon investor dalam dan luar negeri.	Calon investor dalam dan luar negeri.	Calon investor dalam dan luar negeri.	5 kali event promosi.	600.000.000	715.000.000	Dalam dan Luar Negeri.	BPMP
1	16	xx	15	11 Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.	Output : Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan 5 buah perjinan di PPTSP (SITU, SIUP, TDP, IMB DAN Reklame). Outcome :	Masyarakat di lingkup 31 kecamatan.	Masyarakat di lingkup 31 kecamatan.	Masyarakat di lingkup 31 kecamatan.	31 kali	150.000.000	165.000.000	Kabupaten Bandung	BPMP
1	16	xx	15	12 Dst... (Kegiatan seminar potensi peluang investasi bidang usaha kecamatan).	Output :	31 kecamatan @ 2 orang pelaku usaha.	31 kecamatan @ 2 orang pelaku usaha.	31 kecamatan @ 2 orang pelaku usaha.	31 kali	120.000.000	198.000.000	Kabupaten Bandung	BPMP
1	16	xx	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.									BPMP
1	16	xx	16	01 Kegiatan penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur.	Output :	Raperda/Perda yang terkait dengan perjinan dan penanaman modal.	Raperda/Perda yang terkait dengan perjinan dan penanaman modal.	Raperda/Perda yang terkait dengan perjinan dan penanaman modal.	5 buah Raperda	145.000.000	159.500.000	Kabupaten Bandung	BPMP
1	16	xx	16	03 Kegiatan penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal	Output :	Aspek legal formal rencana induk pengembangan investasi dan penanaman modal di Kab. Bandung.	Aspek legal formal rencana induk pengembangan investasi dan penanaman modal di Kab. Bandung.	Aspek legal formal rencana induk pengembangan investasi dan penanaman modal di Kab. Bandung.	1 kali	260.000.000	302.500.000	Kabupaten Bandung	BPMP
Jumlah 19										1.975.000.000	2.392.500.000		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD

: DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING				URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD	
1	18	xx	16				TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012			
1	18	xx	16	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
1	18	xx	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				Usia Remaja 16 - 30 Tahun						
1	18	xx	16	01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terbinanya organisasi kepemudaan	Meningkatnya keterampilan dan kemampuan generasi muda dan anggota Marching Band	155	155	orang	150.000.000	180.000.000	Kab. Bandung	Dispopar
1	18	xx	16	04	Fasilitas pekan temu wicara organisasi pemuda	Terfasilitasinya koordinasi antar organisasi pemuda	Meningkatnya wawasan organisasi kepemudaan	200	200	orang	40.000.000	48.000.000	Kab. Bandung	Dispopar
1	18	xx	16	05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Terlaksananya penyuluhan dan pencegahan narkoba	Generasi muda	500	500	orang	50.000.000	60.000.000	Kab. Bandung	Dispopar
1	18	xx	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga										
1	18	xx	20	01	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam bidang olahraga	Terlaksananya identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam bidang olahraga	Terlaksananya kompetisi olahraga antar pelahar	100	100	Atlet	150.000.000	180.000.000	Kab. Bandung	Dispopar
1	18	xx	20	05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Terlaksananya olahraga gerakan jalan dan rekreasi	PNS, Generasi Muda dan Masyarakat	3000	3000	Orang	100.000.000	120.000.000	Kab. Bandung	Dispopar
1	18	xx	20	06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terlaksananya kompetisi olahraga antar pelahar	Atlet pelajar	100	100	Pelajar	250.000.000	300.000.000	Kab. Bandung	Dispopar
1	18	xx	20	17	Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya	Terlaksananya pembinaan olahragawan/ atlet berbakat dan berprestasi	Guru Olahraga	65	65	Orang	100.000.000	120.000.000	Kab. Bandung	Dispopar
1	18	xx	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga										
1	18	xx	21	02	Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga	Pembebasan lahan	Sarana Olahraga Stadion Si Jalak Harupat	1	1	Paket	3.000.000.000	5.000.000.000	Kab. Bandung	Dispopar
1	18	xx	21	05	Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya E.Sport (Website) olahraga di Kabupaten Bandung	Para atlet dan organisasi keolahragaan	1	1	Paket	50.000.000	60.000.000	Kab. Bandung	Dispopar
1	18	xx	21	07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	Sarana dan prasarana Stadion Si Jalak Harupat	12	12	bin	750.000.000	900.000.000	Kab. Bandung	Dispopar
2	04			PARIWISATA										
2	04	xx	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata										
2	04	xx	15	03	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Terlaksananya pasangiri moka tingkat Kabupaten dan Provinsi	Pelajar smu dan Perguruan Tinggi se- Kabupaten Bandung, Kompepar se- Kabupaten Bandung	1	1	kali	160.000.000	192.000.000	Kab. Bandung	Dispopar
2	04	xx	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata										
2	04	xx	16	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Pembangunan sarana parkir dan pintu gerbang papan reklame objek wisata,	Obyek Data Tarik Wisata (ODTW)	1	1	Unit	300.000.000	360.000.000	Cimencyan, Balendah, Ciwidey, Pangalengan	Dispopar
2	04	xx	16	06	Pengembangan daerah tujuan wisata	Penataan Lahan Parkir Taman Wisata Gunung Puntang	Obyek Data Tarik Wisata (ODTW), Kompepar, Hotel Restoran dan Jasa Usaha Pariwisata.	1	1	Paket	400.000.000	480.000.000	Cimaung	Dispopar
						Sarana Prasarana Bumi Perkemahan Pakusorok		1	1	Paket			Arjasari	Dispopar
2	04	xx	16	07	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Terlaksananya Gebyar Objek Wisata Situ Patengan, Situ Cileunca, Rancabali fair	Obyek Data Tarik Wisata (ODTW), Kompepar, Hotel Restoran dan Jasa Usaha Pariwisata.	3	3	Lokasi	100.000.000	120.000.000	Rancabali, Ciwidey, Pangalengan	Dispopar
2	04	xx	16	03	Pengembangan jenis dan Paket wisata unggulan	Terlaksananya Event-event pameran baik di dalam maupun diluar Kab. Bandung.	Obyek Data Tarik Wisata (ODTW), Kompepar, Hotel Restoran dan Jasa Usaha Pariwisata.	3	3	kali	250.000.000	300.000.000	Kab. Bandung, Kota Bnadung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Batam	Dispopar
2	04	xx	17	Program Pengembangan Kemitraan										
2	04	xx	17	01	Pengembangan dan penguatan,informasi dan database	Tersusunnya data base potensi objek wisata, aset fisik wisata, jumlah kunjungan serta jumlah sarpras wisata lainnya, serta daya dukung pariwisata lainnya	Kompepar, PHRI dan Jasa Usaha Pariwisata	1	1	kali	150.000.000	180.000.000	Cimencyan, Balendah, Ciwidey, Pangalengan, Paseh, Nagreg, Rancabali,Margaasih	Dispopar
2	04	xx	17	03	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Terbangunnya pembinaan dan kemitraan masyarakat desa wisata serta sistem kemitraan terpadu diantara stakeholders pariwisata daerah melalui koordinasi intensif lintas sektoral dan asosiasi (Sinergitas PNPM Pariwisata)	Kompepar, PHRI dan Jasa Usaha Pariwisata	1	1	kali	75.000.000	90.000.000	Cicalengka, Ciwidey, Rancabali, Pangalengan, Baleendah	Dispopar
2	04	xx	17	09	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Tersedianya data hasil money dan pelaporan data wisata, serta hasil kajian akademis tentang pengembangan pariwisata daerah, review perda pariwisata	Kompepar, PHRI dan Jasa Usaha Pariwisata	2	2	kali	75.000.000	90.000.000	Cimencyan, Balendah, Ciwidey, Pangalengan, Paseh, Nagreg, Rancabali,Margaasih	Dispopar
				Jumlah 20							6.150.000.000	8.780.000.000		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD

: KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE REKENING				URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD
							TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012		
1	19			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI									
1	19	xx	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terwujudnya situasi yang kondusif di wilayah Kab. Bandung	Anggota Satlinmas							
1	19	xx	15	01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terbinanya anggota Satlinmas Desa/Kel periode siap.	Anggota Satlinmas	5520	8280	orang	3.974.400.000	5.961.600.000	Kab. Bandung	Kesbanglinmas
1	19	xx	15	03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terbina anggota satlinmas dalam pengendalian keamanan	Anggota Satlinmas	400	500	orang	144.184.000	180.230.000	Kab. Bandung	Kesbanglinmas
1	19	xx	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terwujudnya situasi yang kondusif di wilayah Kab. Bandung	Aparat, Anggota Linmas dan Masyarakat							
1	19	xx	16	02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Terselenggaranya analisa potensi komplk	Aparat instansi vertikal	30	30	Orang	150.000.000	216.000.000	Kab. Bandung	Kesbanglinmas
1	19	xx	15	04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Terbinanya anggota Satlinmas dalam siskamswakarsa	Anggota Satlinmas	200	300	Orang	75.000.000	120.000.000	Kab. Bandung	Kesbanglinmas
1	19	xx	15	06 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terselenggaranya kewaspadaan dini di masyarakat	Masyarakat Kabupaten Bandung	31	31	kecamatan	50.000.000	186.000.000	Kab. Bandung	Kesbanglinmas
1	19	xx	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terpeliharanya kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara	Aparat, tokoh agama dan masyarakat							
1	19	xx	17	01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya pasilitas peningkatan kerukunan hidup beragama	Tokoh agama dan masyarakat	20	20	Org	100.000.000	168.000.000	Kab. Bandung	Kesbanglinmas
1	19	xx	17	03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya analisa potensi komplk	Aparat terkait	20	20	orang	75.000.000	168.000.000	Kab. Bandung	Kesbanglinmas
1	19	xx	17	04 Pemantauan kegiatan orang asing tenaga kerja asing NGO dan lembaga asing	Terselenggaranya analisa data orang asing/tenaga kerj asing dan lembaga asing yang berada di Kab. Bandung	Pendataan orang asing/tenaga kerja asing, NGO dan lembaga asing	500	600	orang	75.000.000	180.000.000	Kab. Bandung	Kesbanglinmas
1	19	xx	21	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat di Kab. Bandung	LSM, Ormas, dan Anggota parpol							
1	19	xx	21	03 koordinasi forum-forum diskusi politik	Terlaksananya pendidikan politik	LSM, Ormas, dan Anggota parpol	200	310	Orang	150.000.000	232.500.000	Kab. Bandung	Kesbanglinmas
1	19	xx	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Meningkatnya keterampilan anggota linmas dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam	Anggota Satlinmas							
1	19	xx	22	01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penanganan bencana	Hasip/Linmas	300	400	Orang	100.000.000	160.000.000	Kab. Bandung	Kesbanglinmas
				Jumlah 21						4.893.584.000	7.572.330.000		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING				URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD
							TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012		
1	19			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI									
1	19	xx	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan									
1	19	xx	15	01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelaksanaan Operasi Ketentraman dan ketertiban umum	Masyarakat/perorangan	500	500	orang	750.000.000	900.000.000	Kab. Bandung	Satpol PP
1	19	xx	15	03 Meningkatkan kemampuan teknis Satpol PP	- Pelaksanaan Pelatihan Satpol PP - Pelaksanaan Penyuluhan bagi masyarakat	Anggota Satpol Masyarakat	50 50	50 50	orang	150.000.000	180.000.000	Kab. Bandung	Satpol PP
1	19	xx	15	05 pengendalian keamanan lingkungan	- Pelaksanaan Operasi GDD terhadap Aparatur - Pelaksanaan Juklak Satpol PP - Pelaksanaan Razia dan penyidikan pemeriksaan terhadap pelanggaran perda dan pembongkaran bangunan liar - Operasi Tipiring	Aparatu dan masyarakat	500 150 600	500 150 600	Orang Buku	1.680.000.000	2.952.000.000	Kab. Bandung	Satpol PP
1	19	xx	15	06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Satpol PP.	Hasil Kegiatan	14	14	Pelaporan	100.000.000	120.000.000	Kab. Bandung	Satpol PP
1	19	xx	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal									
1	19	xx	16	02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	-Melaksanakan pengamanan Bangunan Vital Milik Pemda dan Rumah Dinas Pimpinan Daerah - Melaksanakan acara protokolier pipinan nasional, pejabat pusat dan tamu negara serta pejalanan pimpinan daerah - Pelaksanaan Hut Satpol PP	- Bangunan Pejabat Anggota Satpol PP	365 60 1	365 60 1	Hari Orang Kali	735.600.000	882.720.000	Kab. Bandung	Satpol PP
1	19	xx	20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)									
1	19	xx	20	01 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Pelaksanaan Penyuluhan Miras dan Narkoba bagi Siswa SMA dan SMK	Siswa/ SMA/SMK	100	100	Orang	100.000.000	120.000.000	Kab. Bandung	Satpol PP
				Jumlah 22						3.515.600.000	5.154.720.000		

Matriks Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2011

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

1	20	xx	16	KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD
								TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012		
					OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN									
1	20	xx	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah									
1	20	xx	16	01	Dialog/audensi dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial						80.870.000		Kab. Bandung	Setda/Bagsos
1	20	xx	16	02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri						530.670.000		Kab. Bandung	Setda/Humas
1	20	xx	16	03	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA						98.420.000		Kab. Bandung	Setda/Humas
1	20	xx	16	03	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	Terlaksananya koordinasi unsur muspida sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintah	Muspida	12	12	Kali	100.000.000	150.000.000	Kab. Bandung	Setda/Pemum
1	20	xx	16	04	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah						212.660.000		Kab. Bandung	Setda/Humas
1	20	xx	16	05	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah						139.510.000		Kab. Bandung	Setda/Humas
1	20	xx	16	06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya						271.320.000		Kab. Bandung	Setda/Humas
1	20	xx	17		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah									
1	20	xx	17	02	penyusunan standar satuan harga	Petunjuk teknis dan Standar harga satuan barang/jasa	Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA.	750	750	buku	225.000.000	225.000.000	Kab. Bandung	Setda/Pembangunan
1	20	xx	17	02	penyusunan standar satuan harga	- Mendorong terlaksananya kegiatan sertifikasi bagi pengguna dan panitia penyedia barang / jasa serta mendorong tertib administrasi pelelangan pada SKPD (Procurement unit/ULB dan e procurement unit)	Terbentuknya unit LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik)	1	1	Unit	300.000.000	300.000.000	Kab. Bandung	Setda/Pembangunan
1	20	xx	17	06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Terlaksananya pelaksanaan penyusunan, penganalisaan, pemeriksaan dan pengkajian terhadap pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan, tugas, fungsi, potensi dan beban pelaksanaan tugas pada: Dikbud, Dispopar, Kecamatan, Kelurahan Satpol PP, Kesbang Pilinmas, BPMP, Diskoperindag, DPPK, Setda.	10	10	Dokumen	400.000.000	450.000.000	Kab. Bandung	Setda/Organisasi
1	20	xx	17	16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	- Pengembangan Manajemen/Aset - SIMDA Barang - Penyelesaian masalah aset Pemda Kab Bandung Di kec. Baleendah	SKPD terkait	78	78	SKPD	1.315.000.000	1.500.000.000	Kab. Bandung	Setda/Aset
1	20	xx	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH									
1	20	xx	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Tokoh Masyarakat Organisasi kemasyarakatan Organisasi Propsi Organisasi sosial lainnya					256.450.000		Kab. Bandung	Setda/Bagsos
1	20	xx	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (Fasilitas Penanganan Bencana dan Paska Bencana (Aparat Kecamatan Tokoh Masyarakat Organisasi Masyarakat dan Unsur Desa)					46.500.000		Kab. Bandung	Setda/Bagsos
1	20	xx	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (Bimbingan hidup beragama (Ulama Umuro, Kader Pontren, Mesjid dan sebagainya)					421.450.000		Kab. Bandung	Setda/Bagsos
1	20	xx	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Workshop Pembuatan Data Base Lembaga Ke agamaan (Mesjid, Pontren, MD, MTS, MI dan MA)					100.000.000		Kab. Bandung	Setda/Bagsos
1	20	xx	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (BUMD)	Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan BUMD					300.000.000		Kab. Bandung	Setda/Perek
1	20	xx	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Sarpras Ekonomi Daerah)	Fasilitasi dan Koordinasi Sarana Prasarana Perekonomian Daerah					250.000.000		Kab. Bandung	Setda/Perek
1	20	xx	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Koordinasi Bantuan)	Fasilitasi dan Koordinasi Bantuan					200.000.000		Kab. Bandung	Setda/Perek

1	20	xx	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Promosi Produk Unggulan)	Fasilitasi dan Koordinasi Distribusi Promosi Produk Unggulan Daerah					200.000.000			Kab. Bandung	Setda/Perek	
1	20	xx	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Fasilitasi Penyaluran Bantuan)	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan pada Masyarakat					200.000.000			Kab. Bandung	Setda/Perek	
1	20	xx	20	09	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kec./Kelurahan Penataan Perangkat Daerah)	- Pengelolaan SDM Aparatur Perangkat Daerah -Kec/Kel -Koordinasi dan konsultasi dengan Pemda Lainnya	80 31 2	80 31 2	Orang Kec/Kel Kab	375.000.000	400.000.000		Kab. Bandung	Setda/Pemum	
1	20	xx	20	09	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terusunnya laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, ILPPD dan EKPPD	Aparatur		1	1	Dokumen	263.000.000	300.000.000		Kab. Bandung	Setda/Pemum
1	20	xx	20	09	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terfasilitasinya kerjasama daerah dengan Kab/Kota yang berbatasab dab Pihak ketiga	- Fasilitasi kerjasama dengan daerah berbatasan dan Pihak Ketig - Sosialisasi Perundangan-undangan kerjasama daerah	2 80	2 80	Kab Orang	250.000.000	300.000.000		Kab. Bandung	Setda/Pemum	
1	20	xx	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan											
1	20	xx	26	01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Tersebaiknya perkara-perkara hukum dari tingkat pertama sampai dengan kasasi	aparatur pada pemerintah kabupaten bandung yang terkait dengan perkara	12	15	perkara	150.000.000	250.000.000		Kab. Bandung	Setda/Hukum	
						Terlindungnya hak-hak hukum aparatus sesuai ketentuan	aparatur pada pemerintah kabupaten bandung yang terkait dengan perkara	7	7	orang				Kab. Bandung	Setda/Hukum	
						Terlaksananya konsultasi hukum	aparatur dan masyarakat	1	1	paket				Kab. Bandung	Setda/Hukum	
						Tersebaiknya legal opinion	permasalahan/ kasus yang memerlukan kajian	12	16	legal opinion				Kab. Bandung	Setda/Hukum	
1	20	xx	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Terusunnya rancangan peraturan tentang TP-PNS	1	1	Perbup	400.000.000	450.000.000		Kab. Bandung	Setda/Organisasi	
1	20	xx	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Terbentuknya produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bersifat aspiratif dan akomodatif	SKPD	15 20 350 10 10 7	15 20 400 10 10 7	Perda Perbup Kepbup Perjanjian MoU Orang	374.000.000	500.000.000		Kab. Bandung	Setda/Hukum	
1	20	xx	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Terusunnya Raperda tlg Pamekaran Kelurahan Cibeunyi Kec. Cimenyan	Kel Cibeunyi Kec. Cimenyan	1	1	Raperda	100.000.000	200.000.000		Kab. Bandung	Setda/Otda	
1	20	xx	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Terusunnya Raperda Hasil Kajian Penataan Ds. Citaman dan Desa Nagreg Kec. Nagreg	Ds. Citaman dan Nagreg	1	1	Raperda	100.000.000	200.000.000		Kab. Bandung	Setda/Otda	
1	20	xx	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	- Memfasilitasi dan mendorong peningkatan pemahaman peraturan - peraturan yang menyangkut pelaksanaan pengadaan barang / jasa. (Pembinaan Jasa Konstruksi dan pengadaan barang/jasa lainnya).	SKPD terkait	300	450	buku	75.000.000	75.000.000		Kab. Bandung	Setda/Pembangunan	
1	20	xx	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	- Mendorong terlaksana peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan Pembangunan. (Monitoring Pekerjaan)	Kegiatan yang ada di SKPD	500	500	Paket Kegiatan	150.000.000	150.000.000		Kab. Bandung	Setda/Pembangunan	
1	20	xx	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	- Memfasilitasi penerbitan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan & mendorong meningkatkan pelayanan administrasi kegiatan pembangunan lainnya. (Evaluasi dan Pelaporan)	Kegiatan yang ada di SKPD khusus Bangub	100	100	Paket Kegiatan	100.000.000	100.000.000		Kab. Bandung	Setda/Pembangunan	
1	20	xx	26	03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Tersedianya data base produk hukum, Perda dan Perbup yang diperlukan maupun sudah tidak relevan sehing perlu revisi hasil inventarisasi produk hukum daerah	SKPD	7 25		Orang buku	21.850.000	35.000.000		Kab. Bandung	Setda/Hukum	
1	20	xx	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersosialisasikannya Perbup tentang Naskah Dinas dan TP-PNS	400	400	Orang	200.000.000	250.000.000		Kab. Bandung	Setda/Organisasi	
1	20	xx	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya kodifikasi produk hukum pusat dan daerah seperti Perda, Perbup, Kepbup, Warta Pusat dan Perjanjian/Mou	aparatur dan masyarakat	13 600 200 400 200 50 400		Orang Kodifikasi Perda Kodifikasi Perbup Kodifikasi Kepbup Kodifikasi Warta Pst Buku MoU/Perjan. Buku penerbitan berkas asli Kepbup.	175.980.000	425.980.000		Kab. Bandung	Setda/Hukum	

1	20	xx	26	06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan	a. Tersusunnya Perbup ttg: 1) SPM Bid. Lingkungan Hidup, Adm Pmerintahan, dan Bid Sos; 2) Fasilitas Penyusunan SOP; 3) Terpenuhinya kinerja pemerintahan daerah melalui Citra Bhakti Abdi Negara. b. Tersusunnya penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah pada: 1) Satpol PP; 2) Kesbangpolinmas; 3) Dinsosdukcasip; 4) BKBP; 5) DPPK; 6) Setda. c. Tersusunnya penataan uraian tugas jabatan pada: 1) Dinsosdukcasip; 2) BKBP; 3) SDAPE; 4) Distanbunhut; 5) Disnakan; 6) BKP3.	2 1 4 4	2 1 4 4	Perbub Dokumen Perda Perbup	600.000.000	650.000.000	Kab. Bandung	Setda/Organisasi	
						Terlaksananya sosialisasi produk hukum bagi aparat dan masyarakat di 4 desa di wilayah Kab. Bandung.	Aparat dan masyarakat		400	orang					
						Terlaksananya diseminasi ranham dan pengukuhan ranhan	Aparat dan masyarakat		120	Orang					
1	20	xx	26	06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Terlaksananya pengkajian terhadap produk hukum lama yang disesuaikan dengan ketentuan yang baru.	Aparat dan masyarakat		15 20	Perda Perbup	128.470.000	200.000.000	Kab. Bandung	Setda/Hukum	
						Terciptanya sistem dan mekanisme pemerintahan yang baik berdasarkan kebijakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.	Aparat dan masyarakat								
1	20	xx	26	06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Tersusunnya laporan hasil evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah (EKOPOD) di Kabupaten Bandung	SKPD terkait		1	1	Laporan	100.000.000	150.000.000	Kab. Bandung	Setda/Otda
1	20	xx	26	06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Tersusunnya evaluasi Juklak-Juknis Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat	SKPD terkait		1	1	Paket	100.000.000	150.000.000	Kab. Bandung	Setda/Otda
1	20	xx	26	06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Tersusunnya evaluasi Kepbup pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat	Kecamatan		31	31	Kec	100.000.000	150.000.000	Kab. Bandung	Setda/Otda
1	20	xx	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru										
1	20	xx	27	03	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Pemetaan titik-titik batas Kab. Babdubg dan pengesahan melalui Permendagri tentang penegasan batas daerah	Penegasan batas daerah Kab bandung		1	1	Dokumen	300.000.000	350.000.000	Kab. Bandung	Setda/Pemum
1	20	xx	27	03	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Pembangunan Batas Kecamatan di Kab. Bandung	Penegasan batas daerah Kab bandung		20	11	Dokumen	600.000.000	350.000.000	Kab. Bandung	Setda/Pemum
1	20	xx	27	03	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Bintek Pertanahan bagi camat lurah, kepala desa di Kab. Bdg	Pembinaan aparat Kec, Kelurahan dan Desa dalam pembuatan Akta		31	31	Kec	200.000.000	250.000.000	Kab. Bandung	Setda/Pemum
1	20	xx	27	03	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Penataan, penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah		10	10	Kepbup	60.000.000	60.000.000	Kab. Bandung	Setda/Pemum
1	20	xx	27	05	Dst... Sosialisasi dan penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten Bandung yang pengaturannya diserahkan kepada desa	Sosialisasi dan penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten Bandung yang pengaturannya diserahkan kepada desa	Desa		267	267	Desa	125.000.000	150.000.000	Kab. Bandung	Setda/Otda
1	20	xx	27	05	dst... Sosialisasi penyelenggaraan asas desentralisasi di Kabupaten Bandung	Sosialisasi penyelenggaraan asas desentralisasi di Kabupaten Bandung	SKPD terkait		2	2	Kali	100.000.000	150.000.000	Kab. Bandung	Setda/Otda
1	20	xx	27	05	dst... Fasilitas Penyajian Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah	Fasilitasi penataan Desa di Kec Kab Bdg	Kecamatan		31	31	Kec	100.000.000	100.000.000	Kab. Bandung	Setda/Otda

1	25				KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	25	xx	18		Program kerjasama informasi dengan media massa								
1	25	xx	18	02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah					322.650.000		Kab. Bandung	Setda/Humas
					Jumlah 25					11.218.800.000	8.970.980.000		
											11.218.800.000		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD

: SEKRETARIAT DEWAN

KODE REKENING				URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD
							TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012		
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN									
1	20	xx	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Terselenggaranya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat							
1	20	xx	15	01 Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terbitnya Raperda	Stakeholdres	15	17	Raperda	3.245.947.500	3.850.000.000	Kab. Bandung	Sekretariat DPRD
1	20	xx	15	02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	Terselenggaranya dialog antara DPRD dengan pemerintah dan masyarakat	Anggota Dewan, Pemerintah dan masyarakat	2	2	Kegiatan	388.950.000	550.000.000	Kab. Bandung	Sekretariat DPRD
1	20	xx	15	03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Anggota dewan 1. Rapat Komisi 2. Rapat Pansus 3. Rapat Banmus 4. Rapat Banleg 5. Rapat PURT 6. Rapat Badan Kehormatan	35	40	kegiatan	4.453.274.000	5.750.000.000	Kab. Bandung	Sekretariat DPRD
1	20	xx	15	04 Rapat-rapat paripurna	Terselenggaranya rapat paripurna	Eksekutif dan Legislatif	24	24	Kegiatan	281.215.000	400.000.000	Kab. Bandung	Sekretariat DPRD
1	20	xx	15	05 Kegiatan Reses	Terselenggaranya pertemuan antara Legislatif dan masyarakat.	Legislatif dan masyarakat	3	3	Kegiatan	1.657.350.000	1.875.000.000	Kab. Bandung	Sekretariat DPRD
1	20	xx	15	06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Terselenggaranya kunjungan kerja anggota Dewan daerah	Anggota dewan	5	5	Kegiatan	636.180.000	850.000.000	Kab. Bandung	Sekretariat DPRD
1	20	xx	15	07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Terfasilitasinya anggota dewan untuk mengikuti diklat.	Anggota dewan	2	2	Kegiatan	1.399.120.200	1.450.000.000	Kab. Bandung	Sekretariat DPRD
1	20	xx	15	08 Sosialisasi perturan perundang-undangan	Tersosialisasikanny produk hukum	Stakeholdres	3	3	Kegiatan	30.222.000	45.000.000	Kab. Bandung	Sekretariat DPRD
1	20	xx	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Penataan Peraturan Perundang-undangan	Anggota Dewan dan Instansi terkait							
1	20	xx	26	01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya koordinasi	Instansi terkait	12	12	Kegiatan	89.343.800	110.000.000	Kab. Bandung	Sekretariat DPRD
1	20	xx	26	06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Tersusunnya Raperda Prakarsa Dewan	Anggota Dewan	3	3	Kegiatan	122.107.500	150.000.000	Kab. Bandung	Sekretariat DPRD
				Jumlah 26						12.303.710.000	15.030.000.000		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD

: INSPEKTORAT

KODE REKENING		URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD			
					TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012					
1	20													
1	20	xx	20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN										
1	20	xx	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian	Stakeholder Kab. Bandung								
1	20	xx	20	01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya pengawasan internal secara berkala pada SKPD Kab. Bandung sesuai PKPT Tahun 2010	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa	77 267	77 267	SKPD Desa	850.000.000	1.145.424.000	Kab. Bandung	Inspektorat
1	20	xx	20	02	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Terlaksananya pemeriksaan kasus dan pengaduan masyarakat, mass media, SMS dan pelimpahan dari instansi yang lebih tinggi dan pengembangan temuan hasil pemeriksaan operasional	Stakeholder Kab. Bandung		230 440	Kasus	350.000.000	486.275.000	Kab. Bandung	Inspektorat
1	20	xx	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)		1 1	Dokumen	100.000.000	225.000.000	Kab. Bandung	Inspektorat
1	20	xx	20	04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Tersusunnya laporan akhir pemeriksaan (LHP) dan Laporan Raskin	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa	120 2	168 2	Proyek Raskin	350.000.000	490.000.000	Kab. Bandung	Inspektorat
1	20	xx	20	05	Inventarisasi temuan pengawasan	Terlaksananya inventarisasi temuan hasil pengawasan	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa		1	Dokumen	30.000.000	45.000.000	Kab. Bandung	Inspektorat
1	20	xx	20	06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya tindak lanjut atas pemeriksaan	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa	77 267	77 267	SKPD Desa	330.000.000	450.000.000	Kab. Bandung	Inspektorat
1	20	xx	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya review laporan keuangan	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa		77	SKPD	100.000.000	382.650.000	Kab. Bandung	Inspektorat
1	20	xx	20	08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Terevaluasinya laporan hasil pemeriksaan	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa	77 267	77 267	SKPD Desa	30.000.000	45.000.000	Kab. Bandung	Inspektorat
1	20	xx	24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa							Kab. Bandung	
1	20	xx	24	01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan serta terlaksananya Monev PAD Pemda Kab. Bandung	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa	77 267	77 267	SKPD Desa	100.000.000	400.000.000	Kab. Bandung	Inspektorat
Jumlah 27											2.240.000.000	58.565.109.000		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD
				TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012		
1 20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN									
1 20 xx 17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah									
1 20 xx 17 04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya Sisdur dan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Manual sistem akuntansi pelaporan keuangan daerah	100	100	Buku	100.000.000,00	110.000.000,00	Kab.Bandung	DPPK
1 20 xx 17 05	Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah	Tersusunnya Perda Kabupaten Bandung tentang Pajak Daerah	Perda Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Galian Golongan C., Parkir Perda Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak BPHTB	200	200	buku	330.000.000,00	363.000.000,00	Kab.Bandung	DPPK
1 20 xx 17 06	Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya Perda Kab. Bandung tentang APBD	SKPD dilingkungan Pemkab Bandung meliputi: 3 RS Daerah 13 Dinas 8 Badan 2 Kantor 2 Sekretariat 31 kecamatan 9 kelurahan 1 Inspektorat	150	150	Buku	694.500.000,00	833.426.000,00	Kab.Bandung	DPPK
1 20 xx 17 07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati Bandung tentang Penjabaran APBD	SKPD dilingkungan Pemkab Bandung	150	150	Buku	228.590.000,00	274.308.000,00	Kab.Bandung	DPPK
1 20 xx 17 08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah Kab. Bandung tentang Perubahan APBD	SKPD dilingkungan Pemkab Bandung	150	150	Buku	353.620.000,00	424.356.000,00	Kab.Bandung	DPPK
1 20 xx 17 09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati Bandung tentang Penjabaran Perubahan APBD	SKPD dilingkungan Pemkab Bandung	150	150	Buku	196.000.000,00	235.644.000,00	Kab.Bandung	DPPK
1 20 xx 17 10	Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya data administrasi keuangan daerah Tenaga kerja, bahan, data, waktu dan tempat. Laporan keuangan daerah. Tersedianya bahan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah	Tersusunnya Perda Kabupaten Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	150	150	Buku	401.200.000,00	441.320.000,00	Kab.Bandung	DPPK
1 20 xx 17 11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya data administrasi keuangan daerah Tenaga kerja, bahan, data, waktu dan tempat. Laporan keuangan daerah. Tersedianya bahan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	150	150	Buku	291.390.000,00	320.529.000,00	Kab.Bandung	DPPK
1 20 xx 17 12	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Tersedianya laporan dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, DAU, Perda dan Perbup tentang APBD Seluruh SKPD se-Kabupaten Bandung	Laporan keuangan DPPK sebagai SKPD dan SKPKD	100	100	Buku	110.890.000,00	121.979.000,00	Kab.Bandung	DPPK
1 20 xx 17 13	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedia dana pendamping penyusunan RKA, DPA, Perda dan Perbup tentang APBD Seluruh SKPD se-Kabupaten Bandung	Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA, Perda APBD dan Peraturan Bupati Bandung tentang Penjabaran APBD	70	70	RKA dan DPA	198.137.000,00	217.950.700,00	Kab.Bandung	DPPK
1 20 xx 17 14	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya peraturan perundang-undangan	Tersosialisasikan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan. Tertibnya penatausahaan keuangan daerah. Tercapainya realisasi laporan keuangan. Terbinanya pelebat pengelolaan keuangan	100	100	Buku	137.000.000,00	150.700.000,00	Kab.Bandung	DPPK
1 20 xx 17 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah	Terlaksananya intensifikasi pajak daerah	Wajib Pajak Daerah	5	5	UPTD	760.000.000,00	836.000.000,00	Kab.Bandung	DPPK
1 20 xx 17 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah	Optimalisasi potensi penerimaan pajak daerah Terlaksananya pemantauan dan pengendalian pajak daerah	Wajib Pajak Daerah	3	3	UPTD PBB				
1 20 xx 17 20	Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan	Tersusunnya rencana hasil pemantauan dan laporan PAD Potensi penerimaan PAD	Tercapainya peningkatan penerimaan PAD	30	30	Exs	350.000.000,00	385.000.000,00	Kab.Bandung	DPPK
1 20 xx 17 21	Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Keuangan dari Provinsi	Terciptanya pelaksanaan bantuan Provinsi sesuai dengan peraturan perundangan	SKPD penerima bantuan dari Provinsi	50	50	Buku	-	-	Kab.Bandung	DPPK
Jumlah 28							4.151.327.000	4.714.212.700		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD	
				TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012			
1 20											
1 20 xx											
1 20 xx 30											
1 20 xx 30 01	Pendidikan dan Prajabatan bagi PNS Daerah	Meningkatnya Kualitas SDM CPNS, kinerja PNS dan Profesionalisme Aparatur	Pengiriman peserta Diklat Prajabatan Gol.III dan Gol. II	633	450	orang	3.145.929.000	3.145.929.000	Kab Bandung	BKPP	
1 20 xx 30 02	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS		Pengiriman peserta Diklat Pim Tk.II, Tk.III dan Tk. IV	43	84	orang	1.014.071.000	1.014.071.000	Kab Bandung	BKPP	
1 20 xx 30 03	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional bagi PNS Daerah		Diklat teknis dan BinteK sesuai kebutuhan SKPD dan terlaksananya seminar lokakarya dan workshop	275	275	orang	600.000.000	700.000.000	Kab Bandung	BKPP	
1 20 xx 31											
1 20 xx 31 01	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terciptanya Pejabat struktural sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh SKPD, Terpuhinya pengisian formasi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, meningkatnya disiplin dan mental pegawai, kualitas pelayanan aparatur, serta terdapatnya akurasi data Pegawai Kabupaten Bandung.									
1 20 xx 31 01	Penyusunan rencana karier PNS	Sidang Badan Pertimbangan jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)	Terlaksananya sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)	24	24	kegiatan	100.000.000	125.000.000	Kab Bandung	BKPP	
1 20 xx 31 02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Seleksi penerimaan CPNSD formasi Tahun Anggaran 2011	Terlaksananya Seleksi penerimaan CPNSD dari pelamar umum dan Kontrak kerja	14000	15000	pelamar	850.000.000	850.000.000	Kab Bandung	BKPP	
1 20 xx 31 03	Penempatan PNS	Sumpah dan pelantikan jabatan struktural, pengangkatan pertama dan kembali, serta kenaikan jabatan fungsional	Terlaksananya sumpah dan pelantikan jabatan struktural, pengangkatan pertama dan kembali, serta kenaikan jabatan fungsional	8	8	kegiatan	250.000.000	250.000.000	Kab Bandung	BKPP	
1 20 xx 31 04	Penataan Sistem Administrasi kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Proses Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober 2011 dan kenaikan gaji berkala bagi PNS fungsional dan non fungsional	Terlaksananya Proses Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober 2011 dan kenaikan gaji berkala bagi PNS fungsional dan non fungsional	8000	8500	orang	100.000.000	150.000.000	Kab Bandung	BKPP	
1 20 xx 31 05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Takah elektronik PNS, Program Aplikasi Integrasi Takah elektronik dengan Simpeg, serta terselenggaranya peningkatan kedalaman Database PNS melalui akuisisi	Tersedianya Takah elektronik PNS, Program Aplikasi Integrasi Takah elektronik dengan Simpeg, serta terselenggaranya peningkatan kedalaman Database PNS melalui akuisisi	5000 file, 1 paket dan 5000 data orang	5000 file, 1 paket dan 5000 data orang	file, paket, data orang	150.000.000	150.000.000	Kab Bandung	BKPP	
1 20 xx 31 08	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi masa kerja 30, 20 dan 10 tahun serta pemberian penghargaan satya lancana karya satya dari Presiden RI	Terlaksananya Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi masa kerja 30, 20 dan 10 tahun serta pemberian penghargaan satya lancana karya satya dari Presiden RI	375	400	orang	300.000.000	350.000.000	Kab Bandung	BKPP	
1 20 xx 31 09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, proses pemberian ijin perkawinan dan perceraian PNS, siraman rohai, sera penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Askes dan Bapertarum	Terlaksananya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, proses pemberian ijin perkawinan dan perceraian PNS, siraman rohai, sera penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Askes dan Bapertarum	20 keputusan disiplin, 4 laporan sidak, 40 ijin perceraian, 12 kegiatan sirroh	20 keputusan disiplin, 4 laporan sidak, 40 ijin perceraian, 12 kegiatan sirroh	paket	200.000.000	200.000.000	Kab Bandung	BKPP	
1 20 xx 31 17	Formasi Pegawai	Perumusan formasi yang Ril berdasarkan perhitungan kebutuhan pegawai	Terlaksananya Perumusan formasi yang Ril berdasarkan perhitungan kebutuhan pegawai	10	10	unit	475.000.000	475.000.000	Kab	BKPP	
Jumlah 29											
								7.185.000.000	7.410.000.000		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD

: BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

1	22	xx	15	01	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD
								TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012		
1	22	xx	15	01	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA									
1	22	xx	15	01	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan									BPMPD
1	22	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Tersedianya dana penunjang untuk penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-PPK)	Pelaku PNPMT TK Kec dan TK Desa (UPK 33, BKAD 33 Org, BPUPK 33 Orang, PJOK 11 Org, PL 11 Orang, KPMD 210 Org)	11 Kecamatan (105 Desa)	11 Kecamatan (105 Desa)	Orang	1.362.000.000	600.000.000	11 Kecamatan (105 Desa)	BPMPD
1	22	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Pembangunan Desa terhadap desa Se-kab Bdg (Lomba Desa)	267 desa	adanya 3 desa terbaik	adanya 3 desa terbaik	Paket	80.000.000	150.000.000	31 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Tersedianya dana Penunjang untuk sosialisasi, verifikasi, dan move P4	TPKD di 267 Desa (Kades 267 org, BPD 267 Org dan LPM 267 Desa)	267 desa	267 Desa	Orang	350.000.000	450.000.000	31 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya Pencanangan dan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Masyarakat atau Desa Se-Kab Bdg	276 Desa/kei	276 Desa/kei	Paket	70.000.000	90.000.000	31 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Tersedianya dana penunjang Kegiatan ADPD, TPAPD dan BPD	267 desa, TPKD	267 TPKD	267 TPKD	Orang	150.000.000	200.000.000	31 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Tersedianya dana Penunjang penyaluran bantuan RT/RW/LKMD dan 3 Pilar Desa	RT /RW dan LPM sewilayah Kab. Bdg	267 desa	267 Desa	Orang	25.000.000	-	31 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya Monitoring Pilkades	Tahun 2011 ada 7 Desa , Tahun 2012 ada 62 Desa	7 Desa	62 Desa	Paket	25.000.000	150.000.000		BPMPD
1	22	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya kunjungan ke Posyandu dalam rangka Pembinaan dan Evaluasi Posyandu TK.Kab dan Provinsi	Posyandu(3.898) , kader posyandu (267 Kader) , Tim Pokjnal Posyandu TK.Kec dan TK.Kab	31 Posyandu Terbaik	31 Posyandu Terbaik	Paket	50.000.000	65.000.000	31 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya Pembinaan dan Evaluasi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K-PKK) dan 10 Program Pokok PKK	Kelompok usaha PKK Desa dan kader PKK Desa (31 Ketua Kelompok dan 267 Kader PKK)	267 Desa	267 Desa	Kelompok	50.000.000	65.000.000	31 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya BinteK Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kasie Pem pada 31 Kec	31 Kecamatan	31 Kecamatan	Orang	-	150.000.000	31 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya BinteK Sistem Informasi Posyandu (SIP) sebagai dasar Penyusunan Profil Posyandu	Kader Posyandu Desa dan Kasie Pemberdayaan (267 desa,9 Kel 31 Kasie)	31 Kecamatan	31 Kecamatan	Orang	50.000.000	65.000.000	31 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya Workshop dan Penilaian Pengembangan Adat Istiadat dan Sosial Budaya Masyarakat	Anggota Satgas (267 dari desa dan 31 dari Kec)	31 Kecamatan	31 Kecamatan	Orang	50.000.000	65.000.000	31 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya BinteK Strategi pengawasan dan perlindungan tenaga kerja di pedesaan	Pendataan Keluarga yang mempunyai anak usia sekolah dan tidak sekolah	31 Kecamatan	31 Kecamatan	Paket	50.000.000	65.000.000	31 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya Rakor pokjnal posyandu	SKPD dan 31 Anggota Pokjnal Posyandu TK Kec	SKPD dan 31 Kec	SKPD dan 31 Kec	Orang	50.000.000	75.000.000	31 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Tersusunnya kajian Pengembangan dan pelestarian adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat di Kab. Bdg	Masyarakat Kab. Bdg	Buku	Buku	Paket	45.000.000	-	31 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya Sosialisasi hasil kajian Pengembangan dan pelestarian adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat	SKPD, Kec,Kades dan Tomasy.	31 Kecamatan	31 Kecamatan	Kec.	-	90.000.000	31 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya Rakor Pokja Tim Fasilitasi Pelestarian pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat	SKPD, Kec dan anggota Pokja Tim	267 Desa	267 Desa	Orang	45.000.000	60.000.000	267 Desa	BPMPD
1	22	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya Pembangunan desa terpadu	1 Desa	1 Desa	1 Desa	Paket	75.000.000	125.000.000	Desa	BPMPD
1	22	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan (RT/Rw dan LPM)	RT /RW dan LPM sewilayah Kab. Bdg	31 Kecamatan	31 Kecamatan	Orang	50.000.000	75.000.000	31 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	5 Kecamatan 10 desa 10 SD (10 SD x 200 orang = 2000 orang anak SD)	5 Kecamatan	7 Kecamatan	Orang	140.000.000	249.040.000	5 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	15	03	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	Terlaksananya Pelatihan Teknis penyusunan data profil desa/Kelurahan	Pokjnal data profil desa di tiap desa dan kelurahan	267 desa dan 9 kelurahan	267 desa dan 9 kelurahan	Kelompok	100.000.000	200.000.000	31 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	16		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan									BPMPD
1	22	xx	16	02	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	terlaksananya Inventarisasi, Identifikasi dan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pasar desa	Ketua Pengelola Pasar Desa dan Kades (10 org ketua dan 267 Kades)	31 Kecamatan	31 Kecamatan	Orang	50.000.000	-	31 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	16	02	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Teridentifikasi lokasi yang berpotensi menjadi pasar desa	20 desa di 20 kec	20	20	Kec.		55.000.000	20 kec	BPMPD
1	22	xx	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa									BPMPD
1	22	xx	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Tersedianya dan Penunjang TMMD/TMSS	Masyarakat Desa Sasaran	2 Desa	2 Desa	Paket	450.000.000	400.000.000	2 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terselenggaranya Bimbingan Teknis TTG dan Gelar TTG TK Nasional	Kasie Pemberdayaan dan Pelaku TTG di 31 Kecamatan	31 Kecamatan	31 Kecamatan	Orang	75.000.000	75.000.000	31 Kecamatan	BPMPD

1	22	xx	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terlaksananya Workshop Pembentukan kelompok Pengelola PraSarana dan sarana Perdesaan	Kasie PSU di 31 Kecamatan	-	31 Kecamatan	Orang	-	75.000.000	31 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terfasilitasinya Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan di Kab Bdg	Kasie PM dan KPMD di 5 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	Orang	40.000.000	75.000.000	5 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terlaksananya Pembinaan Posyantekdes	Pengurus posyantekdes di 10 Kec	-	10 Kecamatan	Orang	-	50.000.000	10 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terlaksananya Pelatihan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa/RPJMDes	Sekdes Se-Kab Bandung	267 Desa	93 Desa	Orang	-	-	31 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terselenggaranya Evaluasi Pembinaan dan Sosialisasi desa membangun terhadap desa peradaban	Desa lokasi penerima Program desa peradaban	15 Desa	25 Desa	Paket	138.000.000	175.000.000	Desa	BPMPD
1	22	xx	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terlaksananya penyusunan pendampingan RKP desa	Kasie Pem Desa	267 Desa	267 Desa	Orang	50.000.000	100.000.000	Desa Se-Kab Bdg	BPMPD
1	22	xx	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terlaksananya Revisi Perda tentang kelembagaan kemasyarakatan	RT/RW dan LPM	Perda	Perda	Paket	-	65.000.000	31 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terlaksananya Pedoman Pengelolaan kekayaan desa dan inventarisasi aset desa	Kasie Pem Kecamatan	31 Kecamatan	31 Kecamatan	Orang	275.000.000	75.000.000	31 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terlaksananya Fasilitas pengelolaan Keuangan Desa	Bendahara Desa Se-Kab Bdg	62 Desa	267 Desa	Orang	75.000.000	165.000.000	Desa Se-Kab Bdg	BPMPD
1	22	xx	17	04	Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pronangkis	Terbentuknya Unit Pengaduan masyarakat dan pemantauan terpadu (UMP-N-PT)	Kelembagaan TK kab. Bdg untuk masyarakat di 31 kecamatan	31 Kecamatan	31 Kecamatan	Paket	50.000.000	60.000.000	31 Kecamatan	BPMPD
1	22	xx	18		Program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah desa									BPMPD
1	22	xx	18	01	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa	Sekdes	124 Desa	143 Desa	Orang	75.000.000	150.000.000	Desa	BPMPD
1	22	xx	18	01	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Terlaksananya Fasilitas/evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa	267 Sekdes	267 Desa	267 Desa	Orang	50.000.000	125.000.000	Desa Se-Kab Bdg	BPMPD
1	22	xx	18	01	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Ketua BPD	-	93 Desa	Orang	-	200.000.000	Desa	BPMPD
1	22	xx	18	01	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Terlaksananya Fasilitas/Evaluasi Penyusunan Peraturan desa Khusus mengenai pendapatan desa	Sekdes	31 Desa	62 Desa	Orang	50.000.000	100.000.000	Desa	BPMPD
1	22	xx	18	01	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Terlaksananya Penataan dan penegasan batas desa/kelurahan	Kasie Pem Kecamatan	31 Desa	50 Desa	Orang	50.000.000	250.000.000	Desa	BPMPD
1	22	xx	18	01	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Terlaksananya Fasilitas Pembahasan Raperda Tentang Desa	267 Sekdes	267 Desa	267 Desa	Orang	-	150.000.000	Desa Se-Kab Bdg	BPMPD
Jumlah 30											4.245.000.000	5.334.040.000		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD

: BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

1	26	xx	21	URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD	
							TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012			
1	26	xx	21	PERPUSTAKAAN										
1	26	xx	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan										
1	26	xx	21	05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Terselenggaranya kegiatan pengadaan buku secara terseleksi	Pengunjung	100000	100000	Eks	445.500.000	900.000.000	Kab. Bandung	Bapapsi
						Terlaksananya pembuatan literatur sekunder sebagai sumber rujukan pengguna/pemakai (koleksi bibliografi daerah)	Perpustakaan	50	50	Eks				
						- Terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa mebeulair (Sarana perpustakaan desa/kel.)	Perpustakaan BAPAPSI & Perpustakaan Desa/Kelurahan	95	75	Unit				
1	26	xx	21	08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Terselenggaranya layanan perpustakaan untuk seluruh lapisan masyarakat secara optimal	Pengunjung	13000	13000	Orang	450.000.000	750.000.000	Kab. Bandung	Bapapsi
						- Terselenggaranya Sosialisasi, Roadshow, dan Workshop Perpustakaan	Pengelola perpustakaan	1000	1000	Orang				
						- Terbinanya perpustakaan desa/kelurahan, khusus, sekolah dan pontren	Desa/kelurahan, sekolah dan pontren	561	561	Unit				
1	24	xx	15	KEARSIPAN										
1	24	xx	15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan										
1	24	xx	15	02	Pengumpulan Data	Terakupnya arsip kesejarahan dan budaya di lingkungan Kab. Bandung	Depo Arsip, Narasumber (mantan Bupati, Tokoh sejarah & budaya)	20	30	buah/paket	75.000.000	80.000.000	Tempat/domisili nara-sumber	Bapapsi
1	24	xx	15	06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Penilai Angka Kredit Jafung Arsiparis	Arsiparis			1 Tim		150.000.000	Kab. Bandung	Bapapsi
						Pelaksanaan penilaian angka kredit Arsiparis	Arsiparis			30 Orang				
						Buku Peraturan Tata Kearsipan	Pengelola Arsip			150 Buah				
						Buku Jadwal Retensi Arsip	Pengelola Arsip			150 Buah				
1	24	xx	16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah									Kab. Bandung	
1	24	xx	16	01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Tercapainya sarana penyimpanan yang tertata di Depo Arsip	- Meningkatnya sarana kearsipan di lingkungan Kab. Bandung :				300.000.000	500.000.000	Kab. Bandung	Bapapsi
							Roll-O-Pact	2	5	Unit				
							Rak Arsip 6 susun	20	20	Unit				
							Rak Arsip pintu kaca 2 muka	1	2	Unit				
							Lemari Komputer 4 pintu	2	2	Unit				
							Box Arsip	100000	20000	Buah				
							Folder Besar	1000	2000	Lembar				
							Sampul Arsip	5	5	Rim				
							Label Arsip	10000	10000	Lembar				
1	24	xx	16	02	Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah	Tertatanya arsip di Depo Arsip, SKPD, Kec. Dan Kelurahan	SKPD	7	15	SKPD	100.000.000	150.000.000	Kab. Bandung	Bapapsi
							Kecamatan	16	15	Kecamatan				
							Kelurahan	5	4	Kelurahan				
1	24	xx	18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi									Kab. Bandung	
1	24	xx	18	02	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip	Tercapainya entri data arsip in aktif	Kearsipan	1	1	Modul	40.000.000	60.000.000	Kab. Bandung	Bapapsi
1	24	xx	18	03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah / swasta	Terlaksananya penyuluhan bagi petugas pengelola arsip dan Arsiparis SKPD, Kec., dan Kelurahan	Pengelola Arsip, Arsiparis	40	40	Orang	77.460.000	85.000.000	Kab. Bandung	Bapapsi
1	25	xx	15	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	25	xx	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa										
1	25	xx	15	02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	- Tersedianya akses internet di 31 kantor kecamatan	Aparatur & Masyarakat	31	40	Titik	280.480.000	350.000.000	Kab. Bandung	Bapapsi
						- Tersedianya sarana komputer untuk free internet room bagi umum (aparatur&masyarakat) selama hari/jam kerja	Aparatur & Masyarakat	6	-	Unit				
						- Terlaksananya layanan free internet mobile bagi masyarakat Kab.Bdg melalui sarana MCAP (operasional&pemeliharaan kendaraan selama 1 tahun)	Masyarakat	72	80	kali kunjungan				
						- Tersedianya data digital potensi desa/kel. yang lengkap dan aktual se-Kab. Bandung	Aparatur & Masyarakat	276	276	paket data/ informasi profil desa/ kelurahan				

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD : KECAMATAN

KODE REKENING				URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD
1	20						TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012		
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN								Kab. Bandung	Kecamatan
1	20	xx	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Telaksananya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	SKPD terkait						Kab. Bandung	Kecamatan
1	20	xx	20	03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Kecamatan	1	1	Paket	6.975.000.000	7.672.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Cileunyi						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Cilengkrang						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Cimencyan						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Bojongsong						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Margahayu						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Margaasih						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Daveuhkolot						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Katapang						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Pameungpeuk						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Arjasari						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Pangalengan						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Cimaung						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Banjaran						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Cicalengka						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Rancaekek						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Cikancung						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Nagreg						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Baleendah						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Pacet						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Kertasari						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Ciparay						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Majalaya						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Iibun						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Paseh						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Solokanjeruk						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Pasirjambu						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Ciwidey						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Rancabali						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Soreang						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Cangkuang						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				- Kutawaringin						225.000.000	247.500.000	Kab. Bandung	Kecamatan
				Jumlah 32						6.975.000.000	7.672.500.000		

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011

SKPD : KELURAHAN

KODE REKENING				URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SASARAN	TARGET		SATUAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD
1	20	xx	20				TAHUN 2011	TAHUN 2012		TAHUN 2011	TAHUN 2012		
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN								Kab. Bandung	Kelurahan
1	20	xx	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Telaksananya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	SKPD terkait						Kab. Bandung	Kelurahan
1	20	xx	20	03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Kelurahan	1	1	Paket	4.339.453.040	4.773.398.344	Kab. Bandung	Kelurahan
				- Pasawahan						618.441.000	680.285.100	Kab. Bandung	Kelurahan
				- Padasuka						323.926.040	356.318.644	Kab. Bandung	Kelurahan
				- Andir						414.096.000	455.505.600	Kab. Bandung	Kelurahan
				- Baleendah						1.284.000.000	1.412.400.000	Kab. Bandung	Kelurahan
				- Manggahang						214.020.000	235.422.000	Kab. Bandung	Kelurahan
				- Cibenyng						481.755.000	529.930.500	Kab. Bandung	Kelurahan
				- Jelekong						485.500.000	534.050.000	Kab. Bandung	Kelurahan
				- Wargamekar						330.478.000	363.525.800	Kab. Bandung	Kelurahan
				- Sulaeman						187.237.000	205.960.700	Kab. Bandung	Kelurahan
				Jumlah 33						4.339.453.040	4.773.398.344		
				Jumlah TOTAL						602.434.634.040	792.618.661.544		